



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR **10** TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016–2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah Dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2015-2019.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005-2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013-2018.
13. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

16. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
17. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
25. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan

wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

26. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
27. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
28. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
29. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
30. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan;
31. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2016-2021 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan :

- a. visi dan misi Kepala Daerah terpilih;
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
 - (3) RPJMD disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan RPJMD Kabupaten/ Kota Sekitar Kabupaten Grobogan.
 - (4) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja PD.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2016-2021.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

Dokumen RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

- c. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
- d. BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis;
- e. BAB V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
- f. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan;
- g. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan;
- i. BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- j. BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan;
- k. BAB XI Penutup.

Pasal 7

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana

- pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi hal-hal yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.
- (2) Hal yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional/kepentingan masyarakat luas.

Pasal 10

- (1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target capaian akhir pembangunan jangka menengah, perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat RPJMD Tahun 2021–2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2016-2021, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal **20 September 2016**

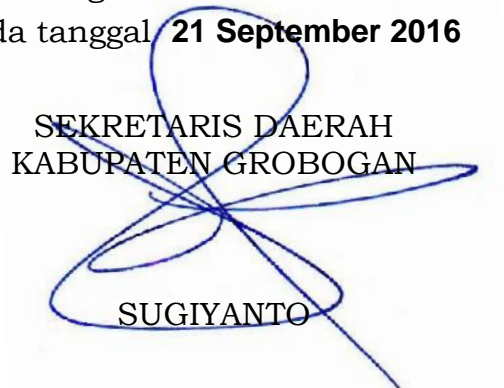
BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal **21 September 2016**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR **10** TAHUN
2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR **10** TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan.

Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat

arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

II. PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas10Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-9
1.5. Maksud dan Tujuan	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah	II-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II-5
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Wilayah	II-11
2.1.4. Demografi	II-15
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-18
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-18
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-22
2.2.3. Fokus Seni dan Budaya	II-23
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-40
2.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	II-40
2.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-60
2.3.3. Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan	II-98
2.3.4. Fokus Urusan Pemerintahan Penunjang	II-113
2.4. Aspek Daya Saing	II-123
BAB III GAMBARAN PENGELOAALAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2011-2015.....	III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.1.2. Neraca Daerah	III-13
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu	III-16
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-16
3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-17
3.3. Kerangka Pendanaan	III-19
3.3.1. Realisasi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III-19
3.3.2. Proyeksi Berdasarkan Data Masa Lalu	III-21
3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-25
3.3.4. Kebijakan Belanja dan Pembiayaan Daerah	III-29
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	IV-4
4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	IV-11
4.1.4. Urusan Pemerintahan Penunjang	IV-14
4.2. Isu Strategis	IV-16

BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1.	Visi.....	V-1
5.2.	Misi	V-2
5.3.	Tujuan dan Sasaran	V-2
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.1.	RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025	VI-1
6.2.	RPJMN Tahun 2015-2019	VI-6
6.3.	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	VI-10
6.4.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Grobogan	VI-16
6.5.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	VI-23
6.6.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021	VI-32
6.7.	Tahapan Pembangunan Daerah	VI-39
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
7.1.	Kebijakan Umum	VII-1
7.2.	Program Pembangunan Daerah.....	VII-2
7.2.1.	Program Pembangunan Misi Pertama	VII-3
7.2.2.	Program Pembangunan Misi Kedua	VII-3
7.2.3.	Program Pembangunan Misi Ketiga	VII-4
7.2.4.	Program Pembangunan Misi Keempat.....	VII-5
7.2.5.	Program Pembangunan Misi Kelima.....	VII-6
7.2.6.	Program Pembangunan Misi Keenam.....	VII-7
7.2.7.	Program Pembangunan Misi Ketujuh	VII-8
7.2.8.	Program Pembangunan Misi Kedelapan	VII-8
7.2.9.	Program Pembangunan Misi Kesembilan	VII-9
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII-1
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X-1
10.1.	Pedoman Transisi	X-1
10.2.	Kaidah Pelaksanaan	X-1
BAB XI	PENUTUP	XI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan per Bulan Menurut Kecamatan/Tempat Pengamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2015	II-4
Tabel 2.2.	Kinerja produksi Pertanian Tahun 2013-2015	II-9
Tabel 2.3.	Potensi Wisata Kabupaten Grobogan Tahun 2015	II-10
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk Tahun 2013 dan 2014	II-16
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2015	II-16
Tabel 2.6.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015	II-17
Tabel 2.7.	Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2015	II-18
Tabel 2.8.	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-19
Tabel 2.9.	Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	II-20
Tabel 2.10.	Perkembangan Kelompok Seni di Kabuapten Grobogan Tahun 2011 – 2015	II.39
Tabel 2.11.	Perkembangan Kelompok Olahraga di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-39
Tabel 2.12.	Kinerja Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-40
Tabel 2.12a.	Kinerja Partisipasi Sekolah Pada Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-42
Tabel 2.12b.	Kinerja Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-42
Tabel 2.13.	Perkembangan Kinerja Pendidikan Menengah di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-43
Tabel 2.14.	Perkembangan Perijinan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Ketersediaan Sarana Prasarana Pembelajaran pada PKM di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-44
Tabel 2.15.	Perkembangan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/SMA Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dengan Baik di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-45
Tabel 2.16.	Perkembangan Ketersediaan Perpustakaan Sesuai Standar SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-45
Tabel 2.17.	Perkembangan Lulusan SMK yang Diterima di Dunia Kerja Sesuai Keahliannya di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015..	II-46
Tabel 2.18.	Perkembangan Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memenuhi Kualifikasi di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-46
Tabel 2.19.	Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2011 – 2015	II-48

Tabel 2.20.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Lainnya Tahun 2011-2015 ..	II-51
Tabel 2.21.	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2011-2015	II-53
Tabel 2.22.	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Tahun 2011-2015	II-55
Tabel 2.23.	Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2011 – 2015	II-56
Tabel 2.24.	Indikator Kinerja Pelayanan Penanggulangan Bencana Tahun 2011-2015	II-57
Tabel 2.25.	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-59
Tabel 2.26.	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2015	II-61
Tabel 2.27.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011-2015	II-65
Tabel 2.28.	Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-67
Tabel 2.29.	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-67
Tabel 2.30.	Banyaknya Sertifikat yang Diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014	II-68
Tabel 2.31.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-69
Tabel 2.32.	Indikator Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan 2011-2015	II-70
Tabel 2.33.	Indikator Kinerja Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Grobogan 2011-2015	II-71
Tabel 2.34.	Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Peningkatan Pengendalian Polusi Kabupaten Grobogan 2011-2015	II-72
Tabel 2.35.	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Periode 2011-2015 ...	II-73
Tabel 2.36.	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2015	II-75
Tabel 2.37.	Capaian Indikator Makro Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2015	II-76
Tabel 2.38.	Gambaran Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-77
Tabel 2.39.	Perkembangan Kondisi Sarana dan Fasilitas Perhubungan Tahun 2011 – 2015	II-78
Tabel 2.40.	Perkembangan Kondisi sarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik Tahun 2011 – 2015	II-79
Tabel 2.41.	Perkembangan Capaian Indikator Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Tahun 2011 – 2015	II-80
Tabel 2.42.	Perkembangan Capaian Indikator Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Tahun 2011 – 2015	II-81

Tabel 2.43.	Perkembangan Capaian Indikator Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi	II-82
Tabel 2.44.	Perkembangan Capaian Indikator Kerjasama Informasi dan Media Masa Tahun 2011-2015	II-83
Tabel 2.45.	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-85
Tabel 2.46.	Indikator Kinerja Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi di Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2015	II-86
Tabel 2.47.	Daftar PMDN Kabupaten Grobogan Tahun 2015	II-88
Tabel 2.48.	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-90
Tabel 2.49.	Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2011-2015	II-91
Tabel 2.50.	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-92
Tabel 2.51.	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2015	II-93
Tabel 2.52.	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2015	II-95
Tabel 2.53.	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-97
Tabel 2.54.	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-99
Tabel 2.55.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-102
Tabel 2.56.	Produksi Tanaman Pangan Utama Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-103
Tabel 2.57.	Produksi komoditas hortikultura Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2015	II-103
Tabel 2.58.	Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-104
Tabel 2.59.	Data Realisasi Produksi Daging di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-104
Tabel 2.60.	Capaian dan Gambaran Kondisi Peternakan di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-105
Tabel 2.61.	Data Kelompok Tani di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-105
Tabel 2.62.	Perkembangan Kinerja Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-106
Tabel 2.63.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-107
Tabel 2.64.	Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-108
Tabel 2.65.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-109
Tabel 2.66.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-110

Tabel 2.67.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2015	II-111
Tabel 2.68.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2015	II-113
Tabel 2.69.	Indikator Kinerja Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-116
Tabel 2.70.	Indikator Kinerja Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-117
Tabel 2.71.	Indikator Kinerja Predikat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-118
Tabel 2.72.	Perkembangan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-119
Tabel 2.73.	Indikator Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-120
Tabel 2.74.	Indikator Kinerja Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-120
Tabel 2.75.	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Dewan	II-121
Tabel 2.76.	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Daerah	II-122
Tabel 2.77.	Persebaran Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Grobogan	II-125
Tabel 2.78.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Grobogan Tahun 2014	II-127
Tabel 2.79.	Kondisi Jalan Kabupaten Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Grobogan Tahun 2014	II-128
Tabel 3.1.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	III-3
Tabel 3.2.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	III-7
Tabel 3.3.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	III-12
Tabel 3.4.	Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2015	III-14
Tabel 3.5.	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2015	III-16
Tabel 3.6.	Rincian Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	III-16
Tabel 3.7.	Perhitungan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	III-17
Tabel 3.8.	Komposisi Komposisi Penerimaan Pembiayaan sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	III-18
Tabel 3.9.	Lebih/(Kurang) Realisasi APBD Sebagai Komponen Penyumbang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	III-18

Tabel 3.10.	Realisasi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2015	III-20
Tabel 3.11.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021	III-22
Tabel 3.12.	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021	III-24
Tabel 3.13.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2021	III-26
Tabel 3.14.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021	III-26
Tabel 3.15.	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021	III-31
Tabel 5.1.	Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2016- 2021	V-3
Tabel 5.2.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016- 2021	V-4
Tabel 6.1.	Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 dengan RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 ...	VI-4
Tabel 6.2.	Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019	VI-7
Tabel 6.3.	Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019	VI-12
Tabel 6.4.	Sasaran Pengembangan Wilayah Kedungsapur Untuk Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2018	VI-14
Tabel 6.5.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kedungsapur	VI-14
Tabel 6.6.	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021	VI-33
Tabel 7.1.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021	VII-10
Tabel 8.1.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021	VIII-2
Tabel 9.1.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021	IX-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...	I-5
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Grobogan	II-1
Gambar 2.2.	Rata-rata Hari Hujan di Kabupaten Grobogan Tahun 2014	II-4
Gambar 2.3.	Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Grobogan	II-5
Gambar 2.4.	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan	II-8
Gambar 2.5.	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2015	II-19
Gambar 2.6.	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Grobogan dan Jawa Tengah Tahun 2011-2015	II-21
Gambar 2.7.	PDRB Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2014	II-22
Gambar 2.8.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2015	II-23
Gambar 2.9.	Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Grobogan dan Kab/Kota di Sekitarnya Tahun 2015	II-23
Gambar 2.10.	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2015	II-24
Gambar 2.11.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2015	II-25
Gambar 2.12.	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2015	II-25
Gambar 2.13.	Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2015	II-26
Gambar 2.14.	Tingkat Kemiskinan Penduduk Kabupaten Grobogan 2011-2015	II-27
Gambar 2.15.	Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2015	II-27
Gambar 2.16.	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Grobogan Tahun 2009-2013	II-28
Gambar 2.17.	Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Grobogan Tahun 2013 ...	II-29
Gambar 2.18.	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014	II-30
Gambar 2.19.	Posisi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2014	II-30
Gambar 2.20.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014	II-31
Gambar 2.21.	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Laki-laki dengan Perempuan di Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014	II-32
Gambar 2.22.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Laki-laki dengan Perempuan di Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014	II-32

Gambar 2.23. Sumbangan Pendapatan Sekolah Laki-Laki dengan Perempuan di Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014	II-33
Gambar 2.24. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014	II-34
Gambar 2.25. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten/Kota Sekitar di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014	II-34
Gambar 2.26. Perkembangan Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014	II-35
Gambar 2.27. Perkembangan Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014	II-36
Gambar 2.28. Perkembangan Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014	II-36
Gambar 2.29. Perkembangan TPT Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015 ..	II-37
Gambar 2.30. Perbandingan TPT Kabupaten Grobogan dengan Wilayah Sekitar Tahun 2015	II-37
Gambar 2.31. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-38
Gambar 2.32. Grafik Indikator Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014	II-123
Gambar 2.33. Grafik Indikator Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2014	II-124
Gambar 2.34. Grafik Peningkatan Jumlah Kamar Hunian Hotel Di Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014	II-125
Gambar 2.35. Grafik Jumlah Penduduk yang Terangkut Melalui Terminal Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	II-127
Gambar 3.1. Besarnya Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015	III-2
Gambar 3.2. Besarnya Masing-Masing Unsur Pendapatan Tahun 2011-2015	III-4
Gambar 3.3. Proporsi Masing-Masing Unsur PAD Tahun 2011-2015	III-5
Gambar 3.4. Besarnya Belanja Daerah Tahun 2011-2015	III-6
Gambar 3.5. Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2011-2015	III-8
Gambar 3.6. Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah dan Terhadap Belanja Langsung Tahun 2011-2015	III-9
Gambar 3.7. Surplus/Defisit Keuangan Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015	III-10
Gambar 3.8. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015	III-11
Gambar 3.9. Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2011-2015	III-13

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah dipimpin oleh kepala daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan pesta demokrasi untuk menentukan kepala daerah, melalui pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan dilantikanya Ibu Sri Sumarni sebagai Bupati Grobogan pada tanggal 21 Maret 2016, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan memasuki era kepemimpinan baru untuk periode tahun 2016-2021. Kepala Daerah memiliki tugas untuk memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan. Selain itu, pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya diharuskan memperhatikan pelayanan dasar yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan dasar dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan lima tahun ke depan, pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan yang bersifat strategis dengan menjawab berbagai permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Grobogan. Perencanaan pembangunan mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu. Tujuan disusunnya perencanaan pembangunan

yaitu dalam rangka mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan disusun sebagai upaya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu dalam perencanaan pembangunan berusaha mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan memberikan jaminan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa lingkup penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan periode tahun 2016-2021, maka penyelenggaraan pemerintahan lima tahun yang akan datang perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 meliputi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan pendekatan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah pada saat kampanye ke dalam program pembangunan jangka menengah, oleh karena itu, RPJMD pada hakekatnya adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan bupati terpilih pada saat kampanye ke dalam program pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk menyerap aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, di mana perencanaan disusun dengan menyelaraskannya melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

RPJMD yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah akan menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, RPJMD akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan kepala daerah selama masa pemerintahannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

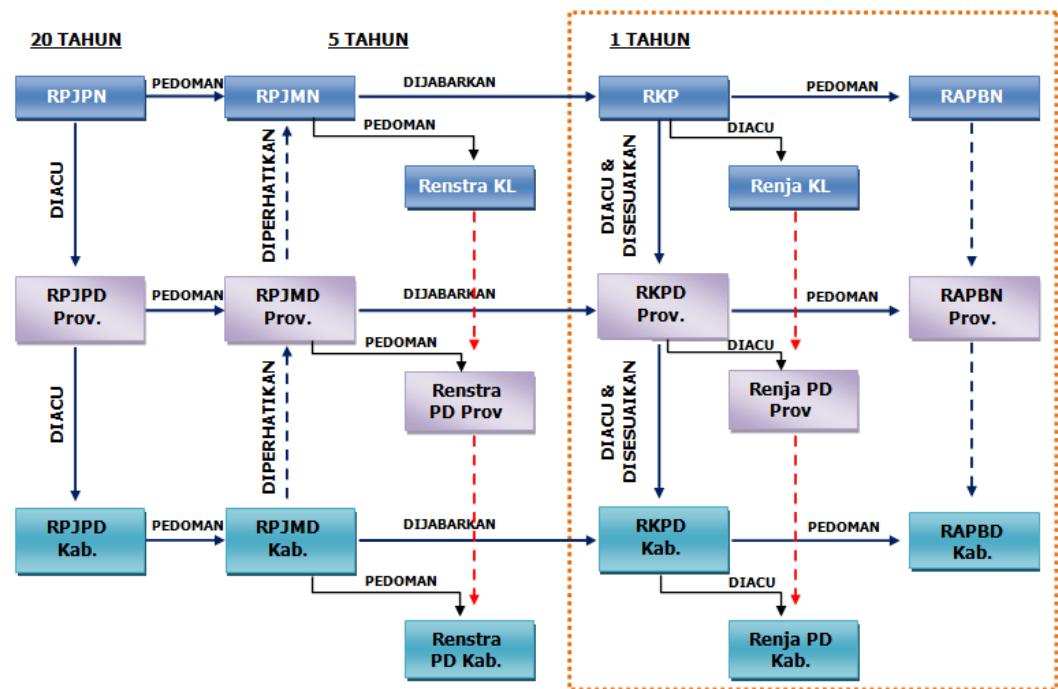
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6).

1.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Grobogan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 secara hierarki tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian RPJMD disusun dengan prinsip keselarasan dan sinergitas yang menjamin keterkaitan dan konsistensi tujuan, sasaran dan program prioritas antara pusat dan daerah. Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD dan RPJMN dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dengan melihat pada Gambar 1.1. di atas, RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran/tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Grobogan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Grobogan dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJP Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program organisasi perangkat daerah, lintas organisasi perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pentahapan RPJMD disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Bupati terpilih yang memuat strategi

pembangunan, serta kebijakan umum program-program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Setelah menyusun RPJMD, setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah). Renstra- Perangkat Daerah berisi gambaran umum, tugas, pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan strategi kebijakan program-program serta kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan wewenang. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah). Renja-Perangkat Daerah tersebut memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan Perangkat Daerah.

Renja-Perangkat Daerah yang telah disusun, selanjutnya diintisarikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang berisi prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi makro daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, kewilayahan dan lintas kewilayahan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan melihat pada Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2005-2025, yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan Sejahtera Lahir dan Batin Yang Beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berbudaya, Maju dan Mandiri. Sasaran pembangunan lima tahun yang akan datang (2016-2021) mengarah pada pencapaian :

- a. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.
- b. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya saing tinggi dan cerdas untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.
- c. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan
- d. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat di Kabupaten Grobogan.
- e. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
- f. Pembangunan daerah yang dinamis untuk membangun Kabupaten Grobogan yang asri dan lestari.

Dengan melihat pada Perda Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan tahun 2011-2031, pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan periode tahun 2016-2021 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu :

- 1. Perwujudan Pusat Kegiatan,** dengan sasaran pembangunan pada :
 - a. Penyusunan Zoning Regulasi dan Perda Peraturan Zonasi
 - b. Penguatan Pusat Kegiatan Lokal
 - c. Penguatan Pusat Pelayanan Kawasan
 - d. Penguatan Pusat Pelayanan Lokal
- 2. Perwujudan Sistem Prasarana,** dengan sasaran pembangunan pada :
 - a. Peningkatan prasarana transportasi untuk
 - b. mendukung pengembangan kawasan
 - c. perdesaan dan agropolitan
 - d. Peningkatan kinerja sistem jaringan kereta api
 - e. Peningkatan sistem jaringan listrik
 - f. Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi guna mendukung keberadaan LP2B
 - g. Pengembangan sistem jaringan drainase
 - h. Pengembangan sistem pengendalian banjir
 - i. Pengembangan sistem jaringan prasarana air baku
 - j. Peningkatan sistem jaringan telepon kabel
 - k. Peningkatan sistem jaringan telepon nirkabel
 - l. Pengelolaan Persampahan dan sanitasi
 - m. Pengembangan mitigasi bencana alam
- 3. Perwujudan Kawasan Lindung,** dengan sasaran pembangunan pada:
 - a. Pengukuhan Kawasan lindung yang secara fisiografis seperti hutan lindung
 - b. Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan lindung guna mengembalikan dan meningkatkan fungsi lindung
 - c. Pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan lindung
 - d. Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan lahan di kawasan lindung
 - e. Pengelolaan kawasan sekitar sungai
 - f. Pengelolaan kawasan sekitar waduk dan mata air
 - g. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat
 - h. Pengelolaan dan pengembangan kawasan cagar budaya
 - i. Pengelolaan dan pengembangan kawasan karst
 - j. Penanganan dan pengelolaan kawasan rawan bencana alam
- 4. Perwujudan Kawasan Budidaya,** dengan sasaran pembangunan pada:
 - a. Pengembangan komoditas hutan produksi
 - b. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan

- c. Pengembangan komoditas hutan rakyat
- d. Penanaman kembali hutan dengan melibatkan masyarakat/PHBM
- e. Pengembangan pertanian lahan basah
- f. Pengembangan pertanian lahan kering
- g. Pengembangan pertanian hortikultura
- h. Pengembangan teknologi dan informasi agribisnis
- i. Pengembangan sentra produksi komoditas perkebunan andalan
- j. Pengembangan agroforestry
- k. Pengembangan dan peningkatan mutu perikanan dan peternakan
- l. Peningkatan mutu produksi dan perbaikan pemasaran komoditas perikanan dan peternakan
- m. Pengembangan sentra / klaster perikanan dan peternakan
- n. Pengembangan pertambangan rakyat yang ramah lingkungan
- o. Peningkatan kerjasama pengelolaan bersama kawasan pertambangan
- p. Pengembangan pertambangan melalui penelitian-penelitian potensi tambang
- q. Penghijauan kembali / reklamasi area bekas tambang
- r. Pengembangan sentra / klaster industri kecil
- s. Peningkatan kualitas dan peran obyek unggulan
- t. Penyediaan sarana & prasarana pendukung
- u. Pembentukan paket wisata serta promosi wisata
- v. Peningkatan peran serta penduduk kawasan wisata
- w. Pengembangan SDM pariwisata
- x. Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
- y. Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan

Sementara itu dengan melihat pada psosisi RPJM Nasional Tahun 2015

- 2019, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu memperhatikan arah pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang mencakup:

- a. Sasaran Makro
- b. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat
- c. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan
- d. Sasaran Dimensi Pemerataan
- e. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah
- f. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan dan maksud serta tujuan.

2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

3. Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

4. Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis

Bab ini menguraikan tentang analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan yang dihadapi yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Analisis pada bab ini akan menjadi penentu arah kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

5. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi pembangunan daerah yang diuraikan pemaknaannya berdasarkan penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi. Dari penjelasan misi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan untuk lima tahun yang akan datang.

6. Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

7. Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Selain itu disajikan penjelasan

tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

8. Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan organisasi perangkat daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Selain itu pada bagian ini, dilengkapi pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Program-program yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah disertai dengan pendanaan indikatif yang besarannya menyesuaikan terhadap target kinerja yang akan dicapai.

9. Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab ini berisi tentang penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

10. Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bab ini menguraikan tentang RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama kepemimpinan bupati periode berikutnya, dan kaidah pelaksanaan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dalam dokumen RPJMD.

11. Bab XI Penutup

1.5 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah untuk kurun waktu lima tahun mendatang dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Selain itu menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 adalah :

- a. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai tolok ukur kinerja kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- b. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah.
- c. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan terhadap program-program pembangunan daerah untuk kurun waktu lima tahun mendatang dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
- d. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- e. RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 sebagai indikator dalam pelaksanaan evaluasi kinerja lima tahunan pemerintah daerah.

BAB II

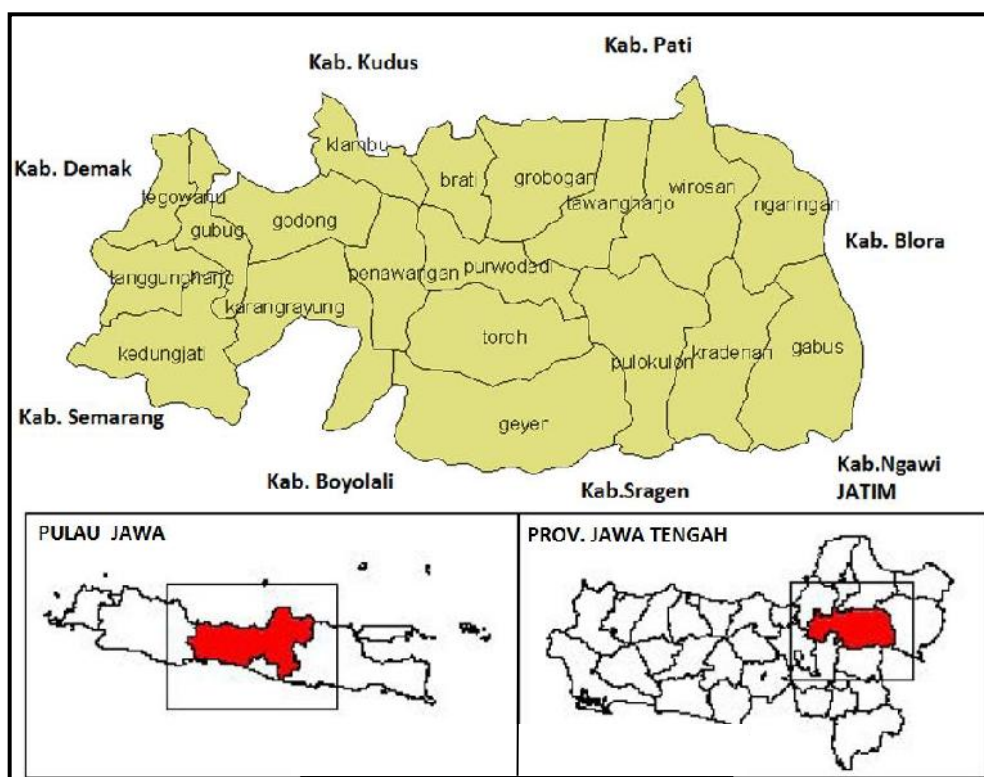
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebagai berikut : sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Semarang, sebelah utara dengan Kudus dan Pati, sebelah timur dengan Blora dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Sragen, Boyolali dan Semarang. Kabupaten Grobogan memiliki wilayah seluas 1.975,865km², Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan dan 280 desa/kelurahan dengan ibukota berada di Purwodadi. Peta lokasi Kabupaten Grobogan seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1.
Peta Adminsitratif Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah

2. Letak dan Kondisi Geografis

Dilihat dari Peta Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan terletak diantara dua Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berada di bagian timur. Secara astronomis daerah ini terletak pada posisi

110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30' LS dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya.

3. Topografi

Kabupaten Grobogan dibagian utara dan selatan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Secara topografi kondisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 0° – 80°. Dataran ini, sebagian besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Kecamatan Wirosari bagian selatan.
- b. Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50⁰-100⁰ meter di atas permukaan air laut, dengan kemiringan antara 8⁰-150⁰ dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara, dan Wirosari sebelah utara.
- c. Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan air laut, rata-rata dengan kemiringan tanah di atas 150, meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

4. Geologi

Kabupaten Grobogan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran. Jenis tanahnya dikelompokkan menjadi:

- a. Tanah alluvial coklat kekelabuan, seluas 3.376 ha atau sebesar 1,71% dari luas wilayah kabupaten
- b. Tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan, seluas 20.248 ha atau 10,25% luas kabupaten
- c. Tanah grumusol kelabu tua, seluas 66.748 ha atau 33,78% dari luas kabupaten
- d. Tanah grumusol kelabu, seluas 39.013 ha atau 19,78% dari luas kabupaten,
- e. Asosiasi grumusol coklat kekelabuan dan grumusol kelabu tua seluas 18.862 ha
- f. Kompleks regosol kelabu dan grumusol kelabu tua seluas 33.181 ha
- g. Kompleks mediteran coklat kemerahan dan lithosol seluas 16.088 ha.

Lahan di kawasan Kabupaten Grobogan cocok digunakan untuk pertanian, hal ini disebabkan topografi Kabupaten Grobogan yang berada dalam dataran rendah dengan kemiringan rata-rata 0 – 15%.

5. Hidrologi

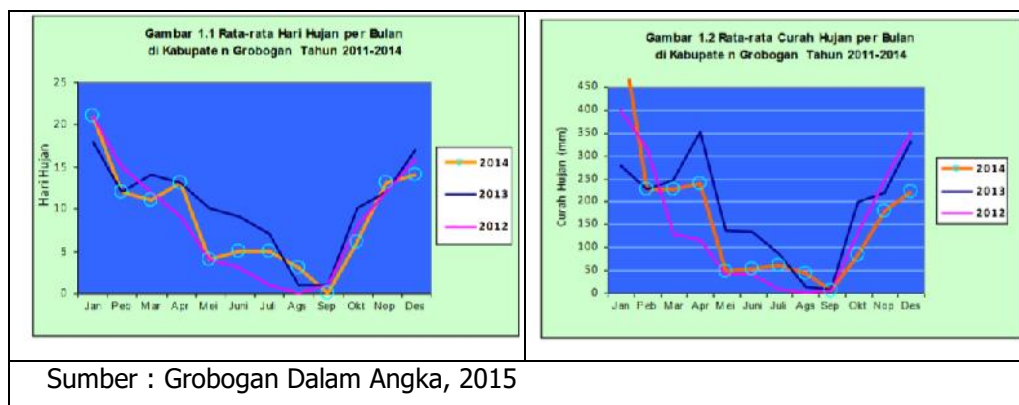
Seperti diketahui, waduk dan sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan (ekosistem), terutama dalam pengadaan air bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu untuk menjaga kelestariannya mutlak diperlukan penampungan berupa waduk atau sejenisnya.

Menyadari hal tersebut maka pemerintah telah membangun Waduk Kedung Ombo yang terletak di wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Keberadaan waduk dan sungai tersebut sangat berperan penting bagi pertanian di daerah Kabupaten Grobogan. Fungsi keberadaan dari Waduk KedungOmbo sebagai penyedia irigasi, sebagai penyedia air baku, dapat menjadi potensi yang menghasilkan tenaga listrik dengan adanya PLTA, sebagai upaya meredam banjir, berpotensi menjadi objek pariwisata dan dapat dimanfaatkan untuk perikanan, dengan adanya keramba-keramba.

Berdasarkan hasil inventarisasi Dinas Pengairan Kabupaten Grobogan, pada tahun 2014 terdapat sekitar 316 sungai dengan total panjang sungai 250,33 Km. Sungai terpanjang adalah Sungai Serang dengan panjang 83 km, kedalaman 8 s/d 10 meter dan debit sebesar 368 m³/ detik dan Sungai Lusi dengan panjang mencapai 78 km, kedalaman 10 s/d 12 meter dan debit sebesar 1068 m³/ detik.

6. Klimatologi

Kabupaten Grobogan mempunyai tipe iklim D yang bersifat 1 s/d 6 bulan kering dan 1 s/d 6 bulan basah dengan suhu minimum 26⁰ C. Kondisi rata-rata curah hujan di Kabupaten Grobogan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian TPH Kabupaten Grobogan diperoleh rata-rata hari hujan perbulan pada tahun 2014 adalah 8,91 hari, sementara itu rata-rata curah hujan pada tahun 2014 adalah sebesar 164,05 mm.



Gambar 2.2.
Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Grobogan Tahun 2014

Kecamatan dengan rata-rata hari hujan tertinggi berada di Kecamatan Grobogan, Klambu, Toroh, Godong dan Tawangharjo dengan rata-rata curah hujan setiap bulannya antara 8,91 hari, dengan akumulasi per tahun rata-rata curah hujannya mencapai 164,05 mm. Sedangkan rata-rata curah hujan per tahunnya tertinggi berada di Kecamatan Geyer dengan rata-rata curah hujan sebesar 540,25 mm. Persebaran rata-rata curah hujan di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

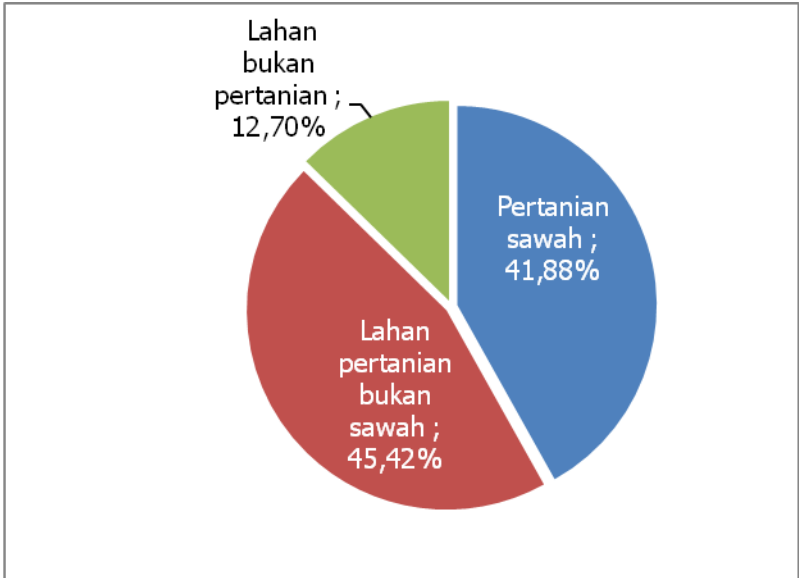
Tabel 2.1
Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan per Bulan Menurut Kecamatan/Tempat Pengamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2015

No	Kecamatan	Rata-rata Hari Hujan per Bulan (hari)	Rata-rata Curah Hujan per Bulan (mm)
1.	Kedungjati	6,08	106,92
2.	Karangrayung	6,75	106,08
3.	Penawangan	5,58	124,33
4.	Toroh	7,83	145,00
5.	Geyer	8,92	182,42
6.	Pulokulon	5,08	117,08
7.	Kradenan	6,50	145,91
8.	Gabus	8,33	146,25
9.	Ngaringan	7,83	103,58
10.	Wirosari	9,33	113,33
11.	Tawangharjo	7,75	133,83
12.	Grobogan	7,75	110,75
13.	Purwodadi	7,71	126,08
14.	Brati	9,50	121,42
15.	Klambu	9,83	150,83
16.	Godong	8,83	118,58
17.	Gubug	7,83	112,67
18.	Tegowanu	6,25	141,83
19.	Tanggunharjo	6,88	112,08
	Rata-Rata	8,91	164,05

Sumber:Dinas Pertanian TPH (SPVA) Kab. Grobogan, 2016

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Wilayah Kabupaten Grobogan seluas 197.586 Ha, dengan komposisi penggunaan lahan terdiri dari lahan pertanian sawah sebesar 41,88%, lahan pertanian bukan sawah sebesar 45,42% dan lahan bukan pertanian sebesar 12,70%.



Sumber:Dinas Pertanian TPH (SPVA) Kab. Grobogan, 2016

Gambar 2.3.
Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Grobogan Tahun 2015

Tanah pertanian sawah di Kabupaten Grobogan mencapai seluas 82.757 Ha. Penggunaan lahan pertanian sawah terdiri sawah irigasi sebesar 32.969 Ha dan sawah tadah hujan sebesar 49.788 Ha. Luas lahan non pertanian di Kabupaten Grobogan mencapai 25.091 Ha, sementara itu tanah pertanian bukan sawah mencapai 89.738 Ha dengan penggunaannya meliputi :

- Sementara tidak diusahakan : 0 Ha
- Tegalan/Kebun : 19.482 Ha
- Ladang/huma : 1.609 Ha
- Perkebunan : 0 Ha
- Hutan Rakyat : 528 Ha
- Padang Rumput : 0 Ha
- Lain-lain : 68.119 Ha

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat berdasarkan pembagian zonasi wilayah berdasarkan pola ruang wilayah

Kabupaten Grobogan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031, meliputi :

1) Kebijakan Penataan Ruang

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah di Kabupaten Grobogan, terdapat beberapa kebijakan penataan ruang wilayah, yaitu :

- a) pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur
- b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian timur Jawa Tengah
- c) pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan agropolitan Kutosaringan (Pulokulon, Toroh, Wirosari, Penawangan) yang berdaya saing dalam skala pelayanan nasional
- d) pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas
- e) pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung kawasan, dan konservasi sumberdaya alam demi pengembangan wilayah berkelanjutan
- f) pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional
- g) peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

2) Strategi Penataan Ruang

Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Grobogan, disusun strategi penataan ruang wilayah, yang meliputi :

- a) Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur;
- b) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian timur Jawa Tengah;
- c) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan agropolitan Kutosaringan yang berdaya saing dalam skala pelayanan nasional;

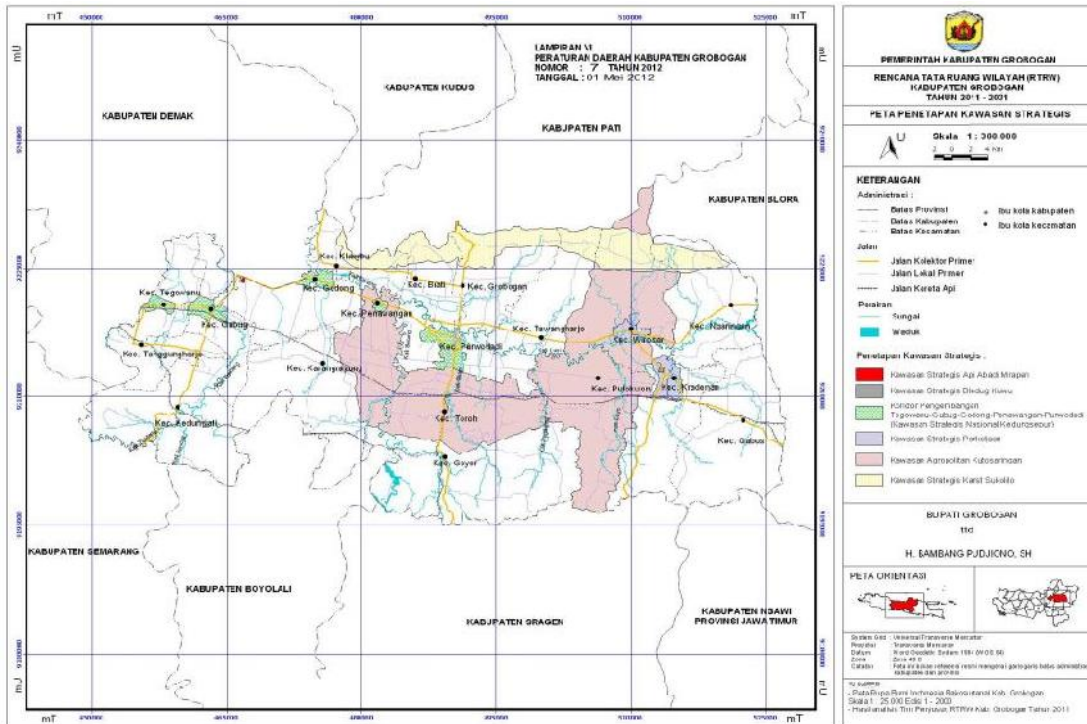
- d) Strategi pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya;
- e) Strategi pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung kawasan, dan konservasi sumberdaya alam demi pengembangan wilayah berkelanjutan;
- f) Strategi pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional; dan
- g) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

3) Kawasan Strategis

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031, rencana penetapan kawasan strategis kabupaten meliputi:

- a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - Koridor pengembangan Tegowanu - Gubug - Godong - Penawangan – Purwodadi sebagai bagian dari KSN Kedungsepur;
 - Kawasan agropolitan Kutosaringan, yaitu : Kecamatan Pulokulon dengan produksi jagung dan kedelai; Kecamatan Toroh dengan produksi jagung; Kecamatan Wirosari dengan produksi sapi potong dan jagung; dan Kecamatan Penawangan dengan produksi melon, semangka dan kacang hijau.
 - Kawasan strategis perkotaan, yaitu : perkotaan Wirosari di Kecamatan Wirosari; dan perkotaan Kradenan di Kecamatan Kradenan.
- b) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi kawasan bentang alam karst Sukolilo yang terdapat di:
 - Kecamatan Klambu
 - Kecamatan Brati
 - Kecamatan Grobogan
 - Kecamatan Tawangharjo
 - Kecamatan Wirosari, dan
 - Kecamatan Ngaringan
- c) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya, meliputi:

- Peta pengembangan kawasan strategis berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.4.
Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan

a) Potensi Pertanian

Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan yang menjadi perhatian di kabupaten Grobogan, di mana tanaman padi, jagung dan kedelai merupakan tanaman yang harus dipandang bukan hanya sebagai pembangunan parsial pengembangan komoditas, tetapi terkait dengan pembangunan wilayah serta sub sektor tanaman pangan untuk memperkuat petani sebagai pelaku agribisnis.

Kabupaten Grobogan mempunyai potensi sumber daya lahan meliputi lahan sawah, lahan kering, hutan rakyat dan hutan negara dengan topografi dan iklim yang mendukung perkembangan pertanian. Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang berpotensi terhadap pemanfaatan pengembangan lahan tanaman padi, jagung dan kedelai, pemanfaatan lahan secara intensif terutama lahan potensial di daerah-

daerah sentra untuk dapat mendukung keberhasilan produk tanaman pangan. Kinerja produksi pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Kinerja Produksi Pertanian Tahun 2013-2015

No	Jenis	Jumlah/Tahun		
		2013	2014	2015
1.	Produksi padi (ton)	612.612	608.751	764.148
2.	Luas panen padi (ha)	113.720	113.540	126.935
4.	Produksi jagung (ton)	559.555	590.776	656.027
5.	Luas panen jagung (ha)	98.909	105.447	112.700
6.	Produksi kedelai (ton)	28.975	45.254	43.760
7.	Luas panen kedelai (ton)	15.606	19.804	17.869
8.	Jumlah kelompok tani	1.671	1.671	1.600
9.	Jumlah Penggilingan padi (Unit)	862	862	818

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2016

Komoditas hortikultura semakin intensif dikembangkan di Kabupaten Grobogan dengan tujuan meningkatkan nilai tambah bagi petani. Komoditas hortikultura yang berkembang antara lain bawang merah, cabe besar, cabe rawit, semangka, jambu air, belimbing, pisang, dan melon.

b) Potensi Perikanan

Banyaknya lahan perikanan air tawar yang didukung dengan perairan yang memadai, menjadikan Kabupaten Grobogan mempunyai produksi ikan yang melimpah. Kabupaten Grobogan mampu menghasilkan ikan tawar sebanyak 1.200 ton pertahun, yang meliputi perikanan budidaya dan tangkapan, yang bersumber dari sungai, bendung dan waduk.

c) Potensi Peternakan

Kabupaten Grobogan dikenal sebagai sentra sapi potong di Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan 35 kabupaten lainnya di provinsi tersebut, Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten tertinggi dalam memproduksi sapi potong. Menurut data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogantahun 2013 jumlah populasi sapi di daerahnya mencapai 154.559 ekor, tersebar di setiap kecamatan se-Kabupaten Grobogan.

d) Potensi Pariwisata

Potensi wisata di Kabupaten Grobogan terdiri wisata alam, wisata mandi, wisata keluarga, wisata religi, serta wisata kuliner.Tempat wisata di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Potensi Wisata Kabupaten Grobogan Tahun 2015

Jenis Wisata	Lokasi
Wisata Alam	1. Bledug Kuwu, di Desa Kuwu Kec. Kradenan
	2. Api Abadi Mrapen, di Desa manggarmas Kec. Godong
	3. Kesongo, di Desa Gabus Kec. Gabus
	4. Goa Ngesong, di Desa Tegalrejo Kec. Wirosari
	5. Air Terjun Ngayoman, di Desa Karangasem Kec. Wirosari
	6. Goa Teges, di Desa Tagalrejo Kec. Wirosari
	7. Air Terjun Widuri, di Desa Kemadohatur Kec. Tawangharjo
	8. Goa Urang, di Desa kemadohatur Kec. Tawangharjo
	9. Goa Gajah, di desa Kemadohatur Kec. Tawangharjo
	10. Goa Anggil-angil, di Desa Kamadohatur Kec. Tawangharjo
	11. Goa Gogor, di Desa Sumberjatipohon Kec. Grobogan
	12. Goa Lawa/Goa Macan, di desa Sedayu Kec. Grobogan
	13. Air Terjun Gulingan, di Desa Sedayu Kec. Grobogan
	14. Ramesan Ramesan Kec. Kradenan
Wisata Buatan	1. Waduk Kedungombo, di Desa Rambat Kec. Geyer
	2. Taman Cindelas, di Desa Ngrandah Kec. Toroh
	3. Pemandian Sangeh, di Desa Tambirejo Kec. Toroh
	4. Pemandian Mudal, di Desa karangasem Kec. Wirosari
	5. Sendang wangi, di Desa Karangasem Kec. Wirosari
	6. Sendang Keyongan, di Desa Penganten Kec. Brati
	7. Pemandian Segoro Gunung, di Desa Nglinduk Kec
	8. Sendang Coyo, di Desa mlowakarantalun Kec. Pulokulon
	9. Sendang Bulusan, di Desa Jipan Kec. Penawangan
	10. Ayodya Bloombang Waterpark, di Kel. Kuripan Kec. Purwodadi.
	11. Kolam Renang Jatipohon, di Desa sumberjatipohon Kec. Grobogan.
	12. Taman Rekreasi Water and Snaw, di Kecamatan Gubug
	13. Taman Rekreasi Mulia, di Desa Klambu Kec. Klambu
Wisata Budaya	Situs Medang, di Desa medangkamolan Kec. Gabus
Wisata Religi	1. Makam Ki Ageng Selo, di Desa Selo Kec. Tawangharjo
	2. Makan Joko Tarub, di Desa Tarub Kec. Tawangharjo
	3. Makan Ki Getas Pendowo, di Kel. Kuripan Kec. Purwodadi
Wisata Kuliner	1. Kampung Sego Jagung, di Kel. Danyang Kec. Purwodadi
	2. Sweekke Purwodadi di Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi
	3. Nasi Becek, di Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi
	4. Danau Resto, di Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi

Sumber : Dispora Kabupaten Grobogan tahun 2016, diolah

e) Potensi Hutan

Secara geografis, Kabupaten Grobogan merupakan lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng di bagian selatan dan Pegunungan Kapur Utara di bagian utara. Adapun bagian

tengah wilayahnya adalah dataran rendah. Dua sungai besar yang mengalir adalah Kali Serang dan Kali Lusi. Dua pegunungan tersebut merupakan hutan jati, mahoni dan campuran yang memiliki fungsi sebagai resapan air hujan di samping juga sebagai lahan pertanian meskipun dengan daya dukung tanah yang rendah.

f) Potensi Industri

▪ Industri Genteng

Perkembangan industri genteng di daerah Grobogan belakangan ini semakin berkembang pesat. Beberapa daerah yang mulai memproduksi genteng antara lain Desa Karangasem, Tegalrejo, Kecamatan Wirosari dan Dusun Gedong, Desa Tegalsumur, Kecamatan Brati. Tingginya aktivitas produksi genteng press di Kabupaten Grobogan, mendorong para pelaku UKM untuk memperluas pemasarannya hingga menjangkau ke luar daerah.

▪ Industri mebel

Kreativitas yang dimiliki masyarakat Grobogan menjadi modal awal bagi mereka untuk mengembangkan industri mebel di daerah tersebut, sedikitnya terdapat sekitar 117 orang pelaku usaha mebel dengan tingkat rata-rata produksi mebel/furniture mencapai 60.385 buah. Ke depan, beragam produk yang dihasilkan pelaku usaha mebel di Grobogan perlu dikembangkan menjadi skala industri yang lebih besar dan mampu menjangkau pasar nasional maupun pasar internasional.

▪ Kerajinan Bambu

Di samping industri mebel yang mulai berkembang, beberapa daerah di Kabupaten Grobogan kini menjadi pusat kerajinan bambu yang cukup dikenal masyarakat luas, antara lain Desa Teguhan Kecamatan Grobogan, Desa Terkesi dan Jenengan Kecamatan Klambu, Desa Dimoro Kecamatan Toroh, Desa Pakis Kecamatan Kradenan, dan Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon. Sebagian besar masyarakat memilih menjadi pengrajin bambu karena minat konsumen masih sangat besar. Beberapa produk kerajinan yang dihasilkan masyarakat antara lain sangkar burung, kandang ayam, anyaman bambu, bronjong dan lain sebagainya.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana merupakan wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis

dan demografis maupun karena ulah manusia. Kawasan rawan bencana merupakan bagian dari kawasan lindung. Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sum sumberdaya buatan. Sehingga pada kawasan rawan bencana dilakukan pembatasan kegiatan atau tidak boleh dilakukan kegiatan budidaya. Kawasan rawan bencana terdiri dari :

a. Kawasan rawan banjir

Kawasan rawan banjir adalah kawasan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Ketentuan pada kawasan rawan banjir adalah:

- Penetapan batas dataran banjir; dan
- Diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.

b. Kawasan rawan longsor

Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yangrawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Ketentuan yang berlaku pada kawasan rawan longsor adalah :

- Diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- Diperbolehkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- Diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

c. Kawasan Rawan Kekeringan

Kawasan rawan kekeringan adalah kawasan dengan kriteria kawasan yang minim sumber air dan rendah curah hujannya. Ketentuan yang berlaku pada kawasan ini adalah :

- Diperbolehkan pembuatan bangunan penampungan air baku;
- Diperbolehkan revitalisasi jaringan irigasi;
- Diperbolehkan peningkatan penghijauan dan reboisasi;
- Diperbolehkan penanganan kondisi darurat dengan pengerahan mobil tanki air minum; dan
- Diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana kekeringan.

Jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Grobogan antara lain bencana banjir, angin puting beliung, tanah lonsor, kekeringan dan kebakaran. Berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan bencana di

Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana, ditunjukkan beberapa wilayah pada tahun 2015 dengan memiliki tingkat kerawanan bencana berdasarkan jenisnya, yaitu :

a. Bencana Banjir

Kondisi wilayah yang termasuk kategori rawan banjir di Kabupaten Grobogan terdapat di 5 kecamatan dengan persebaran wilayah desa/ kelurahan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Tegowanu	Desa Tajemsari Desa Cangkring Desa Tunjungharjo Desa Tlogorejo Desa Gebangan Desa Karangpasar Desa Sukorejo Desa Kebonagung
2	Geyer	Desa Monggot Desa Geyer Desa Ngrandu
3	Toroh	Desa Genengsari
4	Klambu	Desa Penganten
5	Purwodadi	Kel. Danyang Desa Nambuhan Desa Ngraji

b. Angin Puting Beliung

Kondisi wilayah yang termasuk kategori rawan angin puting beliung di Kabupaten Grobogan terdapat di 3 kecamatan dengan persebaran wilayah desa/kelurahan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Tawangharjo	Desa Jono
2	Kradenan	Desa Banjarsari
3	Geyer	Desa Rambat Desa Juworol

c. Tanah Longsor

Kondisi wilayah yang termasuk kategori rawan tanah longsor di Kabupaten Grobogan terdapat di 2 kecamatan dengan persebaran wilayah desa/kelurahan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Tanggungharjo	Desa Mrisi
2	Tawangharjo	Desa Jono

d. Kebakaran

Kondisi wilayah yang termasuk kategori rawan kebakaran di Kabupaten Grobogan terdapat di 16 kecamatan dengan persebaran wilayah desa/kelurahan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Karangrayung	Desa Nampu Desa Termas Desa Telawah Desa Mojoagung Desa Ketrol Desa Cekel
2	Pulokulon	Desa Jetaksari
3	Gubug	Desa Ngroto Desa Kemiri Desa Ginggangtani Desa Gubug Desa Kuwaron
4	Brati	Desa Kronggen Desa Menduran Desa Katekan
5	Toroh	Desa Bolohs Desa Sugihan Desa Depok Desa Katong Desa Pilangpayung
6	Kradenan	Desa Rejosari Desa Sengonwetan Desa Tanjungsari Desa Crewek
7	Tegowanu	Desa Tajemsari Desa Gebangan Desa Sukorejo Desa Karangpasar
8	Tanggunganharjo	Desa Ringinpitu
9	Penawangan	Desa Wolo Desa Pengkolr Desa Lajer Desa Winong Desa Watupawon
10	Klambu	Desa Terkesi Desa Taruman
11	Godong	Desa Sumberagung Desa Kemloko
12	Wirosari	Desa Dapurno Desa Kropak Desa Kalirejo Desa Sambirejo
13	Purwodadi	Kel. Kuripan Desa Ngembak Desa Karanganyar Desa Cingkrong

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
		Desa Nambuhan Desa Warukaranganyar Kel. Kalongan
14	Grobogan	Desa Lebak Desa Getasrejo
15	Geyer	Desa Jambangan Desa Suru
16	Gabus	Desa Pelem

- e. Kekeringan
- Kondisi wilayah yang termasuk kategori memiliki potensi rawan kekeringan di Kabupaten Grobogan terdapat di 17 kecamatan yang terdiri dari:
- (1) Kecamatan Brati
 - (2) Kecamatan Gabus
 - (3) Kecamatan Geyer
 - (4) Kecamatan Godong
 - (5) Kecamatan Grobogan
 - (6) Kecamatan Purwodadi
 - (7) Kecamatan Karangrayung
 - (8) Kecamatan Kedungjati
 - (9) Kecamatan Kradenan
 - (10) Kecamatan Ngaringan
 - (11) Kecamatan Pulokulon
 - (12) Kecamatan Penawangan
 - (13) Kecamatan Tanggungharjo
 - (14) Kecamatan Tawangharjo
 - (15) Kecamatan Tegowanu
 - (16) Kecamatan Toroh
 - (17) Kecamatan Wirosari

2.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan berdasarkan data BPS pada Tahun 2015 tercatat sebesar 1.351.429 jiwa, mengalami pertumbuhan penduduk 0,56% atau bertambah 7.469 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2014. Data jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Tahun 2013 dan 2014

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Pertumbuhan
	Laki-laki	Perempuan		
2011	652.897	666.878	1.319.775	-
2012	657.077	671.120	1.328.197	0,64
2013	661.109	675.195	1.336.304	0,61
2014	664.853	679.107	1.343.960	0,57
2015	668.507	682.922	1.351.429	0,56

Sumber : Buku Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2016

Jika dilihat dari segi seks rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dari pada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 668.507 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 682.922 jiwa, maka sex rasio penduduk mencapai 101,98%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101,98 jiwa penduduk laki-laki.

Sementara itu jika dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 135.698 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 34.779 jiwa. Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex rasio per kecamatan, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		L	P	Total	
1	Kedungjati	19.639	20.195	39.834	101,50
2	Karangrayung	45.075	45.095	90.170	101,90
3	Penawangan	29.342	29.739	59.081	101,02
4	Toroh	52.960	54.320	107.280	100,50
5	Geyer	29.100	31.054	60.154	101,19
6	Pulokulon	50.084	51.046	101.130	104,29
7	Kradenan	37.318	38.626	75.944	102,59
8	Gabus	33.173	34.710	67.883	102,74
9	Ngaringan	33.546	33.171	66.717	104,02
10	Wirosari	42.732	43.611	86.343	101,88
11	Tawangharjo	27.431	27.447	54.878	103,92
12	Grobogan	37.492	37.882	75.374	103,66
13	Purwodadi	66.649	69.049	135.698	100,23
14	Brati	22.829	23.663	46.492	103,20
15	Klambu	17.362	17.417	34.779	104,27
16	Godong	39.566	39.571	79.137	100,15
17	Gubug	38.116	38.958	77.074	101,41
18	Tegowanu	26.709	27.151	53.860	101,85
19	Tanggungharjo	19.384	20.217	39.601	99,82
	JUMLAH	668.507	682.922	1.351.429	101,98

Sumber : Buku Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2016

Dari aspek Kepadatan Penduduk tercatat sebesar 684 jiwa/km², dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.747,42 jiwa/km² dan kecamatan kepadatan terendah di Kecamatan Kedungjati yaitu sebesar 305,61 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Wil KM2	Jumlah Penduduk	Kepadatan Jiwa/ KM2
1	Kedungjati	130,342	39.834	305,61
2	Karangrayung	140,595	90.170	641,35
3	Penawangan	74,177	59.081	796,49
4	Toroh	119,320	107.280	899,09
5	Geyer	196,192	60.154	306,61
6	Pulokulon	133,644	101.130	756,71
7	Kradenan	107,748	75.944	704,83
8	Gabus	165,365	67.883	410,50
9	Ngaringan	116,720	66.717	571,60
10	Wirosari	154,298	86.343	559,59
11	Tawangharjo	83,602	54.878	656,42
12	Grobogan	104,556	75.374	720,90
13	Purwodadi	77,656	135.698	1747,42
14	Brati	54,891	46.492	846,99
15	Klambu	46,562	34.779	746,94
16	Godong	86,780	79.137	911,93
17	Gubug	71,119	77.074	1083,73
18	Tegowanu	51,670	53.860	1042,38
19	Tanggungharjo	60,628	39.601	653,18
JUMLAH		1.975,865	1.351.429	683,97

Sumber : Buku Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2016

Untuk mengetahui angka ketergantungan, harus disusun terlebih dahulu struktur usia penduduk dan piramida penduduk, karena Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (disebut usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif). Berdasarkan struktur usia, penduduk Kabupaten Grobogan dapat di kelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2015

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		L	P	
1	0-4	55663	53009	108672
2	5-9	57060	54303	111363
3	10-14	58961	56907	115868
4	15-19	57678	55092	112770
5	20-24	55325	52715	108040
6	25-29	45869	46288	92157
7	30-34	45833	48199	94032
8	35-39	47185	48701	95886
9	40-44	48007	51545	99552
10	45-49	48773	50786	99559
11	50-54	42083	43609	85692
12	55-59	33750	34038	67788
13	60-64	26193	27621	53814
14	65-69	18462	21705	40167
15	70-74	13367	16579	29946
16	75 +	14298	21825	36123
	TOTAL	668.507	682.922	1.351.429

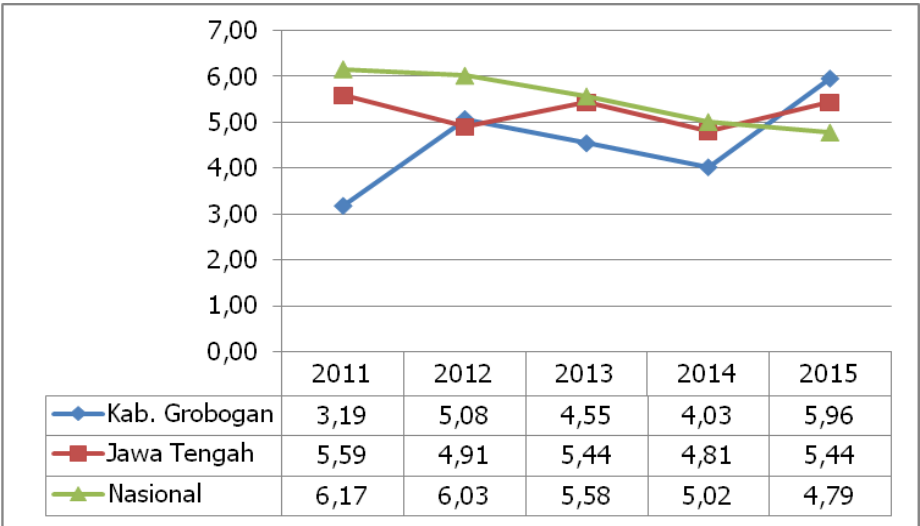
Sumber : Buku Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2016

Pada tahun 2015 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 909.290 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 442.139 jiwa, sehingga Angka rasio ketergantungan adalah 49%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 49 orang yang non produktif.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu baik secara menyeluruh maupun sektoral dapat dilihat dari besarnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/nilai output akhir yang bersumber dari berbagai sektor lapangan usaha di suatu daerah tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 mencapai sebesar 5,96%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 4,03%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan ditahun 2015 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam lima tahun terakhir (2011-2015). Selain itu capaian positif pertumbuhan ekonomi ditahun 2015 lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Selengkapnya dapat dilihat dalam Gambar berikut :



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (data tahun 2015 merupakan angka sementara).

Gambar 2.5.
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan
Tahun 2011-2015

Sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Grobogan adalah sektor industri pengolahan dan sektor angkutan dan komunikasi, Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Keuangan, Persewaan dan Jasa Penunjang Keuangan. Lebih lengkapnya distribusi masing-masing sektor dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.8
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015 (%)

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,48	32,86	32,76	31,63	32,39
B	Pertambangan dan Penggalian	1,04	1,09	1,11	1,21	1,27
C	Industri Pengolahan	10,65	10,64	10,75	11,36	11,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	5,35	5,42	5,48	5,67	5,66
G	Perdagangan Besar dan	21,53	20,81	20,50	20,04	19,41

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
	Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	4,44	4,37	4,35	4,55	4,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,47	4,33	4,25	4,37	4,41
J	Informasi dan Komunikasi	2,36	2,27	2,19	2,15	2,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,67	3,82	3,90	4,02	4,06
L	Real Estate	2,12	2,08	2,11	2,12	2,11
M, N	Jasa Perusahaan	0,24	0,23	0,24	0,24	0,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,70	3,75	3,70	3,64	3,58
P	Jasa Pendidikan	4,16	4,65	4,97	5,14	5,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,96	0,99	0,99	1,00	0,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,71	2,54	2,59	2,73	2,61

Sumber : Buku Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2016

Secara sektoral, perkembangan PDRB Atas dasar harga konstan 2010 dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9
Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2011-2015
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

No	Lapangan Usaha	Tahun (dalam jutaan)				
		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.229.095,65	4.420.863,13	4 499 335,70	4 503 752,85	4 821 978,84
B	Pertambangan dan Penggalian	135.896,43	154.980,80	167 384,78	176 199,50	180 264,97
C	Industri Pengolahan	1.342.086,60	1.431.366,15	1 542 864,73	1 662 382,60	1 768 851,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.437,85	13.603,07	14 813,60	14 956,19	14 591,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.967,21	6.880,77	7 032,63	7 359,51	7 492,64
F	Konstruksi	709.486,32	755.160,38	804 908,83	845 723,83	892 916,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.893.418,44	3.006.953,63	3 141 785,87	3 269 107,53	3 402 657,48
H	Transportasi dan Pergudangan	615.530,07	660.218,03	709 686,48	764 286,68	812 458,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	597.676,04	615.007,85	626 623,07	666 959,99	710 334,81
J	Informasi dan Komunikasi	322.918,38	348.212,54	375 216,21	413 465,48	449 960,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	481.751,05	504.465,72	536 722,88	576 002,05	618 023,50
L	Real Estate	291.013,27	309.365,92	337 597,87	357 185,23	379 163,16
M, N	Jasa Perusahaan	30.742,50	32.352,13	34 694,86	36 727,67	39 741,21
O	Administrasi	504.348,50	507.617,38	522 630,87	528 432,22	554 725,40

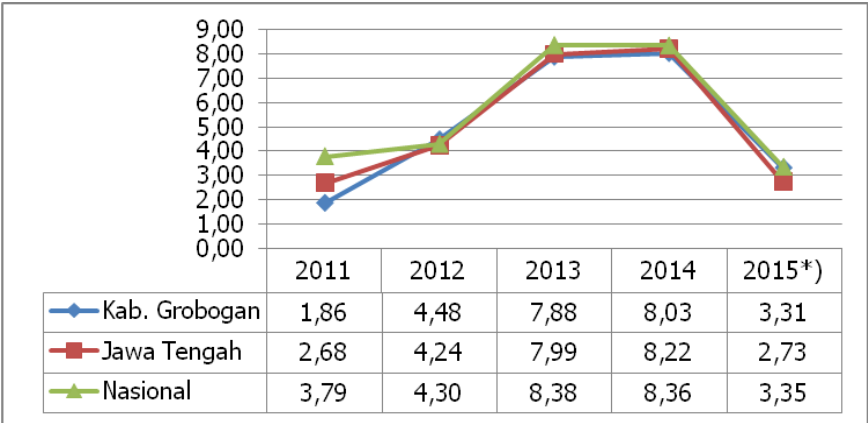
No	Lapangan Usaha	Tahun (dalam jutaan)				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	509.897,58	572.649,79	618 423,66	667 206,72	712 160,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123.774,50	130.235,87	135 033,46	142 437,11	151 367,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	365.671,55	372.113,97	399 973,44	432 271,50	445 931,47
		13.172.711,96	13.842.047,14	14 474.728, 93	15 064.456, 66	15.962. 619, 43

Sumber : Buku Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2016

2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen. Inflasi berpengaruh terhadap tingkat pembelian masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan tetap serta mempengaruhi besarnya produksi barang.

Di Kabupaten Grobogan, laju inflasi dalam kurun waktu 2011-2014 trennya meningkat, namun pada tahun 2015 kondisinya membaik dengan menurun mencapai 3,31% jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 sebesar 8,03%. Kinerja inflasi Kabupaten Grobogan hampir sama dengan kinerja provinsi maupun nasional pada perkembangannya. Namun kondisinya masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut:



Sumber: BPS Provinsi 2016, diolah

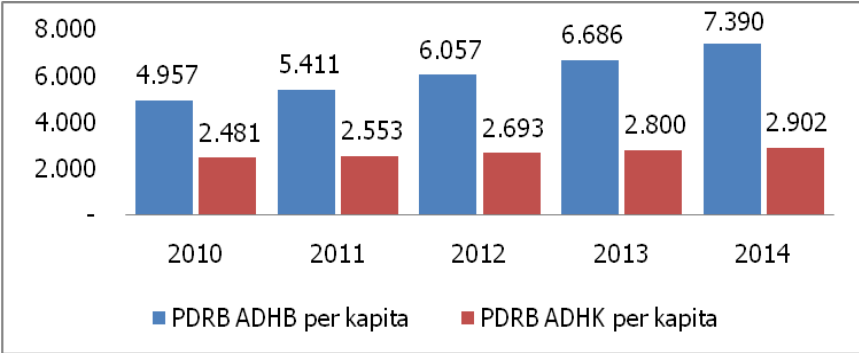
Gambar 2.6.
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Grobogan dan Jawa Tengah (%) Tahun 2011 – 2015

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan

masyarakat di suatu wilayah. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Grobogan dari tahun 2010 – 2014 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, dari Rp 4.957 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 7.390 juta pada tahun 2014. Sementara itu, PDRB ADHK per kapita Kabupaten Grobogan juga mengalami peningkatan meskipun hanya sebesar Rp 421 juta dalam kurun waktu 2010 – 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kab.Grobogan (data tahun 2014 merupakan angka sementara)

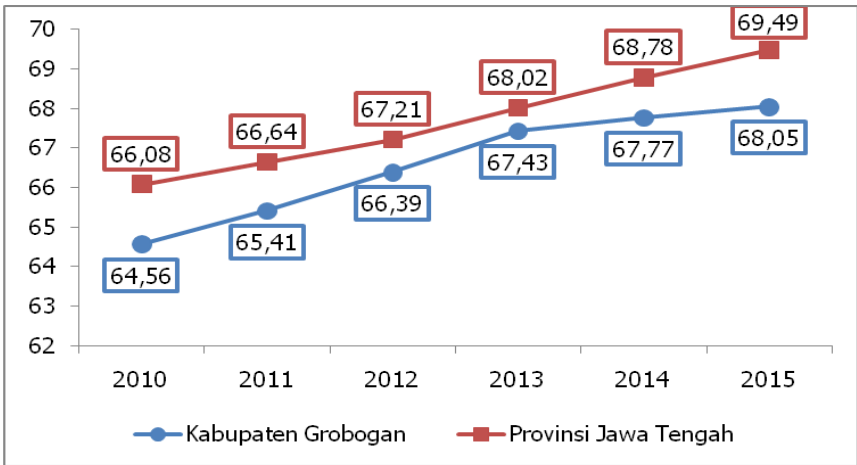
Gambar 2.7.
PDRB per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2014 (juta)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah. Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup, sedangkan indikator dari bidang pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sementara dari bidang perekonomian indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita.

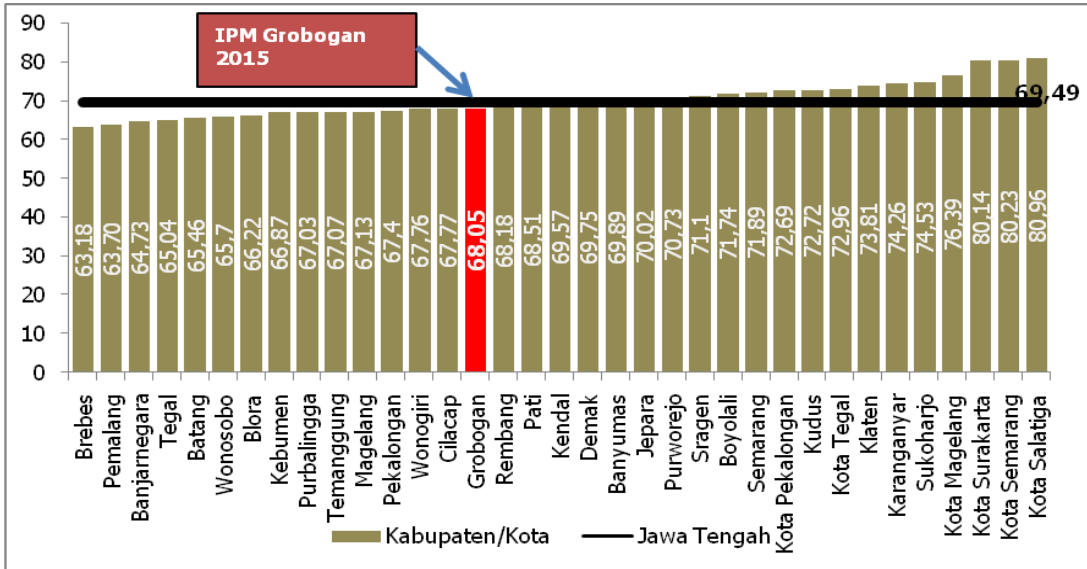
Perkembangan IPM di Kabupaten Grobogan dalam periode 2011-2014 trennya menunjukkan peningkatan. Tahun 2010 IPM Kabupaten Grobogan sebesar 64,56, meningkat menjadi 68,5 pada tahun 2015. Kinerja perkembangan IPM Kabupaten Grobogan sejalan dengan peningkatan perkembangan IPM di Provinsi Jawa Tengah yang meningkat dari 66,08 ditahun 2010 menjadi 69,49 pada tahun 2015. Akan tetapi, ditahun 2014 perkembangan IPM Kabupaten Grobogan sedikit melambat. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kab. Grobogan Tahun 2015

Gambar 2.8.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Grobogan Tahun 2010 – 2015

Berdasarkan posisi relatifnya, capaian IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota lain posisinya ada di kelompok menengah, yakni peringkat 21 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, jika dibandingkan IPM Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Grobogan yang sebesar 68,05, masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 69,49. Sementara itu, jika dibandingkan Kabupaten sekitar, IPM Kabupaten Grobogan sudah lebih baik dari IPM Kabupaten Rembang, Blora dan Pati. Posisi relatif IPM Kabupaten Grobogan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



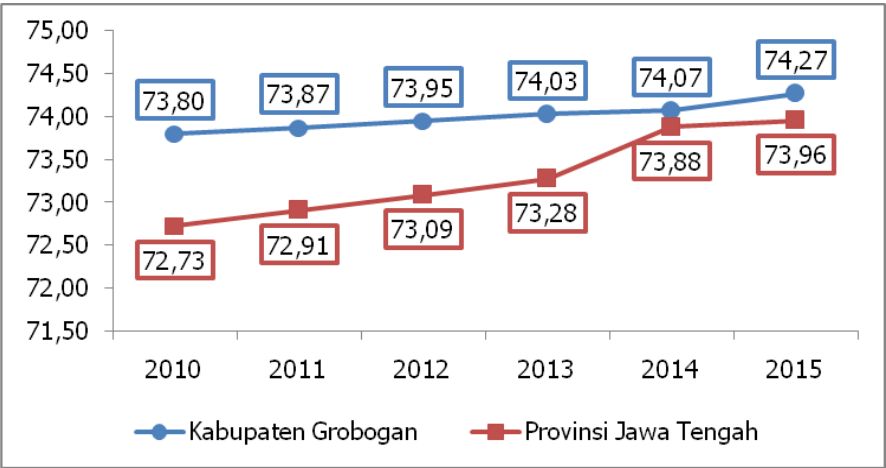
Sumber: Buku IPM-BPS Nasional Tahun 2015

Gambar 2.9.
Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Grobogan dan Kab/Kota di Sekitarnya Tahun 2015

Indikator yang menjadi pembentuk IPM Kabupaten Grobogan yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita akan diuraikan di bawah ini.

a) Angka Harapan Hidup (AHH)

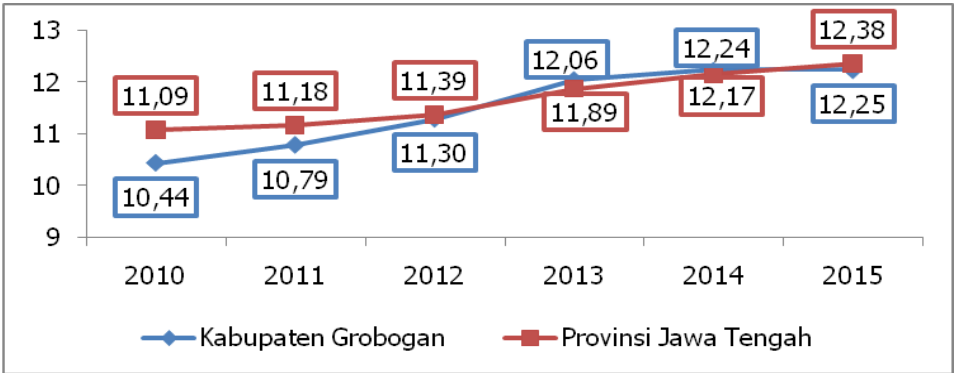
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2015) menunjukkan peningkatan. Capaian selama lima tahun meningkat dari 73,80 tahun pada tahun 2010 menjadi 74,27 tahun pada tahun 2015. AHH di Kabupaten Grobogan setiap tahun capaiannya selalu berada di atas capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.10.
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)
Kabupaten Grobogan Tahun 2010 – 2015

b) Harapan Lama Sekolah (HLS)

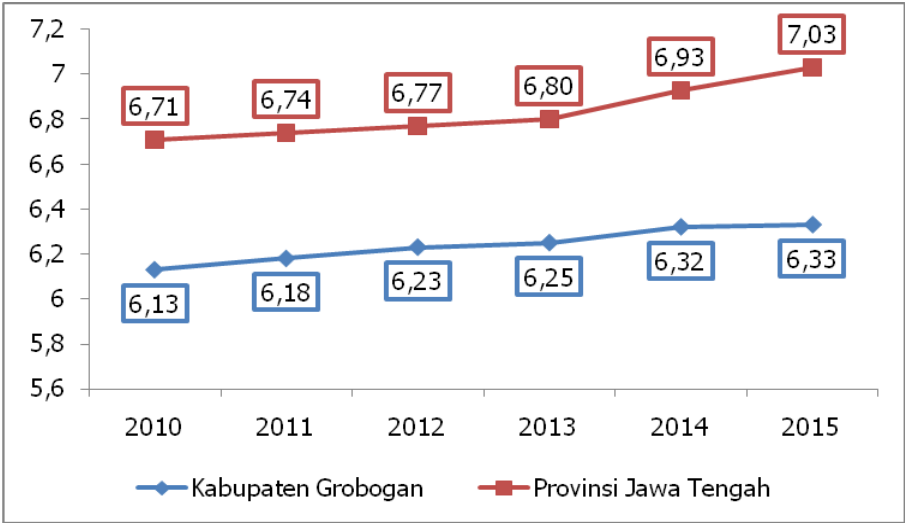
Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Grobogan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010, capaian angka HLS adalah 10,44 tahun kemudian meningkat menjadi 12,25 tahun pada tahun 2015. Jika pada tahun 2010 sampai 2012 capaian HLS Kabupaten Grobogan selalu di bawah capaian rata-rata Jawa Tengah, namun pada tahun 2013 dan 2014 angkanya menjadi lebih baik dengan berada di atas capaian rata-rata Jawa Tengah. Namun kinerja harapan lama sekolah pada tahun 2015 kembali berada di bawah rata-rata Jawa Tengah. Kondisi ini disebabkan pencapaian pada tahun 2015 rendah kenaikannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.11.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 – 2015

c) Rata-rata Lama Sekolah

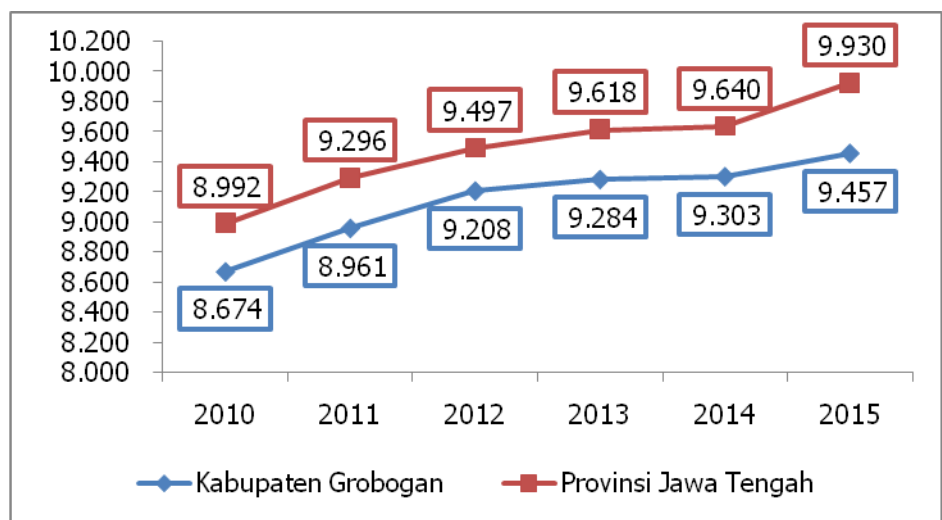
Perkembangan tingkat rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu lima (5) tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010, capaian rata-rata lama sekolah adalah 6,13 tahun meningkat menjadi 6,33 tahun pada tahun 2015. Namun jika dilihat peningkatannya, dalam rentang lima tahun terakhir cukup rendah hanya sebesar 0,2 tahun. Kinerja ditahun 2015 pun kenaikannya rendah. Sementara itu, dibandingkan capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah, capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan masih lebih rendah. Dengan kondisi capaian sampai dengan tahun 2015, menunjukkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan masih setaraf SD/MI. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.12.
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Grobogan Tahun 2010 – 2015

d) Pengeluaran per Kapita

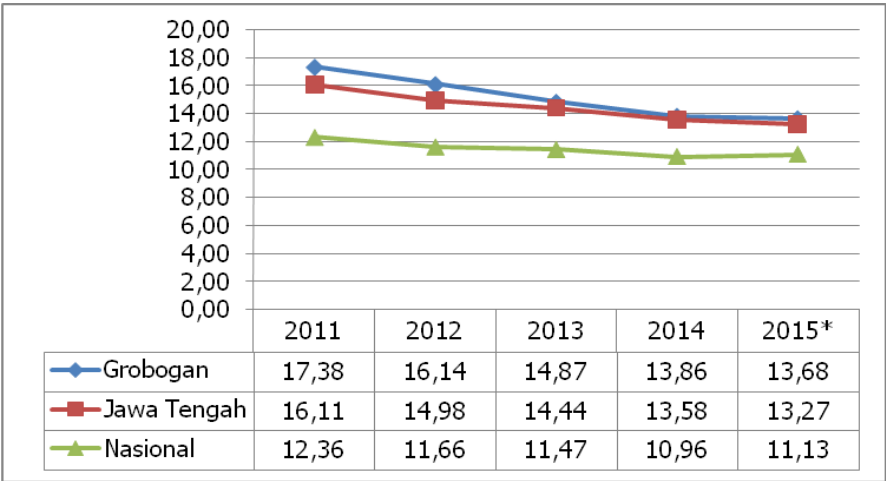
Pada tahun 2014, rata-rata pengeluaran perkapita di Kabupaten Grobogan adalah sebesar Rp9.303 ribu, meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 sebesar Rp 8.674 ribu. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, angka pengeluaran perkapita di Kabupaten grobogan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Meningkatnya pengeluaran perkapita penduduk setiap tahunnya menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.13.
Perkembangan Pendapatan Per Kapita (ribu Rp)
Kabupaten Grobogan Tahun 2010 – 2015

2. Penduduk Miskin

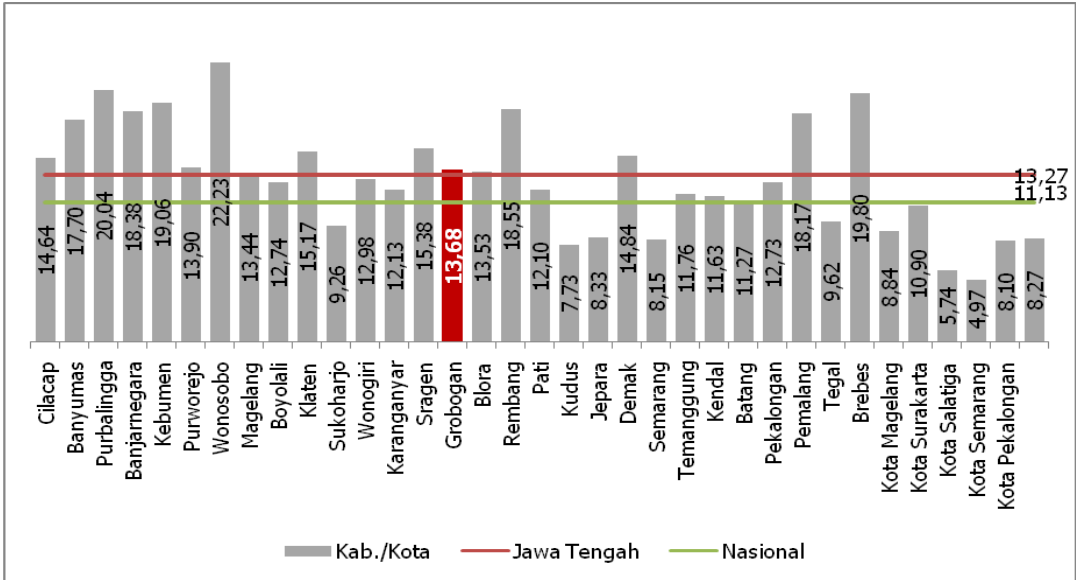
Jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari tingkat kemiskinan pada tahun 2011 sebesar 17,38%, berurutan mengalami penurunan menjadi 13,68% di tahun 2015. Dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan Kabupaten Grobogan mengalami penurunan sebesar 3,70% dengan rata-rata penurunan setiap tahunnya mencapai sebesar 0,74%. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan Provinsi dan Nasional.



Sumber : Berita Statistik BPS 2016, diolah

Gambar 2.14.
Tingkat Kemiskinan Penduduk Grobogan 2011 - 2015

Tingkat kemiskinan Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 adalah 13,68%, masih lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nasional (11,13%) dan Provinsi Jawa Tengah (13,27%). Dibandingkan dengan wilayah sekitar, tingkat kemiskinan Kabupaten Grobogan lebih tinggi dari Kabupaten Blora (13,53%), Kudus (7,73%), Pati (12,10%) dan Boyolali (12,74%). Capaian ini hanya lebih rendah dari Kabupaten Sragen (15,38%). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut di bawah ini.



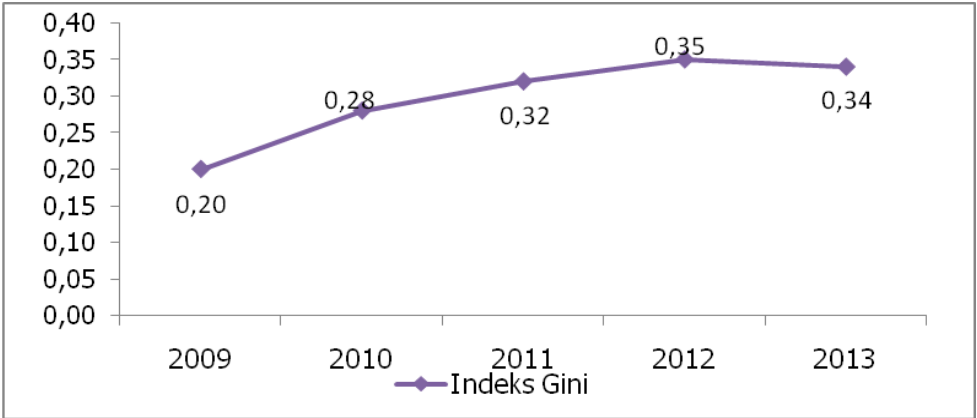
Sumber : Berita Statistik BPS 2016, diolah

Gambar 2.15.
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2015

3. Indeks Gini

Salah satu indikator yang dipergunakan oleh Bank Dunia dalam menilai ketimpangan pemerataan pendapatan di suatu wilayah adalah dengan menggunakan Indeks Gini. Koefisien Indeks Gini adalah 0 hingga 1 yang mengandung arti bahwa sama sekali tidak terjadi ketimpangan ketika capaian indeks Gini adalah 0 dan ketimpangan dapat dikatakan tinggi apabila capaian Indeks Gini adalah 1. Ketimpangan pemerataan pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Gini dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Indeks Gini dikategorikan rendah apabila capaiannya dibawah 0,3. Capaian Indeks Gini dikatakan sedang apabila capaiannya berada diantara 0,3 hingga 0,4 dan dikategorikan tinggi apabila capaiannya diatas 0,4 hingga 1.

Capaian Indeks Gini Kabupaten Grobogan masih dalam kategori rendah. Pada tahun 2009, capaian menunjukkan angka 0,20. Angka ini kemudian terus meningkat menjadi 0,35 pada tahun 2012. Sementara pada tahun 2013, terjadi penurunan angka menjadi 0,34. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.16.
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Grobogan
Tahun 2009 – 2013

Indeks gini Kabupaten Grobogan sudah lebih baik dari rata-rata provinsi maupun nasional. Dibandingkan dengan sekitar, hanya lebih baik dari Blora dan Boyolali, masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Demak dan Pati. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.

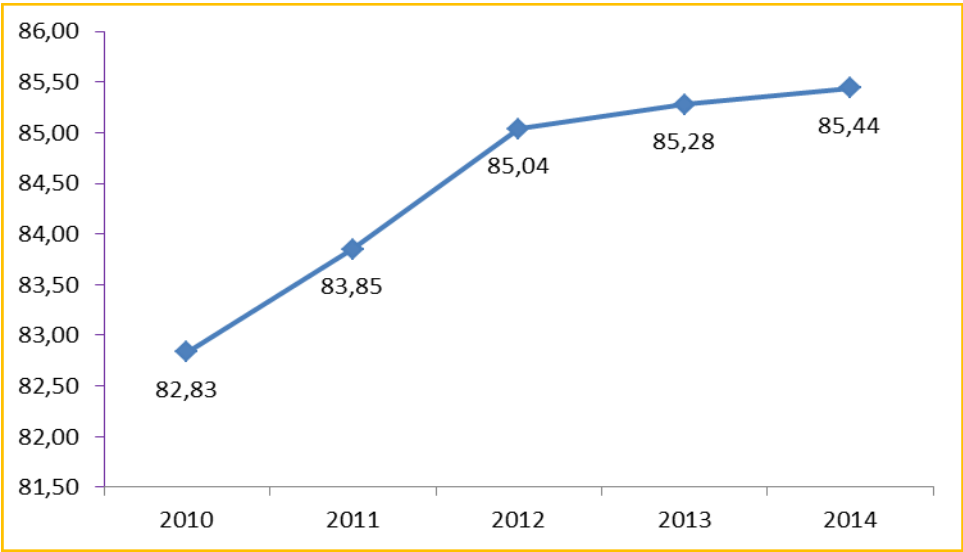


Gambar 2.17.
Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Grobogan Tahun 2013

4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG mendekati angka 100.

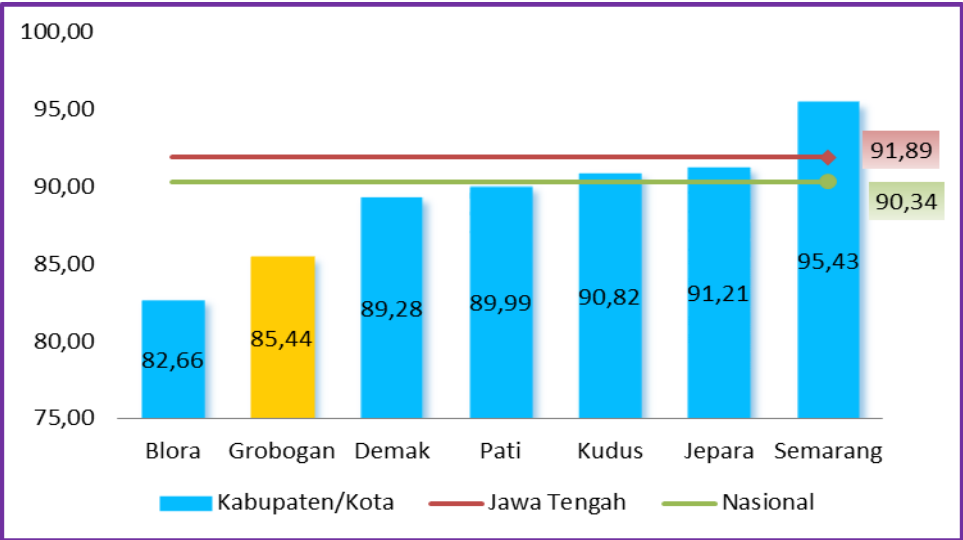
Di Kabupaten Grobogan, selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2010-2014), capaian IPG mengalami peningkatan dari 82,83 pada tahun 2010 menjadi 85,44 pada tahun 2014. Jika dilihat tren peningkatannya, tren tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 85,04 dari capaian pada tahun 2011 yang sebesar 83,85. Perkembangan IPG Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2015

Gambar 2.18.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan Tahun 2010–2014

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten sekitar, capaian IPG Kabupaten Grobogan masih lebih rendah dari capaian IPG Kabupaten Demak, Pati, dan Jepara. Capaian ini hanya lebih tinggi dari capaian Kabupaten Blora yang sebesar 82,66. Dibandingkan dengan capaian IPG Provinsi Jawa Tengah, capaian IPG Kabupaten Grobogan juga masih lebih rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2015

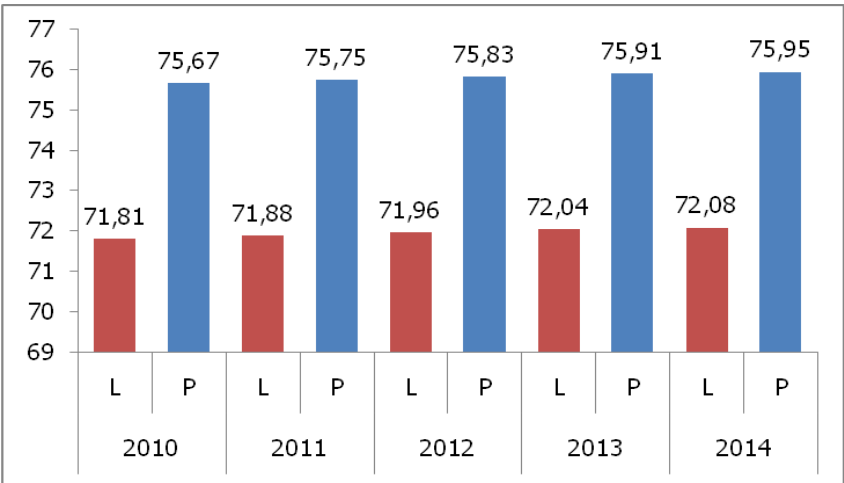
Gambar 2.19.
Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan dengan Kab. Sekitarnya Tahun 2014

Indikator pembentuk IPG adalah Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Sumbangan Pendapatan.

Berdasarkan indikator kompositnya, pencapaian IPG Kabupaten Grobogan tahun 2014 dirinci sebagai berikut.

a) Angka Harapan Hidup

Pada indikator Angka Harapan Hidup (AHH), AHH perempuan di Kabupaten Grobogan masih lebih tinggi dari AHH laki-laki. Capaian ini jelas menunjukkan adanya ketimpangan yang harus bisa dieliminasi pada masa mendatang. Rata-rata AHH laki-laki selama periode 2010 – 2014 sebesar 71,95 tahun, sementara rata-rata AHH perempuan sebesar 75,82 tahun. Adanya kesenjangan dalam capaian indikator tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya gaya hidup, lingkungan, kondisi psikis dan lain-lain.

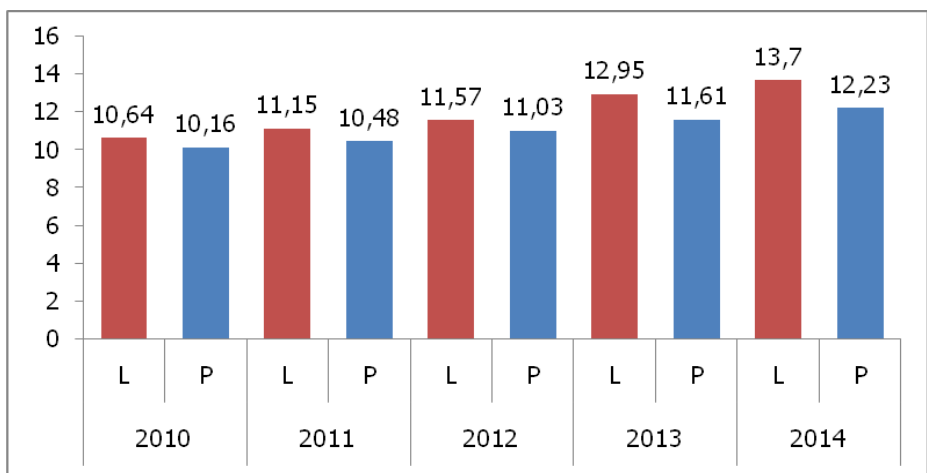


Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2015

Gambar 2.20.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014

b) Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Angka HLS Perempuan di Kabupaten Grobogan lebih tinggi dibandingkan dengan angka HLS laki-laki. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan angka HLS selama tahun 2010-2014. Pada tahun 2014, Angka HLS perempuan sebesar 12,23 tahun, sementara angka HLS laki-laki sebesar 13,70 tahun. Perkembangan Angka HLS Kabupaten Grobogan selama periode 2010 – 2014 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



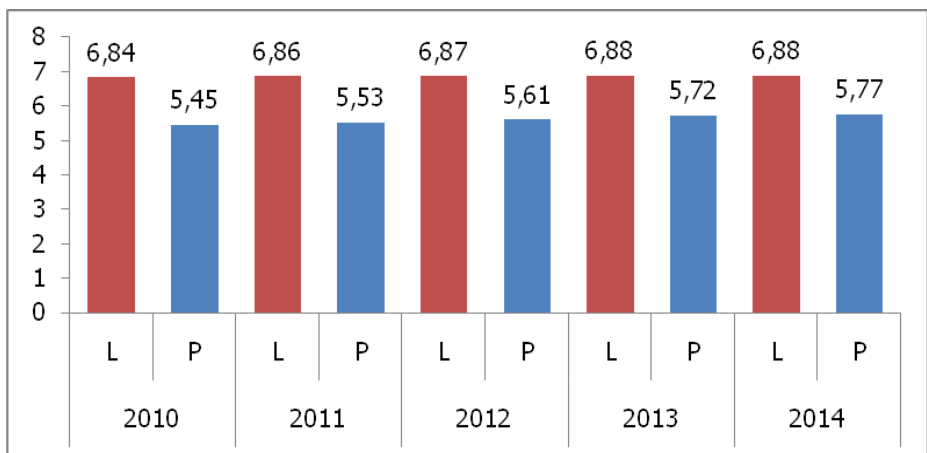
Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2015

Gambar 2.21.
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki dengan Perempuan di Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014

c) Rata-Rata Lama Sekolah

Dilihat dari rata-rata capaian per tahun selama periode 2010 – 2014, rata lama sekolah perempuan masih lebih rendah dari rata-rata lama sekolah laki-laki. Rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 5,62 tahun, sedangkan rata-raa lama sekolah laki-laki sebesar 6,87. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki menjadi salah satu faktor rendahnya rata-rata lama sekolah pendidikan perempuan dibandingkan rata-rata lama sekolah laki-laki. Tingkat pendidikan yang rendah akan berdampak pada terbatasnya pilihan bagi perempuan untuk berupaya dan terlibat dalam pemenuhan hak dalam berbagai bidang.

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

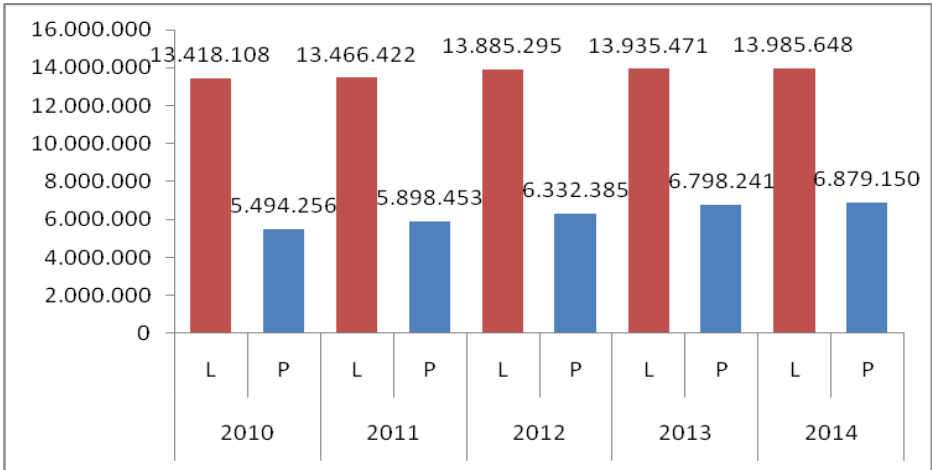


Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2015

Gambar 2.22.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki dengan Perempuan di Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014

d) Pengeluaran Perkapita

Pada indikator pengeluaran perkapita, terjadi ketimpangan capaian yang sangat besar antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari capaian dalam kurun waktu 5 tahun (2010 -2014). Seperti yang terlihat pada tahun 2014, pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp 13.985.648 ribu, sedangkan perempuan sebesar Rp 6.879.150 ribu. Perkembangan pengeluaran perkapita Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

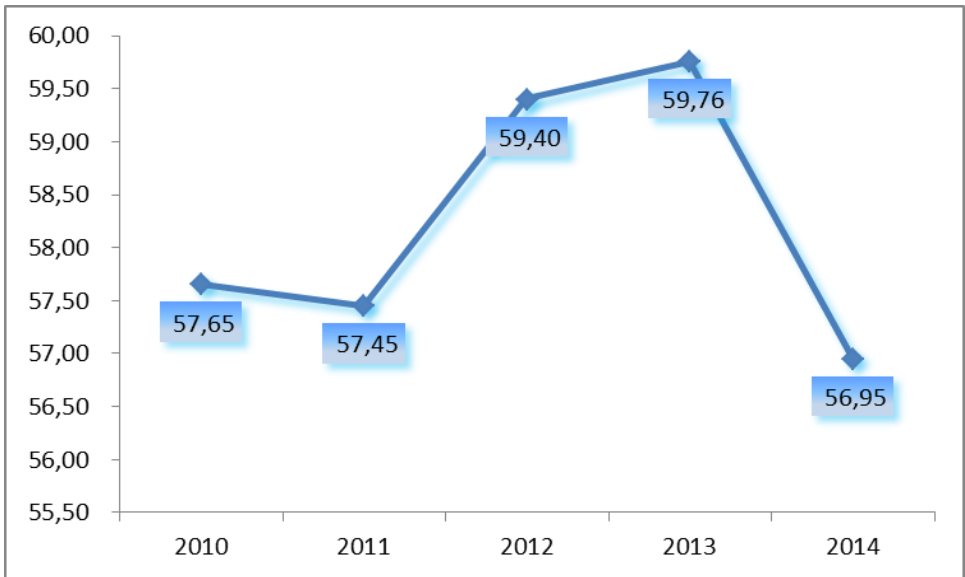


Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2015

Gambar 2.23.
Sumbangan Pendapatan Sekolah Laki-Laki dengan Perempuan (Ribu Rupiah) di Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014

5.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

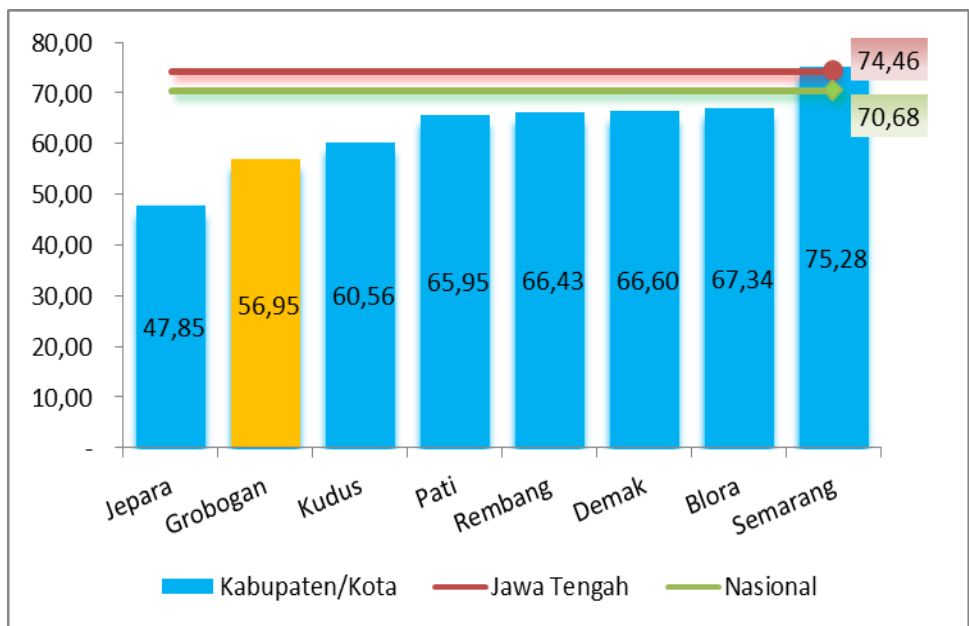
Indeks Pemberdayaan Gender merupakan angka pembentuk IPG yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Pada kurun waktu 2010-2014, capaian IDG Kabupaten Grobogan mengalami penurunan dengan tingkat capaian yang fluktuatif yaitu sebesar 57,65 pada tahun 2010 menjadi 56,95 pada tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2015

Gambar 2.24.
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Grobogan Tahun 2010 – 2014

Jika dibandingkan dengan capaian Kab/Kota sekitar, capaian IDG Kabupaten Grobogan lebih rendah dari capaian Kabupaten Kudus(60,56) dan hanya lebih tinggi dari capaian Kabupaten Jepara (47,85). Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian Kabupaten Grobogan masih lebih rendah. Sementara itu, jika dibandingkan dengan capaian nasional, capaian IDG Kabupaten Grobogan juga masih lebih rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

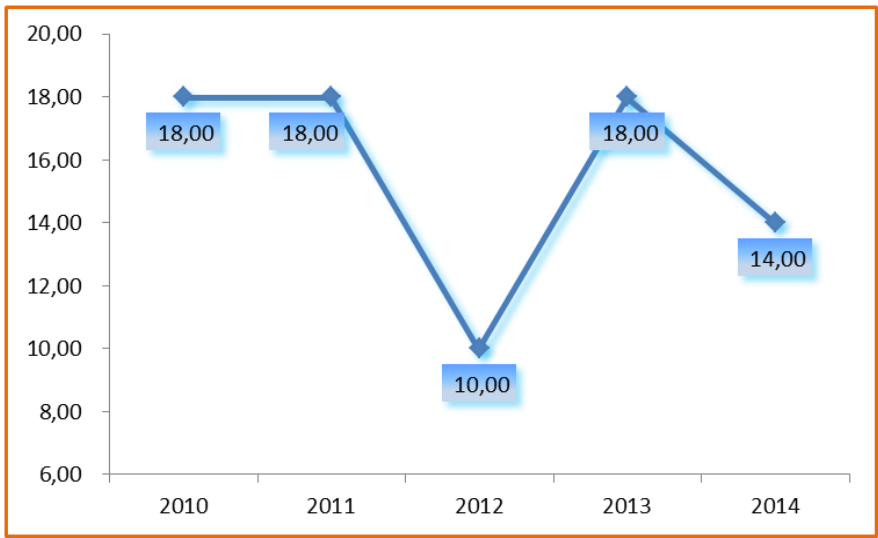


Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2015

Gambar 2.25.
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten
Grobogan dengan Kab/Kota Sekitar dan Prov. Jawa Tengah
Tahun 2014

Sementara itu, indikator pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Keterlibatan Perempuan Di Parlemen, Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi, dan Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja.

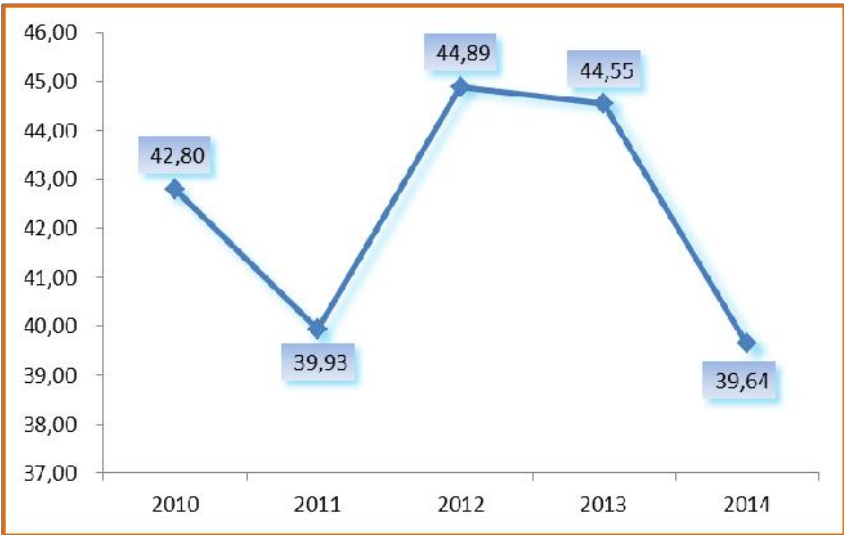
Perkembangan keterlibatan perempuan di parlemen menunjukkan angka yang stabil hampir di setiap tahun kecuali tahun 2012 (turun menjadi 10,00%) dan 2014 (turun menjadi 14,00%). Selama periode 2010 - 2014, keterlibatan perempuan di parlemen adalah sebesar 18,00% pada tahun 2010 dan menurun menjadi 14,00% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sudah mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk berpartisipasi di bidang politik. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2015

Gambar 2.26.
Perkembangan Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)
Kabupaten Grobogan Tahun 2010 – 2014

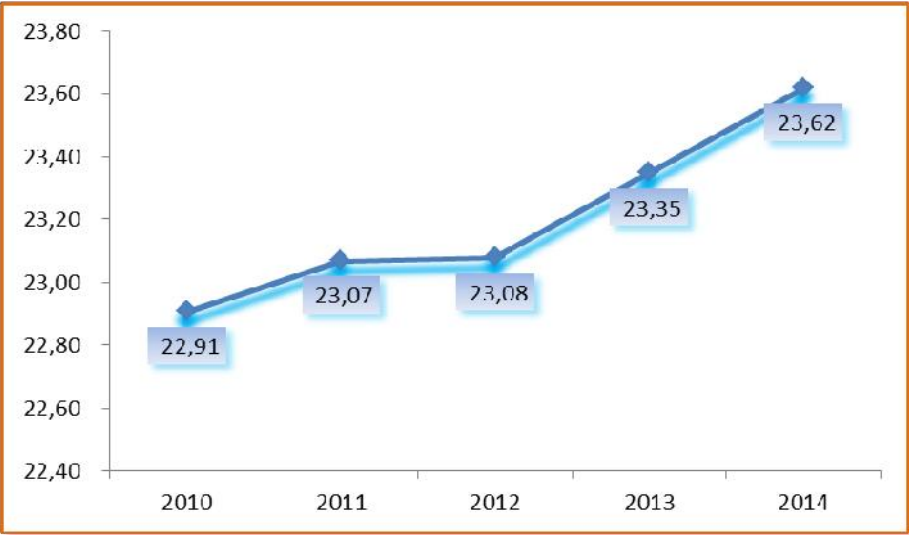
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2010 – 2014), perempuan yang bekerja sebagai manajer, profesional, administrasi dan teknisi perkembangan capaiannya fluktuatif tiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2014, capaiannya menurun dari 44,55% menjadi 39,64%. Namun jika melihat datanya yang hampir mencapai 50%, menunjukkan bahwa perempuan sudah cukup banyak mendapatkan kesempatan dalam bidang perekonomian. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2015

Gambar 2.27.
Perkembangan Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Grobogan Tahun 2010 – 2014

Perkembangan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja di Kabupaten Grobogan menunjukkan adanya peningkatan, dari capaian 22,91% pada tahun 2010 menjadi 23,62% pada tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



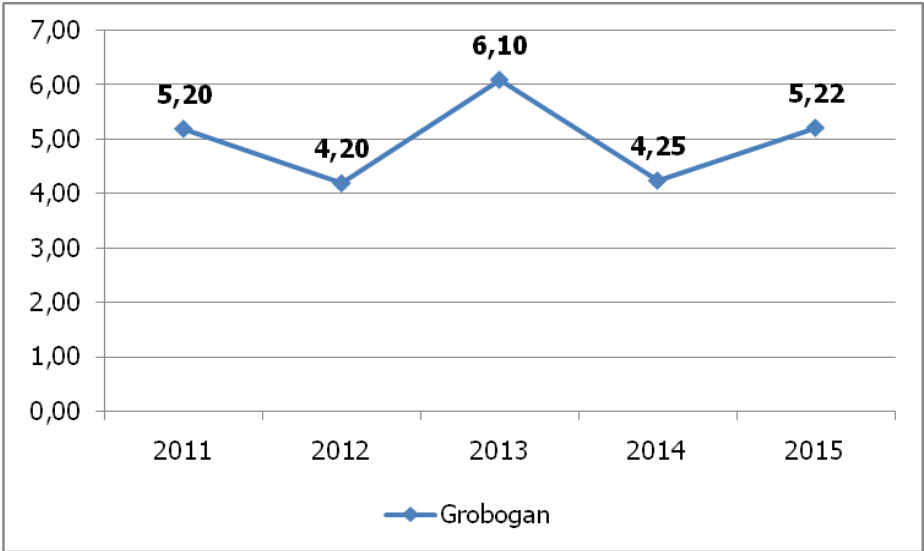
Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2015

Gambar 2.28.
Perkembangan Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Grobogan Tahun 2010 – 2014

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Grobogan, selama periode 2011-2015 kondisinya fluktuatif dengan tren negatif. Selama periode tersebut, terjadi peningkatan TPT yaitu pada tahun 2013

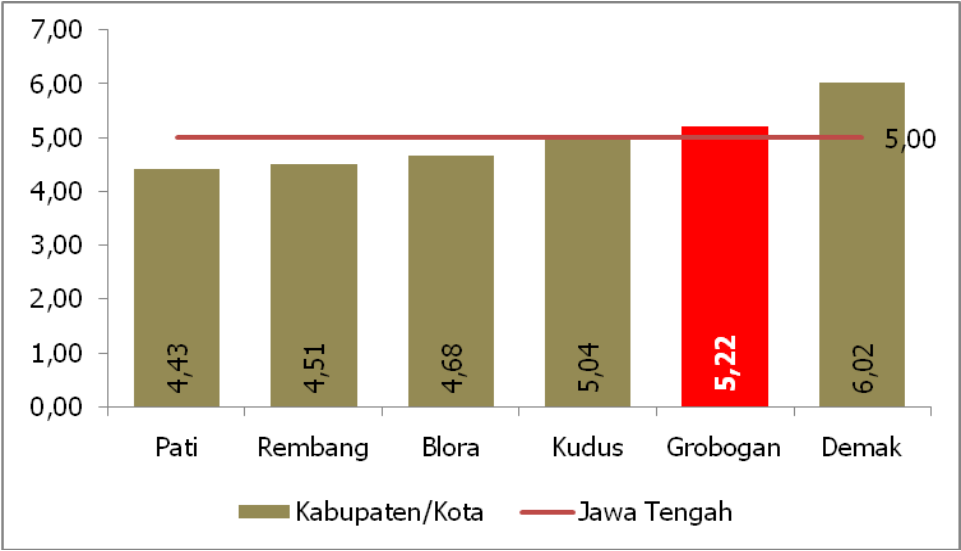
sebesar 6,10% dan tahun 2015 sebesar 5,22%, seperti yang tersaji pada Grafik berikut.



Sumber : BPS Tahun 2016

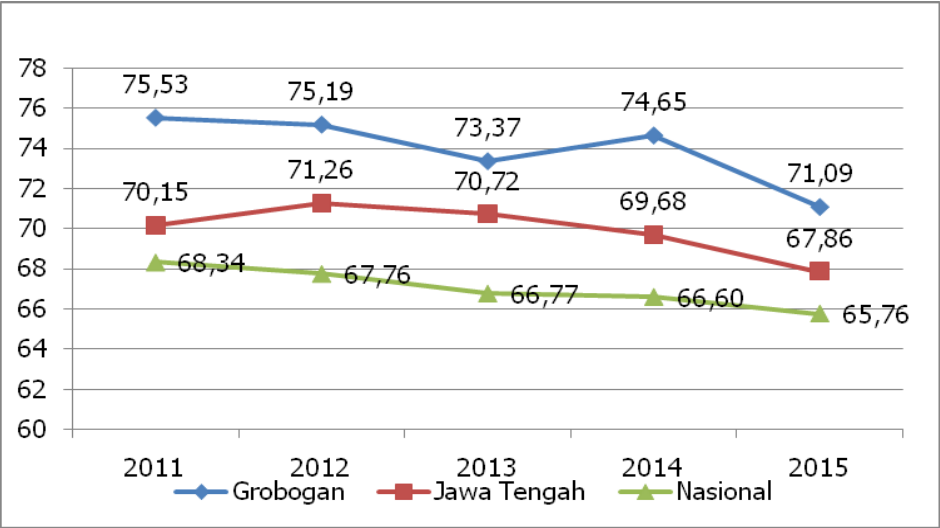
Gambar 2.29.
Perkembangan TPT Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2015

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 sebesar 5,22%. Jika dilihat berdasarkan posisi relatifnya masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata capaian TPT Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,00%. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, TPT Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Pati, Kudus, Rembang dan Belora, hanya lebih baik dari Kabupaten Demak.



Gambar 2.30.
Perbandingan TPT Kabupaten Grobogandengan Wilayah Sekitar Tahun 2015

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 sebesar 74,65% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebesar 73,37%. Namun pada tahun 2015, TPAK Kabupaten Grobogan menunjukkan penurunan menjadi 71,09%. Menurunnya TPAK di Kabupaten Grobogan juga terjadi pada kondisi rata-rata di Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Supply tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami penurunan. Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber : BPS diolah 2016

Gambar 2.31.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Grobogan
Tahun 2011 - 2015

2.2.3. Fokus Seni dan Budaya

1. Seni dan Budaya

Seni dan budaya yang berkembang di Kabupaten Grobogan cukup banyak. Seni dan budaya yang merupakan bagian dari tradisi yang sudah berkembang lama di Kabupaten Grobogan beraneka ragam. Seni dan budaya yang masih ada dan ditampilkan dalam kegiatan-kegiatan pentas seni dan budaya antara lain Asrah Batin, Siram Bendhe Becak, Ande-ande Lumut, Kentrung, Barongan, Babat Mrapen, Cinde Laras, Legenda Bledug Kuwu, Angguk, Tayub, Reog Gondoriyo, Joko Tarub, Barongsai, Adat Penganten dan Kosidah.

Jika dirinci secara keseluruhan berdasarkan kelompok seni, jumlahnya cukup banyak mencapai 1.358 kelompok seni. Dalam rangka

pembinaan terhadap kelompok-kelompok seni tersebut, setiap tahun Kabupaten Grobogan mengirimkan jenis kesenian ke luar daerah. Data terakhir, kelompok kesenian yang dikirim ke luar daerah dalam rangka mengikuti pementasan mencapai sebanyak 7 kali. Selain itu pentas seni dan budaya secara rutin ditampilkan pada kegiatan kirab budaya daerah dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Grobogan.

Tabel 2.10
Perkembangan Kelompok Seni di Kabupaten Grobogan
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kelompok seni daerah	Klp	1.224	1.224	1.224	1.356	1.358
2.	Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah	kali	7	7	7	7	7

Sumber: Isian Data SKPD Disbudparpora Kab. Grobogan, Tahun 2016

2. Olah Raga

Ketercapaian pembangunan dibidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Grobogan ditunjukkan dengan kualitas pembinaan dan prestasi yang dihasilkan. Jumlah kelompok pemuda produktif yang dibina saat ini mencapai 100 kelompok. Dari sisi prestasi, pemuda yang memiliki prestasi ditingkat daerah data terakhir menunjukkan sebanyak 70 pemuda. Sementara itu, atlet Kabupaten Grobogan yang mampu mengharumkan nama daerah dalam ajang pekan olahraga daerah tingkat Provinsi sebanyak 75 orang. Sementara itu sarana pengembangan keolahragaan saat ini di Kabupaten Grobogan tersedia 587 klub olahraga dengan fasilitas 16 gedung olahraga.

Tabel 2.11
Perkembangan Kelompok Olahraga di Kabupaten Grobogan
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Kelompok Pemuda Produktif (KUPP)	Klp	62	71	81	78	100
2.	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	77	66	73	68	70
3.	Jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa Tengah	Orang	69	75,9	119	75	75
4.	Jumlah Klub Olahraga	Klub	587	587	587	587	587
5.	Jumlah gedung olahraga	Gedung	16	16	16	16	16

Sumber : Isian Data SKPD Disporabudpar, Tahun 2016

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam rangka pemberian rangsangan pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani anak usia sejak lahir sampai dengan umur enam tahun, dilakukan pembinaan terhadap anak melalui pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini ini memberikan rangsangan pendidikan kepada anak agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, baik secara formal maupun non formal. Kualitas pengembangan anak usia dini dapat dilihat dari partisipasi anak yang mengikuti Pendidikan anak usia dini (PAUD). Di Kabupaten Grobogan, tingkat partisipasi anak pada PAUD perkembangannya sudah menuju lebih baik. Tahun 2015, Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah mencapai 61,51%, trennya meningkat dalam lima tahun terakhir jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 sebesar 38%.

Meningkatnya APK PAUD di Kabupaten Grobogan tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan, terutama dari sisi keterjangkauan akses. PAUD saat ini tidak hanya ada di wilayah perkotaan, tetapi saat ini sudah banyak didirikan desa-desa melalui pos PAUD. Untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD, pemerintah melakukan penilaian secara kelembagaan melalui sistem akreditasi. Akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya. PAUD terakreditasi di Kabupaten Grobogan saat ini baru mencapai 5,08%, kondisinya sama dari tahun 2011-2015. Dalam rangka pencapaian PAUD terakreditasi, diperlukan upaya-upaya lebih optimal lagi agar pelayanan PAUD semakin baik.

Tabel 2.12
Kinerja Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	38	38,66	50,02	56,89	61,51

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
2	Persentase PAUD terakreditasi	%	-	-	-	-	5,08

Sumber : Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

b. Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pendidikan dasar 9 tahun merupakan wajib belajar bagi masyarakat melalui program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yaitu selama 9 tahun. Pendidikan wajib 9 tahun ini untuk mendorong pada pencapaian pemerataan pendidikan minimal setara SMP/MTs. Di Kabupaten Grobogan angka partisipasi sekolah pada pendidikan dasar sudah mencapai 96,74% ditahun 2015. Tren partisipasi sekolah pada pendidikan dasar menunjukkan kinerja meningkat dari tahun 2011-2015.

Kenaikan partisipasi sekolah pada pendidikan dasar di Kabupaten Grobogan tidak terlepas dari meningkatnya kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) ditingkat SD/MI dan SMP/MTs. Untuk APK SD/MI, ditahun 2015 sudah mampu mencapai 106,65% menurun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 dan 2014. Walaupun dari sisi APK SD/MI menurun, namun dari sisi APM SD/MI menunjukkan peningkatan dari 89,35% ditahun 2011 menjadi 97,69% ditahun 2015. Kenaikan partisipasi sekolah ditingkat SD/MI juga ditunjang dengan meningkatnya angka kelulusan siswa dan menurunnya angka putus sekolah ditingkat SD/MI.

Tren meningkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar dipengaruhi juga oleh prestasi pendidikan ditingkat SMP/MTs. APK SMP/MTs trennya menunjukkan peningkatan dari tahun 2011 sebesar 94,35% menjadi sebesar 100,03 pada tahun 2015. Kinerja APK SMP/MTs menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dilihat pada pencapaian APM SMP/MTs, trennya juga meningkat setiap tahunnya, sama dengan APK SMP/MTs yang meningkat. Angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Grobogan yang semkain menurun memberikan kontribusi pada kenaikan angka partisipasi sekolah.

Peningkatan partisipasi sekolah pada pendidikan dasar juga tidak terlepas dari meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dengan kondisi ditahun 2015 mencapai sebesar 97,83%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.12a.
Kinerja Partisipasi Sekolah Pada Pendidikan Dasar 9 Tahun
di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar	%	81,08	82,26	93,10	94,31	96,74
2	APK SD/MI/Paket A /SDLB	%	102,56	103,08	115,41	112,06	106,65
3	APK SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	94,35	97,60	99,46	101,28	100,03
4	APM SD/MI/Paket A/SDLB	%	89,35	95,09	95,15	96,56	97,69
5	APM SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	73,31	80,74	84,05	86,87	87,06
6	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,06	0,06	0,03	0,05	0,03
7	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,37	0,25	0,20	0,14	0,01
8	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	100
9	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	98,52	100	100	100	100
10	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	%	6,25	6,25	6,35	6,80	7,05
11	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs	%	65,38	65,38	73,04	69,13	50,39
12	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	92,08	94,86	95,57	96,39	97,83
13	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	56,93	60	68,21	72,75	72,78

Sumber : Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana pada pendidikan dasar, ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah di Kabupaten Grobogan sudah mencukupi dengan kondisi kinerja 100%. Namun yang masih menjadi perhatian serius adalah pada kondisi sarana dan prasarana pendidikan SD/MI. Tahun 2015, ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik hanya sebesar 55,69% sementara untuk ruang kelas SMP/MTs kondisi baik sudah lebih baik dibandingkan SD/MI dengan capaian 91,42%. Kondisi perkembangan ketesediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12b.
Kinerja Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar di
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	22,79	25,99	35,42	48,15	55,69
2	Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	18,96	27,81	69,98	80,80	91,42
3	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	98,32	100	100	100	98,32

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
4	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah	%	100	100	100	100	100
5	Rasio guru/murid per kelas rata-rata :						
	• SD	%	25,23	25,75	26,23	11,44	22,74
	• SMP	%	24,35	24,71	25,35	28,99	29,74

Sumber : Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

c. Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK pada tahun 2015 di Kabupaten Grobogan adalah sebesar 67,35%, menjadi capaian tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA pada tahun 2015 adalah sebesar 51,72%. Dalam lima tahun terakhir, APM SMA/SMK/MA menunjukkan fluktuatif dengan capaian masih termasuk kategori rendah. Perhatian tertuju pada anak putus sekolah ditingkat SMA/SMK/MA yang mencapai 2,34%. Rata-rata nilai ujian nasional siswa SMA/MA sebesar 55,24% lebih rendah dibandingkan dengan Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) siswa SMK yang mencapai 65,35%.

Perkembangan kondisi pendidikan menengah di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Perkembangan Kinerja Pendidikan Menengah
di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka partisipasi kasar SMA sederajat	%	28,92	47,32	56,70	63,79	67,35
2	Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA	%	44	33,87	33,93	41,02	51,72
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0,77	0,54	0,47	2,34	2,34
3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	%	96,46	100	100	100	100
4	Rata-rata nilai ujian nasional siswa SMA/MA	%	50,68	51,68	66,93	52,68	55,24
5	Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) siswa SMK	%	71,03	70,13	75,03	60,82	65,35

Sumber : Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

d. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,

penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Di Kabupaten Grobogan saat ini penduduk usia >15 tahun melek huruf 91,87%, lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 90,41%. Namun dilihat dari kinerja selama periode lima tahun tersebut, menunjukkan kinerja yang relatif kecil. Sementara itu pendidikan non formal yang ada saat ini di Kabupaten Grobogan berupa lembaga kursus yang memiliki ijin pada tahun 2015 baru sebesar 25%. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana lembaga kursus yang sudah berijin pada tahun 2014 sudah mencapai 45%. Sebagian besar lembaga kursus yang belum memiliki ijin ditengarai baru terdaftar saja namun perijinan resminya belum diselesaikan. Sementara itu pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran sudah sangat baik. Saat ini pusat kegiatan masyarakat secara sarana dan prasarana telah 100% terpenuhi.

Tabel 2.14
Perkembangan Perijinan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Ketersediaan Sarana Prasarana Pembelajaran Pada PKM di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penduduk usia >15 tahun melek huruf	%	90,41	90,94	91,78	91,82	91,87
2.	Lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	%	86	32	45	45	25
3.	Persentase penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C	%	5,08	5,12	5,14	5,18	5,22
4.	Pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran	%	77	50	52	75	100

Sumber : Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

e. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau

madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pada prinsipnya MBS bertujuan untuk memberdayakan sekolah dalam menetapkan berbagai kebijakan internal sekolah yang mengarah pada peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara keseluruhan.

Di Kabupaten Grobogan, dalam rangka meningkatkan keberdayaan sekolah, saat ini semua tingkatan baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sudah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik. Kondisi ini dihadapkan dapat dipertahankan dengan baik. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Perkembangan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Menerapkan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dengan Baik
di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Prosentase Sekolah melaksanakan MBS dengan baik	%	85,12	85,54	88,56	97,19	98,51

Sumber : Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

f. Ketersediaan Perpustakaan

Di Kabupaten Grobogan, SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar termasuk kategori rendah. Saat ini SD/MI yang perpustakaan sesuai standar baru mencapai 53%. Sedangkan SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar baru mencapai 60%. Dengan demikian, masih banyak sekolah baik SD/MI maupun SMP/MTs yang belum memiliki perpustakaan sesuai standar sebagai sarana mengembangkan bakat, minat dan kegemaran siswa.

Tabel 2.16
Perkembangan Ketersediaan Perpustakaan Sesuai Standar
SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar	%	40	31,33	40	47,51	53

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
2.	SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	%	75	63,11	63	59,02	60

Sumber : Dokumen LKjIP Tahun 2016

g. Lulusan SMK diterima di Dunia Kerja

Persentase lulusan SMK di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 yang diterima di dunia kerja sesuai keahliannya mencapai 83%. Tingkat penerimaan siswa SMK di dunia kerja berdasarkan keahliannya setiap tahun meningkat. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2014 sebesar 82,93% dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013 sebesar 18,5%.

Tabel 2.17
Perkembangan Lulusan SMK yang Diterima di Dunia Kerja Sesuai Keahliannya di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya	%	8	11	18,5	82,93	83

Sumber : Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

h. Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Salah satu indikator penunjang untuk menciptakan hasil lulusan sekolah berkualitas adalah keberadaan guru sebagai pengajar disekolah. Pada tahun 2015, di Kabupaten Grobogan guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4 sebesar 94,34%, Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 52,58%. Sementara itu secara terpisah Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 87,50% sedangkan Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sudah lebih baik dari SD/MI dengan capaian sebesar 92,95%. Perkembangan kualifikasi pendidik pada semua jenjang pendidikan dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.18
Perkembangan Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memenuhi Kualifikasi di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	62,39	75,83	80,54	88,94	94,34

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
2	Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	19,32	30,21	33,21	41,13	52,58
3	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	62,42	76,32	80,51	82,02	87,50
4	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	80,41	81,36	86,49	88,18	92,95

Sumber : Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan di Kabupaten Grobogan dapat diukur dari capaian 50 indikator. Akan tetapi, indikator utama urusan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Persentase Balita Gizi Buruk dan Angka Kematian Ibu.

Angka kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Grobogan meningkat dari 8,78 per 1.000 KH pada tahun 2011 menjadi 17,44 per 1.000 KH pada tahun 2015. Peningkatan capaian ini perlu diwaspadai karena melihat tren perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut, ada tren peningkatan capaian. Penyebab utama kematian bayi secara langsung selama ini karena asfiksia, BBLR, kelainan kongenital, penyakit jantung bawaan, pneumoni. Faktor di luar kesehatan ibu dan bayi, terjadinya kematian bayi baru lahir adalah karena kondisi masyarakat seperti pendidikan, sosial ekonomi dan budaya. Faktor keterlambatan dalam mengambil keputusan, terjadinya keterlambatan sampai di tempat pelayanan dan terlambat mendapatkan pertolongan yang adekuat.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Grobogan cukup tinggi yaitu sebesar 149,92 per 100.000 KH pada tahun 2015. Meskipun sudah menurun dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 188,69 per 100.000 KH, angka ini meningkat dari capaian pada tahun 2011 yang sebesar 114,03 per 100.000 KH. Capaian AKI di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 melebihi target MDGS 2015 yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu yang paling sering adalah : Eklamsia Berat dan perdarahan. Terjadinya kematian ibu biasanya terkait dengan kurangnya akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Capaian kinerja indikator persentase balita gizi buruk mengalami peningkatan dari 0,03% pada tahun 2011 menjadi 0,05% pada tahun 2015.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja penurunan capaian indikator belum efektif. Dalam upaya menurunkan persentase balita gizi buruk ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan sarana kebersihan, mempromosikan pemberian ASI yang lebih baik, termasuk pemberian makanan pendamping ASI dan pemantauan terhadap status gizi anak-anak.

Selain balita dengan gizi buruk, persentase prevalensi balita gizi kurang cukup tinggi meskipun telah menunjukkan kinerja yang baik yang ditunjukkan dengan penurunan capaian sebesar 2% pada tahun 2014. Akan tetapi, melihat capaian per tahunnya, capaiannya termasuk fluktuatif. Capaian pada tahun 2015 meningkat dari capaian pada tahun berikutnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka prevalensi balita dengan gizi kurang antara lain dengan pemberian makanan tambahan pendamping ASI dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan yang dilakukan di posyandu.

Perkembangan penyakit di Kabupaten Grobogan dapat dilihat dari TBC BTA, DBD, dan HIV AIDS. Penemuan TBC BTA dari tahun 2011 – 2014 cenderung meningkat namun pada tahun 2015 mengalami penurunan cukup signifikan hanya 29,30% kondisi ini jauh dari target nasional (65%). Sedangkan prevalensi TB per 100.000 penduduk mengalami penurunan dari 74 menjadi 36,33.

HIV AIDS merupakan penyakit yang sangat sulit untuk terdeteksi perkembangannya, penyakit yang ditemukan saat ini bukan merupakan kondisi yang nyata di masyarakat. Masih banyak masyarakat yang memiliki potensi terjangkit HIV AIDS belum memiliki kesadaran untuk melakukan pemeriksaan HIV AIDS. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun dari tahun 2011 – 2015 mengalami peningkatan dari 0,004% meningkat menjadi 0,005%.

Perkembangan capaian indikator utama pada urusan bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran Hidup	Per 1.000 KH	8,78	10,60	14,14	17,82	17,44
2.	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran Hidup	Per 1.000 KH	9,12	11,61	15,72	19,53	18,99
3.	Persentase balita gizi buruk	%	0,03	0,03	0,05	0,06	0,05
4.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 KH	114,03	150,12	101,10	188,69	149,92

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
5.	Kasus kematian ibu melahirkan	Kasus	26	34	22	43	33
6.	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	58,96	67,00	74,00	100,00	100,00
8.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin yang sakit	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	Jumlah kasus keracunan makanan	Kasus	-	29	33	4	28
10.	Persentase Penggunaan obat rasional di Puskesmas	%	-	-	-	-	60,00
11.	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	-	-	-	89,92	88,03
12.	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Rasio posyandu per satuan balita	per 100 Balita	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
14.	Persentase Posyandu purnama dan mandiri	%	48,83	53,83	47,15	48,8	49,17
15.	Prevalensi balita gizi kurang	%	1,71	8,7	9,4	2	7,6
16.	Persentase Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	73,90	78,60	82,30	82,30	82,81
18.	Cakupan pelayanan anak balita	%	73,78	76,32	77,36	80,12	80,07
19.	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	17,56	20,54	21,57	63,88	72,89
20.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	98,40	97,00	100,00	100,00	100,00
21.	Cakupan RT mengkonsumsi garam beryodium	%	56,5	66,3	63,2	70,5	67,7
22.	Persentase Balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	%	56,01	75,33	81,85	96,2	90,35
23.	Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi	%	82,80	84,90	89,60	89,13	95,50
24.	Persentase Balita dengan Kekurangan Energi dan Protein (KEP)	%	0,50	0,63	0,45	0,23	0,76
25.	Persentase BBLR	%	3,39	3,47	4,02	4,99	3,78
26.	Cakupan Rumah Sehat	%	64,18	65,8	65,88	67,86	79,59
27.	Cakupan penggunaan air bersih	%	50,00	55,00	55,00	60,00	65,00
28.	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM	%	30,00	50,00	70,00	90,00	100,00
29.	Persentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	%	86,10	98,80	98,10	97,65	100,00
30.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)	%	39,82	40,67	34,85	45,11	29,30
31.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (Succes Rate)	%	79,23	80,50	87,85	89,30	95,74
32.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun	%	0,004	0,006	0,01	0,01	0,005
33.	Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	%	20,00	35,00	25,00	80,60	53,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
34.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	70,00	75,00	75,00	80,00	80,00
35.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	70,00	75,00	75,00	80,00	80,00
36.	Cakupan Puskesmas Terakreditasi	%	-	-	-	-	3,00
37.	Persentase Puskesmas yang telah memiliki standar Pelayanan Publik (SPP)	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
38.	Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 pddk	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
39.	Persentase tenaga kesehatan mempunyai izin	%	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
40.	Persentase Puskesmas non rawat inap dan rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
41.	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42.	Jumlah Rumah Sakit Type C yang dibangun	unit	-				
43.	Cakupan puskesmas	%	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
44.	Cakupan pembantu puskesmas	%	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
45.	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
46.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 1.000 pddk	0,2	0,2	0,2	0,2	0.23
47.	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan	%	17,5	10,44	63,65	34,37	49,77
48.	Pelayanan kesehatan balita	%	73,78	70,75	100,00	80,12	80,07
49.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	97,87	98,47	100,00	99,99	99,95
50.	Cakupan kunjungan bayi	%	92,48	97,16	97,84	98,16	97,82
51.	Persentase kunjungan neonatl pertama (KN1)	%	100,00	98,90	99,52	99,34	97,00
52.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,91	79,70	88,46	88,40	93,78
53.	Cakupan pelayanan nifas (KF)	%	94,14	98,84	98,61	98,93	99,40
54.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	34,70	4,86	62,48	81,30	93,44
55.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	60,96	72,20	95,21	100,00	79,28
56.	Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	-	-	-	-	-
58.	Persentase penduduk yang telah mengetahui program JKN	%	-	-	-	53,3	54,29
59.	Persentase Puskesmas yang memublikasikan laporan pemanfaatan BOK di Papan Pengumuman Puskesmas atau Kantor Kecamatan	%	-	-	-	80,00	80,00

Sumber : Isian Data Dinas Kesehatan, Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja urusan kesehatan yang telah mencapai 100% ada beberapa indikator, yaitu : Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan, Cakupan Desa Siaga Aktif, dan Persentase KLB Diare dapat ditangani < 24 jam.

Upaya pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap indeks kepuasan masyarakat. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 telah mencapai 96%, mengalami peningkatan yang sangat baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kepuasan masyarakat tersebut menunjukkan adanya perbaikan dari segi pelayanan maupun peningkatan sarana dan prasarana.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Lainnya Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	BOR (Bed Occupany Ration)	%	65	69,30	73,8	66,47	71,30
2.	AVLOS (Average Leght of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	Hari	4,4	3	4,5	4	5
3.	TOI (turn Over Interval)	Hari	1,9	3	1,3	2	1
4.	BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	Kali	64	76	25	71	72
5.	NDR (Net Death Rate)	%	13	11	16	21	22
6.	GDR (Gross Death Rate) Jumlah semua kematian	%	34	33	35	37	41
7.	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	%	50	50	90	90	96

Sumber : Isian Data RSUD Soedjati SoemodiardjoTahun 2016

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi jalan di Kabupaten Grobogan selama 5 tahun terakhir (2011-2015) menunjukan kondisi yang kurang baik. Tahun 2015 kondisi jalan baik di Kabupaten Grobogan hanya mencapai 40,68%. Sementara itu untuk kondisi jembatan di Kabupaten Grobogan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi jalan. Pada tahun 2015 kondisi jembatan baik telah mencapai 100%. Sementara itu persentase terhubungnya pusat pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten kota telah mencapai 100%.

Kondisi bangunan penampung air di Kabupaten Grobogan sudah cukup baik, hal ini ditunjukkan dari panjang saluran irigasi kondisi baik sampai dengan tahun 2015 mencapai 82%.

Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun demikian capaian ini termasuk dalam kategori rendah. Sampai dengan tahun 2015 persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman hanya mencapai 75%. Penduduk yang terlayani air sistem perpipaan sampai dengan tahun 2015 hanya mencapai 7,30%. Sementara itu untuk persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai di Kabupaten Grobogan juga termasuk rendah, tahun 2011 sebesar 60%, tahun 2015 meningkat menjadi 64%.

Cakupan pelayanan sistem drainase mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, tahun 2011 sebesar 30%, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 40,00%. Sementara itu untuk persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam lebih dari 2 kali setahun, tahun 2011 sebesar 18%, pada tahun 2015 meningkat menjadi 34%.

Pelayanan penanganan sampah di Kabupaten Grobogan belum optimal, kondisi ini dapat dilihat dari persentase pengurangan sampah diperkotaan yang menunjukkan persentase yang rendah dimana tahun 2011 sebesar 3,75%, tahun 2015 kemampuan pengurangan sampah hanya 4,75%. Penanganan sampah yang belum optimal juga terlihat dari persentase pengangkutan sampah, dimana capaian kinerja sampai dengan tahun 2015 sebesar 30%.

Penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Grobogan menunjukkan peningkatan. Persentase luas bangunan / gedung yang dibangun pada wilayah strategis dan cepat tumbuh, tahun 2011 sebesar 20%, meningkat menjadi 30%.

Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital selama 5 tahun terakhir hanya mencapai 5%. Perkembangan capaian indikator pada urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	27,38	30,32	31,63	38,09	40,68
2.	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100
3.	Tingkat kualitas jalan lingkungan (jalan tanah menjadi perkerasan paving blok)	%					40
4.	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.	% penduduk	18	22	26	30	34
5.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	% genangan	58	54	50	46	42
6.	Cakupan pelayanan Sistem Drainase						40
7.	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong terbangun						1,2
8.	Persentase turap/talud/bronjong di wilayah jalan penghubung kewenangan kabupaten terbangun	%	-	4,8	12,23	35,81	42,79
9.	Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	%	12,76	13,43	13,14	14,88	14,68
10.	Tingkat ketersediaan data jalan dan jembatan yang up to date	%	-	-	-	-	100
11.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	-	-	-	-	100
12.	Rasio Jaringan Irigasi	Km/Ha	-	-	-	-	0,017
13.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	82,00
14.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	%	-	-	-	-	81,4
15.	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	60	61	62	63	64
16.	Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	%	68,2	69,9	71,6	73,3	75
17.	Persentase wilayah bebas banjir	%	-	-	-	-	65
18.	Durasi banjir untuk lokasi	hr	-	-	-	-	15
19.	Lokasi banjir	Desa/ Kel	-	-	-	-	10
20.	Persentase pengurangan sampah diperkotaan	%	3,75	4	4,25	4,5	4,75
21.	Persentase Pengangkutan sampah	%	22	24	26	28	30

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
22.	Persentase pengoperasian TPA	%	40	42	44	47	50
23.	persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	%	-	-	-	-	85
24.	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	5	5	5	5	5
25.	Persentase kawasan memiliki RTBL	%	-	-	-	-	0
26.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	-	-	-	-	25
27.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	-	90,57	77,33	98,45	90,12
28.	LP2B	Ha	71.948	71.948	71.948	71.948	71.948
29.	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	-	-	-	-	14
30.	Persentase Kawasan memiliki RTBL	%	-	-	-	-	0
31.	Tersedianya air embung untuk irigasi - pertanian	m ³					110.676
32.	Persentase Luas Bangunan / Gedung yang dibangun pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	%	20	22,5	25	27,5	30
33.	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	10	11	12	13	14
34.	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	-	-	-	-	20

Sumber : Data Isian SKPD Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Dinas Pengairan Kab. Grobogan, Tahun 2016

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Grobogan tahun 2011 sebesar 56%, meningkat tahun 2015 sebesar 58%. Cakupan rumah layak huni yang terjangkau di Kabupaten Grobogan masih rendah, tahun 2011 sebesar 15,00%, tahun 2015 meningkat menjadi 25%. Sementara itu cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum tahun 2011 sebesar 56%, meningkat menjadi 58% tahun 2015.

Penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan belum optimal. Kondisi ini terlihat dari persentase Berkurangnya Permukiman Kumuh di Perkotaan tahun 2011 sebesar 0,09%, tahun 2015 meningkat menjadi 0,054%. Perkembangan capaian indikator pada urusan bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan permukiman
Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase berkurangnya kawasan kumuh terhadap luas kawasan kumuh yang ditetapkan SK Bupati.	%	0,090	0,081	0,072	0,063	0,054
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	56	56,50	57	57,50	58
3	Cakupan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	15,0	17,50	20,0	22,50	25,0
4	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	unit	-	-	-	-	154.828
5	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum	%	56	56,50	57	57,50	58
6	Persentase ketersediaan PJU	%	28	36	44	52	60
7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dikabupaten/Kota	%	11,70	11,70	15,34	21,38	27,28
8	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	%	35,71	35,71	35,71	44,11	45,45
9	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	0	0	0	0	0
10	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	%	11,70	21,05	21,05	21,05	26,31

Sumber : Data Isian Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Grobogan, Tahun 2016

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Grobogan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada dunia usaha/dunia industri dan masyarakat pada umumnya. Wilayah Kabupaten Grobogan yang cukup strategis di jalur perekonomian dan transportasi bagian tengah antara Semarang – Purwodadi dan Blora, tentunya banyak hal yang bisa

mempengaruhi kondisi ketenteraman dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Grobogan secara umum cukup baik dan kondusif bagi pembangunan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan ketertiban umum melalui patroli tramtibum rata-rata 3 kali sehari di kawasan perkotaan dan Siskamling di masing-masing desa/kelurahan. Patroli yang pemantauan dan penyelaesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam namun belum dapat menjangkau seluruh wilayah kecamatan. Hambatan terkait dengan jangkauan patroli Satpol PP adalah terbatasnya jumlah personil Satpol PP yang baru mencakup 67% dalam menjangkau pengamanan patroli, terbatasnya sarana pendukung untuk menjangkau 19 kecamatan dan luas wilayah sebesar 1.975,86 Km2. Demikian pula dengan penegakan perda dan perkada sampai dengan pada tahun 2015 baru tercapai 61%. Belum optimalnya penegakan perda perkada dan penyelesaian pelanggaran K3 selain disebabkan terbatasnya jumlah Satpol PP juga terbatasnya jumlah personil PPNS selaku penyidik pelanggaran perda/ perkada yang terbatas.

Capaian kinerja urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	40	48	53	58	61
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	35	38	43	47	50
3.	Persentase cakupan patroli petugas Satpol PP	%	54	54	55	59	67
4.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	0,38	0,38	0,38	0,38	1,16
5.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	/10.000	3	3	4	4	4
6.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	orang	240	245	260	280	300
7.	Jumlah peserta kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme	Keg					40
8.	Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada	Lembag a	30	30	45	45	45

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Ormas, LSM dan OKP						
9.	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum						65,88
10.	Prosentase antisipasi konflik sosial						100
11.	Persentase wilayah rawan bencana yang telah dipetakan tingkat kerawannya	%	-	-	33,33	33,33	33,33
12.	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang kebencanaan	%	-	-	0,027	0,044	0,061

Sumber : Data Isian SKPD Satpol PP dan Kesbangpolinmas Kab. Grobogan, Tahun 2016

Sementara itu pada pelayanan kebencanaan, upaya pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam melalui pemetaan wilayah rawan bencana menunjukkan tingkat cakupan wilayah yang dipetakan pada tahun 2015 sebesar 33,33%. Sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana terhadap masyarakat rawan bencana menunjukkan masih minim, tahun 2015 masyarakat yang ada di wilayah rawan bencana baru 0,061%. Pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada tahun 2015 tercapai 20%, menunjukkan kinerja yang membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indikator kinerja capaian pada bidang penanggulangan bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Indikator Kinerja Pelayanan Penanggulangan Bencana
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase wilayah rawan bencana yang telah dipetakan tingkat kerawannya	%	-	-	33,33	33,33	33,33
2	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang kebencanaan	%	-	-	0,027	0,044	0,061
3	Jumlah pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	Kali	-	-	4	5	5
4	Cakupan dokumen penanggulangan bencana	%	-	-	0	0	100
5	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	%	-	-	100	100	100
6	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	-	-	10	15	20

Sumber : Isian data BPBD Kabupaten Grobogan, 2016

6. Urusan Sosial

Kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Pasal 34 ayat (1). Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Urusan Sosial yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari 6 sub bidang, yaitu (1) Pemberdayaan Sosial; (2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; (3) Rehabilitasi Sosial; (4) Perlindungan dan Jaminan Sosial; (5) Penanganan Bencana; dan (6) Taman Makam Pahlawan. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dalam menangani PMKS sudah cukup baik namun hasilnya masih belum optimal. Persentase (%) PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial dalam kondisi fluktuatif, terendah ada pada tahun 2012 dengan 27,52% dan tertinggi ada pada tahun 2015 dengan 63,3%. Sementara Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar terus mengalami perbaikan, tahun 2011 baru sebesar 0,4% meningkat menjadi 23,48% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menangani PMKS. Keseriusan pemerintah dalam menangani PMKS juga bisa dilihat dari capaian Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau

kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penanggulangan bencana sejak tahun 2014 ditangani oleh BPBD. Capaian tahun 2013 tentang Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap tahun 2013 sebesar 50%, capaian ini menurun dibandingkan tahun 2012 dan 2011. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat mengalami peningkatan, tahun 2011 sebesar 50% menjadi 66% pada tahun 2015.

Bagi para penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial perlu diberikan jaminan sosial agar mereka bisa hidup dengan layak, namun capaian dari Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial masih sangat terbatas, tahun 2015 baru sebesar 2,76%. Sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Grobogan terdapat 29 panti sosial dan 78,12% diantaranya telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Capaian indikator Urusan Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sosial
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	46,81	46,98	48,16	58,07	58,45
2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%	37,36	27,52	57,4	40,8	63,3
3.	Persentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	0,4	0,56	1,45	22,59	23,48
4.	Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	5,75	14,25	15	21,66	23,33
5.	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	%	50	50	50	66	66
6.	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	35	25	20	-	-
7.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	1,43	1,9	2,33	2,37	2,76

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
8.	Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	45,23	47,29	59,25	63,32	78,12
9.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Lem baga	33	33	31	24	29
10.	Persentase Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina	%	17,26	17,26	17,26	17,26	18,42
11.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	24	36	46,8	47	100
12.	Persentase anak terlantar yang dibina	%	4,00	4,50	4,50	5,00	5,00

Sumber : Data Isian SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2016

2.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003. Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM bidang ketenagakerjaan, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan merupakan masalah yang sangat kompleks, hal ini dikarenakan masalah tenaga kerja berdimensi sangat luas antara lain mencakup pendidikan, lapangan pekerjaan, ketrampilan, pengangguran, kebutuhan pasar kerja dan aspek lainnya yang melekat pada tenaga kerja. Berkaitan dengan masalah pengangguran dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 sebesar 4,25%. Tingkat pengangguran di Kabupaten Grobogan tersebut relatif besar dan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja akan membebani kehidupan bermasyarakat. Tingkat pengangguran berkaitan erat dengan pencari kerja yang ditempatkan semakin rendah pencari kerja yang ditempatkan maka akan semakin besar

sumbangan terhadap angka pengangguran terbuka, hal ini terbukti persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2015 mencapai 69,48% angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kemudian upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan masih belum optimal, hal ini terbukti tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2015 baru mencapai 44,44%, angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 66,67%, sedangkan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan dan berbasis masyarakat baru mencapai 6,67% dan 63% pada tahun 2015. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 7,78% dengan rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2015 sebesar 72,29% angka ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2013 dan 2011, selanjutnya angka partisipasi angkatan kerja pada tahun 2015 sebesar 96,72% angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 98,99%.

Berkaitan dengan hubungan industrial tenaga kerja, menunjukkan upaya yang cukup serius yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menangani sengketa antara pengusaha dengan pekerja, hal ini dapat dilihat angka sengketa mengalami penurunan mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Selanjutnya permasalahan perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan belum tercapai secara optimal, hal ini terbukti capaian kinerjanya masih berkisar antara 50-66%. Untuk lebih jelasnya gambaran tentang capaian kinerja urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Grobogan
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
A	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						
1	Pencari kerja yang ditempatkan	%	21,77	26,13	30,27	61,24	69,48
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	42,86	66,67	37,5	27,27	44,44
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	76	74	78	75	63
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	-	-	1,8	7,78	6,67

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
B	Peningkatan Kesempatan Kerja						
1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	82,88	97,98	87,05	98,99	96.72
2	Rasio penduduk yang bekerja	%	84,01	73,03	76,91	73,27	72.29
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,20	4,11	6,10	4,25	4,25
C	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						
1	Keselamatan dan perlindungan	%	90	90	95	90	90
2	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	54	63	65	51	50,5
4	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	66	66	66	66	66,17
5	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	8	11	40	50	49,72

Sumber : Data Isian SKPD Dinasosnakertrans Kab. Grobogan, Tahun 2016

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 mengalami perubahan yaitu dengan penambahan sub urusan Kualitas Keluarga. Penambahan urusan ini menunjukkan bahwa ruang lingkup kewenangan urusan ini semakin besar yang berarti bahwa permasalahan kehidupan masyarakat semakin kompleks.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mengamanatkan 5 sub bidang dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Perlindungan Khusus Anak. Amanat ini mengandung konsekuensi yaitu pencapaian keberhasilan kewenangan tercermin dalam program dan kegiatan.

Amanat menjalankan kewenangan ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini adalah mandat untuk melaksanakan pembangunan yang memihak kepada perempuan dan anak khususnya dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender umumnya. Mandat tersebut diperkuat melalui Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005 – 2025, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014 serta RPJMN 2015-2019. Sayangnya meskipun telah banyak ketentuan yang ada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender masih jauh dari harapan.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012 diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA. Selain itu diluncurkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat upaya-upaya mencaai kesetaraan dan keadilan gender. Dalam UU Desa secara eksplisit dinyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan dan pemerintahan desa. UU Desa tersebut mengatur bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Pasal 121 Ayat 1 (sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 6 Tahun 2014) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender, termasuk Badan Kerjasama antar Desa harus mempertimbangkan keadilan gender dalam keanggotaan dari tokoh masyarakat desa.

Kabupaten Grobogan selama ini telah melaksanakan berbagai amanah dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Perencanaan Pembangunan Jangka menengah maupun tahunan belum mengarah pada perspektif gender. Jumlah SKPD yang menyusun PPRG masih terbatas, meskipun capacity building untuk PPRG sering dilaksanakan. Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan PPRG tidak lebih dari 60%.

Kabupaten telah memiliki data gender sejak tahun 2000. Data gender meliputi data gender khusus pendidikan dan kesehatan, mulai level kelurahan. Ada 57 kelurahan yang sudah membentuk profil data gender kelurahan. Berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, Kabupaten masuk dalam kategori kuning yaitu kasus kekerasan yang terjadi rata-rata setiap bulan mencapai 75-100 kasus. Untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu pemerintah Kabupaten Grobogan mendirikan Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) yang tersebar di desa-desa dan kelurahan. Hingga tahun 2015 tercatat sudah ada 273 desa dan tujuh kelurahan di Grobogan yang sudah mempunyai

LPAD. Dengan keberadaan lembaga ini, diharapkan warga tak segan untuk memanfaatkan dan melaporkan jika ada kasus kekerasan terhadap anak.

Selain kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi, Kabupaten Grobogan memiliki masalah pernikahan anak. Banyak anak usia < 18 di Kabupaten Grobogan yang melangsungkan pernikahan, sehingga hak-hak mereka sebagai anak banyak yang terabaikan dan tidak terpenuhi, seperti hak untuk bermain dan juga hak untuk memperoleh pendidikan. Perkawinan usia anak, khususnya pada anak perempuan sangat rentan menjadi penyebab adanya gangguan organ reproduksi yang belum siap. Anak perempuan yang menikah dini membuat mereka kehilangan hak untuk meraih pendidikan sehingga akhirnya tidak memiliki keterampilan. Perkawinan anak telah menyebabkan anak kehilangan hak untuk sekolah, bermain, dan berkreasi.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, usia perkawinan anak perempuan usia 17-18 tahun di Kabupaten Grobogan Tahun 2013 cukup tinggi dengan prosentase 28,55%, berada di bawah Kabupaten Tegal, Pemalang, Banjarnegara, Pati, dan Blora, namun jika dilihat dari Umur Perkawinan Pertama <17 tahun, diketahui bahwa Kabupaten Grobogan berada pada urutan pertama jumlah Perkawinan Usia Anak dengan prosentase 34,95%. Sedangkan jika dilihat dari data BP3AKB Kabupaten Grobogan, jumlah perkawinan usia anak di Grobogan tahun 2012 berjumlah 3.142 kasus mengalami kenaikan menjadi 4.072 kasus di tahun 2014.

Pada tahun 2015, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 110 kasus, tingkat perceraian mencapai 3.225 kasus dan jumlah penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 5 kasus. Sementara itu Kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebanyak 25 kasus, jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS sebanyak 55 kasus dan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak 11 kasus. Sedangkan presentase kelembagaan PUG yang aktif mencapai 50% dengan cakupan ketersediaan lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender 123 lembaga.

Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
Presentase kelembagaan PUG yang aktif	%	-	10	40	46	50
Cakupan ketersediaan lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender	lembaga	31	42	50	75	123
Kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	kasus	12	18	20	23	25
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	46,75	46,76	46,75	46,78	46,70
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	Rupiah	-	-	-	-	6.879.150
Jumlah pernikahan usia anak	Jumlah	4.037	3.142	3.995	4.072	3.170
Angka Perceraian	Kasus	-	-	-	-	3.225
Lembaga aktif dalam peningkatan kualitas keluarga	lembaga					-
Persentase forum anak aktif	persentase	0,1	0,1	0,2	0,2	0,42
Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	43	61	194	175	110
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	Jumlah	12	27	64	43	55
Jumlah layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah	10	10	19	26	22
Jumlah penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Jumlah	11	13	9	9	5
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	Jumlah	11	13	19	18	11
Jumlah layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah	1	1	2	1	1
Jumlah layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah	1	1	2	1	1
Jumlah layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah	1	1	2	8	6
Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Jumlah	1	0	1	0	1

3. Urusan Pangan

Ketahanan pangan mencakup sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi pangan. Ketersediaan energi dan protein

per kapita di Kabupaten Grobogan pada tingkat rumah tangga pada tahun 2014 sebesar 147%. Angka ketersediaan energi dan protein telah melebihi standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke VIII tahun 2004, yaitu untuk ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal/kap/hr, dan ketersediaan protein sebesar 57 gram/kap/hr.

Tahun 2014 terdapat 4 desa yang mengalami keadaan kurang tahan pangan di Kabupaten Grobogan yaitu Desa Kemadohbatur (Tawangharjo), Desa Lebengjumuk dan Desa Sedayu (Grobogan), serta Desa Menawan (Klambu). Dalam rangka antisipasi kerawanan pangan, terdapat sebanyak 96 unit lumbung pangan, dan dikembangkan sebanyak 20 ton desa mandiri pangan. Lumbung pangan ini berfungsi untuk menampung gabah hasil panen masyarakat, kemudian jika musim paceklik tiba, gabah yang ada di lumbung didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga rawan pangan bisa teratasi. Desa mandiri pangan dibangun untuk mengatasi rawan pangan yang selama ini terjadi di beberapa wilayah di Grobogan bagian timur yang bersebelahan dengan Kabupaten Blora dan Pati.

Berkaitan dengan distribusi dan harga pangan, capaian Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah mencapai 100%, dan Stabilitas harga dan pasokan pangan mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga pangan masih dapat dijangkau oleh masyarakat kabupaten Grobogan. Diharapkan kedepan distribusi pangan dapat merata dan harga pangan tetap terjangkau oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kerawanan pangan.

Berkaitan dengan konsumsi pangan, capaian Skor pola pangan harapan baru mencapai 85%. Jenis bahan pangan yang konsumsinya paling tinggi yaitu beras yang merupakan sumber utama karbohidrat, sedangkan bahan makanan yang konsumsinya kurang yaitu bahan makanan yang mengandung protein dan lemak. Ketergantungan masyarakat terhadap beras di Kabupaten Grobogan akan sangat rentan apabila harga beras meningkat. Oleh karena itu perlu ada pengalihan pada bahan pangan non beras yang dapat dijadikan alternatif sebagai pengganti beras.

Secara rinci kinerja urusan pangan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Grobogan
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Ketersediaan energy dan protein per kapita	%	147	156	136	147	143
2.	Penguatan cadangan pangan	%	47,3	52,8	58,5	48,7	85,63
3.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	100	100	100	100	100
4.	Stabilitas harga dan pasokan pangan (ton)	%	100	100	100	100	100
5.	Skor pola pangan harapan (PPH)	skor	81	91	89	82	85
6.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (ton)	%	0	8	90	100	100
7.	Penanganan daerah rawan pangan (lokasi)	%	100	100	100	100	100
8.	Jumlah lumbung pangan	unit	66	70	75	94	96
9.	Jumlah desa mandiri pangan	unit	7	8	11	16	20

Sumber : Data Isian Badan Ketahanan Pangan Kab. Grobogan, Tahun 2016

4. Urusan Pertanahan

Bidang pertanahan adalah merupakan bidang yang cukup sensitif terutama dalam hal penguasaan hak atas tanah. Bentuk dari pengakuan Negara gterhadap kepemilikan tanah adalah dengan diterbitkannya sertifikat. Luas lahan di Kabupaten Grobogan adalah sebesar 197.586 hektar. Dari total lahan tersebut 57,83% di antaranya telah memiliki sertifikat. Sedangkan terkait dengan permasalahan/konflik/kasus sengketa tanah milik negara yang terjadi, selama 5 tahun terakhir tidak ada konflik yang terjadi. Kinerja Urusan Pertanahan bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	49,60	51,10	52,53	54,40	57,83
2	Penyelesaian izin lokasi	buah	21	90	5	5	7
3	Jumlah kasus/konflik sengketa tanah milik negara yang terselesaikan	%	0	0	0	0	0
4	Persentase penyelesaian penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh Pemda	%	100	100	100	100	100

Sumber: Data Isian Setda (Bagian Tapem) Kab. Grobogan, Tahun 2016

Bidang pertanahan dalam pembangunan daerah memiliki fungsi ekonomis dan sosial. Karena adanya fungsi ekonomis dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan melalui sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas, status tanah tersebut mempunyai kekuatan hukum, bentuk kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum antara lain sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP). Berdasarkan data BPS Kabupaten Grobogan, tahun 2014 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan menerbitkan 510.252 sertifikat hak milik, 3.034 buah sertifikat hak pakai, serta 3.211 buah sertifikat hak guna bangunan. Dengan demikian maka jumlah keseluruhan sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional meningkat menjadi 516.497 buah pada tahun 2014. Jumlah sertifikat yang diterbitkan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, dan paling banyak jenis sertifikat yang diterbitkan adalah sertifikat hak milik.

Gambaran secara rinci jumlah sertifikat yang dapat diterbitkan sampai tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.30
Banyaknya Sertifikat yang Diterbitkan
Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan
Tahun 2010-2014

No	Jenis Sertifikat	2010	2011	2012	2013	2014
1	Sertifikat Hak Milik	439.236	448.618	458.596	484.424	510.252
2	Sertifikat Hak Pakai	2.605	2.645	2.886	2.960	3.034
3	Sertifikat Hak Pengelolaan	0	0	0	0	0
4	Sertifikat Hak Guna Bangunan	2.827	3.022	3.133	3.172	3.211
	Total	444.674	454.285	464.615	490.556	516.497

Sumber : Kabupaten Grobogan Dalam Angka Tahun 2015

Pemerintah Kabupaten Grobogan mempunyai sejumlah kewenangan dalam penyelenggaraan bidang pertanahan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pertanahan adalah 1) pemberian ijin lokasi; 2) penyelesaian sengketa tanah garapan; 3). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 4) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; 5) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 6) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 7) inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah, 8) penerbitan ijin membuka tanah dan 8) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam implementasi atas kewenangan tersebut di Kabupaten Grobogan masih banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai belum optimal.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah ada pada pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. Selain itu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Indikator kinerja persampahan yang sudah dicapai pada bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan adalah tingkat pengangkutan sampah yang tersebar dimasyarakat. Data yang ada menunjukkan sampah masyarakat yang terangkut baru mencapai 30%. Kondisi tersebut menunjukkan masih ada sekitar 70% sampah yang belum terangkut. Sedangkan upaya pengurangan sampah di wilayah perkotaan baru sebesar 4,75%. Upaya pengurangan sampah diperkotaan masih menunjukkan kinerja yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja dari tahun 2011-2015 yang relatif kecil. Untuk mendorong pada pengurangan sampah perkotaan, upaya dilakukan dengan mengelola sampah dilingkungan masyarakat secara mandiri, terutama dilingkungan keluarga. Upaya tersebut salah satunya adalah dengan menggalakan pengelolaa sampah dengan pola 3R. Kelompok-kelompok pengelola sampah dengan 3R di Kabupaten Grobogan semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari perumbuhan kelompok yang semakin meningkat. Tahun 2015 mencapai 20%, mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dapat dilihat pada kondisi tahun 2011 baru mencapai 5%.

Kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Grobogan dalam lima tahun terakhir dituangkan melalui tabel berikut.

Tabel 2.31
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Prosentase jumlah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah standart 3 R	%	5	7,50	10	15	20

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
2	Persentase pengurangan sampah diperkotaan	%	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75
3	Persentase Pengangkutan sampah	%	22	24	26	28	30,00

Sumber : Data Isian PD Kantor Lingkungan Hidup Kab. Grobogan, Tahun 2016

Upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ditunjukkan dengan indikator kinerja pemantauan status mutu air, pengawasan terhadap AMDAL, tingkat ketaatan usaha secara administratif tingkat pengaduan lingkungan hidup dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup. Indikator kinerja pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan tingkat capaian baik meliputi jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi, jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti dan kegiatan penegakan hukum lingkungan. Secara keseluruhan ketiga indikator tersebut sudah menunjukkan capaian 100%.

Sementara itu, indikator kinerja yang masih memerlukan perhatian dengan tingkat capaian yang belum sesuai harapan adalah pada pemantauan status mutu air dengan tingkat capaian sebesar 44%, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL baru mencapai 20% dan jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati teknis pencegahan pencemaran air dengan tingkat capaian sebesar 80%. Walaupun tingkat capaiannya belum maksimal, tetapi ketiga indikator terebut sudah menunjukkan perkembangan yang positif dengan setiap tahunnya mengalami perbaikan kinerja. Pencapaian indikator kinerja pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32
Indikator Kinerja Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Presentase pemantauan status mutu air	%	5	15	20	30	44
2	Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	5	10	15	15	20
3	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi	%	70	80	90	100	100

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
4	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati teknis pencegahan pencemaran air	%	60	65	70	75	80
5	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100
6	Kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Data Isian PD Kantor Lingkungan Hidup Kab. Grobogan, Tahun 2016

Dalam rangka perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya melalui penghijauan wilayah konservasi dan abrasi, peningkatan tutupan vegetasi wilayah dan upaya-upaya pengurangan emisi GRK. Upaya penghijauan terhadap wilayah konservasi dan rawa abrasi di Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan kinerja maksimal yaitu dengan cakupan sudah mencapai 100% selama periode tahun 2013-2015. Untuk peningkatan tutup vegetasi pada seluruh wilayah masih menunjukkan kinerja yang belum optimal, yaitu dengan rasio capaian pada tahun 2015 baru mencapai 37,93%. Pencapaian tersebut sudah cukup baik dengan tren yang meningkat setiap tahunnya, terutama pada tahun 2014 yang menunjukkan kinerja kenaikan yang signifikan.

Sementara itu, pengurangan terhadap emisi gas rumah kaca pada tahun 2015 menunjukkan kinerja meningkat yaitu sebesar 54% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 50%. Akan tetapi, kenaikan ditahun 2015 masih tergolong trennya menurun jika dilihat dengan kondisi capaian tahun 2012 yang mencapai 76%. Kinerja pengurangan emisi gas rumah kaca jika dilihat selama tahun 2011-2015 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33
Indikator Kinerja Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Grobogan 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio cakupan penghijauan wilayah Konservasi dan rawa abrasi	%	70	80	100	100	100
2	Rasio tutupan vegetasi terhadap seluruh wilayah	%	25	30	30	36	37, 93
3	Pengurangan Emisi GRK	%	70	76	64	50	54

Sumber : Data Isian PD Kantor Lingkungan Hidup Kab. Grobogan, Tahun 2016

Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi pencapaian jumlah luasan lahan dan / tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya sudah mencapai 100%, terhitung sejak tahun 2012-2015. Sedangkan peningkatan pengendalian polusi yang masih memerlukan perhatian serius adalah pada pemenuhan sarana monitoring polusi. Kinerja terhadap pemenuhan sarana monitoring polusi masih rendah, yaitu baru mencapai 40%. Upaya pemenuhan sarana monitoring polusi di Kabupaten Grobogan sudah berjalan cukup baik dengan kinerja yang meningkat setiap tahunnya.

Selanjutnya peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam, lingkungan hidup dan peningkatan pengendalian polusi di Kabupaten Grobogan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34
Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Peningkatan
Pengendalian Polusi
Kabupaten Grobogan 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah luasan lahan dan / tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%	0	100	100	100	100
2	Jumlah usaha dan / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi pencegahan pencemaran udara	%	60	70	80	90	100
3	Jumlah usaha dan / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan teknis pencegahan pencemaran udara	%	20	22	25	28	30
4	Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi	%	5	15	25	35	40

Sumber : Data Isian PD Kantor Lingkungan Hidup Kab.Grobogan, Tahun 2016

6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2015 tercatat sebesar 1.431.535 jiwa, mengalami pertumbuhan penduduk 1,36% atau bertambah 19.210 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2014. Data jumlah penduduk ini adalah data yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri tanggal 17 Januari 2014, Nomor 470/328/SJ, perihal Pemanfaatan Data Kependudukan, yang mewajibkan data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Jika dilihat dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dari pada perempuan. Komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 708.124 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 704.984 jiwa, maka seks rasio penduduk mencapai 101%.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 1,431 juta, penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dikelola secara baik. Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Grobogan pada tahun 2011 baru mencapai 84% mengalami kenaikan di 2015 mencapai 87,99%. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, Kabupaten Grobogan baru mulai terlaksana pada tahun 2011.

Kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 telah mencapai 23,10%, sedangkan pada tahun 2015 kepemilikan akte kelahiran mengalami penurunan menjadi 47,09%. Sesuai dengan Perpres No 2 Tahun 2015, target nasional indikator kepemilikan akta kelahiran di kalangan usia 0-18 tahun ditarget 75 persen pada 2015 ini. Sementara untuk 2016 dan seterusnya nanti, jumlah target akan meningkat 2,5 persen. Dengan demikian target kepemilikan akta kelahiran belum mencapai target nasional.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Periode 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio penduduk ber KTP	%	84	85,39	85,3	73	87,99
2.	Rasio Bayi Ber akte kelahiran	%	79	79,8	80	81,60	82
3.	Kepemilikan akta kelahiran	%	23,10	23,41	23,86	55,45	47,09
4.	Ketersediaan database kependudukan	Kec	19	19	19	19	19
5.	Kepemilikan KK	%	95	96	97	98	98,76
6.	Kepemilikan Akte Kematian	%	345	1.635	1.016	783	6.837

Sumber : Data Isian PD Dispendukcapil, 2016

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu upaya pembangunan untuk mewujudkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dan desa, kemandirian dicerminkan dari meningkatnya kapasitas dan kualitas masyarakat dan desa dalam tata kelola pembangunan di desa, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia juga diimbangi dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan-kelembagaan kemasyarakatan di tingkat desa. Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM dan kelembagaan, maka dinamika pembangunan di desa semakin meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud.

Implementasi pembangunan masyarakat dan desa di Kabupaten Grobogan selama lima tahun yaitu tahun 2011 – 2015 belum sepenuhnya target yang ditetapkan dapat tercapai. Ada beberapa indikator kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa capaiannya sesuai yang diharapkan anatra lain PKK aktif dimana pada tahun 2014 dan 2015 sudah mencapai target yaitu 100%, demikian juga POSYANDU aktif pada tahun 2011 – 2015 target tercapai sebesar 95%.

Kinerja pada upaya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang stagnan. pada tahun 2015, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif di Kabupaten Grobogan tercapai sebesar 5,4%. Keterlibatan masyarakat ditunjukkan dengan besarnya swadaya yang diberikan pada proses pelaksanaan pembangunan, tercatat se tiap tahunnya mencapai 14,5% dan upaya pemeliharaan terhadap program paska pemberdayaan masyarakat sebesar 5%. Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat belum sesuai harapan dan penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMDes belum sepenuhnya menghasilkan dokumen perencanaan yang baik serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan di tingkat desa belum sesuai harapan.

Selanjutnya permasalahan yang muncul dalam pemberdayaan masyarakat dan desa yang berdampak tidak tercapainya target kinerja antara lain belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok PKK dan pembinaan yang dilakukan oleh LPM kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan masih jauh capaian targetnya, hal ini terbukti tahun 2015 capaian kinerja rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dan LPM baru tercapai 13,57%.

Gambaran terkait dengan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Grobogan dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Di Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	PKK aktif	%	100	100	100	100	100
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57
3.	Posyandu aktif	%	95	95	95	95	95
4.	LPM Berprestasi	%	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
5.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD)	%	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57
6.	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (Bumdes)	%	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
8.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	5	5	5	5	5
9.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	%	80	80	80	80	80
10.	Desa yang berprofil	%	87,14	87,14	87,14	87,14	87,14
11.	Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
12.	RPJMDes	%	0	0	0	0	98,53

Sumber : Data Isian PD Bapermas Kab. Grobogan Tahun 2016

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rasio anak tiap keluarga di Kabupaten Grobogan adalah 2,39. Artinya setiap keluarga memiliki anak antara 2 – 3 orang. Rasio anak per keluarga kondisinya selalu menunjukkan penurunan setiap tahun, meskipun penurunan tersebut belum signifikan. Pada tahun 2011 rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 2,46, sedangkan tahun 2015 turun menjadi 2,39. Rata-rata penurunan setiap tahun adalah 0,2 sampai 0,3. Penurunan jumlah anak yang belum signifikan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana. Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Grobogan angkanya fluktuatif dan hasilnya belum optimal. Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 hanya sebesar 74,54%, angka tersebut turun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yang berada di angka 74,82%. antara lain didukung dengan Peningkatan jumlah PUS yang terjadi belum selaras dengan peningkatan jumlah PUS yang mengikuti program KB. Peserta KB Aktif dari tahun 2010-2014 persentasenya naik turun antara 65 – 78%. Capaian terbaik pada tahun 2014 sebesar 74,82%, sedangkan paling rendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 74,46%. Berikut ini perkembangan jumlah peserta KB dari tahun 2010 – 2014 :

Tabel 2.37
Capaian Indikator Makro Bidang Keluarga Berencana
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	rasio	2,46	2,44	2,43	2,42	2,39
2.	Cakupan Peserta KB Aktif	%	74,46	74,53	74,61	74,82	74,54
3.	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	74,46	74,53	74,61	74,82	71,54
4.	Cakupan KB Pria	%	1,13	1,18	1,24	1,88	1,34

Sumber : Data Isian PD BP3AKB Kab. Grobogan, Tahun 2016

Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun pada tahun 2015 cukup rendah yaitu sebesar 1,93% dari total jumlah PUS yang ada. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 sampai 2013 yang capaiannya masih di atas 3%. Sedangkan PUS ber KB yang menjadi anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sampai dengan tahun 2015 sebesar 84%. Adapun PUS yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi atau unmetneed mencapai 11,80%.

Jumlah petugas lapangan keluarga berencana di Kabupaten Grobogan dai tahun ke tahun semakin menurun. Jumlah petugas lapangan keluarga berencana di Kabupaten Grobogan berdasarkan perhitungan rasio PLKB dengan jumlah desa/kelurahan, ternyata Kabupaten Grobogan memiliki rasio 1:3,6 atau 4, Artinya setiap 1 PLKB dalam menjalankan tugasnya memiliki daerah dampingan sebanyak 3 sampai 4 desa/kelurahan. Hal tersebut masih jauh dari harapan karena standarnya setiap satu petugas penyuluh lapangan keluarga berencana sebaiknya menangani maksimal dua desa. Kondisi tersebut tentunya menyebabkan informasi tidak dengan mudah diterima oleh akseptor KB. Untuk mengatasi hal tersebut maka di setiap desa terdapat PPKBD (Petugas Pembantu Pembina KB Desa) di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 semua desa yang ada di Kabupaten Grobogan telah memiliki PPKBD.

Hal lain yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pengendalian penduduk adalah ketersediaan data keluarga di setiap desa. Untuk capain indikator ini, Kabupaten Grobogan sudah mampu mencapai angka 100%. Kemudian terkait dengan pelayanan dan penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah kabupaten, capaiannya masih 0%. Selama ini penyediaan alat

kontrasepsi masih mengandalkan dari pemerintah pusat, sedangkan target untuk penyediaan alat kontrasepsi adalah 30% diadakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Keberhasilan program KB dan pengendalian penduduk juga harus didukung oleh masyarakat. Selain berperan aktif dalam program KB sebagai akseptor, masyarakat juga dapat berperan melalui kegiatan-kegiatan bina keluarga yang ada dan terbagi menjadi tiga (tribina) yaitu bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), dan bina keluarga lansia (BKL). Untuk tiga jenis kelompok tersebut, yang masih belum optimal adalah BKR. Data tahun 2015 baru 29 desa dari 280 desa yang aktif BKRnya. Sedangkan untuk BKB dan BKL angkanya justru telah berada di atas 100%, artinya adalah di setiap desa kedua kelompok tersebut aktif bahkan ada desa yang memiliki lebih dari satu kelompok.

Tabel 2.38
Gambaran Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun	%	3,8	3,7	3,6	1,95	1,93
2.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	%	21/ 1000	21/ 1000	20/ 1000	19/ 1000	18/ 1000
3.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	%	19,80	18,00	12,82	12,00	11,80
4.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	%	83,4	83,8	83,8	84	84
5.	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	%	0	0	0	0	0
6.	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan/Desa (PPKBD) (orang/desa)	orang/desa	100	100	100	100	100
7.	Ratio Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB	%	280/114	280/104	280/92	280/86	280/77
8.	Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	17/38	34/38	34/38	35/38	35/38
9.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa / kelurahan	%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
10.	Remaja yang menjadi anggota BKR (%)	%	74,40%	74,52	75,6	82,3	87,53
11.	Rasio BKB holistik	%	-	-	-	-	5,30
12.	Persentase desa/ kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif	%	BKB 556, BKR 249, BKL 283	BKB 559, BKR 251, BKL 298	BKB 561, BKR 254, BKL 302	BKB 563, BKR 259, BKL 304	BKB 563, BKR 259, BKL 304

Sumber : Data Isian BP3KB Kab. Grobogan, Tahun 2016

9. Urusan Perhubungan

Keberhasilan pembangunan perhubungan diukur melalui beberapa indikator. Indikator tersebut adalah jumlah terminal bis, jumlah terminal yang beroperasi, persentase sarana perhubungan dalam kondisi baik, rasio ketersediaan angkutan kota, tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor dan tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail).

Kondisi pembangunan perhubungan Kabupaten Grobogan tahun 2011 – 2015 relatif baik. Program pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan cukup baik, Kabupaten Grobogan memiliki 6 buah terminal yang berfungsi baik. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 2011 – 2015. Ketersediaan terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sudah cukup baik, yaitu sudah mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa semua terminal sudah dilayani angkutan umum. Ketersediaan halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek baru mencapai 50%. Kondisi ini menggambarkan bahwa prasarana seperti halte penumpang harus diupayakan. Gambaran perkembangan kondisi sarana dan fasilitas perhubungan tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Perkembangan Kondisi Sarana dan Fasilitas Perhubungan
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Terminal Bis	unit	6	6	6	6	6
2.	Jumlah terminal yang beroperasi	unit	6	6	6	6	6
3.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	100	100	100	100	100
4.	persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	50	50	50	50	50

Sumber: Data Isian Dishubinfokom Kab. Grobogan, Tahun 2016

Rehabilitasi prasarana dan fasilitas Lalu lintas dan Angkutan Jalan memiliki nilai strategis bagi peningkatan perekonomian. Prasarana dan fasilitas LLAJ yang baik akan meningkatkan kelancaran lalu lintas dan angkutan di jalan raya sehingga akan memperlancar mobilitas penduduk maupun mobilitas barang dan jasa. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik. Capaian indikator tersebut selama kurun waktu 2011 – 2015 menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu 64% pada tahun 2011 menjadi 78% pada tahun 2015. Kondisi ini menggambarkan bahwa kondisi sarana dan fasilitas LLAJ semakin membaik. Capaian tersebut belum optimal dan ke depan perlu harus ditingkatkan lagi sampai dengan 100% dalam kondisi baik. Perkembangan kondisi sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40
Perkembangan Kondisi sarana dan Fasilitas Perhubungan
dalam kondisi baik Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	64	75	75	76	78

Sumber: Data Isian Dishubinfokom Kab. Grobogan, Tahun 2016

Pelayanan angkutan sangat vital bagi mobilitas penduduk dan mobilitas komoditas perdagangan dan hasil pertanian. Pelayanan angkutan di Kabupaten Grobogan menunjukkan kecenderungan meningkat. Kabupaten Grobogan memiliki sarana pengujian kendaraan untuk menjamin bahwa pelayanan angkutan penumpang umum dan barang aman. Sarana pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki sebanyak satu unit yang beroperasi dengan baik. Waktu rata-rata uji kelayakan kendaraan relatif cepat yaitu 15 menit per kendaraan. Jumlah kendaraan angkutan umum yang diuji setiap tahun meningkat dari tahun 2011 – 2015. Jumlah kendaraan yang diuji pada tahun 2011 sebesar 632 unit dan meningkat menjadi 998 unit pada tahun 2015.

Rasio ketersediaan angkutan kota di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 2011 – 2015 menunjukkan kecenderungan konstan, yaitu 0,043 pada tahun 2011 dan pada tahun 2015 sedikit menurun menjadi 0,040, yang berarti ketersediaan angkutan kota semakin berkurang. Pelayanan angkutan kota sedikit mengalami penurunan.

Ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten konstan selama kurun waktu 2011 – 2015 yaitu sebesar 92%. Kondisi ini berarti sudah 92% jalan kabupaten di Kabupaten Grobogan dilayani oleh angkutan umum. Mobilisasi penduduk dari satu tempat ke tempat lain sudah relatif terfasilitasi. Jumlah penumpang yang melalui terminal juga cenderung meningkat. Hal ini berarti masyarakat pengguna angkutan umum juga meningkat. Ketersediaan layanan angkutan yang melayani wilayah terpencil tidak ada karena di Kabupaten Grobogan tidak ada wilayah yang terpencil. Semua sudah bisa dilayani oleh angkutan umum. Perkembangan kondisi capaian indikator Program Peningkatan Pelayanan Angkutan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Perkembangan Capaian Indikator
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	unit	1	1	1	1	1
2.	Rasio ketersediaan angkutan kota	%	0,043	0,042	0,041	0,039	0,040
3.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota	%	92	92	92	92	92
4.	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang	%	0	0	0	0	0
5.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	orang/tahun	637.294	636.615	635.432	797.550	727.865
6.	Rasio ijin trayek	%	0,029	0,027	0,026	0,020	0,020
7.	Jumlah uji KIR angkutan umum	unit	632	801	866	880	998
8.	Kepemilikan KIR angkutan umum	unit					
9.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	15	15	15	15	15
10.	Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	%	0	0	0	0	0

Sumber: Data Isian Dishubinfokom Kab. Grobogan, Tahun 2016

Keamanan lalu lintas akan berpengaruh pada keamanan berkendara pada saat melintas pada jalan umum. Peran pemerintah daerah dalam program ini adalah memberi rasa aman bagi para pengendara yang melintas pada jalan-jalan kabupaten. Keamanan tersebut sangat tergantung pada ketersediaan rambu lalu lintas dan sarana pengaman lainnya. Kondisi penerangan jalan umum dari tahun 2011 – 2015 terus meningkat. Jumlah penerangan jalan umum tahun 2011 sebanyak 145 buah meningkat pada tahun 2015 sebanyak 334 buah. Ketersediaan rambu lalu lintas juga cenderung meningkat. Pada tahun 2011 sebanyak 604 unit pada tahun 2015 meningkat menjadi 861 unit. Ketersediaan marka jalan selama tahun 2011 – 2015 belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Tahun 2011 ketersediaan marka jalan dan lain-lain sebesar 40% dan pada tahun 2015 meningkat sebesar 55%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan masih kurang, dan perlu ditingkatkan sampai semua jalan tersedia fasilitas kelengkapan jalan. Hal ini juga ditunjukkan bahwa jumlah kasus pelanggaran lalulintas selama kurun waktu 2011 – 2015 fluktuatif cenderung meningkat yaitu sebanyak 550 kasus pada tahun 2011, meningkat menjadi 646 kasus di tahun 2015. Secara rinci perkembangan ketersediaan fasilitas pengamanan lalulintas terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42
Perkembangan Capaian Indikator
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU)	buah	145	176	268	278	334
2.	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas	kali	550	786	667	614	646
3.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	unit	604	648	691	777	861
4.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail).	%	40	40	45	50	55

Sumber: Data Isian SKPD Dishubinfokom Kab. Grobogan, Tahun 2016

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan informatika memiliki tiga program yaitu program pengembangan informasi dan komunikasi, Program Fasilitas

Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dan Program Kerjasama Informasi dan media masa.

Pengembangan informasi dan komunikasi memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan sudah seharusnya berbasis sistem informasi, sehingga setiap kebijakan dapat dengan mudah disampaikan kepada masyarakat dan institusi internal pemerintah daerah. Jaringan informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan agar penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang berkepentingan. Perkembangan jumlah jaringan komunikasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan terus meningkat selama kurun waktu 2011 – 2015. Pada tahun 2011 jumlah jaringan komunikasi antar SKPD sebanyak 39 SKPD pada tahun 2015 sudah semua SKPD (56 SKPD) terhubung jaringan komunikasi. Ketersediaan web milik pemerintah berkurang, yaitu dari 30 SKPD tahun 2011 menjadi hanya 14 SKPD yang memiliki website. Gambaran kondisi capaian indikator pengembangan informasi dan komunikasi terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.43
Perkembangan Capaian Indikator
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Jaringan komunikasi	SKPD	39	49	49	49	56
2.	Website milik pemerintah daerah	SKPD	30	30	30	10	14
3.	Jumlah wartel/ warnet	buah	113	124	136	150	165
4.	Jumlah surat kabar nasional/ lokal		21	21	21	27	27
5.	Jumlah penyiaran radio/TV	Radio : kali	Radio : 19	Radio : 19	Radio : 19	Radio : 19	Radio : 19
		Televisi : kali	TV : 17	TV : 17	TV : 17	TV : 20	TV : 20

Sumber: Data Isian SKPD Dishubinfokom Kab. Grobogan, Tahun 2016

Tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi harus didukung oleh sumberdaya manusia bidang komunikasi informasi yang handal dan kompeten. Selain itu masyarakat yang *melek* informasi diharapkan akan mampu mengakses berbagai informasi yang bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu Perangkat Daerah juga harus responsif terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan membuat *web* yang selalu *up date* setiap saat, sehingga masih perlu ditingkatkan agar

pemerintah semakin responsif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pengembangan komunikasi dan informatika untuk menunjang pemerintahan dibutuhkan kerja sama informasi dan juga kerjasama media massa. Kegiatan kerjasama deseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa cetak dan elektronik dilakukan tetap setiap tahun yaitu 4 kali di majalah, 31 kali pada radio dan 4 kali siaran televisi. Gambaran kegiatan pada program kerjasama informasi dan media massa terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Perkembangan Capaian Indikator Kerjasama Informasi dan Media Masa Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :						
1.	Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	Majalah : kali / tahun	4	4	4	4	4
		Dialog radio : kali / tahun	31	31	31	31	31
		Siaran TV : kali / tahun	4	4	4	4	4
2.	Media baru seperti website (media online)	setiap hari	2 kali/ Minggu	2 kali/ Minggu	2 kali/ Minggu	3 kali Minggu	3 kali Minggu
3.	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	kali / tahun	-	-	1	1	1
4.	Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	kali / tahun / Kecamatan	1 kali/ 4 Kec.	1 kali/ 6 Kec.	1 kali/ 5 Kec.	1 kali/ 2 Kec.	1 kali/ 2 Kec.
5.	Media luar ruang seperti media bulletin, brosur, spanduk, baliho dll	kali / tahun	-	-	-	-	-
6.	Pameran / Exspo	kali / tahun	-	-	-	-	-

Sumber: Data Isian SKPD Dishubinfokom Kab. Grobogan, Tahun 2016

11.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi menurut Undang-Undang perkoperasian Nomor 17 tahun 2002, adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan-kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki beberapa peranan yang cukup penting

di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Sesuai dengan yang dinyatakan pada Konferensi Umum International Labour Organization dan International Labour Office, yang antara lain koperasi sebagai alat yang penting bagi pembangunan ekonomi, sarana untuk memperbaiki ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, bahkan untuk meningkatkan sumber daya modal pribadi dan nasional dengan menghilangkan riba serta pemanfaatan kredit secara sehat.

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 mencapai 88 %, pencapaian pada tahun 2015 ini sama dengan pencapaian tahun 2014. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Grobogan mengalami pencapaian yang fluktuatif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Pencapaian koperasi aktif terendah di Kabupaten Grobogan terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 45%. Dari jumlah berbagai koperasi yang ada di tahun 2015, 88% diantaranya masih aktif dan beroperasi secara sehat. Sedangkan 12% lain non aktif dengan berbagai alasan, seringkali masih ada pengurusnya, tetapi tidak lagi tidak beroperasi.

Untuk mendorong pertumbuhan koperasi aktif hal-hal yang perlu mendapatkan Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah dengan lebih intensif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi serta melakukan peningkatan kapasitas sumber daya pengurus koperasi dengan melakukan pendidikan dan pelatihan, sehingga koperasi tersebut dapat mengelola koperasi mereka dengan baik tanpa campur tangan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengklasifikasi kriteria usaha masyarakat menjadi 3 kategori, yaitu mikro, kecil, dan menengah. Klasifikasi jenis usaha tersebut didasarkan pada jumlah asset dan omset dari masing-masing kategori usaha. Perkembangan UMKM di Kabupaten Grobogan menunjukkan peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 mencapai 26.094 UMKM. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan capaian tahun 2011 yang hanya mencapai 22.350 UMKM.

Dari 26.094 unit UMKM di Kabupaten Grobogan di tahun 2015, hanya 46% UMKM yang berbadan hukum (memiliki ijin usaha) dan hanya 57% usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank. Jumlah tersebut termasuk sangat kecil dibandingkan dengan seluruh jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Grobogan, dimana masih ada 43% UMKM yang belum mengakses kredit/ pembiayaan bank. Jumlah UMKM yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank di tahun 2015 jumlahnya menurun dibanding tahun 2014 yang tercatat sebesar 88 %.

Permasalahan modal bisa menjadi pengambat bagi perkembangan UMKM di Kabupaten Grobogan untuk pengusaha kecil mengembangkan usahanya. Rendahnya jumlah UMKM yang belum memiliki ijin usaha dikarenakan beberapa faktor yang antara lain, UMKM yang tidak mau mengurus perizinan usaha meskipun dalam hal perizinan pemerintah sudah mempermudah dengan pembuatan perizinan satu atap.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengembangkan UMKM antara lain dengan mendorong/ memfasilitasi pelaku UMKM dalam hal perizinan, penguatan modal dan gencar melakukan promosi guna mendorong peningkatan daya saing produk UMKM itu sendiri. Perkembangan capaian pembangunan Koperasi dan UMKM Kabupaten Grobogan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM
di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Unit	22.350	22.333	24.916	25.174	26.094
2	Persentase UMKM yang telah berbadan hukum (memiliki ijin usaha)	%	15	20	46	46	46
3	Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank	%	75	80	99	88	57
4	Jumlah koperasi	Unit	-	-	-	-	481
5	Persentase koperasi aktif	%	85	84	45	88	88
6	Persentase koperasi sehat		-	-	-	-	-
7	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	91,43	82,93	74,80	73,87	73,71
8	Persentase UKM yang mengakses permodalan	%	75	80	99	88	90

Sumber: Data Isian SKPD Disperindagkop & UMKM Kab. Grobogan, Tahun 2016

12.Urusan Penanaman Modal

Kinerja penanaman modal di Kabupaten Grobogan ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan yang menginvestasikan modalnya di Kabupaten Grobogan. Semakin banyak perusahaan yang berinvestasi, maka semakin besar peluang perluasan dan kesempatan kerja yang akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Jenis perusahaan yang menanamkan modal di Kabupaten Grobogan terdiri dari Penanaman Modal

Asing (PMA) dan Perusahaan multinasional/ Penyertaan Modal Negara atau yang disebut PMN.

Kontribusi terhadap besar kecilnya investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Grobogan dapat dilihat dari banyaknya jenis perijinan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Tahun 2015, Jumlah jenis perijinan dan non perijinan investasi yang dilayani BPPT sebanyak 50 jenis. Adapun jumlah Jumlah perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal yang keluarkan BPPT sebanyak 3.605 ijin. Pada tahun 2015 jumlah PMDN dan PMA yang masuk di Kabupaten Grobogan tercatat sebanyak 38 PMDN dan 6 PMA. Upaya meningkatkan pelayanan perijinan penanaman modal di Kabupaten Grobogan saat ini sudah menerapkan sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Selain itu secara dalam meningkatkan mutu pelayanan, sistem perijinan di Kabupaten Grobogan telah menerapkan ISO 9001 : 2008.

Informasi kondisi layanan investasi di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46
Indikator Kinerja Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Di Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah investor berskala nasional :						
	PMA	Perusahaan	-	-	5	2	6
	PMDN	Perusahaan	-	-	0	15	38
2	Nilai investasi berskala nasional :						
	PMA	Ribu dolar	-	-	22,782.6	265.248,3	2.500.000
	PMDN	Juta Rp	-	-	0	627.618	2.960.091,9
3	Jumlah perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal yang keluarkan BPPT	ijin	0	0	0	15 Ijin Prinsip, 1518 SIUP, 308 IMB	3.605
4	Jumlah jenis perijinan dan non perijinan investasi yang dilayani BPPT	ijin	-	-	-	-	50
5	Jumlah bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	kegiatan	0	0	0	1	0
6	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	kegiatan	0	0	0	1	1
7	Persentase waktu pelayanan PTSP ditetapkan maksimal 7 hari kerja	persen	90	90	90	90	90
8	Penerapan Sistem	paket	-	-	2	1	1

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Manajemen Mutu 9001 : 2008 dan Implementasi sistem mutu ISO 9001 : 2008						
9	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Jenis	-	-	-		
10	Jumlah fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	kali	-	-	-		
11	Jumlah promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	kali	-	-	-		
12	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp	-	8.311.888.878	9.356.000.000	12.500.000.000	10.515.000.000

Sumber: Data Isian SKPD BPMPT, Tahun 2016

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Jenis PMA yang ada saat ini di Kabupaten Grobogan antara lain :

- a) PT. Formosa Development yang bergerak dibidang perdagangan besar dan jasa pergudangan.
- b) PT. Cargill Indonesia yang bergerak dibidang industri ransum makanan hewan.
- c) PT. Malindo Feedmill Tbk. yang bergerak dibidang pembibitan dan budidaya ayam ras pedaging.
- d) PT. Pungkook Indonesia One yang bergerak dibidang industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi.
- e) PT. Cemindo Gemilang yang bergerak dibidang industri semen.
- f) PT. Hisheng Lugage Accessory yang bergerak dibidang Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi serta Industri barang jadi baju dan sulaman.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Nama-nama PMDN yang saat ini berkembang di Kabupaten Grobogan beraneka ragam bidang usahanya. Tercatat pada tahun 2015 ada sebanyak 38 PMDN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.47
Daftar PMDN Kabupaten Grobogan Tahun 2015

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
1	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.	Perdagangan Eceran (Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh) dan Perdagangan Eceran (Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh)
2	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	Pembibitan dan Budidaya Ayam Ras Pedaging
3	PT. Ayodya Puri Nugraha	Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa
4	PT. Propertindo Petracho Abadi	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
5	CV. Dr. Any S. Medica	Jasa Poliklinik Swasta
6	Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum (YAKKUM)	Jasa Poliklinik Swasta
7	CV. Citra Medika	Jasa poliklinik swasta
8	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket / Minimarket
9	PT. Vanda Prima Listri	Pertambangan bahan galian batu kapur dan tanah liat dan Industri semen
10	(Perorangan) Saiful Ro'ad	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
11	Yayasan Klinik Pratama Rawat Inap Dan Bersalin Luqi Medika	Jasa Poliklinik Swasta
12	UD. Bejo Putra Tunggal	Peternakan Unggas
13	(Perorangan) Klinik Pratama Rawat Jalan Dan Bersalin Wali Songo	Jasa Poliklinik Swasta
14	PT. Budi Sehat Sentra Diagnostika	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan
15	Perusahaan Perorangan Mekar Wangi Residence	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
16	UD. Muhammad Jamhari	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU
17	CV. Klinik Mata Purwodadi	Jasa Poliklinik Swasta
18	PT. Mustamir Logam Mulia	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket / minimarket
19	Perusahaan Perorangan Rizzam Putra	Pembibitan dan Budidaya Ayam Ras Pedaging
20	PT. Citra Megah Raya	Hotel Bintang Tiga
21	Perum Perhutani	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket / Minimarket
22	Perusahaan Perorangan Bintang Timur	Industri Tahu Kedelai
23	CV. Subur Jaya	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan,Minuman Atau Tembakau Di Toko
24	PT. Enggal Waras Sejati	Jasa Rumah Sakit Swasta
25	CV. Buah Hati	Jasa Poliklinik Swasta
26	(Perorangan) House Of Mazaya	Jasa Poliklinik Swasta
27	(Perorangan) Klinik Pratama Rawat Jalan dan Bersalin Mitra Husada	Jasa Poliklinik Swasta

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
28	PT. Jaya Sinar Mulia	Hotel Bintang Satu
29	PT. Indomarco Prismaatama	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket / Minimarket
30	CV. Mutiara Syafira	Jasa Poliklinik Swasta
31	PT. Anugerah Gasindo Perkasa	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
32	CV. Alicia Skin Care	Jasa Rumah Sakit
33	(Perorangan) Sinar Fatikh	Jasa Rumah Sakit
34	CV. Panti Mulya	Jasa Rumah Sakit
35	PT. Telaga Husada Tlogomulyo	Jasa Poliklinik Swasta
36	PT. Graha Mukti Raharja	Hotel Melati

Sumber: Data Isian SKPD BPMPT, Tahun 2016

13.Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan terkait penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga dapat terlihat dari indikator seperti persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina, jumlah Kelompok Pemuda Produktif (KUPP), jumlah pemuda berprestasi, dan jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa Tengah.

Indikator persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina capaian per tahunnya masih rendah. Kondisi ini ditunjukkan dengan capaian pada tahun 2015 yang hanya 45%. Sementara itu, jumlah kelompok pemuda produktif (KUPP) selama kurun waktu lima tahun meningkat dari 62 kelompok menjadi 100 kelompok, meskipun pada tahun 2014 sempat menurun dari 81 kelompok menjadi 78 kelompok. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemuda di Kabupaten Grobogan semakin menunjukkan eksistensinya dengan hal yang positif.

Di Kabupaten Grobogan, jumlah pemuda yang berprestasi cukup banyak yaitu 70 pemuda. Selain pemuda yang berprestasi, atlet-atlet yang aktif juga menunjukkan kemampuan di bidang olahraga dengan perolehan medali di tingkat provinsi. Jumlah atlet yang memperoleh medali di tingkat provinsi paling banyak terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 119 orang. Sementara pada tahun 2015, atlet yang memperoleh medali menurun menjadi 75 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa atlet di Kabupaten Grobogan membutuhkan bimbingan dan latihan yang konsisten guna meningkatkan kemampuan. Kinerja pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina	%	38,6	40	50	42	45
2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Klp	-	13	11	15	14
3.	Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan	%	-	-	40	20	20
4.	Jumlah organisasi pemuda	buah	20	20	21	22	22
5.	Jumlah Kelompok Pemuda Produktif (KUPP)	Klp	62	71	81	78	100
6.	Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	orang	825	840	868	875	883
7.	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	77	66	73	68	70
8.	Jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa Tengah	Orang	69	75,9	119	75	75
9.	Jumlah Klub Olahraga	Klub	587	587	587	587	587
10.	Jumlah gedung olahraga	Gedung	16	16	16	16	16
11.	Jumlah organisasi olahraga	buah	2	2	2	2	2
12.	Jumlah pemuda yang memperoleh Pemahaman tentang bahaya Narkoba	orang	-	-	-	-	-
13.	Jumlah klub olahraga	klub	587	587	587	587	587
14.	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi	cabang					26
15.	Jumlah gedung olahraga	unit	16	16	16	16	16
16.	Jumlah Lapangan olahraga	unit	974	974	974	974	974

Sumber : Isian Data SKPD Disporabudpar, Tahun 2016

14.Urusan Statistik

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik mengatur fungsi statistik yaitu menjadi salah satu pendukung utama dalam perencanaan daerah. Sementara itu, tujuan dari statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan *up to date* guna mendukung proses pembangunan nasional yang efektif, efisien, dan berdaya guna tinggi. Ketersediaan data statistik yang lengkap, akurat, dan *up to date* merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai tahapan pembangunan.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik digambarkan dengan keberadaan/terbitnya dokumen-dokumen Buku Kabupaten Grobogan Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Grobogan setiap tahunnya. Namun

demikian, diperlukan tambahan kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan olahan.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Buku "kabupaten dalam angka"	%	100	100	100	100	100
2	Buku "PDRB kabupaten"	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Grobogan Tahun 2016

15. Urusan Persandian

Urusan persandian dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren yakni Urusan Wajib Pemerintah Daerah, dalam kelompok Non Pelayanan Dasar. Urusan persandian tentang Pemerintahan Daerah memperoleh perhatian yang cukup besar dibandingkan pada peraturan perundangan sebelumnya, dimana persandian berdiri sendiri sebagai satu urusan atau bidang tersendiri, dimana pada Undang-Undang sebelum (Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) persandian hanya menjadi salah satu sub dari Bidang Otonomi Daerah.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam undang-undang tersebut meliputi :

- 1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
- 2. Penetapan pola hubungan komunikasi antar-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kinerja penyelenggaraan persandian selama ini, terkait dua butir kewenangan tersebut yakni yang berkaitan dengan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah berjalan dengan baik. Sedangkan terkait dengan butir kewenangan kedua yakni: Penetapan pola hubungan komunikasi antar-Perangkat Daerah Kabupaten selama ini telah berjalan alamiah menggunakan peralatan komunikasi umum. Untuk kedepan perlu disusun dan ditingkatkan kemampuan perangkat SDM dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

16.Urusan Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki komitmen yang baik dalam pembangunan kebudayaan, dengan mendasarkan diri menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama tentang : (1) Pengelolaan kebudayaan di daerah; (2) pelestarian tradisi dalam masyarakat; (3) pembinaan lembaga adat; (4) pembinaan kesenian; (5) pembinaan sejarah lokal; (6) penetapan cagar budaya; (7) pengelolaan cagar budaya; (8) penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan (9) pengelolaan museum.

Berbagai potensi kebudayaan di Kabupaten Grobogan yang berkembang, baik seni musik, seni teater tradisional dan modern, tradisi dan warisan budaya tak benda (*intangible*) yang dapat menjadi kekayaan daerah. Kesenian musik tradisional terdiri dari karawitan, keroncong, orkes, dangdut dan organ tunggal. Sedangkan kesenian/ teater tradisional yaitu terdiri dari seni tari dan sanggar seni budaya, wayang kulit, ketoprak, dan lain-lain. Pembinaan budaya dan kelompok kesenian telah dapat berkembang dengan baik semakin ditingkatkan adalah dalam rangka membangun karakter bangsa.

Capaian kinerja pembangunan urusan kebudayaan di Kabupaten Grobogan, dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Grobogan
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah	kali	7	7	7	7	7
2.	Jumlah kelompok seni daerah	Klp	1.224	1.224	1.224	1.356	1.358
3.	Persentase benda purbakala dan peninggalan sejarah yang ditandai sebagai benda cagar budaya	%	70	75	76	76	76
4.	Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah	4	5	6	6	6
5.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100
6.	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	1	1	1	3	2
7.	Jumlah Misi Kesenian	kali	2	2	2	2	2
8.	Jumlah grup kesenian	kelompok	179	164	208	208	1323
9.	Jumlah event budaya di tingkat regional dan nasional yang diikuti	event	1	1	3	3	3

Sumber: Isian Data SKPD Disbudparpora Kab. Grobogan, Tahun 2016

17.Urusan Statistik

Tugas pemerintah daerah dalam urusan statistik adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota. Staitsitik yang menjadi tugas daerah meliputi data yang bersifat makro maupun sektoral. Penyediaan data staistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap dan akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang efektif dan efisien guna mendukung pembangunan daerah.

Ketersediaan data statistik secara aplikasi di Kabupaten Grobogan ditunjukkan dengan data yang ada dalam Sistem Informasi Perencanaan/ Pembangunan Daerah, buku profil daerah berisi seluruh unsur data sektoral pembangunan daerah dan buku profil makro yang bersifat penyediaan data dan informasi pembangunan secara makro.

18.Urusan Persandian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan persandian adalah untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-perangkat daerah kabupaten/kota. Di Kabupaten Grobogan, informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan pada pihak terkait pada tahun 2015 baru mencapai 89%. Fungsi Persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat dalam mengamankan informasi, tertama SDM Persandian yang memiliki kompetensi yang mencukupi untuk mengamankan informasi.

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Grobogan
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan pada pihak terkait	%	-	-	-	-	89

19.Urusan Perpustakaan

Kehadiran perpustakaan di masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi dan menambah pengetahuan

tentang berbagai hal. Perpustakaan dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar masyarakat baik formal maupun non formal yang secara tidak langsung mempunyai peran mendidik masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional dan juga sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional.

Selain itu perpustakaan juga merupakan sarana pelestarian kekayaan budaya bangsa maka sudah selayaknya perpustakaan itu tetap ada walaupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat namun perpustakaan sebagai rangkaian catatan sejarah masa lalu yang merupakan hasil budaya umat manusia yang sangat tinggi harus tetap dilestarikan. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintah bidang perpustakaan untuk Pemerintah Daerah adalah:

1. Pembinaan perpustakaan, dengan lingkup:
 - a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota;
 - b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
 - a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai kantor pengelola dan penanggungjawab penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Grobogan. Kinerja urusan perpustakaan dapat diukur dengan indikator jumlah perpustakaan yang dibina, jumlah pengunjung perpustakaan dalam satu tahun, dan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Sampai dengan tahun 2016, total jumlah anggota perpustakaan yang terdaftar adalah sebanyak 14.862 orang yang didominasi pelajar SMU di Kabupaten Grobogan, dengan rata-rata kunjungan per bulan 1.000 pemustaka. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Grobogan, Kantor Perpustakaan gencar melakukan promosi kegiatan seperti:

1. Menyebarkan Pamflet, Sosialisasi ke berbagai lini
2. Pembinaan Pada Perpustakaan Desa, Sekolah, Khusus Maupun TMB
3. Mengadakan Kegiatan Menumbuhkan Minat dan Budaya gemar membaca sejak Dini

4. Mengadakan Lomba, baik terkait dengan legislasi perpustakaan yang ada di Kab. Grobogan maupun bagi Pemerintah
5. Peningkatan Pelayanan, Baik SDM, Koleksi maupun dengan IT
6. Kerjasama dengan berabagai pihak

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kabupaten Grobogan menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, meskipun sempat mengalami penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2011. Di mana pada tahun 2011 jumlah pengunjung perpustakaan daerah tercatat 11.882 orang, mengalami penurunan menjadi 10.590 orang ditahun 2012 dan 9.160 ditahun 2013. Akan tetapi terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2014 sebesar 16.770 orang, dan pada 2015 tercatat 20.250 pemustaka. Hal ini merupakan indikasi yang baik, bahwa budaya membaca sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Kabupaten Grobogan.

Seiring dengan bertambahnya jumlah pengunjung perpustakaan, diikuti pula dengan meningkatnya jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Grobogan. Sampai dengan tahun 2015 Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan telah koleksi buku sebanyak 24.053 judul buku, jumlah koleksi buku ini mengalami peningkatan sebesar 9% dari tahun sebelumnya (2014) yang tercatat sebesar 23.080 judul. Anggaran pengembangan perpustakaan berasal dari dana APBD, APBN, dan sumber-sumber lainnya.

Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dan jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah Kabupaten Grobogan merupakan *multiplier effect* dari jumlah perpustakaan yang dibina oleh Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan, dimana pada tahun 2011 jumlah perpustakaan yang dibina tercatat 127 unit menjadi 156 unit pada tahun 2015 yang terdiri dari perpustakaan desa, sekolahan, masyarakat dan perpustakaan khusus. Untuk lebih jelasnya perkembangan kinerja perpustakaan daerah Kabupaten Grobogan tahun 2011-2015 ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Grobogan
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah perpustakaan yang dibina	Unit	127	127	127	127	156
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun	Orang	11.882	10.590	9.160	16.770	20.250
3.	Jumlah Koleksi buku milik perpustakaan	Eks	19.883	20.966	22.115	23.080	24.053

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
4.	Jumah Karya Rekam dan Karya Cetak yang dilestarikan	Eks	-	-	-	-	200

Sumber: Data Isian SKPD Kantor Perpusda Kab. Grobogan, Tahun 2016

20. Urusan Kearsipan

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah mengatur bahwa kegiatan pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan arsip, penyusutan arsip sampai dengan tahap pelestarian arsip. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengelolaan kearsipan dilakukan baik pada arsip statis maupun arsip dinamis. Pengertian dari arsip statis yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Adapun yang dimaksud dengan arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Dalam sistem pengelolaan dan penanganan arsip, dibutuhkan kelengkapan sarana, prasarana, dan SDM yang berkompeten. Sarana dan prasarana yang lengkap serta SDM yang berkompeten dalam pengelolaan dan penanganan dokumen/arsip dapat memperpanjang umur dokumen/arsip serta mempermudah orang lain yang membutuhkan dokumen/arsip tersebut.

Untuk menjaga keutuhan dan keamanan dokumen/arsip, salah satu cara adalah dengan melakukan duplikasi. Di Kabupaten Grobogan, jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika masih sangat rendah. Sampai pada tahun 2015, belum ada dokumen/arsip yang diduplikasi. Hal ini dapat memperbesar risiko kehilangan dokumen/arsip. Selain menduplikasi dokumen/arsip dalam bentuk informatika, dokumen/arsip juga dapat dikelola dengan sistim otomasi yaitu sistim yang menggunakan sarana pengolahan data secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas komputer dan teknologi informasi lainnya. Dokumen yang sudah diduplikasi dan diolah secara elektronik diharapkan dapat mempermudah SDM pengelola arsip. Namun, pengelolaan arsip dengan otomasi masih belum dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Grobogan. Sampai pada tahun 2015, belum ada dokumen/arsip yang dikelola dengan sistim otomasi. Selain belum ada dokumen/arsip yang diduplikasi dan dikelola dengan sistim otomasi,

belum adanya naskah peraturan tentang kearsipan juga menjadi penghambat dalam pengelolaan dan penanganan kearsipan.

Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan, Pemerintah Daerah (PD) yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku sampai pada tahun 2015 sebanyak 53 PD. Aparatur pemerintah daerah Kabupaten Grobogan berupaya untuk meningkatkan kuantitas SDM pengelola kearsipan yang cukup banyak pada tiap tahunnya. SDM pengelola kearsipan pada tahun 2010 sebanyak 180 orang, kemudian meningkat menjadi sebanyak 425 orang pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2015, SDM pengelola kearsipan sebanyak 120 orang. Kuantitas SDM pengelola yang mencukupi kebutuhan di semua lini aparatur pemerintahan akan meningkatkan kinerja pelayanan kearsipan.

Selain kuantitas SDM yang mencukupi, prasarana kearsipan seperti ruangan penyimpanan khusus untuk menyimpan dokumen/arsip juga diperlukan. Dinas Perpustakaan Kabupaten Grobogan sebagai instansi yang erat kaitannya dengan kearsipan juga sudah memiliki ruangan untuk menyimpan dokumen/arsip sebanyak 1 ruangan. Diharapkan, dengan jumlah dokumen/arsip yang meningkat maka jumlah ruangan penyimpanan dokumen/arsip juga semakin meningkat.

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Grobogan
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	Berkas	-	-	-	-	-
2.	Pengelolaan arsip secara otomasi	Berkas	-	-	-	-	-
3.	Penerbitan naskah peraturan tentang kearsipan	Buku	-	-	-	-	-
4.	Meningkatnya informasi keasipan	Lokasi	1	1	1	1	1
5.	Pengelolaan arsip secara baku	SKPD	53	53	53	61	53
6.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	180	425	150	200	120
7.	Pemeliharaan arsip dinamis dan statis	ruangan	1	1	1	1	1

Sumber : Data Isian SKPD Kantor Arsipda Kab. Grobogan, Tahun 2016

2.3.3. Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Letak Kabupaten Grobogan yang bukan termasuk wilayah pesisir menjadikan produksi perikanan hanya mengandalkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap di perairan umum. Produksi perikanan Budidaya di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 relatif kecil, hanya sebanyak 1.890.990 kg, sedangkan produksi perikanan tangkap di perairan umum hanya sebanyak 934.500 kg. Ada kecenderungan peningkatan produksi perikanan baik pada perikanan budidaya maupun perikanan tangkap di perairan umum. Pada tahun 2011 produksi perikanan budidaya hanya sebanyak 574.056 kg, sedangkan produksi perikanan tangkap di perairan umum hanya sebanyak 673.776 kg.

Beberapa upaya peningkatan produksi budidaya telah dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk memperluas areal budidaya perikanan, mengoptimalkan balai benih ikan dalam penyediaan benih unggul, dan melakukan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan. Tingkat cakupan bina kelompok ikan sebesar 75% atau sebanyak 20 kelompok pada tahun 2015. Sementara itu upaya peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum dilakukan dengan pembinaan kelompok nelayan, dan penebaran benih ikan di perairan umum. Pembinaan terhadap kelompok nelayan perairan umum mencapai sebanyak 30 kelompok atau 27% pada tahun 2015. Penebaran benih ikan di waduk-waduk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan harapan agar benih ikan yang ditebar dapat meningkatkan populasi ikan dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar.

Produksi produksi hasil olahan ikan di Kabupaten Grobogan meningkat dari sebanyak 128.671 kg pada tahun 2011 menjadi 284.375 kg pada tahun 2015 yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah usaha pengolahan ikan dari sebanyak 43 unit menjadi 80 unit. Dalam rangka meningkatkan produksi hasil olahan ikan, Pemerintah Kabupaten Grobogan meningkatkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas dan higienisitas produk hasil olahan ikan sehingga memenuhi standar cara pengolahan ikan yang baik dan dapat diterima pasar. Minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan Kabupaten Grobogan masih kurang, terlihat dari tingkat konsumsi makan ikan per tahun hanya sebanyak 14,43 kg/kapita pada tahun 2015. Dalam rangka meningkatkan tingkat konsumsi ikan, setiap tahun pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan kampanye Gemar Makan Ikan (Gemarikan) dengan sasaran siswa SD. Kegiatan Gemarikan ini bertujuan agar lebih

banyak masyarakat yang tahu tentang ikan, kandungan gizi dan manfaatnya sehingga mereka menjadi suka untuk mengkonsumsinya.

Secara rinci perkembangan kinerja urusan perikanan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi perikanan Tangkap	ton	673.776	771.980	814.428	887.854	934.500
2	Cakupan bina kelompok nelayan	%	10	14	22	26	30
3	Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	40%	43%	55%	46%	27%
4	Produksi perikanan budidaya	kg	574.056	592.630	814.602	1.539.000	1.890.990
5	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	kelompok	15	15	20	20	20
6	Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	67%	80%	75%	75%	75%
7	Tingkat konsumsi makan ikan	kg/kap.	10,80	11,28	12,28	13,48	14,43
8	Jumlah produksi hasil olahan ikan	Kg	128.671	145.330	274.995	276.090	284.375
9	Jumlah usaha pengolahan ikan	unit	43	48	72	78	80

Sumber : Data Isian SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Grobogan, Tahun 2016

2. Urusan Pariwisata

Kabupaten Grobogan memiliki potensi Destinasi Pariwisata yang beragam, meliputi wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata religi dan wisata kuliner. Adapun wisata alam yang menjadi unggulan adalah Bledug Kuwu, karena merupakan fenomena alam yang luar biasa yaitu berupa letupan-letupan (bledug) yang membentuk bola lumpur raksasa yang terjadi sejak ratusan tahun yang lalu hingga sekarang di areal tanah Pemerintah Kabupaten seluas ± 32 hektar. Obyek wisata tersebut juga menjadi tujuan penelitian di bidang geologi dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berasal dari Semarang, Yogyakarta dan Bandung.

Kabupaten Grobogan juga memiliki obyek wisata alam pegunungan yang berada di pegunungan kendeng utara antara lain bukit pandang di Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan yang bisa melihat wilayah Kabupaten Grobogan dari atas bukit/pegunungan. Selain itu terdapat pula Goa Lawa dan Goa Macan dengan keindahan staktit dan stalatmitnya.

Selain itu terdapat pula Obyek Wisata Api Abadi Mrapen yang melegenda dan menjadi tempat dilaksanakannya pengambilan api untuk obor event-even nasional bahkan internasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), Asean Games, Paragames dan sebagainya bahkan untuk pengambilan api peringatan Waisak Nasional dan Internasional. Saat ini lokasi Api Abadi Mrapen telah dibangun Museum Olahraga yang melengkapi daya tarik obyek wisata Api Abadi Mrapen.

Salah satu kebijakan RPJPD dan RPJMD tahap ke-2 yaitu : Peningkatan kualitas produk sektor industri, perdagangan dan pariwisata melalui peningkatan kualitas dan produktifitas SDM. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut, pengembangan destinasi wisata terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Jumlah obyek wisata yang dikembangkan semakin meningkat, yang terbaru dan banyak pengunjungnya adalah Taman Rekreasi dan Kolam Renang Mulia Klambu serta Taman Rekreasi Water And Snow Gubug. Sedangkan pada wisata kuliner telah ada Danau Resto yang dilengkapi dengan berbagai daya tarik serta sarana dan prasarana penunjang seperti adanya gasebo-gasebo di tepi danau buatan dan wisata pendidikan berupa pesawat terbang. Di bidang akomodasi pembangunan hotel-hotel baru juga telah bertambah yang hingga tahun 2016 ini telah berdiri 10 hotel, baik hotel bintang II, hotel bintang I dan hotel non bintang dan akan berdiri 3 hotel yang kesemuanya untuk menunjang pariwisata Kabupaten Grobogan.

Peningkatan usaha-usaha di bidang pariwisata ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata baik domestik maupun manca negara sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Grobogan dalam kurun 5 tahun terakhir telah mengalami naik-turun, kenaikan terjadi pada tahun 2010 hingga tahun 2013, sedangkan penurunan di mulai tahun 2014 disebabkan pendapatan Obyek Wisata Kedungombo tidak lagi masuk ke pendapatan daerah Kabupaten Grobogan. Mulai tahun 2015 mengalami peningkatan kembali disebabkan munculnya obyek wisata baru yang dikelola swasta seperti Taman Rekreasi Mulia Klambu, Ayodya Bloombang waterpark dan lain-lain. Berdasarkan data statistik pariwisata, kunjungan wisata pada tahun 2010 sebanyak 90.144 wisatawan menjadi 200.289 wisatawan pada tahun 2015. Pada kurun waktu 5 tahun mendatang, usaha-usaha di bidang pariwisata diharapkan terus mengalami perkembangan dan kemajuan sehingga dapat meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Pada tahun 2016 ini telah dimulai dengan disusunnya *Detail Engineering Design* Bledug kuwu yang akan dijadikan

pedoman untuk pengembangan dan pembangunan obyek wisata Bledug Kuwu agar bisa menjadi ikon wisata di kabupaten Grobogan. Pengembangan dan pembangunan obyek-obyek wisata lain juga diharapkan terus berkembang sehingga dapat membawa dampak ganda (*multiplier effect*) pada ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.

Usaha pengembangan pariwisata dengan kondisi potensi yang dimiliki saat ini menjadi tantangan yang besar. Destinasi wisata yang sudah berkembang jumlahnya yang dikelola pemerintah daerah saat ini hanya tinggal 2, dari jumlah sebelumnya yang mencapai 6 lokasi. Penurunan tersebut dikarenakan adanya pengalihan pengelolaan, baik pada pemerintah provinsi maupun pada pihak swasta. Untuk itu pemerintah Kabupaten Grobogan perlu mengembangkan kembali potensi-potensi wisata yang selama ini belum tergali.

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional; Sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, usaha-usaha dibidang pariwisata meliputi 13 bidang, antara lain :

1. Daya tarik wisata
2. Kawasan pariwisata
3. Jasa transportasi wisata
4. Jasa perjalanan wisata
5. Jasa makanan dan minuman
6. Penyediaan akomodasi
7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran -
9. Jasa informasi pariwisata
10. Jasa konsultan pariwisata
11. Jasa pramuwisata
12. Wisata tirta dan
13. SPA.

Secara rinci pencapaian kinerja urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah restoran dan rumah makan	unit	38	54	72	74	32
2	Jumlah penginapan / hotel	buah	9	9	8	10	10
3	Jumlah kunjungan wisata	orang	90.144	139.124	244.063	30.057	200.289
4	Jumlah obyek wisata yang telah dikembangkan	unit	2	3	4	6	2
7	Jumlah kelompok sadar wisata	kelompok	2	2	4	4	6
8	Jumlah desa wisata	desa	2	2	4	4	6

Sumber : Data Isian SKPD Disparbud Kab. Grobogan, Tahun 2016

3. Urusan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terbagi atas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Luas lahan pertanian di Kabupaten Grobogan mencapai 197.586 Ha. Luas lahan tersebut terdiri dari sawah sebesar 82.757 Ha dan luas peruntukan pertanian bukan sawah sebesar 89.738 Ha.

1) Tanaman Pangan

Jenis tanaman pangan utama Kabupaten Grobogan yaitu padi, jagung, dan kedelai. Produktivitas tanaman pangan utama dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, Pada Tahun 2011 produktivitas tanaman pangan utama sebesar 53,75 kwintal/hektar, meningkat menjadi 60,20 kwintal/hektar pada tahun 2015.

Jumlah produksi padi dalam kurun waktu lima tahun (2011 – 2015) menunjukkan peningkatan dari sebanyak 602.689 ton menjadi 764.148 ton. Produksi padi yang cukup besar tersebut diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Grobogan sebagai kabupaten yang surplus beras. Produksi jagung dalam kurun waktu yang sama juga mengalami peningkatan. Sedangkan untuk kedelai meskipun fluktuatif namun trennya mengalami peningkatan. Perkembangan produksi padi dan tanaman pangan utama lainnya selama tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Produksi Tanaman Pangan Utama
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Komoditi	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha)	53,75	57,21	53,87	57,62	60,20
2	Produksi pertanian tanaman pangan utama (Ton)					
	- Padi	602.689	628.569	612.612	608.751	764.148
	- Jagung	502.212	575.615	559.555	590.776	656.027
	- Kedelai	14.899	65.114	28.975	45.254	43.760

Sumber : Data Isian PD Dinas Pertanian TPH Kab. Grobogan, Tahun 2016

2) Hortikultura

Komoditas hortikultura yang dikembangkan di Kabupaten Grobogan antara lain bawang merah, cabe besar, cabe rawit, semangka, jambu air, belimbing, pisang, dan melon. Pada lima tahun terakhir, berbagai komoditas hortikultura tersebut mengalami fluktuasi produksi. Namun terdapat tren peningkatan produksi komoditas cabe rawit meskipun sempat mengalami penurunan produksi pada tahun 2013. Perkembangan produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57
Produksi komoditas hortikultura Kabupaten Grobogan
Tahun 2011– 2015 (Kwintal)

No	Jenis Tanaman	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bawang merah	58.110	19.232	29.113	76.984	53.296
2	Cabe Besar	5.473	13.203	10.703	9.428	10.672
3	Cabe Rawit	11.429	18.301	16.701	19.625	27.143
4	Semangka	115.010	84.899	72.495	164.220	126.066
5	Jambu air	16.571	23.509	10.287	18.776	11.913
6	Belimbing	5.281	6.948	8.328	7.911	6.370
7	Pisang	24.156	366.892	412.998	293.933	371.097
8	Melon	90.341	83.275	78.757	121.255	112.738

Sumber : Data Isian PD Dinas Pertanian TPH Kab. Grobogan, Tahun 2016

3) Peternakan

Dalam upaya pengembangan usaha peternakan maka telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan di masing-masing daerah. Peluang pengembangan usaha

peternakan di Kabupaten Grobogan masih terbuka lebar apabila dikaitkan dengan perkiraan (estimasi) peningkatan kebutuhan konsumsi hasil ternak seiring dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi dan taraf hidup masyarakat.

Beberapa jenis komoditas peternakan yang dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Grobogan meliputi sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam, dan itik. Jumlah populasi komoditas peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Grobogan menunjukkan angka yang fluktuatif, Tidak ada komoditas yang menonjol dari sektor peternakan di Kabupaten Grobogan. Perkembangan populasi hewan ternak di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Grobogan
Tahun 2011-2015 (ekor)

No	Jenis Ternak	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sapi potong	212.409	197.430	137.242	151.324	178.555
2.	Kerbau	2.546	2.581	1.920	2.037	2.457
3.	Kambing	111.839	115.394	141.425	108.820	117.756
4.	Domba	18.928	29.528	14.936	15.875	18.257
5.	Unggas (Ayam)	1.194.524	985.995	1.131.141	1.200.027	1.294.904

Sumber : Data Isian PD Dinas Pertanian TPH Kab. Grobogan, Tahun 2016

Produksi daging di Kabupaten Grobogan untuk semua komoditas peternakan rata-rata menunjukkan peningkatan. Perkembangan produksi daging selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59
Data Realisasi Produksi Daging di Kabupaten Grobogan
Tahun 2011-2015 (Kg)

No	Jenis Ternak	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sapi potong	1.074.665	1.090.522	1.539.856	1.586.017	1.641.121
2	Kerbau	65.120	67.520	84.800	84.500	113.120
3	Kambing	743.088	471.350	566.970	583.980	737.300
4	Domba	46.433	47.863	39.660	53.380	105.902
5	Unggas (Ayam)	782.508	961.392	597.285	45.080	1.872.516

Sumber : Data Isian PD Dinas Pertanian TPH Kab. Grobogan, Tahun 2016

Peningkatan hasil peternakan antara lain didukung oleh menurunnya angka kesakitan ternak yang terjadi. Angka morbiditas/kesakitan ternak untuk semua jenis ternak yang ada rata-rata menunjukkan penurunan. Penurunan angka morbiditas/kesakita tersebut didorong antara lain oleh penanganan dan pengobatan terhadap hewan ternak yang dilakukan. Selain faktor pengobatan, hal lain yag mempengaruhi produksi peternakan adalah

pemanfaatan teknologi dalam pembiakan ternak. Pemanfaatan teknologi tersebut antara lain adalah inseminasi buatan pada hewan ternak khususnya sapi potong. Berikut ini adalah data terkait dengan kondisi peternakan di Kabupaten Grobogan.

Tabel 2.60
Capaian dan Gambaran Kondisi Peternakan di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satu an	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka kesakitan / morbiditas ternak						
	Sapi	ekor	2.092	1.902	1.379	1.375	1.174
	Kerbau	ekor		-	-	3	-
	Kambing	ekor	854	754	672	670	670
	Domba	ekor					
	Ayam	ekor	916	3.723	1.996	1.953	1.860
2.	Angka Pengobatan ternak						
	Vaksin AI (Ayam)	Dosis	35.000	55.000	45.000	30.000	33.000
	Desinfektan	Liter	150	350	250	150	300
	ternak besar (sapi)	Ekor	22.500	22.500	17.500	17.500	17.500
3.	Capaian Inseminasi Buatan Sapi Potong	Dosis	63.393	60.535	60.408	73.866	80.996
4.	Capaian Kelahiran hasil IB	Ekor	44.803	38.485	37.690	38.149	45.841
5.	Pengembangan Biogas	Unit	15	10	10	12	9

Sumber : Data Isian PD Dinas Pertanian TPH Kab. Grobogan, Tahun 2016

Keberhasilan program-program pertanian di Kabupaten Grobogan antara lain didukung oleh keberadaan kelompok-kelompok tani yang ada di masyarakat. Jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Grobogan adalah 1.600 kelompok, dengan total anggota kelompok mencapai 217.322 orang. Peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pemberdayaan kelompok tani yang ada antara lain dengan melaksanakan pembinaan, penyuluhan, dan pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian.

Capaian terkait dengan pembinaan kelompok tani yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.61
Data Kelompok Tani di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kelompok tani	orang	1.670	1.671	1.671	1.671	1.600
2.	Jumlah anggota	orang	211.047	212.544	210.347	210.347	217.322
3.	Jumlah Gapoktan Penerima BLM PUAP*	orang	220	236	267	280	280
4.	Jumlah Kemitraan yang terjalin	kegiatan	2	2	2	2	10
5.	Jumlah promosi yang diikuti	kegiatan	2	2	2	3	3

Sumber : Data Isian PD Dinas Pertanian TPH Kab. Grobogan, Tahun 2016

4. Urusan Kehutanan

Wilayah Kabupaten Grobogan masih banyak terdapat kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Purwodadi, KPH Gundih, KPH Telawa, KPH Semarang dan Randublatung. Dengan luasan hutan negara sebesar 68.632,320 Ha dan hutan rakyat sebesar 15.496 Ha dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Grobogan sebesar 197.586,420 Ha menunjukkan bahwa kawasan hutan cukup mendominasi area penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Grobogan. Jumlah produksi kayu hasil hutan pada tahun 2015 mencapai 30.061 M3, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2014 sebesar 34.08 M3. Sementara itu dalam lima tahun terakhir, produksi hasil hutan tertinggi pada tahun 2011 mencapai 43.090 M3. Produksi hasil hutan dilihat dari jenisnya pada tahun 2014 meliputi produksi hasil hutan kayu jati dikelola oleh Perum.

Potensi sumber daya hutan yang dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat ada juga yang berasal dari non kayu. Potensi sumber daya hutan non kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai nilai tambah dalam meningkatkan perekonomian. Hasil hutan non kayu meliputi hewan buruan, rambut hewan, kacang-kacangan, biji, buah peri, jamur, minyak, daun, rempah-rempah, ranting untuk kayu bakar, pakan hewan ternak dan madu. Selain itu, tumbuhan paku, kayu manis, lumut, karet, resin, getah dan ginseng. Produksi hasil hutan non kayu di Kabupaten Grobogan menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2011, produksi hutan non kayu sebesar 3.789 ton, meningkat signifikan sampai dengan tahun 2015 mencapai 28.963 ton. Tiap tahun produksi hutan non kayu terlihat meningkat yang menunjukkan nilai manfaat yang didapatkan oleh masyarakat sangat tinggi.

Potensi dan pemanfaatan hasil hutan di Kabupaten Grobogan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.62
Perkembangan Kinerja Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	43.090	25.139	21.314	34.080	30.061
2.	Jumlah Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	3.789	17.337	24.408	28.407	28.963

Sumber : Data Isian SKPD Dinas Kehutanan Kab. Grobogan Tahun 2016

Luas hutan rakyat di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 mencapai 15.496 Ha, mengalami penurunan luasan dibanding dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 seluas 18.760 Ha dan tahun 2014 seluas 19.795 Ha. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Grobogan adalah masih terjadinya kejahatan bidang kehutanan berupa penebangan liar tanpa ijin, penyalahgunaan lahan konservasi dan sebagainya. Tercatat kejahatan bidang kehutanan pada tahun 2015 sebanyak 320 kasus. Dilihat dari jumlahnya masih tinggi, namun menunjukkan penurunan setiap tahunnya, tertinggi angka kejahatan bidang kehutanan pada tahun 2011 mencapai 511 kasus. Upaya mengurangi pengrusakan hutan di Kabupaten Grobogan tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Saat ini kelompok masyarakat pengelola hutan yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 sebanyak 20 kelompok. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 28 kelompok.

Kinerja perlindungan dan konservasi sumber daya hutan di Kabupaten Grobogan selama periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Kasus Kejahatan Bidang Kehutanan	kali	511	322	363	340	320
2.	Luas Hutan Rakyat	Ha	16.678	13.031	18.760	19.795	15.496
3.	Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Buah	342	354	371	395	414
4.	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Dibina	Klp	13	15	20	28	20

Sumber : Data Isian SKPD Dinas Kehutanan Kab. Grobogan Tahun 2016

Selain sektor kehutanan, Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki sumber perekonomian masyarakat dari sektor perkebunan. Produksi sektor perkebunan di Kabupaten Grobogan meliputi tembakau, tebu dan kelapa. Produksi sektor perkebunan di Kabupaten Grobogan menunjukkan fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Produksi tembakau menunjukkan peningkatan tertinggi pada tahun 2014 yang mencapai 2.564,10 ton. Untuk produksi tebu tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai 118.200 ton. Sementara itu produksi kelapa masih relatif kecil yang mana pada tahun 2015 baru mencapai 23 ton.

Perkembangan produksi sektor perkebunan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.64
Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Produksi Tembakau	Ton	965,676	1.985,60	1.903,47	2.564,10	2.515,50
2.	Jumlah Produksi Tebu	Ton	5.935	89.698,50	97.240	115.239	118.200
3.	Jumlah Produksi Kelapa	Ton	26	25	27	21	23
4.	Jumlah Kelompok Tani Perkebunan yang Dibina	Klp	13	13	14	14	14

Sumber : Data Isian SKPD Dinas Kehutanan Kab. Grobogan Tahun 2016

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan perencanaan kehutanan, pengelolaan kehutanan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sepenuhnya dialihkan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat. Kewenangan yang masih melekat pada Pemerintah Daerah hanya ada pada konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kewenangan pemerintah daerah hanya pada pelaksanaan pengelolaan TAHURA. Untuk itu, lima tahun ke depan, pemerintah Kabupaten Grobogan perlu mengupayakan pada penetapan TAHURA sebagai wilayah konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Listrik merupakan kebutuhan masyarakat yang penting, dengan daya listrik maka banyak aktifitas yang bisa dilakukan. Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Grobogan sampai dengan tahun 2015 sebesar 84,92%. Hal ini tentu harus ditingkatkan agar lebih banyak rumah tangga yang memperoleh manfaat dari adanya listrik.

Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Grobogan masih cukup tinggi meskipun dari tahun ke tahun persentasenya telah mengalami penurunan, tahun 2011 sebesar 98,35% menjadi 53,92% pada tahun 2015. Kontribusi pertambangan terhadap PDRB tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi, tahun 2013 kontribusi pertambangan mengalami puncaknya

dengan kontribusi sebesar 1,71% sedangkan tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 1,21%.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	60	63	57,79	74,2	84,92
2.	Pertambangan tanpa ijin	%	98,35	97,39	41,74	55,07	53,92
3.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	1,50	1,64	1,71	1,49	1,21

Sumber : Data Isian SKPD Dinas Bina Marga dan ESDM Kab. Grobogan Tahun 2016

6. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu urusan yang cukup besar dalam proporsi pembangunan ekonomi di Kabupaten Grobogan. Kondisi ini tercermin dari kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB yang mencapai 20,56% di tahun 2015. Tingginya kontribusi sektor perdagangan salah satunya disebabkan oleh tingginya perputaran ekonomi sektor tersebut di Kabupaten Grobogan. Nilai bersih ekspor Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 mencapai Rp. 142.032.319.000, menurun dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 sebesar Rp. 1.552.000.000.

Jumlah pasar yang dalam kondisi baik saat ini sebanyak 16 pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan juga melakukan kegiatan pembinaan terhadap pedagang pasar yang diharapkan mampu untuk memotori proses-proses jual-beli yang baik dan tidak merugikan konsumen. Tingkat pengawasan pasar saat ini belum keseluruhan baru mencapai 15,17%. Sementara itu pasar yang memenuhi persyaratan sesuai standar baru sebesar 43,75%, masih memerlukan banyak perbaikan untuk menciptakan pasar yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Jenis pembinaan yang dilakukan antara lain penertiban PKL di beberapa titik. Persentase PKL yang tertata pada tahun 2014-2015 mencapai 10,34%.

Kondisi pembangunan sektor perdagangan di Kabupaten Grobogan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.66
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Pasar yang diawasi	buah	10,67	11,24	12,36	14,61	15,17
Tingkat Pengaduan yang ditangani (%)	%	66,67	66,67	66,67	75,00	75,00
Produk yang bisa diterima pasar internasional	Produk	-	1	2	2	3
Perkembangan nilai ekspor	Rp (000)	-	875.000	1.953.000	1.552.000	142.032.319
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	17,79	18,13	18,85	19,30	20,56
Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	%	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Persentase lokasi PKL yang tertata	%	6,9	6,9	10,34	10,34	10,34
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	12,25	12,25	25	37,5	43,75
Jumlah pasar daerah	%	16	16	16	16	16

Sumber : Isian Data SKPD Disperindagtamben Kab. Grobogan, Tahun 2016

7. Urusan Perindustrian

Penyerapan tenaga kerja dalam sebuah industri dapat digunakan sebagai salah satu kriteria dalam menentukan besaran suatu industri. Pertama, Sebuah industri yang memiliki jumlah pekerja antara 1 – 4 orang merupakan industri dengan skala mikro. Kedua adalah industri kecil, yaitu jumlah pekerja antara 5 – 19 orang. Ketiga adalah industri sedang dengan tenaga kerja antara 20 – 99 orang. Dan yang keempat adalah industri besar yaitu industri yang mampu menyerap tenaga kerja 100 orang tenaga kerja atau lebih. Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 banyak didominasi oleh industri dengan skala kecil dan menengah. Pada tahun 2015 jumlah industri skala kecil dan menengah mencapai 99,96% dari total industri yang ada. Sebagian besar industri yang berkembang adalah industri makanan, minuman, kayu, dan produk pengolahan batu bata. Pertumbuhan industri di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 mencapai 1,27% pertahun. Kondisi ini paling baik dibandingkan dengan beberapa kondisi sebelumnya yang hanya mencapai 0,95% pada tahun 2014. Pertumbuhan industri yang didukung oleh pertumbuhan produksi sektor industri memberikan kontribusi yang cukup baik dalam proporsinya pada PDRB. Pada tahun 2015 kontribusi sektor perindustrian menurun sebesar 2,7% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 2,99%. Sementara itu terjadi dengan peningkatan omset penjualan produk IKM yang meningkat sebesar 15,09% pada tahun 2015. Meningkatnya omset penjualan IKM didukung oleh perbaikan sistem produksi

oleh pelaku usaha. Sebanyak 73,5% total industri pada tahun 2015 industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi.

Peningkatan kualitas produk sektor industri dan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan. Jumlah IKM yang mendominasi sektor industri di Kabupaten Grobogan pada umumnya memiliki kemampuan SDM dan modal yang terbatas sehingga perlu adanya fasilitasi, bimbingan teknis dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Jumlah IKM yang dibina pada tahun 2015 baru mencapai 1,2% dari total IKM yang ada. Legalitas usaha merupakan salah satu unsur utama dalam kegiatan industri. Ijin usaha akan berdampak terhadap kemampuan dan keabsahan industri dalam proses penjualan, marketing serta kerjasama dengan pihak ketiga; baik dalam bentuk kerjasama penjualan maupun permodalan. Jumlah industri yang memiliki izin usaha masih terbatas, yaitu sebesar 57% pada tahun 2015.

Jumlah IKM yang mengikuti fasilitasi promosi juga masih terbatas yaitu sebesar 0,02% pada tahun 2015. Kluster industri yang berkembang di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 sudah mencapai 100%, meningkat dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yang mencapai 87,5%. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas para pelaku IKM khususnya pengrajin adalah melakukan pembinaan rutin terhadap para pengrajin. Secara rinci kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Grobogan
Tahun 2011 - 2015

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan pembinaan unit usaha IKM	%	1,0	1,07	1,1	1,16	1,2
2	Pertumbuhan Industri	%	0,56	0,51	0,19	0,95	1,27
3	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,37	3,39	3,45	2,99	2,7
4	Persentase industri kecil dan menengah	%	100	100	99,99	99,97	99,96
5	Persentase industri yang telah memiliki ijin usaha	%	55	60	50	50,6	57
6	Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0	0,04	0,03	0,05	0,02
7	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	70	72,7	73	72,7	73,5

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
8	Persentase industri yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi	%	48,66	53,99	50	50,6	62
9	Persentase klaster industri yang berkembang	%	75,00	75,00	75,00	87,5	100
10	Persentase sentra industri yang telah berkembang	%	8,03	8,39	60,58	80,66	83,58
11	Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	4,58	4,69	23,96	7,48	15,09

Sumber : Data Isian SKPD Disperindagtamben Kab. Grobogan Tahun 2016

8. Urusan Transmigrasi

Pembangunan urusan Transmigrasi memiliki tujuan untuk pemeratakan persebaran penduduk sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di lokasi baru. Selain itu secara sosial budaya, transmigrasi juga secara tidak langsung meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Transmigrasi juga menjadi sarana untuk transfer ilmu dan keahlian dari satu daerah ke daerah lain, sehingga potensi daerah yang sebelumnya tidak dikelola akan dapat dikembangkan, tanpa mengurangi khasanah kekayaan lokal yang sudah ada.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintah bidang transmigrasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten adalah:

1. Perencanaan Kawasan Transmigrasi, dengan lingkup: pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kabupaten/ kota.
2. Pembangunan kawasan transmigrasi, dengan lingkup: penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota
3. Pengembangan kawasan transmigrasi, dengan lingkup: pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

Urusan transmigrasi di Kabupaten Grobogan menjadi tanggungjawab Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Meskipun tidak sebanyak beberapa tahun yang lalu, minat warga masyarakat Kabupaten Grobogan yang ingin mengikuti program transmigrasi masih cukup tinggi. Dengan di dukung oleh komitmen pemerintah daerah yang tinggi terhadap upaya peningkatan transmigrasi, Pemerintah Kabupaten memperoleh penghargaan Transmigrasi Award dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2014.

Pemberangkatan transmigran dari Kabupaten Grobogan pada tahun 2011-2015 mengalami trend yang cenderung menurun setiap

tahunnya. Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Grobogan berhasil memberangkatkan transmigrasi sebanyak 60 KK, akan tetapi mengalami penurunan hingga pada tahun 2015 hanya mampu memberangkatkan 14 kepala keluarga. Meskipun jumlah transmigran yang diberangkatkan sedikit akan tetapi jumlah calon transmigran relatif banyak dan fluktuatif setiap tahun. Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU) pada tahun 2011 tercatat 60 orang, mengalami penurunan menjadi 14 orang pada tahun 2015. Semakin menurunnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dikarenakan keterbatasan alokasi kuota dan lokasi penempatan program transmigrasi dari pemerintah pusat/ provinsi kepada pemerintah kepada Kabupaten Grobogan.

Jumlah perjanjian kerjasama (MoU) antar daerah kerjasama transmigrasi juga menunjukkan trend penurunan, pada tahun 2011 perjanjian kerjasama transmigrasi dilakukan dengan 5 daerah akan tetapi di tahun 2015 terjadi penurunan, dimana perjanjian kerjasama transmigrasi hanya dilakukan dengan 3 daerah saja. Perkembangan kinerja urusan transmigrasi Kabupaten Grobogan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi
Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	KK	60	51	25	8	14
2.	Jumlah perjanjian kerjasama (MoU) antar daerah kerjasama transmigrasi	dok	5	5	3	2	3
3.	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	Orang	60	51	25	8	14

Sumber : Data Isian SKPD Dinsosnakertrans Kab. Grobogan Tahun 2016

2.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Penunjang

1. Perencanaan Pembangunan

Sebagai urusan penunjang pemerintahan, perencanaan pembangunan memiliki fungsi menyediakan perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut sesuai dengan fungsi pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan dalam setiap pembangunan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015.

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan, mulai penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Kinerja urusan wajib perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan ditunjukkan dengan capaian perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2005–2025 ditetapkan dengan Perda Nomor 11 Tahun 2007, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2016, Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

2. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Upaya pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Grobogan dilakukan dengan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Secara rutin, pemerintah daerah melalui inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pengawasan dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan pemerintahan baik dilihat dari kinerja maupun penggunaan anggaran.

Kinerja pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, menunjukkan pada tahun 2015 terdapat 613 temuan, cukup tinggi jika dibandingkan dengan temuan-temuan sebelumnya seperti tahun 2013 sebanyak 91 temuan dan tahun 2014 sebanyak 194 temuan. Dari banyaknya jumlah kasus temuan oleh Inspektorat, selanjutnya temuan tersebut ditindaklanjuti oleh penyelenggara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dengan melihat kondisi yang ada, menunjukkan tindaklanjut atas berbagai temuan masih sangat rendah. Bisa dilihat pada data tahun 2015, dari sebanyak 613 temuan hanya 198 yang ditindaklanjuti. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Grobogan menunjukkan kinerja yang lebih jika dibandingkan dengan hasil yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Temuan atas kinerja pemerintahan menunjukkan adanya penurunan selama empat tahun terakhir, yaitu pada tahun 2012 sebanyak 29 temuan menurun menjadi 14 temuan pada tahun 2015. Hampir setiap tahunnya temuan BPK atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Grobogan semakin membaik.

Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah salah satunya adalah ketersediaan SDM yang terampil dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mencapai perwujudan SDM yang handal, antara lain dengan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Tenaga pemeriksa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja di Kabupaten Grobogan sudah cukup baik. Pada tahun 2015 kinerjanya sudah mencapai 93,33%. Untuk lima tahun ke depan, masih ada sekitar 6,67% yang belum mendapatkan peningkatan kapasitas profesionalisme pengawasan. Kinerja peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH serta Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Indikator Kinerja Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH di Kabupaten Grobogan
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Dokumen	163	160	156	153	122
2	Jumlah laporan hasil tindak lanjut dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun :						
	Inspek Kabupaten						
	• Temuan	Dokumen	315	229	91	194	613
	• Tindak Lanjut	Dokumen	296	179	84	77	198
	BPK :						
	• Temuan	Dokumen	16	29	30	30	14
	• Tindak Lanjut	Dokumen	14	20	28	12	6
3	Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	%	85,71	84,2	88,88	83,33	93,33

Sumber : Isian Data SKPD Inspektorat Kab. Grobogan, Tahun 2016

3. Keuangan

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan dan belanja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja Operasi, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik. Kedua Belanja Operasi, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Ketiga belanja modal yang merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Keempat belanja transfer yang merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut, dan kelima belanja tak tersangka yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

Berdasarkan kondisi kinerja saat ini, Belanja Langsung terhadap total APBD pada tahun 2015 mencapai 39,22%, menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 41,99%. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan dalam APBD menunjukkan tren yang meningkat dibandingkan dengan kondisi lima tahun lalu. Namun pada tahun 2015 menunjukkan penurunan yaitu sebesar 13,52% dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 sebesar 13,75%. Sementara itu rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan sebesar 12,74%, lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2014 sebesar 10,90%. Rasio SILPA terhadap total belanja paling rendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 3,94% dan tahun 2012 sebesar 3,03%.

Kondisi kinerja Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70
Indikator Kinerja Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Belanja Publik terhadap DAU	%	61,21	51,24	65,23	70,68	76,94
2	Belanja Langsung terhadap total APBD	%	34,90	34,61	39,22	41,99	39,22
3	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	7,55	7,97	9,27	13,75	13,52
4	Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	%	3,94	3,03	11,56	10,90	12,74
5	Rasio SILPA thdp Jumlah Pendapatan	%	3,06	10,51	10,60	12,25	12,76
6	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	%	94,60	91,20	93,81	92,03	89,03
7	Peningkatan PAD	%	12,18	19,96	36,15	63,87	15,90
8	Rasio pajak terhadap PAD	%	17,05	17,72	29,68	19,35	19,22

Sumber : Data Isian SKPD DPKAD Kab. Grobogan, Tahun 2016

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Grobogan sudah berjalan dengan baik, dalam mencapai transparansi dan akuntabel. Pengelolaan keuangan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis akuntansi, nilai-nilai historis, realistis, periodisasi, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian secara wajar. Atas dasar tersebut, pengelolaan keuangan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 mendapatkan predikat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Daerah pada posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun 2014 yang baru mencapai Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selain itu tingkat pengelolaan aset daerah sudah menunjukkan kondisi 100, termasuk juga ketepatan dalam penyusunan APBD dan penyampaian laporan keuangan. Kondisi kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.71
Indikator Kinerja Predikat Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Opini BPK terhadap Lap Keu Daerah	%	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
2	Tingkat Pengelolaan asset daerah	%	100	100	100	100	100
3	Tingkat ketepatan laporan keuangan daerah (tepat)	%	100	100	100	100	100
4	Tingkat ketepatan penyusunan APBD (tepat)	%	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat

Sumber : Data Isian SKPD DPKAD Kab. Grobogan, Tahun 2016

4. Kepegawaian

Kewenangan pemerintah daerah terhadap bidang kepegawaian daerah yaitu melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dibidang Kepegawaian sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan. Pembinaan teknis dan admnistratif dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Indikator kinerja dalam rangka mendorong pada peningkatan disiplin aparatur adalah dengan pengenaaan tanda pengenal terhadap pegawai. Di Kabupaten Grobogan, pengenaaan tanda pengenal pegawai mencapai 600 ASN. Jumlah tersebut menunjukkan tidak ada perubahan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Terjadi penurunan jumlah jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 yang mencapai 700 ASN. Penurunan tersebut dimungkinkan karena adanya penurunan jumlah ASN yang bekerja di Pemerintahan Kabupaten Grobogan.

Peningkatan disiplin aparatur juga dapat dilihat dari banyaknya penanganan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN. Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin aparatur bersifat ringan dan berat. Penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN menunjukkan kinerja yang tetap yaitu sebanyak 35 ASN dalam lima tahun terakhir. Data tersebut masih

belum diperkuat seberapa banyak ASN yang melakukan pelanggaran disiplin setiap tahunnya. Upaya peningkatan disiplin aparatur dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Perkembangan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	ASN yang mendapatkan Tanda Pengenal Pegawai.	ASN	700	600	600	600	600
2.	Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	ASN	35	35	35	35	35

Sumber : Data Isian SKPD BKD Kab. Grobogan, Tahun 2016

Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur menjadi kewenangan daerah dalam rangka peningkatan kepangkatan, pembinaan karir dengan mutasi jabatan, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Upaya tersebut yaitu dengan meningkatkan pendidikan formal aparatur, mengikutsertakan aparatur dalam diklatpim dalam penyesuaian jabatan, menerapkan diklat prajabatan bagi CPNS dan melakukan diklat teknis fungsional. Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan formal pada tahun 2015 sebanyak 15 orang. Setiap tahun, aparatur yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal bersifat fluktuatif. Aparatur yang mengikuti pendidikan formal paling banyak pada tahun 2012 sebanyak 53 orang. Penyelenggaraan diklatpim golongan II, III dan IV setiap tahunnya yang diikuti tidak sama, sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2015, aparatur yang mengikuti diklatpim golongan II, III dan IV sebanyak 52 orang.

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan sesuai dengan waktu yang ditentukan paling banyak terjadi pada tahun 2015 sebanyak 670 orang. Tahun 2014 terjadi kekosongan pada penyelenggaraan diklat pra jabatan bagi CPNS. Sementara itu aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional pada tahun 2015 sebanyak 188 orang, menurun dibandingkan dengan pelaksanaan pada tahun 2013 yang mencapai 218 orang dan tahun 2014 sebanyak 403 orang. Kinerja peningkatan sumberdaya aparatur di Kabupaten Grobogan selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Indikator Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan formal	orang	11	53	24	20	15
2	Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklatpim (II, III dan IV)	orang	44	51	58	53	52
3	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan sesuai dengan waktu yang ditentukan	orang	278	207	38	-	670
4	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Teknis fungsional	orang	202	91	218	403	188

Sumber : Data Isian SKPD BKD Kab. Grobogan, Tahun 2016

Pembinaan dan pengembangan aparatur menjadi bagian tugas pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan, pemindahan, dan pemberhentian ASN Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja pada pembinaan dan pengembangan aparatur ditunjukkan melalui ASN yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu, ASN yang menerima SK pindah (mutasi) sesuai kebutuhan organisasi, penerbitan SK pensiun tepat waktu, ASN berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya, data ASN yang di update dan ASN yang mengikuti seleksi pimpinan tinggi. Pencapaian indikator kinerja pembinaan dan pengembangan aparatur di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Indikator Kinerja Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	ASN yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu	ASN	2500	2000	1600	1900	1200
2	ASN yang menerima SK pindah (mutasi) sesuai kebutuhan organisasi	ASN	125	100	125	100	125
3	Penerbitan SK pensiun tepat waktu	SK Pensiun	500	500	500	500	500
4	ASN berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya	orang	250	250	200	250	150
5	Data ASN yang di update	ASN	-	-	5000	4200	10577
6	ASN yang mengikuti seleksi pimpinan tinggi	orang	-	-	-	-	-

Sumber : Data Isian SKPD BKD Kab. Grobogan, Tahun 2016

5. **Legislasi Daerah**

Sekretariat Dewan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, administrasi, keuangan, persidangan dan risalah, informasi, keprotokolan serta hukum dan perundang-undangan. Seluruh tugas tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu Sekretariat dewan juga memiliki tugas untuk menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Kebutuhan dan Kemampuan.

Salah satu tugas Dewan yaitu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Perda disusun dan ditetapkan untuk menjamin ketenteraman, ketertiban dalam masyarakat yang menjamin keberlangsungan dunia usaha. Perda yang ditetapkan antara tahun 2010–2015 menunjukan kinerja yang baik yaitu antara 9-17 Perda. Penindakan terhadap pelanggaran Perda dilakukan oleh aparat Satpol PP dan Polri.

Tabel 2.75
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Dewan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	RAPERDA yang disetujui DPRD	buah	13	12	15	19	16
2	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	%	48	48	52	57	45

Sumber : Data Isian SKPD Sekretariat Dewan Kab. Grobogan, Tahun 2016

6. **Sekretariat Daerah**

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun perumusan kebijakan, mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, administrasi, organisasi dan tata laksana, pengelolaan sumberdaya aparatur serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Kondisi pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat berdasarkan kinerja pada tahun 2011-2015. Sekretariat daerah sebagai fungsi koordinasi menunjukkan tingkat capaian yang baik dengan rata-rata kinerja tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan lima tahun sebelumnya. Secara lebih rinci tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target

periode tahun 2011-2016 menurut indikator kinerja pelayanan perangkat daerah SKPD secara rinci ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 2.76
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Daerah

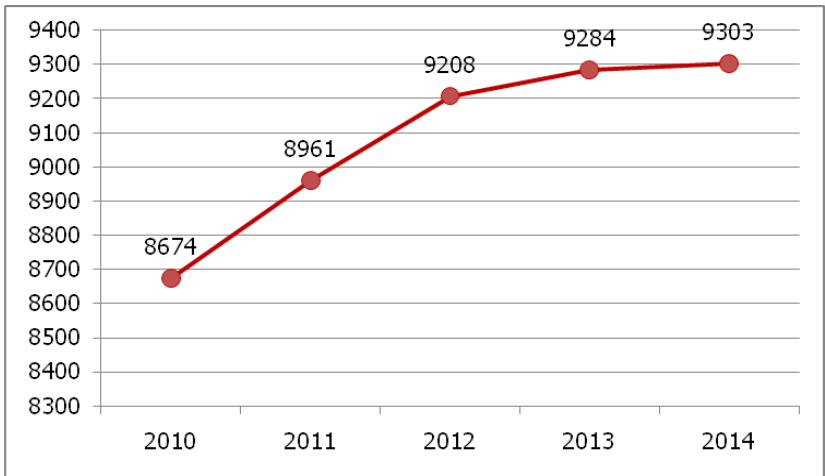
NO	Indikator Kinerja	Kinerja Pencapaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Realisasi Kerjasama antar daerah	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD
2	Administrasi Pertanahan	80 bidang, 7 Kelurahan	80 bidang, 7 Kelurahan	80 bidang, 7 Kelurahan	80 bidang, 7 Kelurahan	80 bidang, 7 Kelurahan
3	Kebijakan Regulasi Pemerintahan Desa yang diterbitkan.	300 perdes	300 perdes	300 perdes	300 perdes	300 perdes
4	Frekuensi Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	230 desa	230 desa	230 desa	230 desa	230 desa
5	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang disusun	5 Perda	5 Perda	5 Perda	5 Perda	5 Perda
6	Jumlah Peraturan Bupati (Perbup) yang disusun	12 Perbup	12 Perbup	12 Perbup	12 Perbup	12 Perbup
7	Jumlah Keputusan Bupati yang diselesaikan penyelesaiannya/pengkajiannya	1000 Keputusan Bupati	1000 Keputusan Bupati	1000 Keputusan Bupati	1000 Keputusan Bupati	1000 Keputusan Bupati
8	Jumlah siaran penyelenggaraan pemerintahan	38 Media Cetak dan TV, 45 kali, 1 buah	38 Media Cetak dan TV, 45 kali, 1 buah	38 Media Cetak dan TV, 45 kali, 1 buah	38 Media Cetak dan TV, 45 kali, 1 buah	38 Media Cetak dan TV, 45 kali, 1 buah
9	Jumlah pengguna informasi publik.	5000 Orang, 7Kecamatan	5000 Orang, 7Kecamatan	5000 Orang, 7Kecamatan	5000 Orang, 7Kecamatan	5000 Orang, 7Kecamatan
10	Meningkatnya koordinasi ekonomi, keuangan, industri daerah.	3 kali Rakor SKPD dan Stakeholders, Monev, 2 kali laporan	3 kali Rakor SKPD dan Stakeholders, Monev, 2 kali laporan	3 kali Rakor SKPD dan Stakeholders, Monev, 2 kali laporan	3 kali Rakor SKPD dan Stakeholders, Monev, 2 kali laporan	3 kali Rakor SKPD dan Stakeholders, Monev, 2 kali laporan
11	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan BUMD	1 bintek, 4 kali rakor, 5 BUMD	1 bintek, 4 kali rakor, 5 BUMD	1 bintek, 4 kali rakor, 5 BUMD	1 bintek, 4 kali rakor, 5 BUMD	1 bintek, 4 kali rakor, 5 BUMD
12	Tersusunnya buku juklak APBD Kab. Grobogan.	170 Buku	170 Buku	170 Buku	170 Buku	170 Buku
13	Jumlah SKPD yang terintegrasi DataBase SIM	35 buku	35 buku	35 buku	35 buku	35 buku
14	Jumlah sistem / pola pendayagunaan aparatur yang disusun/ dilakukan	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem
15	Terselenggaranya Akuntansi dan Pelaporan keuangan.	11 data laporan keuangan, 12 LRA	11 data laporan keuangan, 12 LRA	11 data laporan keuangan, 12 LRA	11 data laporan keuangan, 12 LRA	11 data laporan keuangan, 12 LRA
16	Jumlah rakor pimpinan SKPD	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali

2.4. Aspek Daya Saing

1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Penduduk

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk

Rata-rata pengeluaran per-kapita di Kabupaten Grobogan cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010-2014. Rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Grobogan meningkat dari Rp 8.674.000 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 9.303.000 pada tahun 2014. Meningkatnya rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan perkapita yang diterima oleh masyarakat. Perkembangan rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



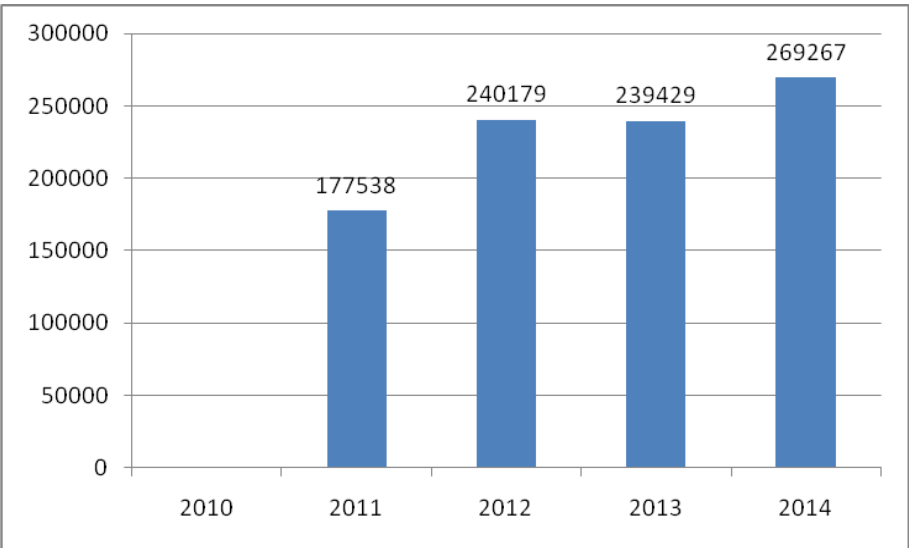
Sumber : Publikasi BPS

Gambar 2.32.
Grafik Indikator Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Penduduk
(Ribu Rp) Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014

2. Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Non Pangan

Tingkat kesejahteraan dalam sebuah wilayah merupakan sebuah perwujudan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui indikator pola konsumsi masyarakat; semakin tinggi pola konsumsi masyarakat menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Pola konsumsi masyarakat dibagi kedalam dua kategori, yaitu pengeluaran konsumsi untuk pangan dan pengeluaran konsumsi non pangan. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah melalui indikator pengeluaran konsumsi non pangan. Kondisi ini disebabkan bahwa alokasi pendanaan rumah tangga yang awalnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dapat digeser guna memenuhi kebutuhan konsumsi non pangan.

Rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Konsumsi non pangan pada tahun 2011 mencapai Rp 177.538 meningkat menjadi 240.179 pada tahun 2012 dan kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014 menjadi Rp 269.267. Perkembangan rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan di Kabupaten Grobogan secara rinci dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah ini.



Sumber : Publikasi BPS

Gambar 2.33.
Grafik Indikator Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Non Pangan
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2014

3. Peningkatan sarana kamar penginapan hotel

Tingkat hunian hotel di Kabupaten Grobogan menunjukkan kondisi yang cukup dinamis. Pada tahun 2010 tingkat hunian hotel mencapai 353 kamar menurun menjadi 319 pada tahun 2012 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 302. Pada tahun 2014 tingkat hunian hotel mengalami perbaikan menjadi 367. Perkembangan tingkat hunian hotel di Kabupaten Grobogan secara rinci dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah ini.



Sumber : Buku Grobogan Dalam Angka, 2015

Gambar 2.34.
Grafik Peningkatan Jumlah Kamar Hunian Hotel
Di Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014

4. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Grobogan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan rendah tersebar di beberapa daerah yang masih tertinggal, seperti Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Karangrayung, dan Kecamatan Toroh.

Tabel 2.77
Persebaran Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Akademi/ PT	SMU/ SMK	SLTP	SD	Tidak / Belum Tamat SD	Jumlah
1	Kedungjati	582	3.429	8.271	13.430	11.324	37.036
2	Karangrayung	1.208	5.045	11.113	30.845	34.589	82.800
3	Penawangan	919	4.015	9.141	19.941	20.120	54.135
4	Toroh	1.615	9.641	18.671	41.164	27.642	98.732
5	Geyer	657	3.647	7.954	23.148	21.083	56.490
6	Pulokulon	1.012	4.720	11.985	40.555	34.730	93.002
7	Kradenan	1.137	4.775	8.860	30.976	24.254	70.002
8	Gabus	834	3.471	7.325	28.405	23.397	63.433
9	Ngaringan	737	3.223	6.169	29.963	21.007	61.098

No	Kecamatan	Akademi/ PT	SMU/ SMK	SLTP	SD	Tidak / Belum Tamat SD	Jumlah
10	Wirosari	1.736	683	9.575	34.811	26.222	73.027
11	Tawangharjo	766	4.248	9.403	20.044	15.667	50.128
12	Grobogan	1.154	5.577	10.299	26.542	24.753	68.325
13	Purwodadi	7.724	25.150	28.788	38.490	23.093	123.245
14	Brati	642	3.007	7.227	18.461	13.140	42.477
15	Klambu	400	2.046	6.142	11.836	11.521	31.945
16	Godong	2.032	7.998	17.077	23.347	22.043	72.497
17	Gubug	1.998	9.944	18.563	21.861	18.527	70.894
18	Tegowanu	976	4.330	8.599	17.384	17.408	48.696
19	Tanggunganharjo	613	4.150	9.322	11.645	10.996	36.726
	Jumlah	26.742	109.098	214.483	482.850	401.516	1.234.689

Sumber : Buku Grobogan Dalam Angka, 2015

5. Rasio Ketergantungan

Kabupaten Grobogan semenjak tahun 2010 telah mengalami kondisi yang disebut sebagai bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15 tahun - 64 tahun) di suatu wilayah atau negara lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif (kurang dari 14 tahun dan diatas 65 tahun). Proporsi penduduk produktif (yang bekerja/angkatan kerja) lebih besar daripada penduduk tidak produktif (tidak bekerja), sehingga tingkat kebergantungan penduduk tidak produktif (anak-anak dan lansia) kepada penduduk yang produktif menjadi sangat rendah. Bonus demografi dapat dilihat berdasarkan nilai ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Angka ketergantungan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 909.290 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) mencapai 442.139 jiwa, sehingga Angka rasio ketergantungan adalah 49%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 49 orang yang non produktif. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk non produktif di Kabupaten Grobogan kurang dari 50%. Perkembangan angka ketergantungan di Kabupaten Grobogan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

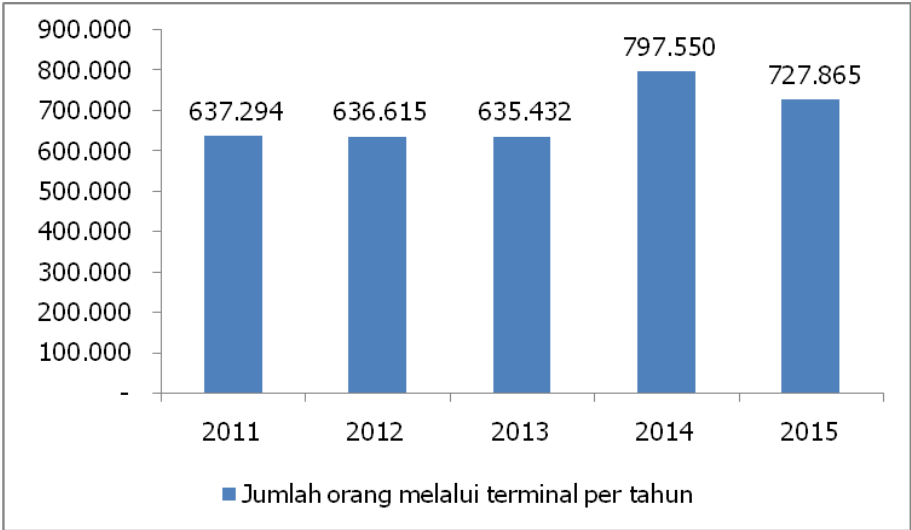
Tabel 2.78
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Grobogan Tahun 2014

No	Jumlah Penduduk Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Non Produktif	Rasio Ketergantungan
1	909.290	442.139	49

Sumber : Buku Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2016

6. Jumlah Orang Terangkut Melalui Terminal per tahun

Jumlah orang yang terangkut melalui terminal di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 mencapai 727.865 orang. Jumlah tersebut menurun dibandingkan capaian pada tahun 2014 yang telah mencapai 797.550 orang.



Gambar 2.35.
Grafik Jumlah Penduduk yang Terangkut Melalui Terminal
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

7. Status Kondisi Jalan

Jalan merupakan salah satu unsur infrastruktur yang memiliki peranan besar dalam pembangunan di daerah. Hal ini disebabkan jalan memiliki fungsi sebagai media distribusi dalam perputaran ekonomi disuatu wilayah. Kondisi jalan di Kabupaten Grobogan sebagian besar mengalami kerusakan, baik kerusakan ringan maupun rusak berat. Kerusakan jalan di Kabupaten Grobogan seringkali disebabkan oleh kondisi geologis, dimana lapisan tanah di hampir sebagian besar wilayah grobogan rawan terjadi pergerakan. Pengembangan Kabupaten Grobogan sebagai Kabupaten lumbung padi juga memberikan kontribusi terhadap tingginya angka kerusakan jalan. Penggunaan angkutan barang, khususnya pengangkut padi dan tanaman pangan lain, yang overload dapat menyebabkan kerusakan

terhadap kondisi jalan. Perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Grobogan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Kondisi Jalan Kabupaten (m) Berdasarkan Kecamatan
Di Kabupaten Grobogan Tahun 2014

No	Kecamatan	Kondisi Jalan				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	Kedungjati	9.680	1.788	7.510	20.722	39.700
2	Karangrayung	15.770	11.322	9.755	0,154	37.000
3	Penawangan	34.343	5.713	13.224	8.730	62.010
4	Toroh	24.917	5.393	22.647	49.993	102.950
5	Geyer	15.078	1.787	3.197	55.538	75.600
6	Pulokulon	15.470	12.751	37.636	16.894	82.750
7	Kradenan	11.483	2.598	5.859	6.659	26.600
8	Gabus	15.698	2.574	16.572	19.757	54.600
9	Ngaringan	8.811	4.882	12.362	15.944	42.000
10	Wirosari	12.812	3.464	11.044	17.799	45.120
11	Tawangharjo	13.330	2.730	8.144	6.246	30.450
12	Grobogan	20.313	5.484	17.496	0,607	43.900
13	Purwodadi	50.777	3.260	21.777	14.367	90.180
14	Brati	12.875	1.500	12.275	0,000	26.650
15	Klambu	13.700	0,350	4.750	0,000	18.800
16	Godong	33.216	1.108	3.089	3.488	40.900
17	Gubug	13.909	7.781	0,673	7.637	30.000
18	Tegowanu	9.991	4.568	1.467	14.674	30.700
19	Tanggungharjo	6.878	0,000	0,569	2.653	10.100
	Jumlah	339.050	79.053	210.046	261.861	890.010

Sumber : Buku Grobogan dalam Angka 2015

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2011-2015

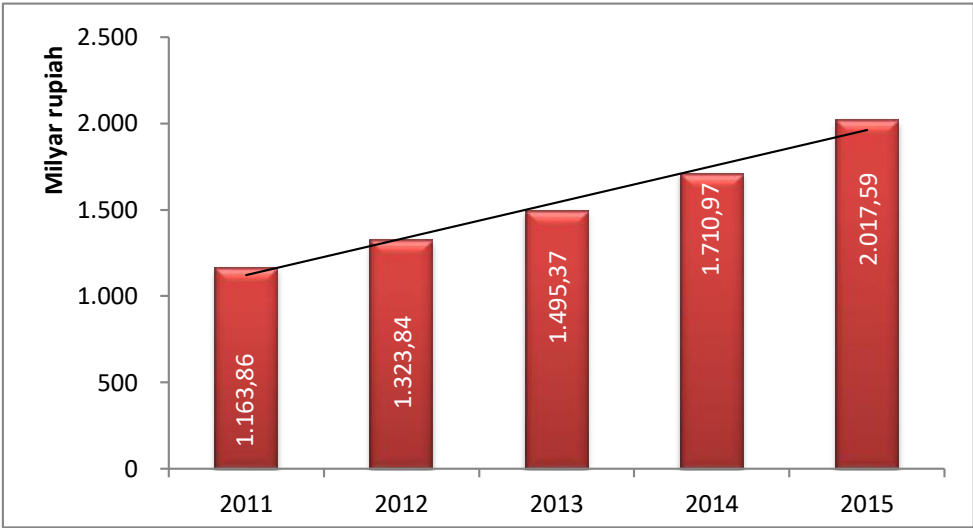
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan daerah Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2011-2015 diupayakan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Kinerja APBD selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 akan dijelaskan berdasarkan struktur APBD, yaitu pendapatan daerah; belanja daerah; dan Pembiayaan Daerah.

1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Lain – lain Pendapatan yang sah yang meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Grobogan dari tahun anggaran 2011-2015 mengalami peningkatan dari sebesar 1.163,86 milyar rupiah menjadi sebesar 2.017,59 milyar rupiah. Pertumbuhan setiap tahun berkisar antara 13,75% hingga 17,92%. Perkembangan pendapatan daerah selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3.1 Besarnya Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015

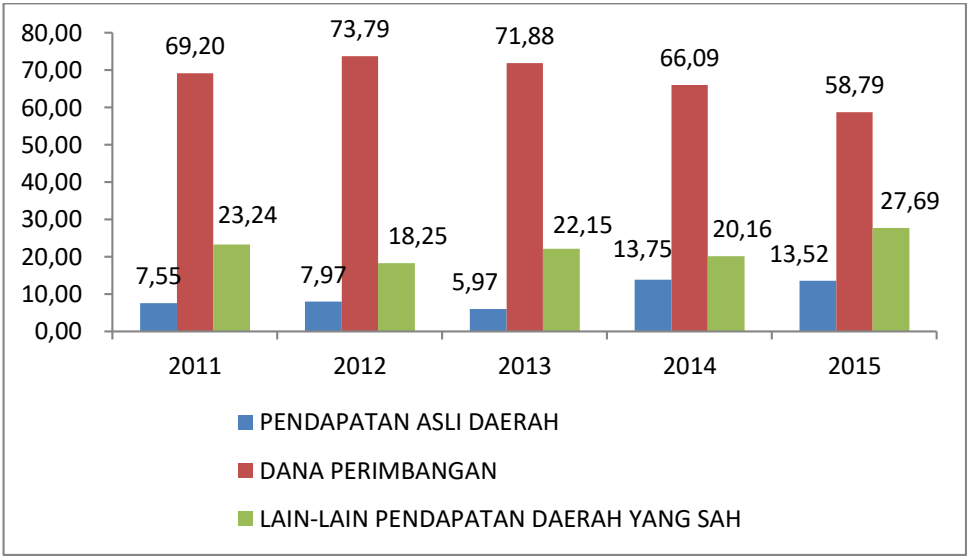
Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Grobogan tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015 (Rp)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	PENDAPATAN	1.163.858.404.192	1.323.837.610.516	1.495.365.047.970	1.710.966.445.735	2.017.588.934.756
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	87.912.458.185	105.463.320.984	89.242.308.420	235.295.346.622	272.718.439.175
	Pendapatan Pajak Daerah	14.990.198.823	18.690.718.677	42.622.520.501	45.528.565.144	52.740.830.578
	Hasil Retribusi Daerah	14.261.854.045	15.134.904.001	13.579.062.514	28.028.552.159	25.468.337.859
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.895.692.871	6.712.724.685	11.471.523.229	10.886.504.006	10.241.201.300
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.764.712.446	64.924.973.621	21.569.202.176	150.851.725.313	184.268.069.438
2	DANA PERIMBANGAN	805.407.794.183	976.816.606.098	1.074.895.578.793	1.130.745.214.336	1.186.214.542.310
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	58.173.272.183	66.770.846.098	63.924.773.793	67.231.012.336	46.067.092.310
	Dana Alokasi Umum	668.995.422.000	812.990.740.000	906.666.365.000	977.675.512.000	1.008.901.500.000
	Dana Alokasi Khusus	78.239.100.000	97.055.020.000	104.304.440.000	85.838.690.000	131.245.950.000
	Dana Insentif Daerah					
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	270.538.151.824	241.557.683.434	331.227.160.757	344.925.884.777	558.655.953.271
	Pendapatan Hibah	0	709.703.500	1.099.143.300	2.649.605.300	9.967.401.080
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	50.222.209.544	63.125.944.934	74.627.151.592	80.379.135.995	128.708.982.460
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	193.272.367.280	131.494.643.000	217.919.024.000	221.326.331.000	378.478.042.000
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	27.043.575.000	46.227.392.000	37.581.841.865	40.570.812.482	41.501.527.731

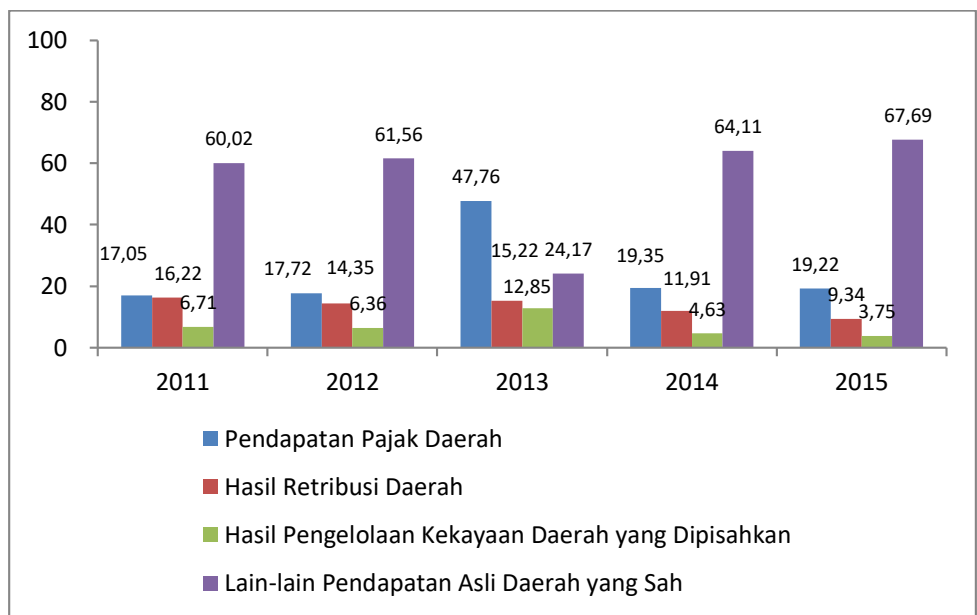
Dilihat dari masing-masing unsur pendapatan, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 seluruh unsur pendapatan daerah menunjukkan peningkatan. PAD meningkat dari sebesar Rp 87,91 milyar menjadi Rp 272,71 milyar; Dana Perimbangan meningkat dari sebesar Rp805,40 milyar menjadi Rp 1.186,21 milyar; Lain-lain Pendapatan yang sah meningkat dari sebesar Rp 270,53 milyar menjadi Rp 558,65 milyar. Dilihat dari proporsinya, pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan, pada kisaran antara 58,79% hingga 73,79% dalam kurun waktu tahun 2011-2015, selanjutnya lain-lain pendapatan yang sah dengan proporsi antara 18,25% hingga 27,69%, dan terakhir Pendapatan Asli Daerah berkisar antara 5,97% hingga 13,52%.

Proporsi masing-masing unsur pendapatan daerah dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini.



Gambar 3.2
Besarnya Masing-Masing Unsur Pendapatan Tahun 2011-2015 (%)

Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hingga saat ini PAD Kabupaten Grobogan sangat dipengaruhi oleh komponen Lain-lain PAD yang sah. Proporsi Lain-lain PAD yang sah selama lima tahun berkisar antara 24,17% hingga 67,69% dari PAD. Selanjutnya diikuti oleh komponen Pendapatan Pajak Daerah, dengan proporsi terhadap PAD antara 17,05% hingga 47,76%. Proporsi retribusi daerah terhadap PAD hanya berkisar antara 11,91% hingga 19,22%. Sementara itu proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD hanya berkisar antara 3,75% hingga 12,85%. Secara rinci proporsi masing-masing unsur PAD dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut ini.

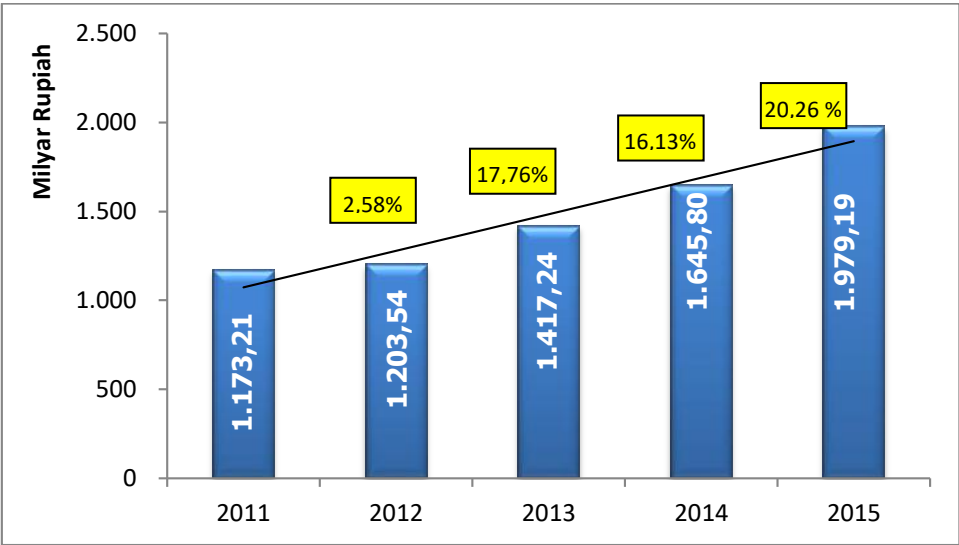


Gambar 3.3
Proporsi Masing-Masing Unsur PAD Tahun 2011-2015 (%)

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Daerah mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perkembangan perekonomian daerah.

Belanja Daerah di Kabupaten Grobogan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 besarnya Belanja Daerah sebesar Rp 1.173,21 milyar, pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 1.979,19 milyar. Belanja daerah menunjukkan peningkatan pada kisaran antara 2,58% hingga 20,26%. Perkembangan Belanja Daerah dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut ini.



Gambar 3.4
Besarnya Belanja Daerah Tahun 2011-2015

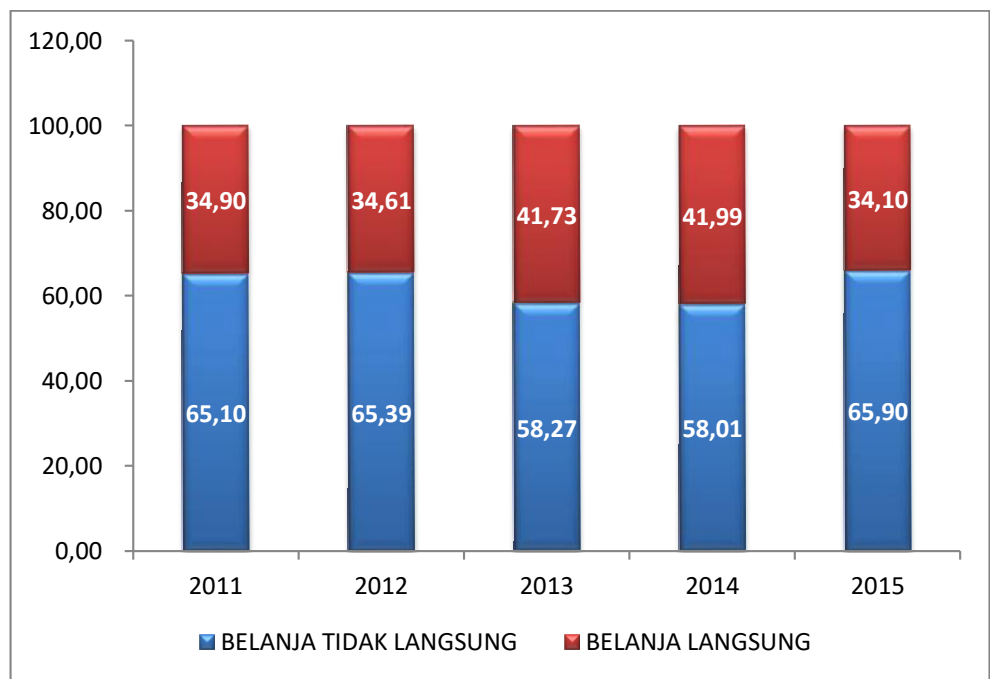
Secara rinci perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015 (Rp)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
	BELANJA	1.173.213.711.868	1.203.540.602.867	1.417.235.444.163	1.645.804.824.542	1.979.187.272.646
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	763.713.596.921	786.954.166.858	825.802.125.423	954.769.671.642	1.202.984.467.369
	Belanja Pegawai	675.042.247.926	713.945.515.724	755.207.848.920	836.117.897.297	901.461.631.091
	Belanja Bunga	255.955.760	47.178.063	35.959.948	24.948.302	13.856.282
	Belanja Subsidi		300.000.000	428.500.000	428.500.000	488.500.000
	Belanja Hibah	26.065.640.186	29.530.353.825	20.611.994.000	31.803.253.608	61.321.799.887
	Belanja Bantuan Sosial	23.609.166.778	12.746.595.330	12.807.409.550	7.368.471.000	12.710.116.756
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.097.550.000	1.349.400.000	2.440.420.000	0	5.100.671.460
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	28.072.511.525	28.544.692.366	33.911.412.590	79.026.601.435	221.647.788.565
	Belanja Tidak Terduga	9.570.524.746	490.431.550	358.580.415	0	240.103.328
2	BELANJA LANGSUNG	409.500.114.947	416.586.436.009	591.433.318.740	691.035.152.900	776.202.805.277
	Belanja Pegawai	50.175.681.507	35.955.786.682	39.814.211.965	43.297.113.900	51.719.214.520
	Belanja Barang dan Jasa	198.002.896.664	190.555.668.746	207.651.807.831	347.215.856.333	429.655.613.491
	Belanja Modal	161.321.536.776	190.074.980.581	343.967.298.944	300.522.182.667	294.827.977.266

Selama tahun 2011-2015, besarnya Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung selalu mengalami peningkatan. Apabila dilihat dari besarnya Belanja, Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung meningkat dari 763,71 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp. 954,76 milyar pada tahun 2014, sedangkan Belanja Langsung meningkat dari Rp. 409,50 milyar menjadi Rp. 691,03 milyar. Dilihat dari proporsinya, selama kurun waktu tahun 2011-2015 terjadi fluktuasi proporsi masing-masing unsur belanja terhadap total belanja daerah, dengan kecenderungan proporsi Belanja Langsung meningkat, sedangkan proporsi belanja tidak langsung semakin menurun. Proporsi Belanja Langsung terhadap total belanja daerah berkisar antara sebesar 34,90% hingga 41,99%. Sementara itu, proporsi Belanja Tidak Langsung berkisar antara 58,01% hingga 65,10%.

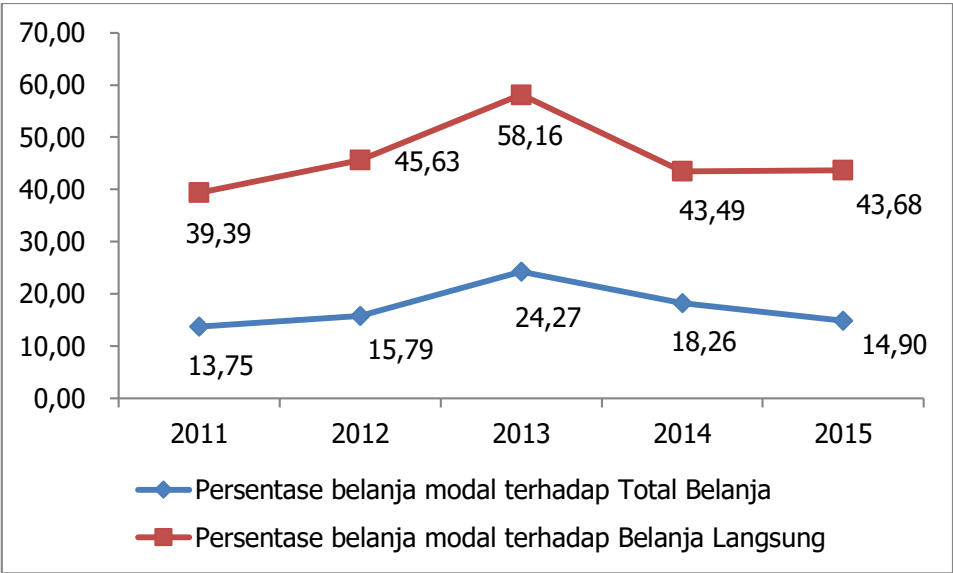
Secara rinci proporsi masing-masing unsur belanja daerah terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut ini.



Gambar 3.5
Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2011-2015 (%)

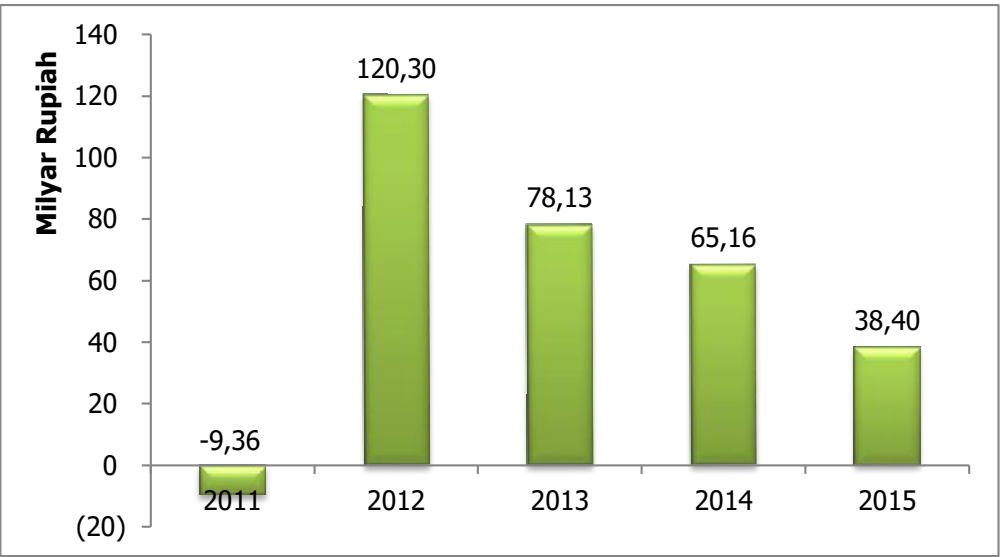
Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah semakin besarnya porsi Belanja Modal terhadap belanja daerah. Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Belanja Modal yang besar akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di

daerah. Selama tahun 2011-2015 proporsi Belanja Modal terhadap total belanja maupun proporsi Belanja Modal terhadap belanja langsung di Kabupaten Grobogan kondisinya fluktuatif. Proporsi belanja modal terhadap total belanja relatif kecil, hanya berkisar antara 13,75% hingga 24,27%. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja Langsung juga relatif kecil, hanya 39,39% hingga sebesar 58,16%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran untuk belanja modal belum optimal untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Perkembangan proporsi belanja modal terhadap belanja daerah dan Belanja Langsung dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut ini.



Gambar 3.6
Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah dan Terhadap Belanja Langsung Tahun 2011-2015

Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada belanja, maka terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Besaran defisit menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah. Dalam Kurun tahun 2011-2015 defisit terjadi pada tahun 2011, sedangkan surplus terjadi pada tahun 2012-2015. Ada kecenderungan penurunan surplus APBD dari sebesar Rp 120,30 milyar pada tahun 2012 menjadi Rp 38,40 milyar pada tahun 2015, seperti terlihat pada Gambar 3.7 berikut ini.

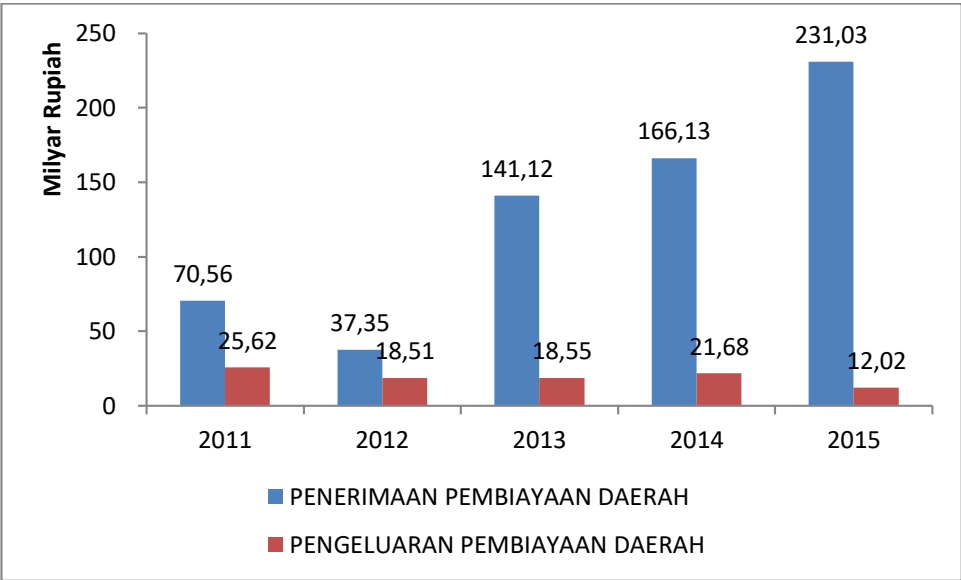


Gambar 3.7
Surplus/Defisit Keuangan Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015
(Milyar Rupiah)

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan Pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau pemberian pinjaman daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2011-2015 penerimaan Pembiayaan Daerah menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp 70,56 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 231,03 milyar pada tahun 2015. Perkembangan pengeluaran pembiayaan juga fluktuatif dari sebesar Rp 25,62 milyar pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp 12,02 milyar pada tahun 2015, seperti terlihat pada Gambar 3.8 berikut ini.



Gambar 3.8
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah)

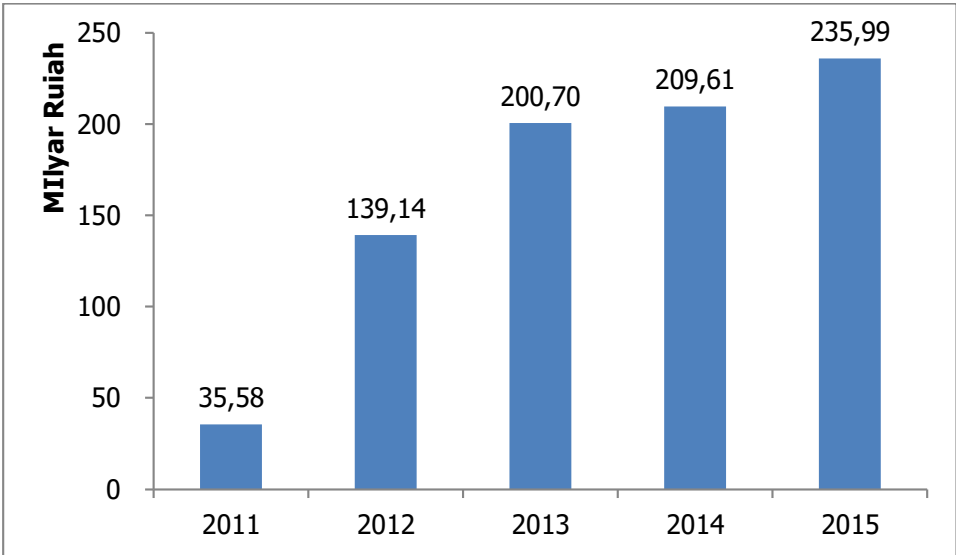
Secara rinci perkembangan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015 (Rp)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	70.556.130.412	37.346.712.765	141.123.082.558	166.127.016.838	231.031.234.931
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	63.915.469.074	35.580.271.785	139.135.182.834	164.329.258.658	209.605.742.431
	Penerimaan Piutang Daerah	6.640.661.338	1.766.440.980	1.987.899.724	1.797.758.180	1.425.492.500
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	20.000.000.000
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.620.550.951	18.508.537.580	18.553.726.600	21.682.895.600	12.017.895.600
	Pembentukan Dana Cadangan	0	5.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	0
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	8.311.888.878	9.356.000.000	12.500.000.000	10.515.000.000
	Pembayaran Pokok Utang	24.010.550.951	3.484.248.702	132.726.600	92.895.600	92.895.600
	Pemberian Pinjaman Daerah	1.610.000.000	1.712.400.000	1.565.000.000	1.590.000.000	1.410.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	44.935.579.461	18.838.175.185	122.569.355.958	144.444.121.238	219.013.339.331
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	35.580.271.785	139.135.182.834	200.698.959.765	209.605.742.431	257.415.001.441

Pelampauan pendapatan dan atau penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang pada tahun berikutnya digunakan sebagai sumber penerimaan Pembiayaan Daerah. Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain pada tahun berkenaan, sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana *idle*.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Grobogan selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan adanya peningkatan angka SiLPA dari sebesar Rp 35,58 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 235,99 milyar. Kontribusi utama SiLPA adalah Pelampauan penerimaan PAD. Khusus tahun 2014 SiLPA juga disebabkan oleh Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Perkembangan SiLPA Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Gambar 3.9 berikut.



Gambar 3.9
Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah)

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah mencakup aset, kewajiban dan ekuitas dana. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dapat berupa: Kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lainnya dan Persediaan.

Perkembangan asset Kabupaten Grobogan menunjukkan penurunan dalam kurun waktu tahun 2013-2015 dari sebesar Rp 2.354 milyar menjadi Rp 2.110 milyar. Kewajiban merupakan kewajiban yang harus dipenuhi /diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Kewajiban mencakup kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi /diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan, dan kewajiban jangka panjang yang harus dipenuhi /diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Terjadi penurunan kewajiban dari sebesar Rp 16,22 milyar menjadi sebesar Rp 15,59 milyar.

Sementara itu Ekuitas Dana Investasi mencerminkan Ekuitas Pemerintah Kabupaten yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang. Perkembangan ekuitas dana investasi menunjukkan penurunan dari sebesar Rp 2.337 milyar menjadi Rp 2.094 milyar.

Perkembangan neraca daerah secara rinci Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2013-2015 (Rp)

No	Uraian	2013	2014	2015
1.	ASET	2.354.118.079.503,45	1.670.649.934.323,37	2.110.181.560.904,25
1.1.	ASET LANCAR	236.065.019.086,00	256.108.248.844,09	305.079.399.313,47
1.1.1.	Kas	175.388.369.298,00	205.844.036.574,00	263.707.734.106,00
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	0,00	5.000.000.000,00	0,00
1.1.3.	Piutang Pajak dan Retribusi	15.152.879.529,00	21.525.289.767,00	26.967.487.093,00
1.1.4.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	936.274.052,00	3.006.677.643,77	3.369.594.318,83
1.1.5.	Piutang Lainnya	4.991.581.505,00	0,00	0,00
1.1.6.	Penyisihan Piutang	(2.925.900.255,00)	(4.840.707.537,69)	(5.993.643.177,36)
1.1.7.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	783.143.103,00
1.1.8.	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
1.1.9.	Persediaan	42.521.814.957,00	25.572.952.397,00	16.245.083.870,00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	85.691.135.672,92	115.249.198.352,44	128.099.632.218,07
1.3.	ASET TETAP	1.847.814.796.734,02	1.266.550.300.935,24	1.666.573.904.551,87
1.3.1.	Tanah	332.655.736.368,66	349.212.209.753,67	468.535.605.215,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	235.098.720.913,46	264.385.678.009,06	348.048.631.062,22
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	563.888.546.469,29	624.274.525.777,39	730.040.379.631,13
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	504.817.675.649,45	680.390.677.733,11	970.101.492.095,12
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	210.409.158.833,15	222.678.153.526,70	243.446.293.714,16
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	944.958.500,00	363.572.500,00	128.622.000,00
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	0,00	(874.754.516.364,69)	(1.093.727.119.165,76)
1.4.	DANA CADANGAN	13.194.881.504,00	21.900.426.864,00	0,00

No	Uraian	2013	2014	2015
1.5.	ASET LAINNYA	171.352.246.506,51	10.841.759.327,60	10.428.624.820,85
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	6.808.628.625,00	4.442.873.988,99	3.759.199.252,47
1.5.3.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	26.703.475,00	23.603.475,00	21.253.475,00
1.5.4.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	2.581.000.000,00	2.581.000.000,00	2.581.000.000,00
1.5.5.	Aset Tidak Berwujud	3.785.246.736,74	3.394.811.197,61	3.613.419.109,61
1.5.6.	Aset Lain-lain	158.150.667.669,77	399.470.666,00	3.207.484.540,64
1.5.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00	(2.753.731.556,87)
2.	KEWAJIBAN	16.221.554.174,49	7.878.552.729,22	15.599.693.987,40
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16.065.565.044,27	7.829.315.480,82	15.599.693.987,40
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	10.989.995.001,00	1.146.204.053,00	5.511.465.948,00
2.1.2.	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	117.818.715,27	106.751.881,82	49.237.248,40
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	1.756.628,00	706.695.599,00
2.1.5.	Utang Beban	0,00	3.456.426.867,00	9.332.295.192,00
2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.957.751.328,00	3.118.176.051,00	0,00
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	155.989.130,22	49.237.248,40	0,00
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	155.989.130,22	49.237.248,40	0,00
2.2.2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.	EKUITAS	2.337.896.525.328,96	1.662.771.381.594,15	2.094.581.866.916,85
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.354.118.079.503,45	1.670.649.934.323,37	2.110.181.560.904,25

Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat dihitung dengan rasio likuiditas (rasio lancar dan rasio quick), dan rasio solvabilitas (rasio total hutang terhadap total aset), dan rasio hutang terhadap modal. Rasio lancar dalam kurun waktu tahun 2013-2015 menunjukkan angka diatas 1 dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 14,69 menjadi 19,56. Hal ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki Kabupaten Grobogan mampu digunakan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Begitu pula dengan rasio quick, dengan angka capaian juga meningkat dari sebesar 12,05 menjadi 18,52.

Dilihat dari Rasio total hutang terhadap total aset dalam kurun waktu tahun 2013-2015 menunjukkan angka dibawah 1 dari sebesar 0,007 pada tahun 2013 dan 2015. Capaian ini menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki pemerintah daerah dapat ditutup dengan aset yang dimiliki. Dilihat dari rasio

hutang terhadap modal, capaiannya dibawah angka 1 yaitu dari sebesar 0,007 pada tahun 2013 dan 2015. Hal ini menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki Kabupaten Grobogan dapat ditutup dengan investasi yang ditanamkan. Hasil perhitungan data analisis neraca daerah secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2015

NO	Uraian	2013	2014	2015
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	14,69	32,71	19,56
2.	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	12,05	29,45	18,52
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,007	0,005	0,007
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,007	0,005	0,007

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi pemenuhan belanja aparatur di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan dari sebesar Rp 738.121.187.237,00 pada tahun 2011 menjadi Rp 1.000.958.358.872,00 pada tahun 2015. Namun demikian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja daerah semakin menurun, dari sebesar 62,91% menjadi sebesar 50,57%. Kondisi ini menunjukkan bahwa komposisi anggaran sebagian besar masih digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, sehingga ke depan perlu ada upaya untuk mendorong anggaran belanja untuk program-program yang mengarah pada kepentingan masyarakat luas (pelayanan publik). Secara rinci data belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6.
Rincian Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	675.042.247.926	713.702.321.960	754.923.763.120	835.760.879.034	898.958.198.229
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	521.117.602.120	554.879.096.898	548.274.745.673	583.480.031.775	632.595.737.384
2	Belanja Tambahan Penghasilan	149.383.102.940	153.857.778.754	200.915.087.447	246.145.468.617	262.007.660.845
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.919.996.000	2.908.030.000	4.027.225.000	4.161.100.000	4.354.800.000
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	1.621.546.866	2.057.416.308	1.706.705.000	1.974.278.642	0
B	Belanja Langsung	63.078.939.311	74.448.064.450	86.653.662.943	94.794.245.292	102.000.160.643
1	Belanja Honorarium PNS	12.793.727.050	14.223.001.100	18.018.406.290	16.507.492.450	21.862.650.000
2	Belanja Uang Lembur	10.032.000	12.192.000	20.128.000	45.904.000	0
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	275.000.000	1.057.500.000	964.000.000	827.000.000	784.250.000

No	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.572.006.500	6.869.096.300	4.944.735.850	5.769.554.757	5.255.457.172
5	Belanja premi asuransi kesehatan	297.331.602	622.052.337	630.798.645	333.462.293	0
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	9.855.113.820	13.483.062.004	16.426.777.920	18.772.878.305	23.534.956.550
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	643.163.500	621.878.200	883.811.030	1.229.130.000	1.105.154.220
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.440.334.000	658.183.530	1.012.219.130	6.054.090.450	2.876.177.285
9	Belanja perjalanan dinas	30.262.709.826	33.613.183.090	41.039.499.584	41.492.335.466	45.102.672.856
10	Belanja perjalanan pindah tugas	0	0	0	0	0
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0	0	0	0	0
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	2.929.521.013	3.287.915.889	2.713.286.494	3.762.397.571	1.478.842.560
	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	738.121.187.237	788.150.386.410	841.577.426.063	930.555.124.326	1.000.958.358.872
1	Total Belanja Daerah	1.173.213.711.868	1.203.540.602.867	1.417.235.444.163	1.645.804.824.542	1.979.187.272.646
2	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	62,91	65,49	59,38	56,54	50,57

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Defisit/surplus riil anggaran diperoleh dari pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran Pembiayaan Daerah. Defisit/surplus riil anggaran Kabupaten Grobogan pada tahun 2011-2015 menunjukkan angka yang fluktuatif, pada kisaran antara Rp.- 34.975.858.627,00 hingga Rp 101.788.470.069,00.

Tabel 3.7.
Perhitungan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Grobogan
Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pendapatan Daerah	1.163.858.404.192	1.323.837.610.516	1.495.365.047.970	1.710.966.445.735	2.017.588.934.756
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.173.213.711.868	1.203.540.602.867	1.417.235.444.163	1.645.804.824.542	1.979.187.272.646
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.620.550.951	18.508.537.580	18.553.726.600	21.682.895.600	12.017.895.600
	Defisit Riil (1-(2+3))	(34.975.858.627)	101.788.470.069	59.575.877.207	43.478.725.593	26.383.766.510

Sumber utama penutup defisit anggaran Kabupaten Grobogan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Piutang Daerah, seperti terlihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.
Komposisi Komposisi Penerimaan Pembiayaan sebagai Penutup Defisit Riil
Anggaran Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	63.915.469.074	35.580.271.785	139.135.182.834	164.329.258.658	209.605.742.431
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	20.000.000.000
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	6.640.661.338	1.766.440.980	1.987.899.724	1.797.758.180	1.425.492.500
TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN		70.556.130.412	37.346.712.765	141.123.082.558	166.127.016.838	231.031.234.931

Realisasi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) tahun 2011-2015 dipengaruhi oleh pencapaian realisasi pendapatan yang melebihi target pendapatan, penghematan belanja daerah, pencapaian realisasi penerimaan Pembiayaan Daerah yang melebihi target, dan penghematan atas pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan perincian sebagaimana tercantum pada Tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9.
Lebih/(Kurang) Realisasi APBD Sebagai Komponen Penyumbang Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015 (Rp)

No	Unsur APBD	Lebih/(Kurang) Realisasi APBD (Rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
A	PENDAPATAN	19.866.407.310	26.081.247.516	12.834.908.970	68.580.320.735	11.362.805.756
	Pendapatan Asli Daerah	3.563.103.451	17.324.017.984	(33.110.077.580)	38.201.970.622	33.013.150.175
	Dana Perimbangan	877.089.501	4.160.674.098	12.580.433.793	22.665.573.336	(4.254.390.690)
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15.426.214.358	4.596.555.434	33.364.552.757	7.712.776.777	(17.395.953.729)
B	BELANJA	66.970.503.853	116.138.791.133	190.242.465.837	142.449.083.708	243.962.364.785
	Belanja Tidak Langsung	11.398.365.760	15.764.797.142	65.332.071.577	75.563.500.608	125.002.356.062
	Belanja Langsung	55.572.138.093	100.373.993.991	124.910.394.260	66.885.583.100	118.960.008.723
C	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	(54.478.169.211)	(3.259.134.235)	(2.857.675.442)	(1.977.922.412)	(1.181.169.500)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	785		658	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah	(50.114.201.657)	0	834	0	0
	Penerimaan Piutang Daerah	(4.363.967.554)	(3.259.135.020)	(2.857.676.276)	(1.977.923.070)	(1.181.169.500)
D	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.221.529.833	174.278.420	479.260.400	554.260.400	3.271.000.400
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (A+B+C+D)	35.580.271.785	139.135.182.834	200.698.959.765	209.605.742.431	257.415.001.441

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Realisasi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah misalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Belanja Tidak Langsung yang termasuk kategori pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta Prioritas Utama meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten-Kota Lainnya/Pemerintah Desa. Belanja Langsung yang termasuk kategori pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta Prioritas utama meliputi: Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai Dana Bos SD, Belanja Pegawai Dana Bos SMP, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS. Adapun pengeluaran pembiayaan yang termasuk kategori pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta Prioritas Utama yaitu: Pembentukan Dana Cadangan, dan Pembayaran Pokok Utang.

Realisasi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta Prioritas utama dalam kurun tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 571.946.727.091,00 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp 651.272.989.562,00 pada tahun 2015, dengan perincian terlihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10.
Realisasi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Grobogan
Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Belanja Tidak Langsung	525.391.103.880	559.483.704.961	555.206.850.621	588.094.580.077	642.553.565.126
1.	Gaji Dan Tunjangan	521.117.602.120	554.879.096.898	548.274.745.673	583.480.031.775	632.595.737.384
2.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	2.919.996.000	2.908.030.000	4.027.225.000	4.161.100.000	4.354.800.000
3.	Belanja Bunga	255.955.760	47.178.063	35.959.948	24.948.302	13.856.282
4.	Belanja Subsidi	0	300.000.000	428.500.000	428.500.000	488.500.000
5.	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa	1.097.550.000	1.349.400.000	2.440.420.000	0	5.100.671.460
B	Belanja langsung	22.545.072.260	4.035.639.082	2.352.585.900	6.195.260.736	8.626.528.836
1.	Belanja Pegawai BLUD	1.625.654.000	1.914.984.500	0	3.728.630.500	6.276.603.820
2.	Belanja Pegawai Dana Bos SD	12.603.850.500	0	0		
3.	Belanja Pegawai Dana Bos SMP	7.372.325.460	0	0		
4.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir untuk Kantor	668.242.300	1.063.154.582	1.388.585.900	1.639.630.236	1.565.675.016
5.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	275.000.000	1.057.500.000	964.000.000	827.000.000	784.250.000
C	Pengeluaran Pembiayaan	24.010.550.951	8.484.248.702	7.632.726.600	7.592.895.600	92.895.600
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	5.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	0
2	Pembayaran Pokok Utang	24.010.550.951	3.484.248.702	132.726.600	92.895.600	92.895.600
	TOTAL (A+B+C)	571.946.727.091	572.003.592.745	565.192.163.121	601.882.736.413	651.272.989.562

3.3.2. Proyeksi Berdasarkan Data Masa Lalu

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan diproyeksikan mengalami peningkatan dari sebesar Rp.2.374.362.555.000,00 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 3.380.657.615.877,00. Peningkatan pendapatan ini dihitung menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD dan perilaku dari potensi masing-masing objek pajak dan objek retribusi daerah, kinerja, dan rencana bisnis BUMD dan BLUD serta trend pendapatan PAD lainnya.
2. Dana perimbangan disusun dengan asumsi tidak terjadi perubahan kebijakan yang mendasar atas pengalokasian dana transfer dari pemerintah sampai dengan Tahun 2019. Dana Alokasi Khusus (DAK) sama dengan APBD tahun 2016.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah disusun dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan kebijakan hibah dari pemerintah, dana penyesuaian/ DID serta kebijakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pajak/retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras, pengembangan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah; peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan tata kelola BUMD sehingga mampu meningkatkan laba BUMD dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah;
4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendorong peningkatan pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan Provinsi.

Tabel 3.11.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	PENDAPATAN	2.374.362.555.000	2.533.079.710.080	2.715.459.217.137	2.916.115.309.241	3.137.085.855.731	3.380.657.615.877
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	268.933.420.000	303.485.853.250	342.780.107.703	387.492.552.901	438.398.159.910	496.385.051.941
a	Pendapatan Pajak Daerah	52.105.000.000	56.794.450.000	61.905.950.500	67.477.486.045	73.550.459.789	80.170.001.170
b	Hasil Retribusi Daerah	29.569.775.000	31.343.961.500	33.224.599.190	35.218.075.141	37.331.159.650	39.571.029.229
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.895.859.000	13.680.237.850	15.732.273.528	18.092.114.557	20.805.931.740	23.926.821.501
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.362.786.000	201.667.203.900	231.917.284.485	266.704.877.158	306.710.608.731	352.717.200.041
2	DANA PERIMBANGAN	1.674.832.773.000	1.756.747.927.050	1.844.439.057.505	1.938.313.835.963	2.038.808.739.295	2.146.391.087.471
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	52.394.527.000	56.586.089.160	61.112.976.293	66.002.014.396	71.282.175.548	76.984.749.592
b	Dana Alokasi Umum	1.110.337.027.000	1.188.060.618.890	1.271.224.862.212	1.360.210.602.567	1.455.425.344.747	1.557.305.118.879
c	Dana Alokasi Khusus	476.361.117.000	476.361.117.000	476.361.117.000	476.361.117.000	476.361.117.000	476.361.117.000
d	Dana Insentif Daerah	35.740.102.000	35.740.102.000	35.740.102.000	35.740.102.000	35.740.102.000	35.740.102.000
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	430.596.362.000	472.845.929.780	528.240.051.929	590.308.920.377	659.878.956.526	737.881.476.465
a	Pendapatan Hibah	7.203.355.000	0	0	0	0	0
b	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	177.840.552.000	202.738.229.280	231.121.581.379	263.478.602.772	300.365.607.160	342.416.792.163
c	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	179.971.455.000	197.968.600.500	217.765.460.550	239.542.006.605	263.496.207.266	289.845.827.992
d	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	65.581.000.000	72.139.100.000	79.353.010.000	87.288.311.000	96.017.142.100	105.618.856.310

2. Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan terlebih dahulu penghitungan proyeksi berdasarkan data masa lalu, khususnya pada jenis-jenis belanja dan pengeluaran yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama. Dalam kurun waktu tahun 2016-2021 jenis belanja dan pengeluaran yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama mengalami peningkatan dari sebesar Rp.695.715.405.920,00 pada tahun 2016 menjadi Rp.931.132.725.163,00 pada tahun 2021. Jenis belanja tidak langsung yang termasuk kategori Belanja yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Bagi Hasil kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa. Jenis Belanja Langsung yang termasuk kategori belanja yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama meliputi: Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai Dana Bos SD, Belanja Pegawai Dana Bos SMP, Belanja Sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, belanja sewa sarana mobilitas, dan belanja beasiswa pendidikan PNS. Sementara itu jenis Pembiayaan Daerah yang termasuk kategori pengeluaran yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama meliputi: Pembentukan Dana Cadangan, dan Pembayaran Pokok Utang. Secara rinci proyeksi belanja dan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut ini.

Tabel 3.12.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Belanja Tidak Langsung	686.575.998.127	727.852.979.517	771.668.801.124	818.126.699.490	867.386.183.780	919.616.407.551
	Gaji Dan Tunjangan	670.551.481.627	710.784.570.525	753.431.644.756	798.637.543.442	846.555.796.048	897.349.143.811
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4.616.088.000	4.893.053.280	5.186.636.477	5.497.834.665	5.827.704.745	6.177.367.030
	Belanja Bunga	47.179.000	0	0	0	0	0
	Belanja Subsidi	506.500.000	506.500.000	506.500.000	506.500.000	506.500.000	506.500.000
	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa	10.854.749.500	11.668.855.713	12.544.019.891	13.484.821.383	14.496.182.986	15.583.396.710
B	Belanja langsung	9.046.511.793	9.489.383.417	9.956.416.251	10.448.955.151	10.968.421.489	11.516.317.612
	Belanja Pegawai BLUD	6.590.434.011	6.919.955.712	7.265.953.497	7.629.251.172	8.010.713.731	8.411.249.417
	Belanja Pegawai Dana Bos SD						
	Belanja Pegawai Dana Bos SMP						
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir untuk Kantor	1.671.827.782	1.785.177.706	1.906.212.754	2.035.453.979	2.173.457.759	2.320.818.195
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	784.250.000	784.250.000	784.250.000	784.250.000	784.250.000	784.250.000
C	Pengeluaran Pembiayaan	92.896.000	0	0	0	0	0
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
	Pembayaran Pokok Utang	92.896.000	0	0	0	0	0
	TOTAL (A+B+C)	695.715.405.920	737.342.362.934	781.625.217.375	828.575.654.641	878.354.605.269	931.132.725.163

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan diawali dengan penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah. Kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah relatif kecil dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp1.938.368.812.521 pada tahun 2016 menjadi Rp2.450.886.951.558 pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu yang menjadi masalah pembangunan daerah terkait dengan kerangka pendanaan adalah rendahnya kapasitas fiskal daerah. Secara rinci perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13.
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	2.634.084.218.441	2.535.155.705.880	2.717.327.613.357	2.917.796.865.839	3.138.599.256.669	3.382.019.676.721
a	Pendapatan	2.374.362.555.000	2.533.079.710.080	2.715.459.217.137	2.916.115.309.241	3.137.085.855.731	3.380.657.615.877
b	Penerimaan Pembiayaan	259.721.663.441	2.075.995.800	1.868.396.220	1.681.556.598	1.513.400.938	1.362.060.844
	Dikurangi:						
2	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	695.715.405.920	737.342.362.934	781.625.217.375	828.575.654.641	878.354.605.269	931.132.725.163
	Kapasitas riil kemampuan keuangan (1-2)	1.938.368.812.521	1.797.813.342.946	1.935.702.395.982	2.089.221.211.199	2.260.244.651.400	2.450.886.951.558

Rencana Penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 tercantum pada Tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	2.634.084.218.441	2.535.155.705.880	2.717.327.613.357	2.917.796.865.839	3.138.599.256.669	3.382.019.676.721
1.	Pendapatan	2.374.362.555.000	2.533.079.710.080	2.715.459.217.137	2.916.115.309.241	3.137.085.855.731	3.380.657.615.877
2.	Penerimaan Pembiayaan	259.721.663.441	2.075.995.800	1.868.396.220	1.681.556.598	1.513.400.938	1.362.060.844

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	Prioritas I (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama)	695.715.405.920	737.342.362.934	781.625.217.375	828.575.654.641	878.354.605.269	931.132.725.163
1	Belanja Tidak Langsung	686.575.998.127	727.852.979.517	771.668.801.124	818.126.699.490	867.386.183.780	919.616.407.551
2	Belanja Langsung	9.046.511.793	9.489.383.417	9.956.416.251	10.448.955.151	10.968.421.489	11.516.317.612
3	Pengeluaran Pembiayaan	92.896.000	0	0	0	0	0
	Kapasitas riil kemampuan keuangan (A-B)	1.938.368.812.521	1.797.813.342.946	1.935.702.395.982	2.089.221.211.199	2.260.244.651.400	2.450.886.951.558
C	Prioritas II (Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala daerah dan Program Prioritas diluar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama)	1.118.221.023.207	894.615.372.145	971.275.515.743	1.056.927.297.787	1.122.179.253.241	1.260.620.107.023
1	Belanja Langsung	1.118.221.023.207	894.615.372.145	971.275.515.743	1.056.927.297.787	1.122.179.253.241	1.260.620.107.023
D	Prioritas III	820.147.789.314	903.197.970.801	964.426.880.239	1.032.293.913.411	1.138.065.398.159	1.190.266.844.536
1	Belanja Tidak Langsung	801.427.189.314	860.887.970.801	923.116.880.239	990.983.913.411	1.096.755.398.159	1.148.956.844.536
a	Belanja Pegawai (Tambahan Penghasilan PNS, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	401.333.415.614	425.413.420.551	450.938.225.784	477.994.519.331	506.674.190.491	537.074.641.920
b	Belanja Hibah	27.214.750.000	27.214.750.000	25.000.000.000	23.000.000.000	53.000.000.000	23.000.000.000
c	Belanja Bantuan Sosial	16.571.258.200	16.571.258.200	16.571.258.200	16.571.258.200	16.571.258.200	16.571.258.200
d	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	353.807.765.500	389.188.542.050	428.107.396.255	470.918.135.881	518.009.949.469	569.810.944.415
e	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Pengeluaran Pembiayaan	18.720.600.000	42.310.000.000	41.310.000.000	41.310.000.000	41.310.000.000	41.310.000.000
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	17.410.600.000	41.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
b	Pemberian Pinjaman Daerah	1.310.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000
	Surplus Anggaran Riil/Berimbang	0	0	0	0	0	0

3.3.4. Kebijakan Belanja dan Pembiayaan Daerah

Pengalokasian belanja daerah dan pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan menyesuaikan dengan pendapatan daerah. Belanja daerah diproyeksikan meningkat dari sebesar Rp 2.615.270.722.441,00 pada tahun 2016 menjadi Rp 3.340.709.676.721,00 pada tahun 2021. Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Grobogan sebagai berikut.

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja prioritas pembangunan, dan belanja tidak langsung diluar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
2. Belanja tidak langsung diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa, dan sisanya untuk belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kab/kota, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga.
3. Belanja Langsung diarahkan untuk pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, kemudian baru dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai kewenangan kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah diproyeksikan menurun dari sebesar Rp 259.721.663.441,00 menjadi Rp 1.362.060.844,00. Asumsi yang digunakan dalam proyeksi Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut :

1. SILPA direncanakan nol, dengan harapan seluruh anggaran belanja terserap sesuai dengan rencana.
2. Penerimaan Pembiayaan Daerah hanya bersumber dari penerimaan piutang daerah.

Kebijakan dalam penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan yaitu: Penerimaan piutang daerah berasal dari penerimaan piutang dari pemberian pinjaman daerah berupa dana talangan pengadaan pangan, serta modal kerja bergulir koperasi.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan menurun dari sebesar Rp 18.813.496.000,00 menjadi Rp 41.310.000.000,00. Kebijakan berkaitan pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan diuraikan sebagai berikut.

1. Penyertaan modal pemerintah daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) untuk memperkuat struktur modal dan memperkuat *share* permodalan pada BUMD.

2. Pemberian pinjaman daerah untuk dana talangan pengadaan pangan dan modal kerja bergulir koperasi.

Tabel 3.15.
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	PENDAPATAN	2.374.362.555.000	2.533.079.710.080	2.715.459.217.137	2.916.115.309.241	3.137.085.855.731	3.380.657.615.877
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	268.933.420.000	303.485.853.250	342.780.107.703	387.492.552.901	438.398.159.910	496.385.051.941
a	Pendapatan Pajak Daerah	52.105.000.000	56.794.450.000	61.905.950.500	67.477.486.045	73.550.459.789	80.170.001.170
b	Hasil Retribusi Daerah	29.569.775.000	31.343.961.500	33.224.599.190	35.218.075.141	37.331.159.650	39.571.029.229
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.895.859.000	13.680.237.850	15.732.273.528	18.092.114.557	20.805.931.740	23.926.821.501
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.362.786.000	201.667.203.900	231.917.284.485	266.704.877.158	306.710.608.731	352.717.200.041
2	DANA PERIMBANGAN	1.674.832.773.000	1.756.747.927.050	1.844.439.057.505	1.938.313.835.963	2.038.808.739.295	2.146.391.087.471
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	52.394.527.000	56.586.089.160	61.112.976.293	66.002.014.396	71.282.175.548	76.984.749.592
b	Dana Alokasi Umum	1.110.337.027.000	1.188.060.618.890	1.271.224.862.212	1.360.210.602.567	1.455.425.344.747	1.557.305.118.879
c	Dana Alokasi Khusus	476.361.117.000	476.361.117.000	476.361.117.000	476.361.117.000	476.361.117.000	476.361.117.000
d	Dana Insentif Daerah	35.740.102.000	35.740.102.000	35.740.102.000	35.740.102.000	35.740.102.000	35.740.102.000
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	430.596.362.000	472.845.929.780	528.240.051.929	590.308.920.377	659.878.956.526	737.881.476.465
a	Pendapatan Hibah	7.203.355.000	0	0	0	0	0
b	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	177.840.552.000	202.738.229.280	231.121.581.379	263.478.602.772	300.365.607.160	342.416.792.163
c	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	179.971.455.000	197.968.600.500	217.765.460.550	239.542.006.605	263.496.207.266	289.845.827.992
d	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	65.581.000.000	72.139.100.000	79.353.010.000	87.288.311.000	96.017.142.100	105.618.856.310
B	BELANJA	2.615.270.722.441	2.492.845.705.880	2.676.017.613.357	2.876.486.865.839	3.097.289.256.669	3.340.709.676.721

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.488.003.187.441	1.588.740.950.318	1.694.785.681.363	1.809.110.612.901	1.964.141.581.939	2.068.573.252.087
a	Belanja Pegawai	1.076.500.985.241	1.141.091.044.356	1.209.556.507.017	1.282.129.897.438	1.359.057.691.284	1.440.601.152.761
b	Belanja Bunga	47.179.000	0	0	0	0	0
c	Belanja Subsidi	506.500.000	506.500.000	506.500.000	506.500.000	506.500.000	506.500.000
d	Belanja Hibah	27.214.750.000	27.214.750.000	25.000.000.000	23.000.000.000	53.000.000.000	23.000.000.000
e	Belanja Bantuan Sosial	16.571.258.200	16.571.258.200	16.571.258.200	16.571.258.200	16.571.258.200	16.571.258.200
f	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10.854.749.500	11.668.855.713	12.544.019.891	13.484.821.383	14.496.182.986	15.583.396.710
g	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	353.807.765.500	389.188.542.050	428.107.396.255	470.918.135.881	518.009.949.469	569.810.944.415
h	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
				0	0	0	0
2	BELANJA LANGSUNG	1.127.267.535.000	904.104.755.562	981.231.931.994	1.067.376.252.938	1.133.147.674.730	1.272.136.424.634
a	Belanja Pegawai	75.111.029.061	63.287.332.889	58.873.915.920	64.042.575.176	67.988.860.484	63.606.821.232
b	Belanja Barang dan Jasa	623.982.316.253	470.134.472.892	480.803.646.677	523.014.363.940	532.579.407.123	572.461.391.085
c	Belanja Modal	428.174.189.686	370.682.949.780	441.554.369.397	480.319.313.822	532.579.407.123	636.068.212.317
	SURPLUS / DEFISIT	(240.908.167.441)	40.234.004.200	39.441.603.780	39.628.443.402	39.796.599.062	39.947.939.156
C	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	259.721.663.441	2.075.995.800	1.868.396.220	1.681.556.598	1.513.400.938	1.362.060.844
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	257.415.001.441	0	0	0	0	0
2	Penerimaan Piutang Daerah	2.306.662.000	2.075.995.800	1.868.396.220	1.681.556.598	1.513.400.938	1.362.060.844
3	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
D	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18.813.496.000	42.310.000.000	41.310.000.000	41.310.000.000	41.310.000.000	41.310.000.000
1	Pembentukan Dana Cadangan		0	0	0	0	0
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	17.410.600.000	41.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
3	Pembayaran Pokok Utang	92.896.000	0	0	0	0	0
4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.310.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	240.908.167.441	(40.234.004.200)	(39.441.603.780)	(39.628.443.402)	(39.796.599.062)	(39.947.939.156)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0	0

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pada semua urusan pembangunan merupakan bagian terpenting dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan. Hasil identifikasi permasalahan akan memberikan data dan informasi sebagai bahan analisis permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Grobogan. Analisis permasalahan berdasarkan pada hasil analisis kinerja capaian pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya pada bab 2. Adapun permasalahan yang dihadapi pada masing-masing urusan pembangunan di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut.

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- Masih rendahnya partisipasi dalam penyelenggaraan PAUD oleh masyarakat, hal ini terlihat dari capaian APK PAUD yang pada tahun 2015 baru tercapai sebesar 61,51%. Sementara itu lembaga PAUD yang terakreditasi baru tercapai sebesar 5,08% di tahun 2015.
- Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar, hal ini terlihat dari capaian APM SMP/MTs di tahun 2015 masih 87,06%, sementara pada APM SD/MI 97,69%.
- Masih terdapatnya anak putus sekolah, tercatat pada tahun 2015 angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,03%, SMP/MTs sebesar 0,01% dan paling tinggi berada pada tingkatan SMA/MA sebesar 2,3%.
- Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, hal ini terlihat dari persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4 tahun 2015 tercapai sebesar 87,50%.
- Masih rendahnya ketersediaan sarana ruang kelas pada pendidikan dasar, terutama pada satuan pendidikan SD/MI yang mana pada tahun 2015, ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik hanya sebesar 55,69%.
- Masih terdapat penduduk dengan kondisi buta huruf, tercatat pada tahun 2015 masih ada sekitar 8,13% penduduk belum melek huruf.

2. Urusan Kesehatan

- Masih tingginya angka kematian Ibu dan angka kematian bayi. Angka kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Grobogan meningkat dari 8,78 per 1.000 KH pada tahun 2011 menjadi 17,44 per 1.000 KH pada tahun 2015. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Grobogan cukup tinggi yaitu sebesar 149,92 per 100.000 KH pada tahun 2015.
- Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan ada kecenderungan meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak menular. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, pola hidup sehat serta lingkungan yang masih kurang baik. Prevalensi TB per 100 tahun 2015 sebesar 36,33. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun dari tahun 2011 – 2015 mengalami peningkatan dari 0,004% meningkat menjadi 0,005%. Pada tahun 2011 angka kesakitan DBD sebesar 13,50 per 100.000 penduduk meningkat menjadi 71,78 per 100.000 penduduk.
- Masih kurangnya mutu pelayanan baik sarana, prasarana maupun sumber daya kesehatan. Sarana dan prasarana kesehatan baik rujukan, maupun dasar secara kuantitas telah mencukupi namun secara kualitas belum optimal. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk masih kurang untuk kategori tertentu. Belum seluruh puskesmas terakreditasi dan belum sesuai dengan ketentuan Permenkes 75 tahun 2014 tentang puskesmas.
- Masih ditemukannya gizi buruk pada anak usia bawah lima tahun atau kategori tertentu. Persentase balita gizi buruk mengalami peningkatan dari 0,03% pada tahun 2011 menjadi 0,05% pada tahun 2015.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih tingginya kondisi jalan rusak di Kabupaten Grobogan. Kondisi ini ditunjukkan dengan data persentase jalan kondisi baik sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 40,73%.
- Masih rendahnya pelayanan sistem drainase perkotaan. Kondisi ini ditunjukkan dengan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan tahun 2015 hanya mencapai 34,00%.
- Rendahnya akses masyarakat terhadap layanan air limbah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai tahun 2015 tercapai sebesar 64%.

- Rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum aman. Kondisi ini ditunjukkan persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman tahun 2015 hanya mencapai 75%.
- Belum optimalnya penanganan sampah. Kondisi ini dapat dilihat persentase pengurangan sampah diperkotaan tahun 2015 kemampuan pengurangan sampah hanya mencapai 4,75% dan persentase pengangkutan sampah, tahun 2015 sebesar 30%.
- Belum optimalnya proses pembangunan pada wilayah strategis dan cepat tumbuh. Kondisi tersebut dapat dilihat dari luas bangunan / gedung yang dibangun pada wilayah strategis dan cepat tumbuh baru tercapai sebesar 30%.
- Masih rendahnya ketersediaan ruang terbuka hijau. Tahun 2015, ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan baru tercapai 14%.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Masih terdapatnya wilayah kumuh perkotaan, tahun 2015 menunjukkan sebesar 0,054% wilayah yang termasuk kumuh dikawasan perkotaan.
- Masih banyaknya rumah dengan kondisi tidak layak huni, tercatat pada tahun 2015 cakupan ketersediaan rumah layak huni baru tercapai 57,50%.
- Belum optimalnya pemenuhan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum, tahun 2015 baru tercapai sebesar 58%.
- Belum optimalnya cakupan pelayanan bencana kebakaran. Tahun 2015 jangkauan pelayanan bencana kebakaran tercapai sebesar 21,38%.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Belum optimalnya penegakan dan penanganan pelanggaran Perda/ Perkada yang terjadi. Hal ini disebabkan kurangnya penyuluhan dan penanganan pelanggaran Perda/ Perkada belum menjangkau seluruh desa/kelurahan dan ketaatan hukum masyarakat relatif rendah.
- Kurangnya kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan belum dapat menjangkau seluruh wilayah.

- Terbatasnya jumlah personil Satpol PP yaitu sebanyak 60 orang dibandingkan dengan jumlah penduduknya sebanyak 1.343.960 jiwa dan luas wilayah sebesar 1.975,86 Km², sehingga pelayanan belum optimal.
- Masih kurangnya jumlah anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) dan kurang merata penyebarannya di seluruh wilayah.
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat terutama di kawasan pinggiran.

6. Urusan Sosial

- Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memerlukan penanganan, tahun 2015 baru sebesar 58,45% PMKS yang memperoleh penanganan dan sebesar 23,48% PMKS yang mendapatkan bantuan sosial.
- Rendahnya pemberdayaan PMKS, ditunjukkan dengan PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi hanya sebesar 23,33%.
- Belum maksimalnya penanganan korban bencana, tahun 2015 baru 66% korban bencana yang menerima bantuan sosial.
- Terbatasnya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana, hal ini bisa dilihat dari persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap tahun 2015 baru tercapai sebesar 60%.
- Terbatasnya jumlah dan kapasitas sarana sosial, Tahun 2015 jumlah panti sosial sebanyak 29 lembaga dan baru 78,12% yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
- Masih terbatasnya jaminan sosial yang diberikan kepada penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial. Tahun 2015 sebesar 2,76%.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- Masih rendahnya penempatan angkatan kerja, hal ini dapat diketahui bahwa persentase penempatan kerja pada tahun 2015 baru mencapai 69,48%

- Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan belum sesuai harapan, hal ini dapat dilihat persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi tahun 2015 baru mencapai 44,44% dan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru mencapai 6,67%.
- Masih tingginya angka pengangguran, hal ini dapat diketahui angka pengangguran Kabupaten Grobogan Tahun 2015 sebesar 4,25%
- Masih rendahnya pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan, data tahun 2015 menunjukkan baru mencapai 50,5% pekerja yang menjadi peserta program BPJS.
- Belum optimalnya kegiatan pemeriksaan secara berkala terhadap perusahaan, data tahun 2015 menunjukkan capaian kinerja pemeriksaan secara berkala terhadap perusahaan baru mencapai 66,17%.
- Belum optimalnya pengujian peralatan di perusahaan, data tahun 2015 menunjukkan capaian kinerja pengujian peralatan di perusahaan baru mencapai 49,72%.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Rendahnya capaian IPG Kabupaten Grobogan dengan berada pada peringkat ketiga di Jawa Tengah.
- Rendahnya capaian IDG yang ditunjukkan pada tahun 2014 mencapai 56,95 dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang sudah mencapai 59, 40 pada tahun 2012 dan 59,76 pada tahun 2013.
- Tingginya pernikahan dini. Badan Pusat Statistik, usia perkawinan anak perempuan usia 17-18 tahun di Kabupaten Grobogan Tahun 2014 cukup tinggi yaitu berjumlah 4.072 kasus, dan tahun 2015 jumlah pernikahan anak sudah mencapai 3.170.
- Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan kasus kekerasan yang terjadi rata-rata mencapai 110 kasus.
- Implementasi PPRG dan kelembagaan anak belum optimal

3. Pangan

- Belum optimalnya Skor Pola Pangan Harapan, tahun 2015 baru mencapai 85 dari kondisi ideal sebesar 100 dan tingginya ketergantungan konsumsi beras.
- Masih adanya sebanyak 4 desa rawan pangan dan belum optimalnya pengembangan desa mandiri pangan untuk mendorong pemanfaatan

bahan pangan lokal dan mewujudkan ketahanan pangan pada desa rawan pangan. Hal ini ditandai dengan jumlah desa mandiri pangan hanya sebanyak 20 desa.

4. Pertanian

- Masih banyaknya lahan yang belum memiliki legalitas, hal tersebut dapat dilihat dari luas lahan yang bersertifikat di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 baru 57,83%.

5. Lingkungan Hidup

- Meningkatnya kuantitas sampah domestik terutama sampah plastik, tidak sebanding dengan kapasitas daya tampung sarana pengelolaan dan pengolahan sampah. Tercatat tahun 2015, sampah yang baru terangkut baru mencapai 30%. Upaya pengurangan sampah pun baru tercapai 5%.
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R, tahun 2015, prosentase kelompok pengelola sampah yang melaksanakan pengelolaan sampah standart 3 R baru sebesar 20%.
- Meningkatnya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup terutama di wilayah perkotaan disebabkan aktivitas industri, pertambangan dan transportasi, rumah tangga (domestik), upaya pemantauan status mutu air tahun 2015 belum optimal dengan tingkat capaian sebesar 44%.
- Masih lemahnya pengawasan terhadap usaha/ kegiatan yang memiliki dampak terhadap keseimbangan lingkungan, tahun 2015 rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL baru terlaksana 20%.
- Masih tingginya luasan lahan kritis dan rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam, tingkat tutupan vegetasi terhadap seluruh wilayah di Kabupaten Grobogan tahun 2015 baru mencapai 37,93%.
- Masih lemahnya upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan tingkat capaian pada tahun 2015 sebesar 54%.
- Masih rendahnya pemenuhan terhadap sarana dan prasaran monitoring polusi di Kabupaten Grobogan, tahun 2015 tingkat Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi baru sebesar 40%.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum seluruh akte kelahiran terinput ke dalam database kependudukan.
- Data Base Kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan keakuratan dan validitasnya.
- Seiring dengan kemajuan roda transportasi antar wilayah kab/kota dan antar provinsi, perpindahan penduduk seringkali tidak disertai dan diikuti dengan administrasi kependudukan yang benar, sehingga perpindahan penduduk banyak yang tidak terdeteksi.
- Kesadaran masyarakat akan kepemilikan kelengkapan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil) belum maksimal.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, hal ini dapat diketahui rata-rata jumlah kelompok PKK yang dibina baru mencapai 13,57%, LPM berprestasi sebesar 0,44%, dan rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat masih rendah yaitu baru mencapai 13,57%.
- Usaha ekonomi produktif belum dapat berkembang sesuai harapan, hal dapat dilihat jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang tidak aktif dan tidak memberikan kontribusi dalam penyediaan atau memfasilitasi modal usaha.
- Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat masih rendah.
- Komitmen dan tanggungjawab masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian pasca program masih rendah, hal ini terbukti capaian kinerjanya baru mencapai 14,5%

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Belum optimalnya kepesertaan PUS dalam ber-KB, dari total PUS yang ada di Kabupaten Grobogan hanya 74,54% saja yang telah menjadi peserta KB aktif.
- Rendahnya partisipasi kaum laki-laki dalam mengikuti program KB. dari keseluruhan peserta KB aktif hanya 1,34% saja laki-laki yang menjadi akseptor KB
- Masih rendahnya capaian *unmetneed* yakni sebesar 11,80%.

- Belum maksimalnya Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB yakni baru 84%.
- Masih belum optimalnya partisipasi remaja dalam Bina Keluarga Remaja (BKR), tahun 2015 baru mencapai 87,53%.
- Belum sesuai keterediaan jumlah PLKB. Jumlah PLKB seharusnya adalah 1 orang tiap 2 desa, namun di Kabupaten Grobogan 1 PLKB masih menangani 3 – 4 desa.
- Belum tersedianya alat kontrasepsi yang diadakan oleh pemerintah kabupaten. Seharusnya pemerintah kabupaten menyediakan 30% dari kebutuhan alat kontrasepsi, namun di Kabupaten Grobogan belum bisa menyediakan.

9. Perhubungan

- Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan berupa marka, rambu dan guardrail. Sampai dengan tahun 2015 masih tersedia sebanyak 55% saja dari seluruh ruas jalan kabupaten yang ada.
- Kondisi kendaraan umum yang memenuhi layak jalan baru mencapai 85%.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik, hal ini ditunjuk dengan indikator persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik yaitu baru mencapai 78% pada tahun 2015.
- Ketersediaan halte yang dilayani angkutan umum masih relatif konstan pada posisi cukup yaitu sebesar 50%.

10. Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya penyediaan jaringan komunikasi antar Perangkat Daerah (PD) dan pengembangan Website pemerintah Kabupaten Grobogan.
- Belum optimalnya pemberdayaan sumberdaya informasi dan komunikasi, berkaitan dengan kemampuan PD dalam melakukan *update* informasi yang dimuat dalam website.
- Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan jaringan kerjasama komunikasi dan informasi untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat. Frekuensi kegiatan memuat informasi pada website masih dilakukan 3 kali per minggu.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Masih rendahnya pemahaman SDM pengurus koperasi di Kabupaten Grobogan tentang pengkoperasian; hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya persentase koperasi aktif. Pada tahun 2015 persentase koperasi aktif sebesar 88%
- Daya saing produk UMKM yang masih rendah;
- Kurangnya kegiatan promosi bagi UMKM di Kabupaten Grobogan, sehingga kurang dapat mengembangkan hasil produk UMKM. Persentase UMKM yang mengikuti pameran tahun 2015 hanya 0,2%
- Rendahnya kesadaran UMKM untuk mengurus ijin usaha (berbadan hukum);
- Rendahnya UMKM yang memperoleh akses permodalan (kredit/pembiayaan bank).

12. Penanaman Modal

- Belum optimalnya Promosi dan kerjasama investasi, setahun hanya 2-3 kali terutama kerjasama antar instansi dalam rangka menarik investasi dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya nilai investasi di Kabupaten Grobogan.
- Belum tersedianya data dan informasi investasi yang diwujudkan dalam peta potensi investasi di Kabupaten Grobogan.
- Belum optimalnya pelayanan perijinan usaha, dukungan regulasi dan kepastian hukum serta sarana prasarana pendukung investasi daerah, di antaranya jaringan jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, perbankan, dll. Penetapan percepatan pelayanan belum jelas, hanya menetapkan 7 hari jam kerja.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, hal ini terlihat dari capaian di tahun 2015 hanya 45% organisasi kepemudaan yang dibina.
- Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan berjenjang, hal ini terlihat dari menurunnya prestasi pemuda dari delegasi yang diberangkatkan di tahun 2015 hanya 20 orang, jika dibanding pada tahun-tahun sebelumnya pernah mencapai angka 40 orang (2013).
- Masih terbatasnya sarana prasarana olah raga. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah klub olah raga dengan sarana dan

prasarana tidak seimbang, dimana tahun 2015 jumlah klub olahraga mencapai 587 klub, sementara gedung olahraga yang tersedia hanya 16 gedung.

14. Kebudayaan

- Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Grobogan menjadi wisata Budaya;
- Belum optimalnya kepedulian masyarakat/ pelaku seni budaya dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.
- Belum optimalnya perlindungan, pembinaan dan pengembangan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Grobogan.
- Belum optimalnya pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Grobogan.
- Belum optimalnya pembinaan sumberdaya manusia (tokoh kesenian, pelaku seni lainnya) dalam upaya pengembangan seni budaya di Kabupaten Grobogan.

15. Statistik

- Belum optimalnya penyediaan data dan statistik pada seluruh aspek urusan pembangunan.

16. Persandian

- Pengelolaan persandian belum optimal karena rendahnya kemampuan SDM dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

17. Perpustakaan

- SDM pengelola perpustakaan yang masih rendah secara kualitas dan kuantitas (sebagian besar berpendidikan SMU)
- Belum tersedia layanan *electronic library*
- Masih rendahnya minat baca masyarakat, dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan yang masih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan
- Sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai (gedung perpustakaan)
- Layanan perpustakaan keliling belum menjangkau keseluruhan Kabupaten Grobogan dikarenakan Perpustakaan Umum Daerah hanya memiliki 1 unit mobil perpustakaan keliling yang melayani 19 kecamatan.

18. Kearsipan

- Belum tersedianya dokumen/arsip yang diduplikasi
- Belum adanya pengelolaan dokumen/arsip yang dikelola dengan sistem otomasi.
- Belum tersedianya naskah peraturan tentang kearsipan yang diterbitkan.
- Masih kurangnya SDM pengelola kearsipan.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- Masih kurangnya produksi perikanan budidaya, ditandai dengan produksi perikanan budidaya tahun 2015 baru mencapai sebanyak 1.890.990 kg yang dipengaruhi oleh ketersediaan sarana produksi yang terbatas, penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang kurang, dan ketersediaan sarana produksi perikanan yang belum memadai.
- Masih rendahnya produksi hasil olahan ikan dan tingkat konsumsi makan ikan, ditandai dengan jumlah produksi hasil olahan ikan tahun 2015 sebanyak 284.375 kg dan tingkat konsumsi ikan sebanyak 14,43 kg, serta penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) yang masih kurang.

2. Pariwisata

- Kurangnya Sarana dan Prasarana obyek wisata.
- Keterbatasan Anggaran dana promosi pariwisata.
- Lemahnya peran seksi pemasaran dan, promosi, dan produk pariwisata Kabupaten Grobogan.
- Kurang terawatnya Obyek Pariwisata di Kabupaten Grobogan.
- Banyaknya investor yang kurang tertarik dengan wisata di Kabupaten Grobogan.
- Minimnya Penanaman Modal pada obyek Pariwisata.
- Infrastruktur menuju obyek wisata banyak yang rusak, sehingga mengurangi minat investor dan wisatawan.
- Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Grobogan.
- Masih rendahnya kelompok sadar wisata.

3. Pertanian

- Belum optimalnya peningkatan produksi terutama komoditas padi, jagung, kedelai, kacang hijau, cabai, bawang merah, semangka, melon, pisang, jambu air, dan belimbing
- Masih kurangnya penerapan modernisasi pertanian sebagai sarana untuk mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan dan hortikultura
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian
- Masih kurangnya mutu hasil, industri pengolahan dan perluasan pemasaran hasil pertanian
- Rendahnya peran generasi muda dan kelembagaan pertanian terutama Gapoktan, Kelompok Tani, UPJA, penangkar dan produsen benih, kelompok pengolahan hasil, serta P3A/GP3A/IP3A
- Masih rendahnya kemitraan agribisnis antara kelembagaan petani dengan stakeholder terkait
- Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber air tanah dan *rain harvester* untuk pertanian secara bijaksana
- Masih kurangnya upaya meningkatkan daya dukung lahan pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, penerapan pola tata tanam yang tepat dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

4. Kehutanan

- Belum optimalnya peran penyuluh kehutanan dan masyarakat sekitar hutan dalam pelestarian sumber daya hutan
- Belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa di sekitar hutan.
- Masih ditemuinya perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa di sekitar hutan. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat hutan dan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan.
- Belum optimalnya pelayanan ijin tebang dan ijin angkut hasil hutan bagi masyarakat. Hal ini ditandai masih adanya penebangan dan pengangkutan hasil hutan rakyat tanpa ijin.
- Belum optimalnya pelayanan data dan informasi kehutanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan belum adanya pemetaan secara digital kehutanan dan belum terbangunnya kesinambungan statistik kehutanan.

- Masih banyaknya luas lahan kritis, disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan rakyat. Pengembangan hutan rakyat selama ini hanya berasal dari program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL).
- Belum sinergisnya regulasi mengenai industri hasil hutan, sehingga rentan terhadap pelanggaran dalam pengelolaan industri hasil hutan.
- Rendahnya infrastruktur pada kawasan sekitar hutan

5. Energi dan Sumberdaya Mineral

- Belum seluruh rumah tangga memperoleh pelayanan listrik tahun 2015 baru sebesar 84,92%
- Masih tingginya pertambangan yang tidak memiliki izin, tahun 2015 sebesar 53,92%.

6. Perdagangan

- Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan produk makanan yang telah kadaluwarsa.
- Masih terbatasnya volume dan nilai realisasi ekspor. Hal ini disebabkan lemahnya daya saing produk dalam hal mutu, desain dan merk dagang produk lokal, dan belum kuatnya jaringan eksportir.
- Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau di seluruh wilayah, dan belum terintegrasinya pasar lokal.
- Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan kurang tertatanya kawasan pedagang kaki lima.
- Munculnya masalah sosial sebagai akibat dari banyaknya pasar swalayan/pasar modern, dan keberadaan pasar tradisional dan toko kelontong yang sudah ada kurang mendapat perlindungan.
- Tingginya biaya ekonomi sebagai akibat dari masih rendahnya infrastruktur penunjang yang telah menyebabkan turunnya daya saing produk.
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan.
- Berlakunya AFTA 2010 yang mempengaruhi persaingan produk-produk perdagangan antar Negara.

7. Perindustrian

- Masih sedikitnya jumlah industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi (SNI, ISO dan lain), masih terdapat 26,5% industri yang belum berstandar kelayakan produksi.
- Masih rendahnya klaster industri yang berkembang, jumlah klaster yang berkembang baru mencapai 7 unit.
- Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki ijin usaha. Jumlah industri yang memiliki ijin usaha baru mencapai 50,6%.

8. Transmigrasi

- Terbatasnya alokasi pemberangkatan transmigran dari pemerintah pusat/ provinsi, jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi hanya 2,16% dari 369 KK calon transmigran (daftar tunggu) Kabupaten, yaitu 14 KK dan jumlah ini jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya;
- Semakin menurunnya minat masyarakat untuk melakukan transmigrasi ke luar pulau Jawa, berdasarkan data Dinsosnakertrans Kabupaten Grobogan.

4.1.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan Daerah

- Belum optimalnya ketersediaan perencanaan pembangunan yang menjawab permasalahan sektoral pada pembangunan daerah;
- Belum optimalnya kesesuaian perencanaan antar perangkat daerah.
- Belum optimalnya implementasi proses penyusunan perencanaan secara partisipatif dalam menjawab isu dan tantangan pembangunan daerah.

2. Pengawasan

- Masih tingginya temuan pemeriksaan baik oleh Inspektorat Daerah maupun oleh BPK.
- Masuih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- Masih kurangnya kapasitas SDM pemeriksa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan;
- Masih kurangnya kuantitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah).

- Masih kurangnya SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada masing masing PD.

3. Keuangan

- Belum optimalnya upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
- Terbatasnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Grobogan dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah.

4. Kepegawaian

- Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.
- Masih terjadinya pelanggaran disiplin aparatur pemerintah.
- Masih kurangnya ketersediaan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di masng-masing perangkat daerah.

5. Legislasi Daerah

- Belum optimalnya fungsi Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD sebagai lembaga legislasi daerah.

6. Sekretariat Daerah

- Kurangnya koordinasi dan fasilitasi kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga
- Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- Masih rendahnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat
- Belum optimalnya koordinasi, fasilitasi dan pembinaan sarana prasarana perekonomian
- Belum Optimalnya koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Produksi dan Sumberdaya Alam
- Belum optimalnya koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang lembaga keuangan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

- Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam penanganan permasalahan sosial
- Belum dilakukan upaya penguatan satuan kerja yang mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, khususnya satuan kerja yang membidangi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, hukum, dan pelayanan publik.
- Belum seluruh manajemen pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan menggunakan teknologi informasi berbasis elektronik, baik melalui e-government maupun e-office.
- Belum seluruh prosedur pelayanan disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP), baik pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Belum dilaksanakannya evaluasi / survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Masih diperlukan peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), baik LKjIP Kabupaten maupun LKjIP SKPD.
- Masih diperlukan peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), baik LKjIP Kabupaten maupun LKjIP SKPD.

4.2. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan yang menjadi prioritas penanganan untuk periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1. Rendahnya kualitas pembangunan manusia

Rendahnya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Grobogan ditunjukkan dengan kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2015, IPM Kabupaten Grobogan adalah sebesar 68,05 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,49 dan juga masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 69,55. Rendahnya IPM di Kabupaten Grobogan perlu menjadi perhatian serius terutama pada sektor pendidikan yang mana rata-rata sekolah pada tahun 2015 baru mencapai 6,33 tahun, dan pada sektor ekonomi dengan rata-rata pendapatan perkapita penduduk sebesar

9.457 ribu rupiah. Rendahnya kualitas pembangunan manusia di Grobogan dipengaruhi oleh rendahnya kinerja kenaikan unsur pembentuk IPM sendiri setiap tahunnya.

2. Pertumbuhan ekonomi melemah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan menunjukkan pelambatan dalam tiga tahun terakhir (2013-2015). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 sebesar 5,96%, trennya melambat dilihat dari tahun 2013 sebesar 4,55% dan tahun 2014 sebesar 4,03%. Dampak yang ditimbulkan dari perlambatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri karena persoalan daya saing yang masih kurang. Sementara itu, tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat juga mengalami penurunan karena harga jual yang meningkat.

3. Tingginya tingkat kesenjangan antar kelompok pendapatan masyarakat.

Tingginya tingkat kesenjangan antar kelompok pendapatan di Kabupaten Grobogan ditunjukkan dengan indeks gini rasio pada tahun 2013 sebesar 0,34, trennya masih meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2010-2012. Dengan melebarnya kesenjangan antar kelompok pendapatan, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih serius dengan berusaha meningkatkan keberpihakan pengelolaan anggaran dan pembangunan daerah yang mengarah pada kelompok-kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

4. Rendahnya capaian pembangunan dan pemberdayaan gender

Rendahnya pembangunan gender di Kabupaten Grobogan ditunjukkan dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Pemberdayaan Gender (IDG). IPG Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 adalah sebesar 85,44 masih rendah dibandingkan dengan nilai IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 91,89. Sama halnya dengan IDG Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 sebesar 56,95 berada lebih rendah dibandingkan dengan IDG Jawa Tengah sebesar 74,46. Selain itu IPG dan IDG Kabupaten Grobogan jika dilihat berdasarkan posisinya di Jawa Tengah, berada pada ranking 33.

5. Tingginya angka kemiskinan

Kemiskinan menjadi isu yang penyelesaiannya memerlukan penanganan multi sektor. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pembangunan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Grobogan dalam lima tahun terakhir (2010-2014) trennya sudah menunjukkan penurunan. Namun jika dilihat dari jumlahnya, penduduk miskin masih menunjukkan jumlah yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi tingkat kemiskinan pada tahun 2014 yang sebesar 13,86%, masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 10,96% dan Jawa Tengah sebesar 13,58%.

6. Belum optimalnya pemerataan mutu dan akses pendidikan

Permasalahan mutu pendidikan di Kabupaten Grobogan tidak terlepas dari pemerataan kualitas pendidikan antara kota dan desa, dimana desa masih tertinggal, baik dari kualitas sarana, tenaga pendidik dan manajemen pendidikan. Oleh karena itu peningkatan mutu dan akses pendidikan perlu dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas mutu guru serta meningkatkan manajemen pendidikan terutama di pelosok pedesaan.

7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan

Permasalahan kesehatan yang masih menjadi permasalahan adalah masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan baik sarana, prasarana maupun sumber daya kesehatan. Upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan dilakukan melalui peningkatan atau pembangunan sarana kesehatan serta peningkatan sumber daya kesehatan lainnya.

8. Belum optimalnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum

Permasalahan yang ada pada pekerjaan umum adalah belum optimalnya mutu jalan, jembatan dan jaringan pengairan. Peningkatan efektivitas urusan pekerjaan umum ini dilakukan dengan upaya pemeliharaan dan perencanaan pembangunan yang lebih baik jalan, jembatan, dan pengairan.

9. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan

Belum optimalnya pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik masih merupakan bagian dari permasalahan pembangunan di Kabupaten Grobogan. Upaya untuk melakukan peningkatan pelayanan

dilakukan dengan usaha-usaha perbaikan dalam *service delivery* maupun *manufacturing* di dalam tubuh pemerintahan. Sedangkan peningkatan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan efektifitas pembinaan dan pengawasan terhadap semua unsur manajemen pemerintahan.

10. Rendahnya ketahanan pangan

Permasalahan ketahanan pangan dan pertanian yang masih terkendala dengan kondisi geografis Kabupaten Grobogan yang sering terjadi kekeringan yang cukup parah pada saat musim kemarau. Oleh karena upaya peningkatan produktifitas pertanian dan ketahanan pangan dilakukan dengan upaya peningkatan pengelolaan pengairan terutama pada daerah-daerah pertanian.

11. Rendahnya Investasi

Rendahnya investasi diakibatkan oleh kurangnya promosi investasi dan rendahnya daya tarik investasi di Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan belum memiliki sarana promosi investasi yang memadai sehingga informasi tentang investasi di Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya diketahui oleh investor.

12. Penurunan dan Kerusakan Kualitas Lingkungan

Penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan di Kabupaten Grobogan ditandai dengan meningkatnya pencemaran tanah dan sumber daya air, menurunnya kuantitas sumber daya air, masih banyaknya lahan yang berpotensi kritis dan meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk.

13. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan menjadi permasalahan strategis di Kabupaten Grobogan yang ditandai dengan banyaknya alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai peruntukan. Selain itu masih terjadi pemanfaatan ruang secara ilegal yang mengganggu kenyamanan dan kualitas lingkungan hidup, hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat kesesuaian penggunaan pola ruang tidak sesuai dengan tata ruang Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan 13 isu strategis di atas, melalui diskusi dan penilaian terhadap isu-isu tersebut ditentukan prioritas utama isu strategis pembangunan di Kabupaten Grobogan pada tabel berikut.

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Rendahnya kualitas pembangunan manusia	20	10	20	10	10	25	95
2	Tingginya angka kemiskinan	20	10	20	10	10	25	95
3	Pertumbuhan ekonomi melemah	20	10	20	10	10	25	95
4	Tingginya tingkat kesenjangan antar kelompok pendapatan masyarakat	20	10	20	10	10	25	95
5	Rendahnya capaian pembangunan dan pemberdayaan gender	10	10	10	10	10	15	65
6	Belum optimalnya pemerataan mutu dan akses pendidikan	20	5	15	5	10	25	80
7	Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan	20	10	20	10	10	25	95
8	Belum optimalnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	20	10	20	10	10	25	95
9	Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan	10	10	10	5	10	15	60
10	Rendahnya ketahanan pangan	10	10	20	5	10	10	65
11	Rendahnya Investasi	20	5	15	10	7	15	72
12	Penurunan dan Kerusakan Kualitas Lingkungan	10	5	10	5	7	0	37
13	Alih Fungsi Lahan	10	10	10	5	10	0	45

Berdasarkan hasil penghitungan skor pada masing-masing isu strategis tersebut, dihasilkan bobot skor yang menjadi dasar dalam penetapan urutan prioritas isu sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas pembangunan manusia
2. Tingginya angka kemiskinan
3. Pertumbuhan ekonomi melemah
4. Tingginya tingkat kesenjangan antar kelompok pendapatan masyarakat
5. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan
6. Belum optimalnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum
7. Belum optimalnya pemerataan mutu dan akses pendidikan
8. Rendahnya Investasi
9. Rendahnya capaian pembangunan dan pemberdayaan gender
10. Rendahnya ketahanan pangan
11. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan
12. Alih Fungsi Lahan
13. Penurunan dan Kerusakan Kualitas Lingkungan

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pilkada. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 adalah :

***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera
Secara Utuh dan Menyeluruh"***

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase, yaitu masyarakat Kabupaten Grobogan yang **sejahtera secara utuh** dan masyarakat Kabupaten Grobogan yang **sejahtera secara menyeluruh**. Maka penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah :

1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat secara utuh unsur yang ada dalam arti sejahtera terpenuhi semua, baik itu sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupannya, terhindar dari ancaman keamanan dan ketertiban lingkungan.
2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten. Ditandai dengan menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar wilayah.

5.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh"**, ditetapkan 9 (sembilan) misi yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat , keolahragaan, pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik
7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2016-2021. Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran Pokok Pembangunan yang akan dicapai Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2016- 2021

No	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,96	6,11	6,26	6,41	6,56	6,71	6,86	6,86
2.	Laju Inflasi	%	3,31	3,21	3,11	3,01	2,91	2,81	2,71	2,71
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,05	68,36	68,67	68,98	69,29	69,60	69,91	69,91
4.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	85,44 (2014)	85,84	86,05	86,25	86,45	86,65	86,85	86,85
5.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	56,95 (2014)	57,67	57,85	58,21	58,39	58,75	58,93	58,93

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran per Misi Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016- 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir	Urusan
Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air												
Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta sarana drainase perkotaan	Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	1. Persentase jalan - jembatan dalam kondisi baik	%	40,69	46,53	52,94	60,01	67,88	76,08	84,51	84,51	PU dan PR
	Meningkatnya ketersediaan drainase perkotaan	2. Persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.	% penduduk	34	38	42	46	50	54	58	58	PU dan PR
Meningkatkan pemenuhan akses permukiman, air	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya	3. Persentase berkurangnya kawasan kumuh terhadap luas	%	0,054	0,045	0,036	0,027	0,018	0,009	0,000	0,000	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Ha	77,32	47,32	37,32	27,32	17,32	7,32	0	0	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir	Urusan
minum dan sanitasi yang layak.	cakupan akses air minum dan sanitasi	kawasan kumuh yang ditetapkan SK Bupati.										
		4. Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	70,00	74,54	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	PU dan PR
		5. Persentase cakupan pelayanan air minum	%	45,7	48	51	54	57	60	63	63	PU dan PR
Meningkatkan pemenuhan air irigasi untuk pertanian	Meningkatnya fungsi sarana irigasi	6. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	82	82,5	83,1	83,7	84,1	84,5	85	85	PU dan PR
Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana transportasi yang aman dan nyaman	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	7. Rasio ijin trayek	Ratio	0,019	0,020	0,021	0,021	0,022	0,022	0,023	0,023	Perhubungan
		8. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	92	92	93	93	94	94	95	95	Perhubungan
Misi 2 : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan												
Meningkatkan	Meningkatnya	9. Pertumbuhan	%	11,90	12,11	14,39	16,67	18,95	21,23	23,51	23,51	Pertanian

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir	Urusan
produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan darat	produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	produksi pertanian pangan hortikultura										
		10. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/th	3.4	3	3	3	3	3	3	3	Pertanian
		11. Pertumbuhan produksi peternakan	%	9,3	9,87	10,09	10,31	10,60	10,81	11,11	11,11	Pertanian
	Meningkatnya produksi perikanan	12. Produksi perikanan Budidaya per tahun	kg	1.890.990	1.989.321	2.094.756	2.206.825	2.325.993	2.452.760	2.587.662	2.587.662	Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan	13. Skor PPH	Skor	85	85	87	87	87	90	90	90	Pangan
		14. Ketersediaan cadangan pangan daerah	%	79,98	82	84	86	88	90	92	92	Pangan
Misi 3 : Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata												
Menumbuhkembangkan usaha ekonomi kerakyatan baik koperasi dan UMKM, industri, maupun	Meningkatnya jumlah dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)	15. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,70	2,90	3,10	3,30	3,35	3,40	3,46	3,46	Perindustrian
		16. Pertumbuhan Industri	%	1,27	1,28	1,29	1,30	1,32	1,33	1,35	1,35	Perindustrian
	Meningkatnya	17. Persentase	%	73,71	96	97	95,5	93,7	92	90,5	90,5	Koperasi dan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir	Urusan
perdagangan	jumlah dan kapasitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta kualitas koperasi	Usaha Mikro dan Kecil										UKM
		18. % UKM yang mampu mengakses permodalan	%	90	90	90	91	92	93	94	94	Koperasi dan UKM
		19. Persentase koperasi aktif	%	88	88,20	89,20	90,20	91,20	92,20	93,22	93,22	Koperasi dan UKM
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan	20. Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	43,75	43,75	44	50	56,25	62,5	68	68	Perdagangan
		21. Perkembangan nilai ekspor	Rp(000)	142.032.319	142.387.400	142.742.480	143.456.193	144.173.475	144.894.341	145.618.813	145.618.813	Perdagangan
Mengembangkan pariwisata daerah yang berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor wisata dalam pembangunan daerah	22. Kunjungan wisata	%	206.896	208.000	210.000	275.000	300.000	325.000	375.000	375.000	Pariwisata
		23. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,76	0,79	0,81	0,84	0,87	0,90	0,93	0,93	Pariwisata
Misi 4 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya												
Membangun sistem pendidikan yang	Meningkatnya partisipasi masyarakat	24. Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	6,91	6,92	6,93	6,95	6,98	7,01	7,04	7,04	Pendidikan
		25. Angka Harapan	Tahun	12,25	12,35	12,44	12,54	12,63	12,73	12,82	12,82	Pendidikan

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir	Urusan
	kualitas pelayanan RSUD	Akreditasi RS oleh KARS versi 2012		Lanjut 12 Pelayanan	Paripurna (versi 2012)	Paripurna (versi 2012)	Paripurna (versi 2012)	Paripurna (versi 2012)	Paripurna (versi 2012)	Paripurna (versi 2012)	Paripurna (versi 2012)	
	Terbangunnya rumah sakit tipe C	36. Jumlah Rumah Sakit Tipe C yang dibangun	Unit	0	-	-	1	-	1	-	2	Kesehatan
	Terciptanya manajemen dan syitem pelayanan kesehatan yang profesional di puskesmas	37. Persentase puskesmas terakreditasi	%	10	43,33	76,67	100	100	100	100	100	Kesehatan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan KB	Terkendalinya jumlah penduduk dan meningkatnya parsitipasi Aktif KB	38. Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
		39. Cakupan peserta KB aktif	%	74,54	74,56	75,59	75,64	76,72	76,84	77,2	77,2	
Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya persentase desa memiliki BUMDes	40. Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDesa)	%	5,4	19,40	33,3	54,2	750	100	100	100	Pemberdayaan masyarakat dan Desa
Meningkatakan partisipasi pemuda serta prestasi olahraga	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	41. Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang	%	20	20	30	30	30	30	30	30	Kepemudaan dan olah raga

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir	Urusan
		diberangkatkan										
	Meningkatnya prestasi olah raga	42. Peringkat kabupaten dalam porprov	Peringkat	4	-	-	3	-	-	-	3	Kepemudaan dan olah raga
Meningkatkan kualitas penanganan PMKS	Berkurangnya masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS	43. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	58,45	60,25	62,85	66,78	70,71	74,64	78,57	78,57	sosial
Misi 5 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja												
Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perijinan penanaman modal	44. Nilai investasi PMA	ribu Us \$	2.500	65.180	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	71.430	penanaman modal
		45. Nilai investasi PMDN	Juta Rp	2.960.091,93	3.937.533,6	389.486	389.486	389.486	389.486	389.486	5.884.964	penanaman modal
		46. Jumlah jenis perijinan dan non perijinan investasi yang dilayani BPPT	Jenis	50	50	52	52	52	52	52	52	penanaman modal
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengiriman transmigran	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan pemberangkatan transmigran	47. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,22	4,13	4,07	4,04	4,01	3,98	3,95	4,13	Tenaga kerja
		48. Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi	KK	14	14	20	25	25	30	30	30	Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir	Urusan
		transmigrasi (KK)										
Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kepastian dalam penegakan hukum.	Menurunnya pelanggaran produk hukum daerah	49. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	61	67	70	75	80	83	85	85	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		50. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten	%	50	55	60	65	70	70,5	80	80	
Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik												
Meningkatkan kualitas dan produktivitas aparatur sipil negara	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	51. Prosentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	79	80	80	80	80	80	80	100	Kepegawaian
		52. Persentase penanganan kasus pelanggaran	%	54	75	75	75	75	75	75	100	

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir	Urusan
	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	61. Rasio penduduk ber KTP	%	87,99	91	95	97	99	100	100	100	Kependudukan dan Capil
		62. Rasio Bayi Ber akta kelahiran	%	82	82,51	85	90	100	100	100	100	Kependudukan dan Capil
	Meningkatnya kualitas e-government, pengelolaan data/informasi dan arsip daerah, serta pengamanan informasi sandi	63. Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)	Skor	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,2	Komunikasi dan Informatika
		64. Persentase PD yang memiliki buku profil data statistik	%	57,89	60	70	80	90	100	100	100	Statistik
		65. Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	47,75	47,75	65,77	100	100	100	100	100	Kearsipan
		66. Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak	%	89	90	93	96	99	100	100	100	persandian

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir	Urusan
penghayatan masyarakat terhadap agama yang dipeluknya	pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	pembinaan keagamaan										
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelestarian budaya masyarakat	Lestarnya budaya lokal masyarakat	73. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	43,22	45	50	55	60	65	70	70	Kebudayaan
		74. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kebudayaan
Misi 9 : Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan												
Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan.	Berkurangnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	75. Persentase Penduduk Miskin	%	13,68	13,18	12,68	12,18	11,68	11,18	10,68	10,68	PD anggota TKPKD
		76. Pengeluaran riil perkapita (daya beli)	Rupiah	9.457	9.540	9.623	9.706	9.789	9.872	9.955	9.955	PD anggota TKPKD
		77. Indeks Gini	-	0,31	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	PD anggota TKPKD
		78. Nilai indeks Williamson	Indeks	0,19	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	PD anggota TKPKD

[illegible]

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Grobogan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Perumusan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 memperhatikan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

6.1. RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025

Berdasar pada kondisi, potensi dan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Grobogan, maka visi Kabupaten Grobogan jangka panjang untuk

20 tahun dirumuskan sebagai berikut : **“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan sejahtera lahir dan batin yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, maju dan mandiri”**.

Pengertian masing-masing frase visi RPJPD tersebut yaitu:

- Masyarakat Kabupaten Grobogan sejahtera lahir dan batin adalah bahwa seluruh lapisan dan kelompok masyarakat warga Kabupaten Grobogan dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara adil, baik aspek lahiriah (sandang, pangan, papan dan kesehatan jasmani) maupun aspek batiniah (rasa aman, pendidikan, dan keagamaan).
- Masyarakat Kabupaten Grobogan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah bahwa tidak saja masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya dalam hal keagamaan, namun lebih dari itu adalah bahwa masyarakat Kabupaten Grobogan merupakan masyarakat yang dalam setiap aspek kehidupannya selalu menunjukkan sikap, pemikiran dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penuh rasa persatuan sebagai warga Kabupaten Grobogan sekaligus sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
- Masyarakat yang berbudaya adalah masyarakat Kabupaten Grobogan yang memiliki jati diri dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Grobogan khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan bermasyarakat.
- Masyarakat yang maju diartikan bahwa masyarakat Grobogan yang ingin dicapai merupakan masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat Grobogan yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Berdasarkan visi jangka panjang beserta uraiannya di atas, maka untuk mencapainya ditetapkan misi untuk jangka panjang sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing, yakni dengan mengupayakan :
 - a. Meningkatkan kemampuan ekonomi berbasis keunggulan pertanian, perdagangan, industri kecil dan pariwisata, guna mewujudkan masyarakat sejahtera.
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan masyarakat mandiri.

- c. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mewujudkan masyarakat maju.
2. Meningkatkan terwujudnya masyarakat yang demokratis, guna mewujudkan visi masyarakat maju, melalui :
 - a. Pemantapan lembaga demokrasi yang kokoh.
 - b. Pemantapan pelaksanaan otonomi daerah.
 - c. Peningkatan penegakan hukum secara adil dan memihak rakyat kecil.
3. Meningkatnya terwujudnya masyarakat yang damai, bersatu dan rukun dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan batin, melalui :
 - a. Pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat secara mantap.
 - b. Pembangunan keseimbangan pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup.
 - c. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana bagi pelayanan masyarakat.
4. Meningkatkan terwujudnya masyarakat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika dan berbudaya, guna mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui :
 - a. Peningkatan pembangunan agama.
 - b. Peningkatan pelestarian dan penerapan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Grobogan.
 - c. Peningkatan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Meningkatkan sarana dan prasana fisik (infrastruktur) serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat dibidang transportasi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, agama, pemuda dan olahraga, utamanya secara fisik seperti jalan dan jembatan serta irigasi.
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu potensi daerah, kekayaan alam dan keunggulan sumber daya manusia melalui:
 - a. Meningkatkan daya tarik dan pengelolaan potensi wisata daerah.
 - b. Meningkatkan potensi koperasi, agar dapat menjadi sokoguru perekonomian daerah.
 - c. Menjaga dan melestarikan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah melalui:
 - a. Penciptaan sistem perijinan yang mudah, murah, dan cepat.

- b. Menciptakan iklim investasi yang menarik investor yang diutamakan yang mengolah sumber alam lokal.
 - c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan, khususnya bagi kaum wanita.
8. Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 dengan RPJPD Kabupaten Grobogan tahun 2005-2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 6.1.
Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2021 dengan RPJPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2005-2025

RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021
Visi RPJPD: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan sejahtera lahir dan batin yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, maju dan mandiri.	Visi RPJMD Grobogan: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh"
Misi RPJPD:	Misi:
1. Meningkatkan daya saing	Misi 2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan Misi 3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata Misi 4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya
2. Meningkatkan terwujudnya masyarakat yang demokratis	Misi 6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya terwujudnya masyarakat yang damai, bersatu dan rukun dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan batin	Misi 5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja

RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021
4. Meningkatkan terwujudnya masyarakat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika dan berbudaya, guna mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi 8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat
5. Meningkatkan sarana dan prasana fisik (infrastruktur) serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat dibidang transportasi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, agama, pemuda dan olahraga, utamanya secara fisik seperti jalan dan jembatan serta irigasi	Misi 1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu potensi daerah, kekayaan alam dan keunggulan sumber daya manusia	Misi 5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja Misi 7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang 9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan
7. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah	Misi 5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja
8. Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih	Misi 6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik

6.2. RPJMN Tahun 2015-2019

Visi pembangunan jangka menengah nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.**

Visi pembangunan nasional tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Grobogan dengan Visi dan Nawacita RPJMN Tahun 2014-2019 sebagai berikut.

Tabel 6.2.
Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019

RPJMN Tahun 2015-2019	RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021
Visi RPJMN: Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong	Visi RPJMD Grobogan: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh"
Nawacita :	Misi:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.	Misi 5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	Misi 6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	Misi 1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.	Misi 6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.	Misi 4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya. Misi 7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	Misi 3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor	Misi 2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

RPJMN Tahun 2015-2019	RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021
strategis ekonomi domestik.	
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.	Misi 8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	Misi 5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja

Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 menggariskan hal-hal sebagai berikut:

a. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
- 2) Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.
- 3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

b. Tiga Dimensi Pembangunan

1) Dimensi Pembangunan Manusia Dan Masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharap-kan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan Dengan Prioritas:

- a) Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
- b) Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
- c) Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- d) Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah, karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:

- a) Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
 - b) Wilayah pinggiran;
 - c) Luar Jawa;
 - d) Kawasan Timur.
- 1) Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas.
Kondisi tersebut antara lain:
- a) Kepastian dan penegakan hukum;
 - b) Keamanan dan ketertiban;
 - c) Politik dan demokrasi; dan
 - d) Tatakelola dan reformasi birokrasi.
- 2) Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

6.3. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021. Unsur yang perlu diperhatikan antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah:

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Terdapat 7 (tujuh) Misi yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi diatas, yaitu:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

Misi pertama merupakan kerangka acuan bagi enam misi lainnya dengan mentransformasikan nilai Trisakti dalam setiap misi. Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah memiliki karakter berbasis pada nilai ideologis Trisakti Bung Karno yaitu Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang

Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan. Landasan Trisakti ini perlu juga diaktualisasikan sebagai respon atas perubahan situasi global yang memiliki dampak pada posisi kedaulatan negara, khususnya kedaulatan atas pangan dan energi sebagai prasyarat keberdikarian sebuah bangsa. Kedaulatan pangan dan energi sebagai pengejawantahan bangunan Trisakti akan memberikan implikasi bukan saja berdikari di bidang ekonomi, namun juga akan melahirkan karakter politik yang lebih berdaulat, dan melebur pada bangunan karakter rakyat Jawa Tengah dengan melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya Jawa.

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, pengendalian alih fungsi lahan yang didukung dengan reformasi agraria, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi.

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan sosial masyarakat melalui pelibatan kelembagaan sosial dalam proses perencanaan partisipatif, revitalisasi kearifan lokal yang diadopsi dalam proses komunikasi politik, serta peningkatan peran dan fungsi seni budaya dan olah raga.

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, serta sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
Misi ini diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, permukiman, jaringan irigasi dan air baku melalui perluasan akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal.
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis.

Tabel 6.3.
Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021
Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"	Visi RPJMD Grobogan: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh"
Misi	Misi:
1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan	
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran	Misi 3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata. Misi 2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan Misi 5. Mewujudkan iklim investasi

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021
	yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”	Misi 6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan	Misi 8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat.
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak	Misi 6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat	Misi 4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya.
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	Misi 1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air. Misi 7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang

Terkait dengan pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan, dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disebutkan bahwa Kabupaten Grobogan termasuk dalam kawasan **Kedungsepur**. Kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah Kedungsapur selain Kabupaten Grobogan yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal. Kawasan ini ke depan diarahkan sebagai kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi dan pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah, sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur jawa dan pulau lainnya.

Potensi unggulan Kabupaten Grobogan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang dimiliki dan terus dapat dikembangkan adalah industri unggulan genteng, jagung, mebel; klaster genteng, kerajinan bambu, jagung, pupuk organik; serta destinasi wisata Bledug Kuwu, sumber api abadi Mrapen, Makam Kyai Ageng Selo, Kyai Tarub dan Bulan Kejawen.

Fungsi wilayah Kedungsapur ke depan diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sebagai PKN, arah pengembangan wilayah adalah pada: (1) perwujudan kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah; (2) pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus; (3) perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura; (4) dan perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai wilayah Kedungsepur meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan TPT. Adapun untuk Kabupaten Grobogan, target-target yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

Tabel 6.4.
Sasaran Pengembangan Wilayah Kedungsapur
Untuk Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2018

No	Indikator	Grobogan (%)	
		2017	2018
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,40 – 5,00	5,00– 5,40
2	Angka Kemiskinan	10,89	9,90
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,60	4,50

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Kedungsapur yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan konsep pengembangan wilayah Kedungsapur adalah Pengembangan Wilayah Kedungsapur Berbasis Perdagangan Jasa, Industri, Pariwisata, dan Agrominapolitan yang Berkelanjutan. Guna mendukung konsep tersebut maka arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kedungsapur sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5.
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kedungsapur

Konsep Pengembangan	Aspek	Kebijakan	Strategi
Pengembangan Wilayah Kedungsepur berbasis Perdagangan Jasa, Industri, Pariwisata, dan Agrowanapolitan yang Berkelanjutan	Ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah Kedungsapur melalui pengotimalan sektor potensial dan dukungan pengembangan	Meningkatkan dukungan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi
		Meningkatkan dukungan dan kinerja infrastruktur	Perbaikan jalan dan peningkatan kualitas

Konsep Pengembangan	Aspek	Kebijakan	Strategi
	Fisik (Infrastruktur, Konektivitas, Alam)	pada wilayah-wilayah pertanian Kedungsepur	jalan yang merata di wilayah pertanian Kedungsepur
		Pengembangan infrastruktur yang merata guna mendukung aktivitas di wilayah pertanian Kedungsepur yang masih tertinggal	Meningkatkan dukungan dan kinerja infrastruktur pada wilayah-wilayah pertanian Kedungsepur
		Pengembangan pelayanan infrastruktur regional di wilayah Kedungsepur	Mengembangkan infastruktur regional yang meningkatkan interaksi wilayah di Kedungsepur
		Pengembangan sektor ekonomi potensial yang terpadu di wilayah Kedungsepur	Meningkatkan konektivitas internal wilayah Kedungsepur melalui keterhubungan pengembangan sektor ekonomi
		Peningkatan interaksi internal wilayah Kedungsepur	Peningkatan dukungan prasarana jalan penghubung interwilayah di Kedungsepur
			Pengembangan dukungan transportasi massal regional Kedungsepur via BRT dan angkutan penumpang
			Pengembangan konektivitas wilayah Kedungsepur melalui jalur kereta api
		Peningkatan interaksi eksternal wilayah Kedungsepur dengan region lain yang berbatasan	Peningkatan dukungan transportasi dalam memperkuat interaksi eksternal wilayah Kedungsepur
	Sosial	Pengembangan sumber daya manusia di wilayah Kedungsepur melalui pengoptimalan pendidikan masyarakat	Peningkatan pelayanan pendidikan formal dan non formal wilayah Kedungsepur
		Pengentasan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat dengan target "penyelesaian masalah langsung dari pihak yang bermasalah"	Penanganan permasalahan pengangguran di wilayah Kedungsepur

Konsep Pengembangan	Aspek	Kebijakan	Strategi
	Tata Kelola	Pengembangan Kelembagaan Kedungsepur efektif	Penguatan kerjasama regional Kedungsepur dalam penyediaan infrastruktur dan sistem pelayanan regional
			Pembentukan baru badan pengelola kerjasama interwilayah Kedungsepur
	Lingkungan Hidup	Pengintegrasian kegiatan ekonomi wilayah dengan pelestarian lingkungan	Pelestarian sumber daya air, tanah, dan hutan

6.4. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Grobogan

Berdasarkan perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan tahun 2011-2031 Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di bagian timur Jawa Tengah dengan berbasis sektor pertanian dan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan pariwisata. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten, meliputi:

- Pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan
- Perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten terutama dalam koridor
- Pengembangan Kedungsepur;
- Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian timur Jawa Tengah;
- Pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan agropolitan Kutosaringan yang berdaya saing dalam skala pelayanan nasional;
- Pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang didukung
- Peningkatan produktifitas hasil komoditasnya;
- Pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung kawasan, dan konservasi sumberdaya alam demi pengembangan wilayah berkelanjutan;

- i. Pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional; dan
- j. Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas rencana pengembangan sistem pusat pelayanan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Pola pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan dengan memperhatikan kondisi dan potensi pada masing-masing wilayah yaitu:

1. Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan

- a. Rencana pengembangan sistem perkotaan dengan sasaran dipusatkan pada :

- 1) Kawasan perkotaan Purwodadi sebagai bagian dari PKN Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi yang selanjutnya disebut Kedungsepur;
 - 2) PKL meliputi:
 - Kawasan perkotaan Purwodadi
 - Kawasan perkotaan Gubug
 - Kawasan perkotaan Godong.
 - 3) PKLp meliputi:
 - Kawasan perkotaan Wirosari
 - Kawasan perkotaan Kradenan.
 - 4) PPK meliputi:
 - Kawasan perkotaan Tegowanu
 - Kawasan perkotaan Tanggunharjo
 - Kawasan perkotaan Kedungjati
 - Kawasan perkotaan Klambu
 - Kawasan perkotaan Brati
 - Kawasan perkotaan Grobogan
 - Kawasan perkotaan Penawangan
 - Kawasan perkotaan Karangrayung
 - Kawasan perkotaan Toroh
 - Kawasan perkotaan Geyer
 - Kawasan perkotaan Pulokulon
 - Kawasan perkotaan Gabus
 - Kawasan perkotaan Ngaringan
 - Kawasan perkotaan Tawangharjo.

b. Rencana pengembangan sistem perdesaan dipusatkan pada desa-desa dengan fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan pelayanan permukiman sebagai berikut :

- 1) Desa Karangasem Kecamatan Wirosari
- 2) Desa Boloh Kecamatan Toroh
- 3) Desa Jeketro Kecamatan Gubug
- 4) Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi
- 5) Desa Putatsari Kecamatan Grobogan
- 6) Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan
- 7) Desa Simo Kecamatan Kradenan
- 8) Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo
- 9) Desa Sedadi Kecamatan Penawangan
- 10) Desa Telawah Kecamatan Karangrayung
- 11) Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati
- 12) Desa Jambon Kecamatan Pulokulon

2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah terdiri atas:

a. Rencana pengembangan sistem prasarana utama

Rencana pengembangan sistem prasarana utama yang difokuskan pada rencana sistem jaringan transportasi darat meliputi :

- 1) Jaringan jalan provinsi di wilayah Kabupaten dengan sasaran pengembangan pada :
 - Ruas jalan Semarang-Godong Wilayah Kabupaten Grobogan
 - Ruas jalan Demak-Godong Wilayah Kabupaten Grobogan
 - Ruas jalan Godong-Purwodadi
 - Ruas jalan Purwodadi-Wirosari
 - Ruas jalan Wirosari-Sulursari-Singget (Batas Kabupaten Blora)
 - Ruas jalan Wirosari-Kunduran;
 - Ruas jalan Purwodadi-Batas Kabupaten (Klambu)
 - Ruas s jalan Purwodadi-Geyer / Batas Kabupaten Sragen
 - Ruas jalan Sukolilo-Grobogan
 - Ruas alan Kuwu-Galeh (Batas Kabupaten Sragen)
 - Ruas jalan Tegowanu-Tanggung-Kapung
 - Ruas jalan Gubug-Kapung-Kedungjati / Batas Kabupaten Semarang
 - Ruas jalan Diponegoro (Purwodadi)
 - Ruas jalan A. Yani (Purwodadi)

- Ruas jalan R. Suprpto (Purwodadi)
- Ruas jalan S. Parman (Purwodadi)
- Ruas jalan MT. Haryono (Purwodadi)
- Ruas jalan Jenderal Sudirman (Purwodadi).

2) Pengembangan terminal yang difokuskan pada :

- Pengembangan terminal penumpang tipe A berada di Kecamatan Purwodadi;
- Pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi Terminal Gubug di Kecamatan Gubug, terminal Godong di Kecamatan Godong, terminal Wirosari di Kecamatan Wirosari, terminal Kuwu di Kecamatan Kradenan, terminal Gabus di Kecamatan Gabus, terminal Klambu di Kecamatan Klambu, terminal Karangrayung di Kecamatan Karangrayung, terminal Kedungjati di Kecamatan Kedungjati, terminal Toroh di Kecamatan Toroh dan terminal Pulokulon di Kecamatan Pulokulon.
- Pengembangan terminal barang meliputi terminal Purwodadi di Kecamatan Purwodadi, terminal Gubug di Kecamatan Gubug, Terminal Godong di Kecamatan Godong, terminal Wirosari di Kecamatan Wirosari dan terminal Grobogan di Kecamatan Grobogan.

b. Rencana pengembangan sistem prasarana lainnya

Rencana pengembangan sistem prasarana lainnya meliputi :

1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi, yang difokuskan pada :

- Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi berlokasi sejajar jalur kereta api Semarang-Surabaya meliputi pembangunan jalur pipa gas Blora-Grobogan-Demak-Semarang dan jalur pipa gas Gresik-Semarang, melalui Kecamatan Gabus, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Toroh, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Godong, Kecamatan Gubug dan Kecamatan Tegowanu.
- Rencana pengembangan gardu induk distribusi berupa peningkatan gardu induk listrik di Kecamatan Purwodadi.
- Rencana pengembangan pembangkit listrik berupa peningkatan interkoneksi jaringan listrik Jawa – Bali.
- Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik.

- Rencana pengembangan energi alternatif.
- 2) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, yang difokuskan pada :
- Pengembangan jaringan kabel semua kawasan perkotaan dan peningkatan, peningkatan kapasitas pelayanan Sentral Telepon Otomat (STO) yang terdapat di Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Toroh, Kecamatan Godong, dan Kecamatan Gubug.
 - Pengembangan sistem nirkabel meliputi pembangunan jaringan telepon tanpa kabel yang menjangkau semua kawasan, pembangunan jaringan layanan internet pada fasilitas umum di PKL, PKLp, PPK, dan PPL dan pembangunan menara telekomunikasi bersama di seluruh kecamatan
- 3) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air, yang difokuskan pada:
- Pengelolaan DAS pada jaringan sumber daya air WS Strategis Nasional Jragung Seluna meliputi DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang - Lusi dan DAS Juwana.
 - Jaringan irigasi yang meliputi jaringan irigasi primer yang melalui seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kedungjati, jaringan irigasi sekunder yang melalui seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kedungjati dan jaringan tersier yang tersebar di wilayah kabupaten.
 - Sistem prasarana air baku melalui pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan sumber air baku permukaan yang terdiri atas:
 - Peningkatan pengelolaan waduk meliputi Waduk Sanggeh di Kecamatan Toroh, Waduk Simo di Kecamatan Kradenan, Waduk Gambrengan di Kecamatan Toroh, Waduk Nglangon di Kecamatan Kradenan, Waduk Butak di Kecamatan Kradenan dan Waduk Kenteng di Kecamatan Toroh.
 - Peningkatan pengelolaan embung meliputi Embung Plosorejo di Kecamatan Tawangharjo, embung Boloh di Kecamatan Toroh, embung Jambon di Kecamatan Pulkokulon, embung Rejosari di Kecamatan Grobogan, embung Kidang Kencono di Kecamatan Penawangan, embung Tahunan di Kecamatan Gabus, embung Mojorebo di Kecamatan Wirosari, embung

Sengonwetan di Kecamatan Kradenan, embung Crewek di Kecamatan Kradenan, embung Pulokulon di Kecamatan Pulokulon, embung Sindurejo di Kecamatan Toroh, embung Getasrejo di Kecamatan Grobogan, embung Kronggen di Kecamatan Brati, embung Sulursari di Kecamatan Gabus, embung Waru Karanganyar di Kecamatan Purwodadi, embung Tunggu di Kecamatan Penawangan, embung Pelem di Kecamatan Gabus, embung Jono di Kecamatan Tawangharjo, embung Lemah Putih di Kecamatan Brati, embung Sugihmanik di Kecamatan Tanggungharjo, embung Kalimaro di Kecamatan Kedungjati, dan embung Mangin di Kecamatan Karangrayung.

- Pembuatan embung baru tersebar di kecamatan-kecamatan untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir.

4) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya, yang difokuskan pada wilayah :

- Sistem pengelolaan persampahan meliputi rencana pengelolaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dengan sistem sanitary landfill terdapat di Kecamatan Purwodadi, revitalisasi TPSST eksisting di Kecamatan Gubug, Kecamatan Godong, dan Kecamatan Wirosari.
- Pembangunan TPSST baru tersebar di Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Tanggungharjo, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Gabus, Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo dan Kecamatan Ngaringan.
- Pola operasi pewadahan individu dan pewadahan komunal;
- Pengangkutan dilakukan dari transfer depo dan wadah komunal ke TPA atau untuk pengumpulan langsung dari sumber-sumber sampah besar langsung ke TPA.
- Sampah dikelola dari sumbernya dengan prinsip 3 R (Reuse, Reduce, Recycle).
- Sistem drainase yang meliputi saluran primer yaitu sistem saluran yang memanfaatkan aliran sungai-sungai utama di

Kabupaten Grobogan, saluran sekunder yaitu sistem saluran berupa selokan yang dikembangkan mengikuti jaringan jalan utama dan c. pengembangan drainase kabupaten dengan mengintegrasikan sistem drainase dengan sistem DAS dan Sub DAS.

- Sistem penyediaan air minum mencakup sistem jaringan perpipaan dan sistem jaringan non perpipaan terlindungi dengan rencana cakupan pelayanan mencapai 80% wilayah Kabupaten Grobogan, meliputi IPA Tegowanu dengan debit 25 liter/detik melayani kawasan perkotaan tegowanu, IPA Penawangan dengan debit 30 liter/detik melayani kawasan perkotaan penawangan dan c. sistem penyediaan air minum di tiap kawasan perkotaan dari sumber mata air dengan sistem pengaliran gravitasi.
- Sistem pengelolaan air limbah meliputi sistem pembuangan air limbah (sewage) mencakup sistem pengolahan berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terletak di kawasan peruntukan industri meliputi Kecamatan Tegowanu, Gubug, Tanggungharjo, Godong, Pendawangan, Karangarayang, Purwodadi, Wirosari dan Pulokulon.
- Sistem pembuangan air buangan rumah tangga (sewerage) yang pengelolaannya terdiri atas pengolahan sanitasi setempat (on site sanitation) untuk industri, hotel rumah makan, dan rumah tangga, serta pengolahan sanitasi terpusat (off site sanitation) bagi kompleks perumahan baru dan rumah sakit, dan sistem pembuangan air limbah (sewage) mencakup sistem pengolahan berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terletak di Kecamatan Purwodadi.
- Jalur dan ruang evakuasi bencana alam meliputi jalur dan ruang evakuasi bencana banjir, terletak di :
 - jalan raya Gubug–Semarang dengan ruang evakuasi berada di kantor Kecamatan Tegowanu untuk Kecamatan Tegowanu;
 - jalan raya Gubug–Semarang dan Gubug-Godong dengan ruang evakuasi berada di kantor Kecamatan Gubug untuk Kecamatan Gubug;
 - jalan Godong–Purwodadi dengan ruang evakuasi berada di kantor Kecamatan Godong untuk Kecamatan Godong;

- jalur Grobogan ke arah Pati dengan ruang evakuasi berada di kantor Kecamatan Grobogan untuk Kecamatan Grobogan;
 - jalan Godong–Karangrayung dengan ruang evakuasi berada di kantor Kecamatan Karangrayung untuk Kecamatan Karangrayung;
 - ruas Jalan Purwodadi–Surakarta dengan ruang evakuasi berada di kantor Kecamatan Geyer untuk Kecamatan Geyer;
 - ruas Jalan Grobogan–ke arah Kudus dengan ruang evakuasi berada di kantor Kecamatan Brati untuk Kecamatan Brati;
 - ruas Jalan Puwodadi–Geyer ke arah Surakarta dengan ruang evakuasi berada di Kantor Kecamatan Toroh untuk Kecamatan Toroh
 - ruas Jalan Suprpto–Diponegoro–ke arah Surakarta dan ruas jalan Suprpto–Gajah Mada–ke arah Semarang dengan ruang evakuasi berada di GOR Purwodadi untuk Kecamatan Purwodadi.
- Jalur dan ruang evakuasi bencana tanah longsor menyesuaikan lokasi kejadian tanah longsor dengan ruang evakuasi berada di kantor desa dan/atau kantor kecamatan.
 - Pengembangan sistem proteksi kebakaran meliputi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan;
 - sistem proteksi kebakaran mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan, terdiri atas:
 - pencegahan kebakaran;
 - pemberdayaan peran masyarakat;
 - pemadam kebakaran; dan
 - penyelamatan jiwa dan harta benda.

6.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk memudahkan implementasi KLHS dalam perencanaan pembangunan, utamanya integrasi kepentingan lingkungan hidup (LH) dalam rencana pembangunan, dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kunci keberlanjutan (*sustainability key questions*). Pertanyaan ini untuk memastikan apakah penyusunan rencana pembangunan sudah mempertimbangkan kepentingan lingkungan. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan representasi dari kepentingan LH yang

seharusnya dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Persepsi tentang makna “kepentingan” Lingkungan Hidup ini penting untuk didiskusikan di antara pemangku kepentingan sehingga tidak timbul kerancuan ketika menentukan apakah penyusunan suatu rencana pembangunan telah mempertimbangkan kepentingan Lingkungan Hidup.

Ketidakjelasan yang seringkali terjadi ketika menilai apakah kepentingan Lingkungan Hidup telah atau belum diintegrasikan dalam penyusunan suatu rencana pembangunan umumnya terkait dengan ketidakjelasan apa makna “kepentingan” Lingkungan Hidup dan bagaimana kepentingan Lingkungan Hidup tersebut “dipertimbangkan” atau diintegrasikan dalam penyusunan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam metodologi ini dijelaskan makna “kepentingan” Lingkungan Hidup dan bagaimana kepentingan tersebut seharusnya diintegrasikan ke dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.

Makna kepentingan Lingkungan Hidup dalam hal ini, diusulkan, diwakili oleh tiga prinsip Lingkungan Hidup yang merupakan kaidah-kaidah ekologi dan sosial-ekonomi, yaitu: (1) keterkaitan/ketergantungan (*interdependency*), (2) keberlanjutan (*sustainability*), dan (3) keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya (*environmental justice*). Masing-masing kaidah ini kemudian dijabarkan dalam kriteria dan beberapa indikator, terutama indikator-indikator input dan proses (implementasi). Dalam hal rumusan indikator, diusahakan dalam bentuk indikator teknis sehingga dapat operasional.

Prinsip I : Pertimbangan keterkaitan/ketergantungan (*interdependency*). Menunjukkan sejauhmana tingkat partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan; Kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan antar pemangku kepentingan; Kejelasan mekanisme, prosedur, dan kewenangan dalam hubungan kerja antar sektor, antar lembaga (formal dan non-formal), dan antar wilayah; Kejelasan digunakannya pendekatan ekosistem [a.l., Daerah Aliran Sungai (DAS), ekosistem khas] dalam perencanaan pembangunan; Keterkaitan RPJMD Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, utamanya antar Kabupaten/Kota dalam satu ekosistem.

Prinsip II : Pertimbangan kaidah-kaidah keberlanjutan (*sustainability*). Menunjukkan sejauh mana faktor-faktor penunjang keberlanjutan, antara lain, daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup serta faktor kemampuan sumberdaya alam pulih kembali (atau alih fungsi menjadi sumberdaya produktif lainnya) menjadi pertimbangan perencanaan pembangunan.

Prinsip III : Pertimbangan keadilan sosial dan ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) (*environmental justice*). Mencegah terjadinya pembangunan yang berakibat pada marginalisasi dan kemiskinan akibat ketidakadilan dalam akses, pemanfaatan, penguasaan, dan pengendalian terhadap sumberdaya alam. Pertimbangan keadilan juga termasuk keadilan dalam akses infrastruktur dasar dan informasi atas sumberdaya.

Untuk memudahkan integrasi prinsip dan kriteria kepentingan Lingkungan Hidup dalam perencanaan pembangunan tersebut di atas, prinsip dan kriteria tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan termasuk indikator-indikator yang akan digunakan sebagai tolak ukur.

Kegiatan KLHS penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021 diakhiri dengan kegiatan *Penyampaian Hasil Rekomendasi* KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021” yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dengan dihadiri oleh pemangku kepentingan. Pada kegiatan ini, Tim Pokja Pengendalian Lingkungan selaku penyusun KLHS, memaparkan hasil proses KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021 yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam kegiatan tersebut, juga disepakati dan dapat diterima rekomendasi KLHS oleh tim penyusun RPJMD yang juga sebagian anggotanya juga menjadi anggota Pokja PL untuk diintegrasikan ke dalam rancangan RPJMD. Meskipun proses penyusunan telah selesai, Pokja Pengendalian Lingkungan masih memiliki kewajiban untuk “mengawal” proses pengintegrasian KLHS ke dalam Rancangan Akhir RPJMD dan dilakukannya KLHS Renstra SKPD. Berikut penjelasan hasil kesepakatan pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam rancangan akhir RPJMD Kabupaten Grobogan 2016 – 2021 :

1. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Grobogan 2016 - 2021

Isu strategis KLHS RPJMD berupa isu Kemiskinan dan Pengangguran, Pelayanan Dasar dan Infrastruktur, Kelembagaan dan Tata Kelola, Konflik dan Kesenjangan Sosial, serta Kerentanan dan Pelestarian Sosial Budaya, Penurunan dan Kerusakan Kualitas Lingkungan, dan Alih Fungsi Lahan **sudah** masuk dalam substansi yang disebutkan sebagai isu strategis RPJMD.

2. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Grobogan 2016 - 2021

Berdasarkan kajian konsistensi Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah RPJMD yang sedang disusun terhadap Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi Prinsip Keterkaitan, Keseimbangan, dan Keadilan, maka diusulkan untuk menambahkan beberapa hal, yaitu :

- Catatan perbaikan terhadap Visi :

Visi Kabupaten Grobogan yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh"*** belum secara langsung maupun dalam penjelasan visi menyebutkan secara spesifik mengenai aspek lingkungan hidup. Catatan perbaikan, pada penjelasan dari SECARA UTUH dapat diartikan sebagai juga sebagai keutuhan kelestarian lingkungan alam atau MENYELURUH diartikan sebagai keseluruhan baik aspek sosial/budaya, ekonomi, dan lingkungan.

- Catatan perbaikan untuk Misi :

Misi sudah memperhatikan pembangunan berkelanjutan tetapi perlu dipertegas berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan khususnya pada aspek lingkungan yang dapat berimplikasi pada tidak terjaminnya keadilan antar kelompok dan antar generasi. Penjabaran Misi ke-3 mengenai pelaksanaan Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata dapat dilakukan dengan berwawasan lingkungan. Penjabaran Misi ke-6 Penambahan usaha dan tindakan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Berdasarkan kajian mengenai Prinsip Keterkaitan, Keseimbangan, dan Keadilan, Arah Kebijakan Pembangunan pada misi 1 hingga 9 sudah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, namun ada beberapa catatan agar diperhatikan pada program, yaitu :

Program Prioritas

(9 program – 2 program terindikasi dapat berpengaruh negatif)

- 1) Pembangunan Infrastruktur dilakukan secara merata dan proporsional di seluruh wilayah daerah atau difokuskan pada lokasi yang relatif

tertinggal, dengan tetap memperhatikan aset dan nilai-nilai budaya lokal, tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan menggunakan bahan, material, dan alat/teknologi yang ramah lingkungan dan penyediaan jalur hijau maupun ruang terbuka hijau lainnya, memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh. dan menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.

- 2) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru di pedesaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan menggunakan bahan, material, dan alat/teknologi yang ramah lingkungan dan penyediaan ruang terbuka hijau lainnya, memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi serta peneduh dan menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.

Misi 1

"Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air" (6 program – 4 program terindikasi dapat berpengaruh negatif)

- 1) Peningkatan rehabilitasi / pemeliharaan jalan tetap memperhatikan kondisi pelengkap dan perlengkapan jalan terutama peningkatan dan penyediaan drainase, dan dapat menambah kantung/celukan parkir, memaksimalkan lahan yang ada, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh, dan menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana. Menyiapkan lahan pertanian produktif pengganti.
- 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan dilakukan secara merata diseluruh wilayah dengan tetap memperhatikan kondisi pelengkap dan perlengkapan jalan terutama peningkatan dan penyediaan drainase, dan dapat menambah kantung/celukan parkir.
- 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dilakukan secara proporsional diseluruh wilayah atau difokuskan pada lokasi yang memiliki pergerakan (LLAJ) yang tinggi.

- 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dilakukan secara proporsional atau difokuskan pada lokasi yang memiliki akses terbatas, disertai monitoring terkait emisi gas buang (uji emisi secara rutin) dan dapat dilakukan dengan pengembangan transportasi masal. Memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh, dan menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.

Misi 2

"Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan" (5 program – 2 program terindikasi dapat berpengaruh negatif)

- 1) Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dilakukan meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan petani serta penguatan kelembagaan petani, tetap menjaga dan mempertahankan nilai budaya dan kebiasaan dalam bertani berbasis kearifan lokal, serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- 2) Dalam peningkatan produksi pertanian/perkebunan, agar melibatkan seluruh stakeholders serta melakukan penguatan terhadap kelembagaan pertanian, tetap menjaga dan mempertahankan nilai budaya dan kebiasaan dalam bertani berbasis kearifan lokal, penguatan kelembagaan petani, dan menggunakan pupuk berimbang spesifik lokasi dan penggunaan pestisida yang memperhatikan ambang pengendalian, meningkatkan pemakaian pupuk dan pestisida organik, dan diversifikasi komoditas yang ditanam.

Misi 3

"Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata" (9 program – 4 program terindikasi dapat berpengaruh negatif)

- 1) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dilakukan secara merata dengan pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan kebijakan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi industri, pemanfaatan SDA agar dibatasi dan penetapan lokasi dilakukan dengan kajian yang dilandasi peraturan yang tegas serta menyediakan sistem pengolahan limbah yang baik, memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta

meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh. Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan Menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.

- 2) Pengembangan sentra-sentra industri potensial dilakukan secara merata dengan pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan kebijakan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi industri, pemanfaatan SDA agar dibatasi dan pentapan lokasi dengan kajian yang dilandasi peraturan yang tegas serta menyediakan sistem pengolahan limbah yang baik, memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh. Menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.
- 3) Pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan dengan langkah awal penyiapan kelembagaan tata kelola yang baik, dengan Pelibatan pemangku kepentingan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata dan Pelatihan dan edukasi kepada masyarakat terkait keahlian bidang pariwisata maupun Pembentukan komunitas sadar wisata dengan memberdayakan masyarakat local, meningkatkan investasi masyarakat, menjaga kelestarian alam dan membentuk regulasi yang menjaga keasrian lingkungan dan ekosistem di destinasi wisata yang baru, memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan Memaksimalkan lahan yang ada, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh. Mengembangkan destinasi pariwisata berbasis alam seperti agrowisata dan lain sebagainya.
- 4) Pengembangan Pemasaran Pariwisata dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan ikut serta dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemasaran pariwisata serta menggunakan teknologi yang mendukung pemasaran, meningkatkan kerjasama pemasaran dengan berbagai pihak pelaku pariwisata serta mengembangkan pariwisata berkonsep eco-tourism.

Misi 4

"Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat , keolahragaan kepemudaan, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya"

(17 program – 2 program terindikasi dapat berpengaruh negatif)

- 1) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dilakukan menggunakan material yang ramah lingkungan serta menyediakan IPAL dan pengelolaan lingkungan dengan baik, memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta menyediakan ruang terbuka hijau di dalam maupun disekitar lokasi Puskesmas, dan menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.
- 2) Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dilakukan menggunakan material yang ramah lingkungan serta menyediakan IPAL dan pengelolaan lingkungan dengan baik, memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta menyediakan ruang terbuka hijau di dalam maupun disekitar lokasi Rumah Sakii, dan menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.

Misi 5

"Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja"

(4 program – 3 program terindikasi dapat berpengaruh negatif)

- 1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam merumuskan kesepakatan dan kebijakan dengan investor dan dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- 2) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kesepakatan dan kebijakan dengan investor dan dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, pemilihan lokasi sesuai peruntukan dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh, serta pembangunan dilakukan pada lokasi yang

dipersyaratkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang terbatas. Pendirian industri baru yang memberikan dampak lingkungan signifikan perlu memperhatikan aspek rehabilitasi dan reklamasi lingkungan. Penggantian lahan pertanian yang terpakai serta pembangunan jalur evakuasi bencana harus dimasukkan dalam perencanaan investasi dengan mempertimbangkan biaya pemulihan lingkungan dan sosial.

- 3) Peningkatan Kesempatan Kerja dilakukan dengan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi usaha.

Misi 6

"Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik"
(9 program – 2 program terindikasi dapat berpengaruh negatif)

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur berupa kantor maupun bangunan dan sejenisnya dilakukan dengan memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh serta menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.
- 2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara merata dan memperhatikan dampak terhadap kawasan sekitarnya serta mengikutsertakan masyarakat.

Misi 7

"Meningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang"
(9 program – 4 program terindikasi dapat berpengaruh negatif)

- 1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam harus memperhatikan tindakan antisipasi dampak perubahan iklim serta aspek adaptasi dan mitigasi terhadap bencana. Program ini perlu memasukan teknologi tepat guna seperti pilot proyek panel surya untuk perkantoran pemerintah, biogas dan sumur resapan, rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lahan kritis.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dilakukan secara merata dan menyeluruh disertai Menjaga dan mengawasi penggunaan akses informasi lingkungan

hidup yang baik. Program ini juga perlu dijalankan dengan melaksanakan pemetaan potensi pencemaran yang akurat dan menyeluruh dengan menggunakan teknologi berbasis Sistem Informasi Geografis

- 3) Perencanaan Tata Ruang dilakukan secara merata dan memperhatikan dampak terhadap kawasan sekitarnya serta mengikutsertakan masyarakat dan kebijakan diambil dengan metode Bottom-Up.
- 4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dilakukan dengan meningkatkan kapasitas laboratorium pengujian menjadi laboratorium lingkungan yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Misi 8

“Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan”

(7 program – 2 program terindikasi dapat berpengaruh negatif)

- 1) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dilakukan sesuai dengan kerifan lokal memperhatikan dampak terhadap kawasan sekitarnya serta mengikutsertakan masyarakat dengan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan adat setempat dengan tanpa menghilangkan aset budaya dan penyediaan ketentuan yang dapat menghindari konflik budaya dalam bentuk CSR dan sebagainya.
- 2) Perencanaan pembangunan ekonomi dilakukan secara merata dan memperhatikan dampak terhadap kawasan sekitarnya serta mengikutsertakan masyarakat.

6.6. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan (Tahun 2016-2021) yang diselaraskan dengan visi misi dan tujuan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.6.
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air			
Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta sarana drainase perkotaan	Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dengan prioritas pada jalan dan jembatan dalam kondisi rusak berat
	Meningkatnya ketersediaan drainase perkotaan	Meningkatkan fungsi drainase pembangunan dan rehabilitasi drainase di wilayah perkotaan	Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi drainase khususnya pada wilayah rawan genangan.
Meningkatkan pemenuhan akses permukiman, air minum dan sanitasi yang layak.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	Meningkatkan penataan perumahan dan permukiman, serta penyediaan akses air minum dan sanitasi layak.	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan fokus pada penanganan kawasan kumuh, dan penyediaan sarana air minum dan sanitasi
Meningkatkan pemenuhan air irigasi untuk pertanian	Meningkatnya fungsi sarana irigasi	Meningkatkan fungsi irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi drainase dengan prioritas pada jaringan irigasi yang rusak sedang dan berat
Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana transportasi yang aman dan nyaman.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan ijin trayek dan pemenuhan angkutan umum pada jalan kabupaten.	Pemenuhan sarana dan prasarana angkutan umum dan fasilitas keselamatan jalan pada titik rawan kecelakaan.
Misi 2 : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan			
Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan darat	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan melalui penyediaan sarana produksi dan pemberdayaan kelompok tani	Peningkatan pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat pertanian tepat guna, serta pengembangan sistem pertanian berkelanjutan terutama pada jenis komoditas pertanian unggulan lokal
	Meningkatnya produksi perikanan	Pengembangan budidaya perikanan darat melalui penyediaan sarana produksi dan pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan	Pengembangan budidaya perikanan darat pada kawasan peruntukan perikanan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan serta meningkatkan	Pemantauan pasokan dan harga pangan pokok, penyediaan cadangan pangan sesuai standar, dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		pola konsumsi pangan yang BISA (berimbang, beragam, sehat, dan aman).	peningkatan kesadaran masyarakat mengenai konsumsi pangan yang BISA
Misi 3 : Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata			
Menumbuhkembangkan usaha ekonomi kerakyatan baik koperasi dan UMKM, industri, maupun perdagangan	Meningkatnya jumlah dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Meningkatkan industri kecil dan menengah melalui pembinaan dalam memperkuat jaringan klaster industri	Pengembangan dan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi dan pengembangan sentra sentra industri potensial
	Meningkatnya jumlah dan kapasitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta kualitas koperasi	Meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM dan koperasi melalui kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah serta peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan kapasitas dan pembinaan, pemberian bantuan peralatan usaha, dan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM dan pengurus koperasi
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan	Meningkatkan kerjasama jaringan perdagangan internasional maupun regional serta revitalisasi pasar tradisional	Pengembangan jaringan perdagangan dan rehabilitasi pasar dengan prioritas pada pasar yang berkondisi tidak layak.
Mengembangkan pariwisata daerah yang berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor wisata dalam pembangunan daerah	Pengembangan destinasi wisata sesuai potensi yang dimiliki daerah dengan melibatkan pelaku usaha di bidang wisata.	Pengembangan destinasi wisata yang sudah ada dan pembangunan destinasi wisata baru, serta peningkatan promosi melalui berbagai media
Misi 4 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya			
Membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan melalui pemberian beasiswa dan penambahan sarana dan prasarana sekolah	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, pembangunan ruang kelas baru (RKB) rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan berat.
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan manajemen pelayanan pendidikan	Peningkatan ruang penunjang lainnya (RPL) serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	Pembangunan ruang penunjang lainnya (RPL) dan peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, SD/MI dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan pelayanan pendidikan melalui penguatan lembaga pendidikan. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan pendidikan	SMP/MTs. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan melalui fasilitasi akreditasi Meningkatkan peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah melalui pelatihan dan pelibatan pengambilan kebijakan.
	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Meningkatkan minat baca dengan mengembangkan perpustakaan yang berkualitas dan kampanye minat baca kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dengan penyediaan bahan bacaan pada perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling
Meningkatkan derajat kesehatan kesehatan yang semakin berkualitas dan merata	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, kualitas SDM Kesehatan, dan perbaikan manajemen kesehatan	Peningkatan kesehatan masyarakat dengan prioritas pada pelayanan promotif dan preventif serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM bidang medis
	Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan melalui perluasan cakupan sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan peran dan fungsi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan RSUD dengan fokus pada akreditasi dan perluasan cakupan pelayanan.
	Terbangunnya rumah sakit tipe C		
	Terciptanya manajemen dan syitem pelayanan kesehatan yang profesional di puskesmas		
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan KB	Terkendalnya jumlah penduduk dan meningkatnya parsitipasi Aktif KB	Pengendalian penduduk melalui optimalisasi pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KB serta promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya persentase desa memiliki BUMDes	Pengembangan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pendampingan, dan fasilitasi akses modal usaha, serta pengembangan BUMDesa	Pengembangan perekonomian desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki
Meningkatkan partisipasi pemuda serta prestasi olahraga	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan	Pembinaan bagi atlit dan penyelenggaraan berbagai event olahraga prestasi maupun	Pembinaan dan pemberian <i>reward</i> kepada atlit dan pelatihan olahraga berprestasi dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	meningkatnya prestasi olah raga	olahraga rekreasi serta penguatan organisasi dan kapasitas kepemudaan dalam pembangunan	penyediaan sarana prasarana olahraga serta pembinaan dan fasilitasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan
Meningkatkan kualitas penangan PMKS	Berkurangnya masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS	Meningkatkan pelayanan PMKS melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, pemberian bantuan serta peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat	Pemberian jaminan perlindungan dan rehabilitasi sosial difokuskan pada keluarga rentan, LUT, PGOT dan tuna susila.
Misi 5 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja			
Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perijinan penanaman modal	Meningkatkan kemudahan pelayanan perijinan maupun non perijinan, peningkatan sarana dan prasarana penunjang investasi, optimalisasi promosi peluang berinvestasi, serta penyediaan lahan investasi.	Peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang cepat melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), peningkatan jaringan dengan investor serta penyediaan kawasan industri.
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengiriman transmigran	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan pemberangkatan transmigran	Meningkatkan penyerapan kerja dengan meningkatkan kualitas calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja dengan mengoptimalkan BLK, serta fasilitasi pengiriman transmigrasi	- Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, magang kerja, dan pengembangan bursa kerja online. - Peningkatan kerjasama dalam penempatan transmigrasi
Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kepastian dalam penegakan hukum.	Menurunnya pelanggaran produk hukum daerah	Meningkatkan penegakan Perda melalui pelaksanaan patroli dan operasi, serta antisipasi penanganan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.	Peningkatan pendidikan politik, pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP; dan penegakan peraturan daerah
Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik			
Meningkatkan kualitas dan produktivitas aparatur sipil negara	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	Penempatan pegawai sesuai standar kompetensi dan peningkatan kedisiplinan pegawai melalui pemberian reward dan punishment	Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, pengisian jabatan sesuai standar kompetensi, serta peningkatan Diklat bagi ASN sesuai kebutuhan; serta penegakan kedisiplinan bagi ASN
Meningkatkan kualitas dan	Meningkatnya kualitas	Meningkatkan kualitas perencanaan,	Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan daerah	perencanaan dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja pembangunan daerah	an evaluasi serta pelaporan kinerja pembangunan daerah
	Meningkatnya PAD dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Menata sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan seluruh Perangkat Daerah, dan meningkatkan kapasitas pemeriksa dalam pembinaan dan pemeriksaan pelaksanaan pembangunan	Peningkatan perbaikan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan Peningkatan pembinaan dan pemeriksaan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik Pemda	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan SOP dan SPP secara konsisten dan menyeluruh	Optimalisasi penerapan SOP dan SPP dengan fokus pada Perangkat Daerah yang memiliki unit pelayanan langsung kepada masyarakat
	Meningkatnya kualitas e-government, pengelolaan data/informasi dan arsip daerah, serta pengamanan informasi sandi	Meningkatkan kapasitas SDM dan peran seluruh perangkat daerah dalam pengembangan e-government, pengelolaan arsip, pengelolaan data statistik dan persandian	Pengembangan aplikasi dan infrastruktur penunjang e-government, penerapan pengelolaan arsip secara baku, dan perbaikan manajemen pengelolaan data dan sandi.
Misi 7 : Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang			
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya kasus pencemaran lingkungan	Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam melalui Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA serta Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ramah lingkungan	Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan fokus pada perlindungan dan konservasi lingkungan serta penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
Meningkatkan kualitas penataan ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan, dan meningkatnya luasan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan	Menyediakan dokumen penataan kawasan strategis, serta pengendalian pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya, serta menyediakan lahan dalam pengembangan RTH di kawasan perkotaan	Peningkatan pengelolaan penataan ruang dengan fokus pada pengawasan pemanfaatan ruang, dan pengembangan RTH di kawasan perkotaan
Misi 8 : Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat			
Meningkatkan penghayatan masyarakat terhadap agama	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan	Meningkatkan penghayatan nilai keagamaan melalui pembinaan toleransi dan kerukunan	Penyelenggaraan forum kerukunan umat beragama dan pengembangan nilai-nilai agama di

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
yang dipeluknya	kerukunan antar umat beragama	dalam kehidupan beragama	lingkungan masyarakat
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelestarian budaya masyarakat	Lestarnya budaya lokal masyarakat	Meningkatkan kelestarian budaya melalui pelestarian nilai-nilai dan seni budaya lokal serta daerah pelestarian cagar budaya	Pelestarian budaya lokal dengan fokus pada seni dan budaya lokal yang hampir punah
Misi 9 : Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan			
Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan.	Berkurangnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi kemiskinan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan mengoptimalkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah., • Mengurangi kesenjangan pendapatan dan disparitas antar wilayah melalui pemerataan pembangunan dan pertumbuhan pusat perekonomian baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi program-program penanggulangan kemiskinan antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan. • Peningkatan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan fokus pada pengembangan pusat perekonomian baru di tiap kecamatan dan desa
Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan, serta pemenuhan hak anak	Berkurangnya ketimpangan laki-laki dan perempuan dan berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan pemberdayaan lembaga berbasis gender dan anak dalam pengarusutamaan gender dan anak, bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha, serta optimalisasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan anak, peningkatan kualitas hidup perempuan dan tumbuh kembang anak, serta pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan.

6.7. Tahapan Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, dengan memperhatikan prioritas program pembangunan daerah, maka tahapan pembangunan daerah lima tahun yang akan datang meliputi :

1. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2016

"Percepatan pembangunan Infrastruktur Untuk Menunjang Perekonomian Rakyat".

Pada tahap ini pembangunan daerah difokuskan pada percepatan pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah kecamatan serta pembangunan irigasi untuk menyediakan air baku bagi pertanian. Kelancaran transportasi antar wilayah kecamatan karena kondisi jalan dan jembatan yang baik akan mampu meningkatkan roda perekonomian. Perekonomian rakyat berupa usaha mikro dan kecil di masing-masing kecamatan diharapkan akan mampu berkembang karena akses jalan yang semakin mudah. Kebijakan pada tahap ini diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi dengan fokus perbaikan jaringan irigasi yang rusak dan wilayah yang masih tadah hujan.
- 3) Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat difokuskan pada kawasan kumuh.
- 4) Peningkatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga kurang mampu dan penataan lingkungan terutama pada kawasan kumuh.

2. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2017

"Memperkuat pembangunan infrastruktur dalam menunjang pembangunan ekonomi dan investasi serta konektivitas antar wilayah."

Pada tahap ini pembangunan daerah masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang belum selesai dilaksanakan pada tahun 2016. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur diarahkan pada infrastruktur yang menunjang ekonomi dan investasi, seperti jalan , jembatan, air minum dan air bersih, irigasi, sanitasi dan pemukiman. Pembangunan pada tahun 2016 yang diarahkan pada konektivitas daerah terus dikembangkan sampai seluruh jalan dan jembatan dalam kondisi baik.

Jalur ekonomi yang menghubungkan desa, kecamatan sampai ke kota dalam kondisi baik dan lancar. Selain itu kondisi saluran irigas semakin baik bahkan daerah yang selama ini masih tadah hujan dibuatkan irigaasi agar mampu meningkatkan produksi pertanian.

Pada tahap ini kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada:

- 1) Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dengan prioritas pada jalan dan jembatan yang berada dalam kondisi rusak berat di wilayah kecamatan dan desa
- 2) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana irigasi, dan air minum dengan fokus pada penataan dan pendayagunaan sumberdaya air.
- 3) Akselerasi peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat difokuskan pada kawasan kumuh.
- 4) Peningkatan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman dengan fokus pada penyediaan sarana prasarana dan peningkatan partisipasi masyarakat
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang keselamatan dalam berlalu lintas.
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang cepat melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), peningkatan jaringan dengan investor serta penyediaan kawasan industri.

3. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2018,

"Penciptaan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri dan perdagangan dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi"

Pada tahapan ini pembangunan daerah diarahkan pada upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar di seluruh kecamatan dengan berbasis industri dan perdagangan. Pada tahap ini upaya untuk menumbuhkan pasar desa dengan upaya revitalisasi. Perbaikan pasar tradisional menuju pasar yang higienis dan menarik masyarakat untuk berbelanja pada pasar tradisional. Kemandirian ekonomi ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan terjaminnya ketersediaan bahan baku bagi industri dengan sebagian besar berasal dari lokal. Meningkatnya aktivitas perdagangan terutama pada perdagangan antar daerah dan ekspor komoditas unggulan Kabupaten Grobogan.

Fokus pada upaya pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa bukan berarti mengesampingkan sektor yang lain. Sektor lain tetap

haurs dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya reguler. Kebijakan pembangunan daerah pada tahap ini diarahkan pada :

1. Pengembangan dan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi dan pengembangan sentra sentra industri potensial
2. Meningkatkan kerjasama jaringan perdagangan internasional maupun regional serta revitalisasi pasar tradisional
3. Peningkatan kapasitas, pembinaan, serta pemberian bantuan peralatan dan modal bagi pengurus koperasi dan pelaku UMKM yang produktif.
4. Pengembangan perekonomian desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan sumberdaya alam yang dimiliki
5. Peningkatan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan fokus pada pengembangan pusat perekonomian baru di tiap tiap kecamatan dan desa

4. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2019

"Penciptaan dan Penguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis produk unggulan daerah"

Pada tahapan ini pembangunan daerah diarahkan pada upaya untuk memperkuat dan mengembangkan ekonomi kerakyatan serta menciptakan usaha-usaha baru. Pengembangan ekonomi kerakyatan difokuskan pada usaha mikro, industri mikro, usaha kecil dan industri kecil. Pengembangan usaha mikro dan kecil ini termasuk industri mikro dan kecil diarahkan pada upaya untuk memaksimalkan produk unggulan daerah. Pengembangan menuju pada *one village one product* menjadi arah pengembangan industri mikro dan kecil. Penciptaan dan penguatan ekonomi kerakyatan ini dilakukan dengan berbagai upaya yaitu mengalokasikan APBD pada pengembangan sektor koperasi dan UMKM serta sektor Industri dan perdagangan. Selain itu juga dilakukan pendampingan dan pemberdayaan dengan memberikan kepada mereka berbagai pelatihan terutama pada upaya pemasaran produk mereka.

Selain itu pada tahapan ini juga diperhatikan upaya untuk mengembangkan destinasi tujuan wisata baik yang baru maupun pengembangan Destinasi tujuan wisata yang sudah ada. Potensi wisata alam yang terbatas dapat dikembangkan dengan membuat obyek wisata buatan dengan memanfaatkan kebutuhan lokal. Kebijakan pada tahap ini diarahkan pada :

- 1) Peningkatan kapasitas, pembinaan, serta pemberian bantuan peralatan dan modal bagi pengurus koperasi dan pelaku UMKM yang produktif
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian serta sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian dan UMKM
- 3) memfasilitasi pengembangan koperasi khususnya kepada koperasi-koperasi yang statusnya tidak aktif
- 4) Peningkatan daya saing produk UMKM dan IKM dengan prioritas pada peningkatan potensi produksi UMKM dan IKM
- 5) Pengembangan destinasi wisata yang sudah ada serta pembangunan destinasi wisata baru di wilayah Grobogan serta meningkatkan promosi melalui berbagai media

5. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2020

"Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur untuk Memperkuat kualitas pelayanan publik di berbagai bidang terutama pendidikan dan kesehatan"

Pada tahap ini pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pada pendidikan, kesehatan dan pelayanan perijinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan penguatan kapabilitas Sumberdaya aparatur, dengan mengedepankan upaya perubahan budaya kerja yang siap melayani dan perubahan perilaku serta mindset kearah yang lebih baik dilandasi dengan moralitas yang tinggi.

Pelayanan pendidikan pada tahap ini diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru Membangun dan mengembangkan ekosistem pendidikan yang kondusif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus pemerataan pelayanan pendidikan. Selain itu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan perlu terus dilakukan agar peserta didik dapat dengan nyaman dan aman dalam menempuh pelajaran.

Pada bidang kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar dan rujukan dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan sekaligus kelengkapan peralatan kesehatan yang ada pada pelayanan dasar dan rujukan.

Pelayanan perijinan diarahkan pada upaya untuk menyederhanakan prosedur, meningkatkan kualitas pelayanan dengan selalu berkomitmen tinggi pada pelaksanaan SOP dan SPP secara konsisten. Kebijakan pada tahap ini diarahkan pada:

1. Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, pembangunan/rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan
3. Peningkatan peran dan fungsi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan RSUD dengan fokus pada akreditasi dan perluasan cakupan pelayanan
4. Peningkatan kesehatan masyarakat dengan prioritas pada pelayanan promotif dan preventif serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM bidang medis
5. Meningkatkan kemudahan pelayanan perijinan maupun non perijinan, peningkatan sarana dan prasarana penunjang, optimalisasi promosi dan peluang untuk berinvestasi, serta penyediaan lahan investasi.
6. Optimalisasi peran sistem informasi kepegawaian sebagai basis dalam penataan aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhan, penempatan dan pengisian pejabat sesuai dengan kualifikasi jabatan
7. Pengembangan sistem tata kelola kepegawaian dengan fokus pada penataan nilai-nilai budaya disiplin, taat hukum, etik dan norma serta bebas dari KKN
8. Peningkatan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kinerja ASN, mencegah terjadinya KKN dan inefisiensi pelaksanaan pembangunan, memperkuat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan implementasi kegiatan pembangunan.
9. Meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara melalui Diklat dan pelatihan, dan meningkatkan budaya disiplin, taat hukum, etik dan norma aparatur melalui pemberian *reward* dan *punishment*.
10. Akselerasi peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan dengan fokus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik.
11. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan melalui pengembangan dan penerapatan SOP/SPP secara konsisten dan menyeluruh

6. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2021

"Penguatan ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian dalam arti luas berbasis lingkungan hidup menuju masyarakat sejahtera".

Pada tahap ini pembangunan daerah difokuskan supaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada ketahanan pangan yang disertai dengan upaya menuju pada kemandirian pangan. Ketersediaan pangan secara terjangkau dan aman menjadi fokus utama agar masyarakat dapat tercukupi kebutuhan pangannya.

Seiring dengan hal tersebut perlu diupayakan juga peningkatan produksi pertanian dalam arti luas termasuk perikanan budidaya. Pengembangan produksi pertanian dalam arti luas dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan pada tahap ini diarahkan pada:

1. Meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya
2. Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan melalui penyedia sarana dan prasarana produksi serta memberdayakan kelompok tani
3. Meningkatkan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan melalui pengendalian atas ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang BISA (berimbang, beragam, sehat, dan aman).

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dirumuskan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, selengkapnya dijelaskan sebagai berikut :

7.1. Kebijakan Umum

Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing strategi yang tepat dan inherent, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif masyarakat atau layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 54 Tahun 2010, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan diarahkan pada penyediaan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat secara menyeluruh, perwujudan kesejahteraan dan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing yang didukung dengan peningkatan kualitas infrastruktur utamanya jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah hingga ke tingkat desa.
2. Kebijakan umum pada perspektif proses internal antara lain diarahkan pada penguatan sistem pelayanan publik yang cepat dan inovatif disertai dengan standar operasional prosedur (SOP) di jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan yang didukung dengan sistem online dan penyelenggaraan mekanisme sistem pengaduan masyarakat serta sinergitas dan sinkronisasi antar perangkat daerah sebagai wujud pelayanan dan komitmen optimal bagi masyarakat secara menyeluruh.
3. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud dari reformasi birokrasi

yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang handal, penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan efisiensi dan efektifitas kelembagaan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan.

4. Kebijakan umum pada perspektif keuangan antara lain diarahkan pada optimalisasi dan peningkatan kapasitas keuangan daerah yang didukung dengan pengelolaan keuangan yang transparan untuk menghindari praktek praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan penyalahgunaan kewenangan, serta kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah sebagai wujud kemandirian daerah.

7.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Grobogan yang berisi program prioritas yang bersifat strategis, yang terdiri dari:

1. Pembangunan Infrastruktur;
2. Pemberian Jaminan Kredit UMKM;
3. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru di pedesaan sebagai upaya pemerataan pembangunan ekonomi;
4. Program Wajib Belajar 12 Tahun Gratis (SPP);
5. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas;
6. Upaya merubah fungsi RSUD sebagai lembaga yang bersifat *Profit Oriented* (berorientasi Keuntungan) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang bersifat *Service Oriented* (Menedepankan Pelayanan yang Berkualitas) berdasar prinsip keadilan dan membebaskan biaya perawatan kesehatan Kelas 3 bagi Masyarakat ber-KTP Grobogan;
7. Memberikan santunan bagi warga yang meninggal dunia untuk meringankan beban keluarga;
8. Pembebasan biaya pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK);
9. Membentuk peraturan yang melindungi usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktifitas usaha.

7.2.1. Program Pembangunan Misi Pertama

Dalam rangka perwujudan misi pertama yaitu "*Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air*", maka program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

1. Program pembangunan Jalan Dan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
3. Program Pembangunan turap/talud/ bronjong
4. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
5. Program Pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan
6. Program peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan
7. Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah
9. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
10. Program pengendalian Banjir
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
12. Program Pengaturan Jasa Konstruksi
13. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.
14. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
15. Program pengembangan Perumahan
16. Program Lingkungan Sehat perumahan
17. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
18. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
19. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
20. Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
21. Program peningkatan Pelayanan Angkutan
22. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
23. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

7.2.2. Program Pembangunan Misi Kedua

Dalam rangka perwujudan misi kedua yaitu "*Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan*", maka program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian
2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi Peternakan
5. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
7. Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan
8. Program pengembangan Perikanan Tangkap
9. Program pengembangan Perikanan Budidaya
10. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi perikanan

7.2.3. Program Pembangunan Misi Ketiga

Dalam rangka perwujudan misi ketiga yaitu "Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata", maka program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Program pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi Usaha mikro kecil Menengah
3. Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
4. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.
5. Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi
6. Program pembinaan dan pengembangan industri Kecil Dan menengah
7. Program Peningkatan kualitas bahan baku dan kemampuan Teknologi Industri
8. Program Penataan Struktur Industri
9. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial
10. Program Sosialisasi Regulasi Cukai dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
11. Program Perlindungan Konsumen, Dan pengamanan Perdagangan
12. Program peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
13. Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor
14. Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri
15. Program pembinaan Perdagangan Kaki Lima Dan Asongan
16. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
17. Program pengembangan Destinasi Pariwisata
18. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
19. Program pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan

7.2.4. Program Pembangunan Misi Keempat

Dalam rangka perwujudan misi keempat yaitu "*Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya*", maka program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program pendidikan Dasar 9 Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Bahan Pustaka
9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
11. Program Pengawasan Obat Dan Makanan
12. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
13. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
14. Program Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengembangan Lingkungan Sehat
15. Program Pencegahan Dan penanggulangan penyakit Menular
16. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
17. Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
18. Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.
19. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
20. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
21. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
22. Program peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
23. Program Jaminan Kesehatan Nasional
24. Program Bantuan Operasional Puskesmas
25. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
26. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
27. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
28. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
29. Program Pengembangan Data

30. Program Pengentasan Kemiskinan
31. Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
32. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
33. Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan
34. Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
35. Program pengembangan Kebijakan Dan manajemen Olah Raga
36. Program pencegahan penyalahgunaan narkoba
37. Program pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga
38. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga
39. Program Keluarga Berencana
40. Program pelayanan kontrasepsi
41. Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
42. Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa
43. Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
44. Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
45. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
46. Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
47. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
48. Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
49. Program pembinaan Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)
50. Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
51. Program Pembinaan Anak Terlantar

7.2.5. Program Pembangunan Misi Kelima

Dalam rangka perwujudan misi kelima yaitu *"Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja"*, maka program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
4. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
5. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat

7. Program Kerukunan Umat Beragama
8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
9. Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
10. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
11. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Investasi Daerah
12. Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
13. Program peningkatan Kesempatan Kerja
14. Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan
15. Program pengembangan wilayah transmigrasi
16. Program transmigrasi lokal

7.2.6. Program Pembangunan Misi Keenam

Dalam rangka perwujudan misi keenam yaitu "*Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik*", maka program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

1. Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
3. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah
5. Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
9. Program Pengembangan Data/Informasi
10. Program Penelitian dan Pengembangan
11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
13. Program perencanaan Sosial Budaya
14. Program perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
15. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
16. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

18. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan daerah
19. Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
20. Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah
21. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
22. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
23. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
24. Program Pengelolaan Persandian
25. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
26. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
27. Program Kerjasama Informasi dan media masa
28. Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
29. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
30. Program penataan Administrasi Kependudukan

7.2.7. Program Pembangunan Misi Ketujuh

Dalam rangka perwujudan misi ketujuh yaitu *"Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang"*, maka program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
6. Program Perencanaan Tata Ruang
7. Program Pemanfaatan Ruang
8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

7.2.8. Program Pembangunan Misi Kedelapan

Dalam rangka perwujudan misi kedelapan yaitu *"Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat"*, maka program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

1. Program pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

7.2.9. Program Pembangunan Misi Kesembilan

Dalam rangka perwujudan misi kesembilan yaitu "*Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan*", maka program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2. Program peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
3. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
4. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
5. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Selengkapnya kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Grobongan Tahun 2016-2021 yang diselaraskan dengan sasaran dan indikatornya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Perangkat Daerah Pengampu
Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air									
Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta sarana drainase perkotaan	Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dengan prioritas pada jalan dan jembatan dalam kondisi rusak berat	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	40,69	84,51	PU dan PR
				Program rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	%	14,68	20,15	PU dan TR
	Meningkatnya ketersediaan drainase perkotaan	Meningkatkan fungsi drainase pembangunan dan rehabilitasi drainase di wilayah perkotaan	Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi drainase khususnya pada wilayah rawan genangan.	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong terbangun	%	40	55	PU dan PR
Meningkatkan pemenuhan akses permukiman, air minum dan sanitasi yang layak.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	Meningkatkan penataan perumahan dan permukiman, serta penyediaan akses air minum dan sanitasi layak.	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan fokus pada penanganan kawasan kumuh, dan penyediaan sarana air minum dan sanitasi	Program Lingkungan Sehat perumahan	Persentase kawasan kumuh	%	0,054	0,000	Pera dan KP
				Program pengembangan Perumahan	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum	%	58,00	70,00	Pera dan KP
				Program Penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	%	75,00	85,17	PU dan PR
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum	Persentase penduduk yang terlayani sistem air	%	64,00	70,00	Pera dan KP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Perangkat Daerah Pengampu
				dan air limbah	limbah yang memadai				
Meningkatkan pemenuhan air irigasi untuk pertanian	Meningkatnya fungsi sarana irigasi	Meningkatkan fungsi irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi drainase dengan prioritas pada jaringan irigasi yang rusak sedang dan berat	Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	82,00	85,00	PU dan PR
Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana transportasi yang aman dan nyaman.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan ijin trayek dan pemenuhan angkutan umum pada jalan kabupaten.	Pemenuhan sarana dan prasarana angkutan umum dan fasilitas keselamatan jalan pada titik rawan kecelakaan.	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	78,00	90,00	Perhubungan
				Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kend. Bermotor	Persentase ketersediaan alat pengujian kendaraan bermotor yang laik operasi	%	70,00	90,00	Perhubungan
				Program Pembangunan Sarana prasarana perhubungan	Persentase tersedianya halte pada setiap Kab/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	50,00	75,00	Perhubungan
Misi 2 : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan									
Menigkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan,	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan	Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan	Peningkatan pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat pertanian tepat guna,	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Produksi tanaman pangan	%	62,97	65,49	Pertanian
					▪ Padi	Ton	799,356	1020,20	
					▪ Jagung	Ton	700,941	894,60	
					▪ Kacang Hijau	Ton	26,317	33,59	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Perangkat Daerah Pengampu
peternakan dan perikanan darat	peternakan	peternakan melalui penyediaan sarana produksi dan pemberdayaan kelompok tani	serta pengembangan sistem pertanian berkelanjutan terutama pada jenis komoditas pertanian unggulan lokal		▪ Kedelai	Ton	48,002	61,26	
				Program Peningkatan produksi Perkebunan	Produksi Tanaman perkebunan				Pertanian
					▪ Tebu	Ton	118.200	136.422	
					▪ Kelapa	Ton	23	35	
					▪ Tembakau	Ton	2.515,50	2.832,45	
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	▪ Sapi potong	Ekor	178.555	201.082	Pertanian
					▪ Kerbau	Ekor	2.457	2.767	
					▪ Kambing	Ekor	117.756	132.612	
					▪ Domba	Ekor	18.257	20.560	
					▪ Unggas (Ayam)	ekor	1.294.904	2.571.891	
	Meningkatnya produksi perikanan	Pengembangan budidaya perikanan darat melalui penyediaan sarana produksi dan pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan	Pengembangan budidaya perikanan darat pada kawasan peruntukan perikanan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Program pengembangan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Kg	1.890.990	2.587.662	Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan serta meningkatkan pola konsumsi pangan yang BISA (berimbang, beragam, sehat, dan aman).	Pemantauan pasokan dan harga pangan pokok, penyediaan cadangan pangan sesuai standar, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai konsumsi pangan yang BISA	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	%	165	175	Pangan
					Ketersediaan protein perkapita	%	105	115	Pangan
					Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	100	100	Pangan
					Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	100	Pangan
					Penanganan daerah rawan pangan	%	100	100	Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Perangkat Daerah Pengampu
Misi 3 : Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata									
Menumbuhkembangkan usaha ekonomi kerakyatan baik koperasi dan UMKM, industri, maupun perdagangan	Meningkatnya jumlah dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Meningkatkan industri kecil dan menengah melalui pembinaan dalam memperkuat jaringan klaster industry	Pengembangan dan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi dan pengembangan sentra sentra industri potensial	Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi	Cakupan pembinaan unit Usaha IKM	%	1,20	2,10	Perindustrian
				Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	73,5	94,12	Perindustrian
				Program Penataan Struktur Industri	Persentase sentra industri yang berkembang	%	83,58	89,42	Perindustrian
	Meningkatnya jumlah dan kapasitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta kualitas koperasi	Meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM dan koperasi melalui kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah serta peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan kapasitas dan pembinaan, pemberian bantuan peralatan usaha, dan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM dan pengurus koperasi	Program pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi Usaha mikro kecil Menengah	Jumlah Usaha mikro kecil Menengah (UMKM)	Unit	26.094	29.500	Koperasi & UMKM
				Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	73,71	90,5	Koperasi & UMKM
				Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.	Jumlah produk unggulan daerah	Produk	11	18	Koperasi & UMKM
				Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	88	93,22	Koperasi & UMKM
					% koperasi dan UKM yang mengakses permodalan	%	90	94	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Perangkat Daerah Pengampu
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan	Meningkatkan kerjasama perdagangan internasional/ regional serta revitalisasi pasar tradisional	Pengembangan jaringan perdagangan dan rehabilitasi pasar dengan prioritas pada pasar yang berkondisi tidak layak.	Program pembinaan Perdagangan Kaki Lima Dan Asongan	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	43,75	68,00	Perdagangan
				Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor	Perkembangan nilai ekspor	Rp	142.032.319.000	145.618.813.000	Perdagangan
Mengembangkan pariwisata daerah yang berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor wisata dalam pembangunan daerah	Pengembangan destinasi wisata sesuai potensi yang dimiliki daerah dengan melibatkan pelaku usaha di bidang wisata.	Pengembangan destinasi wisata yang sudah ada dan pembangunan destinasi wisata baru, serta peningkatan promosi melalui berbagai media	Program Pengembangan Pemasaran Pariiwisata	Kunjungan wisata	orang	206.896	375.000	Pariwisata
				Program pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata unggulan	DTW	2	9	Pariwisata
Misi 4 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya									
Membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan melalui pemberian beasiswa dan penambahan sarana dan prasarana sekolah	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, pembangunan ruang kelas baru (RKB) rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan berat.	Program PAUD	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	61,51	61,79	Pendiidkan
				Program Pendidikan Non Formal	Persentase penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C	%	5,22	5,49	Pendiidkan
				Program pendidikan Dasar 9 Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	Pendiidkan
					Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	Pendiidkan
	Meningkatnya	Peningkatan ruang	Pembangunan ruang	Program Peningkatan	Guru SD/MI yang	%	87,50	87,72	Pendiidkan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Perangkat Daerah Pengampu
	kualitas pendidikan dan manajemen pelayanan pendidikan	penunjang lainnya (RPL) serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatkan pelayanan pendidikan melalui penguatan lembaga pendidikan. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan pendidikan	penunjang lainnya (RPL) dan peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan melalui fasilitasi akreditasi Meningkatkan peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah melalui pelatihan dan pelibatan pengambilan kebijakan.	Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	memenuhi kualifikasi S1/D-IV				
					Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92,95	93,13	Pendiidkan
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi	%	5,08	5,31	Pendiidkan
					Persentase SD/MI terakreditasi	%	99,15	100	Pendiidkan
					Persentase SMP/MTs terakreditasi	%	75,36	100	Pendiidkan
	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Meningkatkan minat baca dengan mengembangkan perpustakaan yang berkualitas dan kampanye minat baca kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dengan penyediaan bahan bacaan pada perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pemustaka Perpustakaan Daerah (pengunjung)	Orang	20.250	146.000	Perpustakaan
Meningkatkan derajat kesehatan kesehatan yang semakin berkualitas dan merata	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, kualitas	Peningkatan kesehatan masyarakat dengan prioritas pada pelayanan promotif dan preventif serta	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin yang sakit	%	100	100	Kesehatan
				Program Pencegahan Dan penanggulangan	Persentase anak usia 0-11 bulan	%	100	100	Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Perangkat Daerah Pengampu
		SDM Kesehatan, dan perbaikan manajemen kesehatan	peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM bidang medis	penyakit Menular	mendapat imunisasi dasar lengkap				
				Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	88,03	95	Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD, Terbangunnya rumah sakit tipe C, dan terciptanya manajemen dan pelayanan kesehatan yang profesional di puskesmas	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan melalui perluasan cakupan sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan peran dan fungsi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan RSUD dengan fokus pada akreditasi dan perluasan cakupan pelayanan.	Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.	BOR (Bed Occupancy Ration)	%	0,713	0,85	Kesehatan
					AVLOS (Average Leght of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	Hari	5 Hari	4 Hari	Kesehatan
					TOI (turn Over Interval)	Hari	1 Hari	1 Hari	Kesehatan
					BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	Kali	72 Kali	75 Kali	Kesehatan
					NDR (NetDeath Rate)	‰	22‰	10‰	Kesehatan
					GDR (Gross Death Rate)	Kematian	41	25	Kesehatan
					Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	Skor	80	80	Kesehatan
					Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	30	75	Kesehatan
				Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.					

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Perangkat Daerah Pengampu
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan KB	Terkendalinya jumlah penduduk dan meningkatnya partisipasi Aktif KB	Pengendalian penduduk melalui optimalisasi pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KB serta promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	%	74,54	77,20	PP dan KB
				Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	84,00	87,00	PP dan KB
Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya persentase desa memiliki BUMDes	Pengembangan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pendampingan, dan fasilitasi akses modal usaha, serta pengembangan BUMDesa	Pengembangan perekonomian desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDesa)	%	5,4	100	Permasdes
Meningkatkan partisipasi pemuda serta prestasi olahraga	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya prestasi olahraga	Pembinaan bagi atlet dan penyelenggaraan berbagai event olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi serta penguatan organisasi dan kapasitas kepemudaan dalam pembangunan	Pembinaan dan pemberian <i>reward</i> kepada atlet dan pelatihan olahraga berprestasi dan penyediaan sarana prasarana olahraga serta pembinaan dan fasilitasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi	cabang	26	30	Pemuda dan olahraga
				Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan	%	20	30	Pemuda dan olahraga
Meningkatkan kualitas penanganan PMKS	Berkurangnya masyarakat yang	Meningkatkan pelayanan PMKS	Pemberian jaminan perlindungan dan	Program pemberdayaan Fakir	Penanganan penyandang	%	58,45	78,57	Sosial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Perangkat Daerah Pengampu
	termasuk dalam kategori PMKS	melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, pemberian bantuan serta peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat	rehabilitasi sosial difokuskan pada keluarga rentan, LUT, PGOT dan tuna susila.	Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	masalah kesejahteraan sosial				
					Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	23,48	72,22	Sosial
				Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	%	66	93	Sosial
Misi 5 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja									
Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perijinan penanaman modal	Meningkatkan kemudahan pelayanan perijinan maupun non perijinan, peningkatan sarana dan prasarana penunjang investasi, optimalisasi promosi peluang berinvestasi, serta penyediaan lahan investasi.	Peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang cepat melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), peningkatan jaringan dengan investor serta penyediaan kawasan industri.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)				Penanaman Modal
					• PMA	Perusahaan	2	6	
					• PMDN	Perusahaan	38	44	
					Jumlah perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal yang dikeluarkan BPPT	Jumlah	3.605	3.950	Penanaman Modal
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional				Penanaman Modal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Perangkat Daerah Pengampu
					(PMDN/PMA)				
					• PMA	ribu Us \$	2.500	71.430	
					• PMDN	Juta Rp	2.960.091,9	5.884.964	
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengiriman transmigran	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan pemberangkatan transmigran	Meningkatkan penyerapan kerja dengan meningkatkan kualitas calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja dengan mengoptimalkan BLK, serta fasilitasi pengiriman transmigrasi	- Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, magang kerja, dan pengembangan bursa kerja online. - Peningkatan kerjasama dalam penempatan transmigrasi	Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	63,00	75,00	Tenaga kerja
				Program peningkatan Kesempatan Kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	%	96,72	96,77	Tenaga kerja
				Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	50,5	70,00	Tenaga kerja
				Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	Tenaga kerja
				Program Transmigrasi	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	KK	14	30	Transmigrasi
Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kepastian dalam penegakan hukum.	Menurunnya pelanggaran produk hukum daerah	Meningkatkan penegakan Perda melalui pelaksanaan patroli dan operasi, serta antisipasi penanganan potensi gangguan kamtibmas	Peningkatan pendidikan politik, pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP, dan penegakan peraturan daerah	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	61,00	85,00	Trantibum linmas
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	Prosentase partisipasi	%	65,88	70	Trantibum linmas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Perangkat Daerah Pengampu
					masyarakat dlm pemilu				
Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik									
Meningkatkan kualitas dan produktivitas aparatur sipil negara	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	Penempatan pegawai sesuai standar kompetensi dan peningkatan kedisiplinan pegawai melalui pemberian reward dan punishment	Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, pengisian jabatan sesuai standar kompetensi, serta peningkatan Diklat bagi ASN sesuai kebutuhan; serta penegakan kedisiplinan bagi ASN	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100	Kepegawaian
				Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti diklat Teknis fungsional	ASN	188	300	Kepegawaian
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	54,00	75,00	Kepegawaian
Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	%	65,00	100	Perencanaan Pembangunan
	Meningkatnya PAD dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Menata sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan seluruh Perangkat Daerah, dan meningkatkan kapasitas pemeriksa	Peningkatan perbaikan manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah, dan Peningkatan pembinaan dan pemeriksaan pengawasan	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Peningkatan PAD	%		13,14	Keuangan
					Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Opini	WTP	WTP	Keuangan
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase obyek pemeriksaan yang diperiksa	%	30	100	Pengawasan
					Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP				Pengawasan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Perangkat Daerah Pengampu
		dalam pembinaan dan pemeriksaan pelaksanaan pembangunan	pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan		dan aparat pengawas eksternal				
					▪ APIP	%	80,00	95,00	Pengawasan
					▪ BPK	%	80,00	95,00	Pengawasan
					Persentase aduan pelayanan masyarakat	%	60	30	Pengawasan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik Pemda	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan SOP dan SPP secara konsisten dan menyeluruh	Optimalisasi penerapan SOP dan SPP dengan fokus pada Perangkat Daerah yang memiliki unit pelayanan langsung kepada masyarakat	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan publik	%	NA	100	Seluruh urusan
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan kependudukan	Program penataan administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber KTP	%	87,99	100	Kependudukan dan Capil
					Rasio Bayi (0-1 tahun) Ber akta kelahiran	%	47,09	100	Kependudukan dan Capil
	Meningkatnya kualitas e-government, pengelolaan data/informasi dan arsip daerah, serta pengamanan informasi sandi	Meningkatkan kapasitas SDM dan peran seluruh perangkat daerah dalam pengembangan e-government, pengelolaan arsip, pengelolaan data statistik dan persandian	Pengembangan aplikasi dan infrastruktur penunjang e-government, penerapan pengelolaan arsip secara baku, dan perbaikan manajemen pengelolaan data dan	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Website milik pemerintah daerah	%	25,00	100,00	Komunikasi dan informatika
				Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsipda	Persentase arsip yang terduplikasi	%	-	100,00	Kearsipan
				Program pengelolaan data/informasi statistik daerah	Persentase ketersediaan data SIPD	%	80	90	Kearsipan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Perangkat Daerah Pengampu
			sandi.						
Misi 7 : Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang									
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya kasus pencemaran lingkungan	Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam melalui Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA serta Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ramah lingkungan	Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan fokus pada perlindungan dan konservasi lingkungan serta penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Presentase Pemantauan status mutu air	%	44,00	100	Lingkungan Hidup
					Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	20	60	Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas penataan ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan, dan meningkatnya luasan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan	Menyediakan dokumen penataan kawasan strategis, serta pengendalian pemanfaatn lahan sesuai dengan peruntukannya, serta menyediakan lahan dalam pengembangan RTH di kawasan perkotaan	Peningkatan pengelolaan penataan ruang dengan fokus pada pengawasan pemanfaatan ruang, dan pengembangan RTH di kawasan perkotaan	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	25,00	55,00	PU dan PR
Misi 8 : Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat									
Meningkatkan penghayatan masyarakat terhadap agama yang dipeluknya	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar	Meningkatkan penghayatan nilai keagamaan melalui pembinaan toleransi dan kerukunan dalam	Penyelenggaraan forum kerukunan umat beragama dan pengembangan nilai nilai agama di	Program Kerukunan Umat Beragama	Prosentase antisipasi konflik sosial	%	100	100	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Perangkat Daerah Pengampu
	umat beragama	kehidupan beragama	lingkungan masyarakat						
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelestarian budaya masyarakat	Lestarnya budaya lokal masyarakat	Meningkatkan kelestarian budaya melalui pelestarian nilai-nilai dan seni budaya lokal serta daerah pelestarian cagar budaya	Pelestarian budaya lokal dengan fokus pada seni dan budaya lokal yang hampir punah	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	Kebudayaan
				Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah event budaya di tingkat regional dan nasional yang diikuti	event	3	18	Kebudayaan
Misi 9 : Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan									
Menurunkan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Berkurangnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Mengurangi kesenjangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan disparitas antar wilayah melalui pemerataan pembangunan dan pertumbuhan pusat perekonomian baru	Peningkatan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan fokus pada pengembangan pusat perekonomian baru di tiap tiap kecamatan dan desa dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	30,00	45,00	Perencanaan Pembangunan
Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan, serta pemenuhan hak anak	Berkurangnya ketimpangan laki-laki dan perempuan dan berkurangnya kasus kekerasan terhadap	Meningkatkan pemberdayaan lembaga berbasis gender dan anak dalam pengarusutamaan gender dan anak,	Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan anak, peningkatan kualitas hidup perempuan dan	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	46,70	47,85	PP dan PA
				Program peningkatan kualitas hidup dan	Jumlah kekerasan terhadap	Kasus	110	98	PP dan PA

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Perangkat Daerah Pengampu
	perempuan dan anak	bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha, serta optimalisasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	tumbuh kembang anak, serta pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan.	perlindungan perempuan dan anak	perempuan dan anak				
					Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	Kasus	55	65	PP dan PA
					Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	Kasus	11	14	PP dan PA

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi program prioritas RPJMD Kabupaten Grobogan disampaikan seluruh program dengan indikatornya yang disertai dengan pendanaan pada masing-masing urusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Program prioritas selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Perincian program dan indikator kinerja program dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut.

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BELANJA LANGSUNG																
8.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar																
Urusan Pendidikan																
Program PAUD				16.310.675.402		11.573.308.370		12.560.601.702		13.663.322.138		14.505.252.171		16.284.426.158		Dindik
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	61,51	61,55		61,58		61,62		61,71		61,75		61,79		61,79	
Program pendidikan Dasar 9 Tahun				30.976.593.101		23.194.917.784		25.173.624.903		27.383.667.964		29.071.041.813		32.636.815.145		Dindik
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	%	106,65	106,69		106,72		106,75		106,79		106,83		106,85		106,85	
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	100,03	100,05		100,09		100,14		100,17		100,21		100,24		100,24	
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	%	97,69	97,71		97,73		97,75		97,79		97,81		97,83		97,83	
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	87,06	87,1		87,13		87,15		87,18		87,21		87,23		87,23	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,03	0,02		0,02		0,02		0,02		0,01		0		0	
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0		0	
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	%	70,05	70,1		70,13		70,15		70,18		70,21		70,23		7,23	
Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs	%	50,39	50,58		50,68		50,78		50,89		60,01		60,05		6,05	
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	97,83	97,88		97,9		97,93		97,95		97,98		98,01		98,01	
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	72,78	72,88		72,92		72,95		72,99		73,05		73,08		73,08	
Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	55,69	56,11		56,2		56,25		56,54		56,65		56,74		56,74	
Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	91,42	91,45		91,48		91,51		91,53		91,55		91,57		91,57	
Rasio guru/murid	%															
SD		22,74	22,76		22,78		22,82		22,86		22,89		22,91		22,91	
SMP		29,74	29,76		29,78		29,81		29,84		29,87		29,89		29,89	
Program Pendidikan Menengah				5.723.292.809		-										Dindik

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Angka Partisipasi Kasar SMA sederajat	%	67,35	67,38		0		0		0		0		0		0	
Angka Partisipasi Murni SMA Sederajat	%	51,72	60		65,25											
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	2,34	2,31		0		0		0		0		0		0	
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	100	100		0		0		0		0		0		0	
Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMA/MA	%	55,24	55,29		0		0		0		0		0		0	
Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) siswa SMK	%	65,35	65,38		0		0		0		0		0		0	
Program Pendidikan Non Formal				1.790.693.392		1.413.535.860		1.534.121.477		1.668.805.081		1.771.636.377		1.988.940.379		Dindik
Penduduk usia >15 tahun melek huruf	%	91,87	91,89		91,91		91,93		91,95		91,98		91,99		91,99	
Persentase penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C	%	5,22	5,26		5,29		5,35		5,38		5,43		5,49		5,49	
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan				7.233.856.074		5.710.254.483		6.197.383.660		6.741.464.411		7.156.871.535		8.034.713.541		Dindik

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	94,34	94,36		94,38		94,4		94,43		94,45		94,48		94,48	
Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	52,58	52,62		52,55		52,58		52,61		52,65		52,69		52,69	
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	87,5	87,55		87,59		87,63		87,66		87,69		87,72		87,72	
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92,95	92,97		92,99		93,03		93,05		93,09		93,13		93,13	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				1.990.648.146		1.571.375.955		1.705.426.562		1.855.149.383		1.969.463.161		2.211.032.048		Dindik
Prosentase Sekolah melaksanakan MBS dengan baik	%	98,51	99,05		99,22		99,35		99,49		99,75		100		100	
Persentase PAUD terakreditasi	%	5,08	5,12		5,15		5,19		5,22		5,25		5,31		5,31	
Urusan Kesehatan																
Indikator Makro																
Angka usia harapan hidup	Tahun	-	72,6		72,7		72,8		72,9		73		73,1		73,1	
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	17,44	15		13,5		12		10,5		10		9,5		9,5	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran Hidup	per 1.000 KH	18,99	16		14,5		12		10,5		10		9,5		9,5	
Persentase balita gizi buruk	%	0,05	0,05		0,04		0,03		0,02		0,01		0,01		0,01	
Angka Kematian Ibu	kasus	33	30		29		28		27		26		25		25	
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				202.771.018		160.063.195		173.717.832		188.968.869		200.613.077		225.219.721		Dinkes
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat				77.530.180.535		61.064.868.147		66.274.176.947		72.092.519.974		76.534.840.596		85.922.391.800		Dinkes
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin yang sakit	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Program Pengawasan Obat Dan Makanan				84.487.924		66.692.998		72.382.430		78.737.029		83.588.782		93.841.550		Dinkes

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah kasus keracunan makanan	Kasus	28	< 25		< 22		< 20		< 18		< 15		< 12		< 12	
Persentase Penggunaan obat rasional di Puskesmas	%	60	60		65		70		75		80		85		85	
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat				653.373.281		515.759.184		559.757.459		608.899.690		646.419.916		725.707.989		Dinkes
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	88,03	88,03		90		95		95		95		95		95	
Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Rasio posyandu per satuan balita	per 100 Balita	1,87	2		2,5		3		3,5		4		4,5		4,5	
Persentase Posyandu purnama dan mandiri	%	49,17	50		52		54		56		58		60		60	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat				208.403.546		164.509.395		178.543.327		194.218.005		206.185.663		231.475.824		Dinkes
Prevalensi balita gizi kurang	%	7,6	5,64		5,5		5,4		5,3		5,2		5,1		5,1	
Persentase Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100		100		100		100		100		100		100	

[illegible]

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program pengembangan Lingkungan Sehat				428.072.150		337.911.190		366.737.646		398.934.280		423.516.497		475.463.855		Dinkes
Cakupan Rumah Sehat	%	79,59	65		70		75		80		85		90		90	
Cakupan penggunaan air bersih		65	65		70		75		78		80		80		80	
Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Program Pencegahan Dan penanggulangan penyakit Menular				1.529.231.429		1.207.143.263		1.310.121.984		1.425.140.222		1.512.956.958		1.698.532.061		Dinkes
Persentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	29,3	70		72		74		76		78		80		80	
Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	%	95,74	95		96		97		98		99		100		100	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun	%	0,005	< 0,5		< 0,5		< 0,5		< 0,5		< 0,5		< 0,5		< 0,5	
Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	%	53	70		75		80		85		90		95		95	
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	80	90		95		100		100		100		100		100	
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	80	90		95		100		100		100		100		100	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				1.756.670.668		1.386.679.035		1.504.973.555		1.637.098.204		1.737.975.731		1.951.151.012		Dinkes
Cakupan Puskesmas Terakreditasi	%	3	10		25		30		30		30		30		30	
Persentase Puskesmas yang telah memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP)	%	80	90		100		100		100		100		100		100	
Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 pddk	15,76	16		17		18		19		20		21		21	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Persentase tenaga kesehatan mempunyai izin	%	92,5	92		95		100		100		100		100		100	
Persentase Puskesmas non rawat inap dan rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	80	80		85		90		95		100		100		100	
Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Jumlah RS tipe C yang dibangun	Unit	0	0		0		1		0		1		0		2	
Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.				14.419.272.404		11.382.271.648		12.353.268.059		13.437.786.259		14.265.818.835		16.015.624.593		Dinkes
Cakupan puskesmas		1,6	1,6		1,7		1,8		1,9		2		2		2	
Cakupan pembantu puskesmas		0.25	0,2		0,3		0,4		0,5		0,6		0,7		0,7	

[illegible]

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD RSUD)				107.289.653.660		84.692.205.591		91.917.110.275		99.986.697.892		106.147.849.840		119.167.650.598		RSUD R. Soedjati
BOR (Bed Occupancy Ration)	%	0,713	0,75		0,8		0,85		0,85		0,85		0,85		0,85	
AVLOS (Average Leght of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	Hari	5 Hari	4 Hari		4 Hari		4 Hari		4 Hari		4 Hari		4 Hari		4 Hari	
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan				7.937.764.398		6.265.904.972		6.800.435.463		7.397.459.343		7.853.288.688		8.816.551.290		RSUD R. Soedjati
Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan	%	49,77	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		75,00		75,00	
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita				563.252.828		444.619.986		482.549.534		524.913.526		557.258.548		625.610.336		
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	-	100		100		100		100		100		100		100	
Pelayanan kesehatan balita	%	80,07	80		85		90		95		100		100		100	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				174.608.377		137.832.196		149.590.355		162.723.193		172.750.150		193.939.204		Dinkes
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	50,78	60		65		70		75		80		85		85	
Program peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak				535.090.187		422.388.987		458.422.057		498.667.849		529.395.621		594.329.819		Dinkes
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	99,95	99		100		100		100		100		100		100	
Cakupan kunjungan bayi	%	97,82	90		95		95		95		95		95		95	
Persentase kunjungan neonatl pertama (KN1)	%	97	95		96		97		98		99		100		100	
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,78	95		95		95		100		100		100		100	
Cakupan pelayanan nifas	%	99,4	100		100		100		100		100		100		100	
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	93,44	90		94		98		100		100		100		100	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	79,28	100		100		100		100		100		100		100	
Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	%	90	90		95		100		100		100		100		100	
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	60	60		70		80		90		100		100		100	
Program Jaminan Kesehatan Nasional				52.482.968.666		41.428.956.294		44.963.168.897		48.910.575.749		51.924.431.547		58.293.338.258		Dinkes
Persentase penduduk yang mengetahui program JKN	%	54,29	58,5		73,16		91,45		100		100		100		100	
Program Bantuan Operasional Puskesmas				10.719.915.283		8.462.076.613		9.183.957.647		9.990.235.724		10.605.831.214		11.906.713.045		Dinkes
Persentase Puskesmas yang mempublikasikan laporan pemanfaatan BOK di Papan Pengumuman Puskesmas atau Kantor Kecamatan	%	80	80		100		100		100		100		100		100	
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program pembangunan Jalan Dan Jembatan				191.052.190.261		150.452.265.118		163.287.014.991		177.622.309.804		188.567.346.126		211.696.493.629		DPU & PR
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	40,69	46,53		52,94		60,01		67,88		76,08		84,51		84,51	
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Tingkat kualitas jalan lingkungan (jalan tanah menjadi perkerasan paving blok)	%	40	45		50		55		60		65		70		70	
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong				5.745.178.849		4.535.123.860		4.922.005.242		5.354.117.963		5.684.037.192		6.381.225.424		DPU & PR
Persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.	% penduduk	34	38		42		46		50		54		58		58	
	% genangan	19,1	17,6		16,1		14,6		13,1		11,6		10,1		10,1	
Cakupan drainase lingkungan dalam kondisi baik	%	58	59		60		61		62		63		64		64	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Cakupan pelayanan Sistem Drainase	%	40	42,5		45		47,5		50		52,5		55		55	
Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong terbangun	KM	1,2	2,72		2,89		3,06		3,06		3,06		3,06		17,85	
Program Pembangunan turap/talud/ bronjong				49.550.362.271		38.978.185.602		42.303.328.379		46.017.222.494		48.852.790.684		54.844.938.449		DPU & PR
Persentase turap/talud/bronjong di wilayah jalan penghubung kewenangan kabupaten terbangun	%	42,79	48,03		43,67		52,4		58,95		54,59		50,22		50,22	
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan				7.209.636.202		5.691.135.824		6.176.634.030		6.718.893.130		7.132.909.417		8.007.812.297		DPU & PR
Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	%	14,68	16,21		16,67		19,03		19,3		20,68		20,15		20,15	
Program Pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan				112.650.566		88.923.997		96.509.907		104.982.705		111.451.710		125.122.067		DPU & PR

[illegible]

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah				5.155.851.855		4.069.921.473		4.417.117.470		4.804.905.079		5.100.981.966		5.726.654.262		DPU & PR
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	64	67,5		71		74,5		78		81,5		85		85	
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku				4.927.368.625		3.889.561.597		4.221.371.492		4.591.974.168		4.874.930.313		5.472.875.740		DPU & PR
Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	%	75	76,7		78,4		80,1		81,77		83,47		85,17		85,17	
Program pengendalian Banjir				38.295.559.796		30.229.712.864		32.808.542.787		35.688.870.616		37.888.008.695		42.535.246.722		DPU & PR, BPBD
Persentase wilayah bebas banjir	%	65,00	68,00		71,00		74,00		76,00		78,00		80		80	
Durasi banjir untuk lokasi	hr	15	12		11		10		9		8		7		7	
Lokasi banjir	Desa/ Kel	10	10		10		8		8		7		7		7	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				4.449.697.344		3.512.497.891		3.812.141.315		4.146.816.853		4.402.342.531		4.942.321.652		DLHK

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Persentase pengurangan sampah diperkotaan	%	4,75	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		30		30	
Persentase Pengangkutan sampah	%	30,00	33,50		50,00		60,00		70,00		75,00		80		80	
Persentase pengoperasian TPA	%	50,00	53,00		60,00		65,00		70,00		75,00		80		80	
Program Pengaturan Jasa Konstruksi				1.013.644.434		800.149.687		868.408.687		944.648.029		1.002.856.972		1.125.864.626		DPU & PR
persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	%	80,00	90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		100		100	
Program Perencanaan Tata Ruang				1.520.782.636		1.200.473.963		1.302.883.741		1.417.266.520		1.504.598.080		1.689.147.906		DPU & PR, Bappeda
Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	5,00	5,00		50,00		75,00		100		100		100		100	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pemanfaatan Ruang				359.710.595	0,01	283.948.010		308.170.986		335.225.936		355.882.463		399.534.018		DPU & PR
Persentase jumlah IMB yang diterbitkan	%	50,00	52,50		55,00		57,50		60,00		62,50		65,00		65,00	
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	25	30		35		40		45		50		55		55	
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	90,12	90,12		92,52		93,72		94,92		96,12		96,12			
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	14	15		16		17		18		19		20		20	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				450.602.263		450.295.136		488.708.818		531.613.546		564.371.421		633.595.654		DPU & PR
Persentase Kawasan memiliki RTBL	%	0	0		50		75		100		100		100		100	
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.				565.603.450		567.117.289		615.496.810		669.532.510		710.788.913		797.972.310		DPU & PR

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tersedianya air embung untuk irigasi - pertanian	m³	110.676	115.676		120.676		125.676		130.676		135.676		140.676		140.676	
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				17.475.384.640		13.688.250.742		14.855.965.129		16.160.200.128		17.155.987.074		19.260.292.850		DPU & PR
Persentase Luas Bangunan / Gedung yang dibangun pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	%	30,00	32,50		35,00		37,50		40,00		42,50		45,00		45,00	
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau				2.552.261.908		2.014.702.097		2.186.571.876		2.378.535.410		2.525.100.087		2.834.821.858		DPU & PR
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	14,00	15,00		16,00		17,00		18,00		19,00		20,00		20,00	
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi				679.282.911		536.211.703		581.954.737		633.045.712		672.053.809		754.486.065		BPBD, DPU & PR
Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	20,00	20,00		30,00		40,00		50,00		60,00		70,00		70,00	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
Program pengembangan Perumahan				8.448.792.424		6.669.299.794		7.238.243.004		7.873.702.886		8.358.878.224		9.384.155.035		Dinperakap erkim
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum	%	58	58,5		59		59,5		60		60,5		70		70	
Program Lingkungan Sehat perumahan				5.670.725.837		4.476.352.211		4.858.219.915		5.284.732.793		5.610.376.528		6.298.529.747		Dinperakap erkim
Persentase Berkurangnya Permukiman Kumuh di Perkotaan	%	0,054	0,045		0,036		0,027		0,018		0,009		0		0	
	Ha	77,32	47,32		37,32		27,32		17,32		7,32		0			
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	58,00	58,50		59,00		59,50		60,00		60,50		70,00		70,00	
Cakupan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	25,00	27,50		30,00		35,00		40,00		45,00		50,00		50,00	
Penurunan jumlah rumah tidak layak huni	Unit															

[illegible]

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				646.717.132		510.504.960		554.055.008		602.696.610		639.834.604		718.314.941		Satpol PP
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	61,00	67,00		70,00		75,00		80,00		83,00		85,00		85,00	
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	50,00	55,00		60,00		65,00		70,00		70,50		80,00		80,00	
Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal				67.590.339		53.354.398		57.905.944		62.989.623		66.871.026		75.073.240		Satpol PP
Persentase cakupan patroli petugas Satpol PP	%	67	67		73		76		80		83		84		85	
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				69.843.351		55.132.878		59.836.142		65.089.277		69.100.060		77.575.682		Satpol PP

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	1,16	1,18		1,17		1,2		1,31		1,34		1,4		1,4	
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	62,4	62,4		62,4		62,4		62,4		62,4		62,4		62,4	
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	%	0	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01	
Prosentase rasio petugas Linmas tiap RT di desa/kelurahan	%	0,98	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	
Program Pengembangan wawasan kebangsaan				202.771.018		160.063.195		173.717.832		188.968.869		200.613.077		225.219.721		Disbangpol
Jumlah peserta kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme	Orang	40	40		40		40		40		40		40		240	
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				310.424.223		245.042.381		265.946.404		289.294.373		307.120.610		344.791.172		Disbangpol

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM dan OKP	Orang	45	45		45		45		45		45		45		270	
Program Pendidikan Politik Masyarakat				249.897.999		40.015.799		43.429.458		47.242.217		50.153.269		56.304.930		Disbangpol
Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	%	65,88	-		-		50,00		73,00		-		70,00		70,00	
Program Kerukunan Umat Beragama				288.251.065		227.539.353		246.950.232		268.630.489		285.183.423		320.163.231		Disbangpol
Prosentase antisipasi konflik sosial	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				1.860.987.345		1.469.024.435		1.594.343.659		1.734.314.289		1.841.182.243		2.067.016.549		BPBD
Persentase wilayah rawan bencana yang telah dipetakan tingkat kerawanannya	%	33,33	33,33		33,33		66,67		66,67		66,67		100		100	
Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang kebencanaan	%	0,061	0,078		0,124		0,169		0,215		0,26		0,306		0,306	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Urusan Sosial																
Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				219.668.603		473.145.606		513.508.610		558.590.562		593.010.754		665.747.808		Dinas Sosial
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	58,45	60,25		62,85		66,78		70,71		74,64		78,57		78,57	
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	23,48	23,90		24,16		32,5		40,9		55		72,22		72,22	
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	23,33	35,55		40		50		70,58		76,47		87,5		87,5	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				84.487.924		356.370.413		386.771.584		420.727.038		446.652.118		501.437.228		Dinas Sosial
Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	%	66,00	67		70,00		75,00		80,00		85,00		93,00		93,00	
Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0,00	0,00		50,00		65,00		70,00		75,00		85,00		85,00	
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma				45.060.226		335.313.410		363.918.255		395.867.369		420.260.604		471.808.604		Dinas Sosial
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	2,76	3,00		3,73		4,66		5,6		6,53		7,46		7,46	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo				22.530.113		217.614.007		236.178.176		256.912.732		272.743.622		306.197.598		Dinas Sosial
Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	78,12	80,25		81,25		84,37		87,5		92,8		93,75		93,75	
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Lembaga	29	30		32		32		32		32		32		32	
Program pembinaan Eks penyanggah penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)				168.975.848		433.129.807		470.079.152		511.348.345		542.857.485		609.442.878		Dinas Sosial
Persentase Eks penyanggah penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	18,42	18,55		18,79		23,49		28,19		32,89		37,59		37,59	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				309.789.056		544.284.803		590.716.536		642.576.726		682.172.122		765.845.461		Dinas Sosial
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Program Pembinaan Anak Terlantar				16.897.585		113.253.203		122.914.583		133.705.501		141.944.397		159.354.902		
Persentase anak terlantar yang dibina	%	5,00	6,70		8,00		9,50		10,02		12,00		14,80		14,80	
8.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar																
Urusan Tenaga Kerja																
Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja				738.424.458		582.896.802		632.622.439		688.161.632		730.565.957		820.175.150		Disnakertrans
Pencari kerja yang ditempatkan	%	69,48	72,50		73,65		73,9		74,6		75,14		75,38		75,38	
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	44,44	45,55		46,56		47		48		50		52		52	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	63,00	65,00		67		69		71		73		75		75	
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	6,67	6,75		7		7,5		8		8,5		9		9	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,22	4,13		4,07		4,04		4,01		3,98		3,95		4,13	
Program peningkatan Kesempatan Kerja				431.451.666		340.578.909		369.632.943		402.083.761		426.860.048		479.217.517		Disnakertrans
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	96,72	96,72		96,73		96,74		96,75		96,76		96,77		96,77	
Rasio penduduk yang bekerja	%	72,29	72,29		75		79		82		85		87		87	
Angka sengketa pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Tingkat pengangguran terbuka	%	4,25	4,24		4,23		4,22		4,21		4,2		4,19		4,19	
Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan				428.072.150		337.911.190		366.737.646		398.934.280		423.516.497		475.463.855		Disnakertrans

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Keselamatan dan perlindungan	%	90	95		100		100		100		100		100		100	
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	50,5	51,5		52		53		60		65		70		70	
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	66,17	66,17		66		66		66		66		66		66	
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	49,72	55,55		60		60		60		60		60		60	
Urusan Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
Program peningkatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak				1.170.439.377		923.920.331		1.002.737.931		1.090.770.307		1.157.983.263		1.300.018.278		DP3AKB
Presentase kelembagaan PUG yang aktif	%	50	55		60		65		70		80		85		85	

[illegible]

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Persentase forum anak aktif	%	0,42	0,48		0,53		0,58		0,63		0,80		0,70		0,70	
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak						259.777.969		281.939.053		306.691.049		325.589.264		365.525.140		DP3AKB
Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	110	101		123		145		135		125		98		98	
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	Jumlah	55	40		45		50		55		60		65		65	
Jumlah layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah	22	29		32		37		42		47		52		52	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Jumlah	5	6	5	8		10		12		14		16		16	
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	Jumlah	11	14		14		14		14		14		14		14	
Jumlah layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah	1	2		3		3		4		4		4		4	
Jumlah layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah	1	2		4		5		6		7		10		10	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah	6	-		4		8		12		16		20		20	
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan				453.700.153		358.141.399		388.693.649		422.817.845		448.871.761		503.929.125		DP3AKB
Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Jumlah	1	4		2		2		2		2		2		2	
Urusan Pangan																
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian				2.487.324.490		1.963.441.859		2.130.938.740		2.318.018.130		2.460.853.749		2.762.695.242		DKPD
Ketersediaan energi perkapita	Kkal/ kapita/ hari	143	165		170		170		170		175		175		175	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ketersediaan protein perkapita	gram/kapita/hari	105	105		110		110		110		115		115		115	
Penguatan cadangan pangan	%	85,63	120		120		125		125		130		130		130	
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	85	85		87		87		87		90		90		90	
Pengawasan dan pembinaan kewan pangan	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Penanganan daerah rawan pangan	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Urusan Pertanian																
Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah				152.078.264		319.876.604		347.164.569		377.642.843		400.913.088		450.087.975		Setda
Persentase luas lahan bersertifikat	%	57,83	58,83		59,5		60,5		61,5		62,5		63,5		63,5	
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanian				1.830.948.589		1.445.312.470		1.568.608.879		1.706.320.201		1.811.463.168		2.033.652.214		Setda

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyelesaian izin lokasi	%	7	2		2		2		5		5		5		18	
Penyelesaian kasus tanah Negara	%	0			0		0		0		0		0		0	
Persentase penyelesaian penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh Pemda	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Urusan Lingkungan Hidup																
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				7.793.729.548		6.152.206.878		6.677.038.036		7.263.228.608		7.710.786.693		8.656.570.396		DLHK
Prosentase jumlah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah standart 3 R	%	20	36		50		63		76		90		100		100	
Persentase pengurangan sampah diperkotaan	%	4,75	5		10		15		20		25		30		30	
Persentase Pengangkutan sampah	%	30	32		36		38		40		42		44		44	
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				2.589.165.311		2.043.832.871		2.218.187.731		2.412.926.884		2.561.610.754		2.875.810.822		DLHK

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam				808.217.116		637.989.664		692.415.151		753.203.667		799.615.863		897.694.527		DLHK
Rasio cakupan penghijauan wilayah Konservasi dan rawa abrasi	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Rasio tutupan vegetasi terhadap seluruh wilayah	%	37, 93	38,58		39,23		39,88		40,53		41,18		42		42	
Pengurangan Emisi GRK	%	54	49		44		39		34		29		24		24	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup				90.120.453		270.968.405		294.084.120		319.902.355		339.614.648		381.270.838		DLHK
Persentase ketersediaan dokumen SLHD	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Program Peningkatan Pengendalian Polusi				157.710.792		324.322.803		351.990.064		382.891.979		406.485.674		456.344.079		

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah usaha dan / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi pencegahan pencemaran udara	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Jumlah usaha dan / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan teknis pencegahan pencemaran udara	%	30	40		50		60		70		80		90		90	
Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi	%	40	55		65		75		85		100		100		100	
Urusan Administrasi Kependudukan																
Program penataan Administrasi Kependudukan				3.079.021.586		2.430.515.155		2.637.857.025		2.869.439.788		3.046.253.854		3.419.898.900		Dispendukopil
Rasio penduduk ber KTP	%	87,99	91,00		95,00		97,00		99,00		100,00		100,00		100,00	
Rasio Bayi (0-1 tahun) Ber akta kelahiran	%	82,00	82,51		85,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Kepemilikan akta kelahiran	%	47,09	51,95		61,46		70,97		100,00		100,00		100,00		100,00	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ketersediaan database kependudukan	%	19,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
Kepmilikan KK	%	98,76	98,85		99,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Kepemilikan Akte Kematian	Jiwa	6.837	1.769		1.769		1.769		1.769		1.769		1.769		10.614	
Urusan Pemberdayaan Masyarakat																
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				2.838.231.002		2.240.440.111		2.431.567.100		2.645.039.256		2.808.025.825		3.152.450.481		Dinpermas des
PKK aktif	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	13,57	13,57		27,14		40,57		54,28		67,85		81,42		81,42	
Posyandu aktif	%	95	100		100		100		100		100		100		100	
LPM Berprestasi	%	0,44	0,44		0,44		0,44		0,44		0,44		0,44		2,64	
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD)	%	13,57	13,57		27,14		40,57		54,28		67,85		81,42		81,42	
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan				699.037.589		551.805.632		598.878.950		651.455.735		691.598.253		776.427.775		Dinpermas des

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDesa)	%	5,4	19,40		33,3		54,2		750		100		100		100	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				3.452.739.837		2.725.520.516		2.958.028.641		3.217.719.913		3.415.994.901		3.834.991.358		Dinpermas des
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	14,5	15,00		15,50		16,00		16,50		17,00		17,50		17,50	
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan				116.306.426		291.639.064		316.518.147		344.305.911		365.521.943		410.355.850		Dinpermas des
Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	%	80,00	87,00		90,00		92,00		95,00		95,00		95,0		95,0	
Program Pengembangan Data				168.975.848		233.300.600		253.202.958		275.432.153		292.404.205		328.269.693		Dinpermas des
Desa yang berprofil	%	87,14	87,14		90		100		100		100		100		100	
Program Pengentasan Kemiskinan				1.008.222.563		795.869.775		863.763.665		939.595.211		997.492.801		1.119.842.501		Dinpermas des

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin	%	0,14	0,31		1,05		1,79		2,53		3,27		4,01		4,75	
Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				1.233.523.694		973.717.770		1.056.783.479		1.149.560.621		1.220.396.221		1.370.086.635		Dinpermas des
RPJMDes	%	98,53	98,53		100		100		100		100		100		100	
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
Program Keluarga Berencana				4.552.208.232		3.593.417.839		3.899.964.365		4.242.350.065		4.503.762.472		5.056.181.482		DP3AKB
Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2,39			2,37		2,35		2,33		2,31		2,29		2,29	
Rasio akseptor KB baru	%	108	95		96		97		98		99		100		100	
Cakupan peserta KB aktif	%	74,54	74,56		75,59		75,64		76,72		76,84		77,2		77,2	
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	%	1,93			1,91		1,89		1,87		1,85		1,83		1,83	
CakupanPasanganUsiaSubur yang inginber-KB tidakterpenuhi (Unmet Need)	%	11,8	11,85		11,68		10,4		10,2		10		9,2		9,2	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	1000 perempuan usia 15-19 tahun	18 /1000	17,90 /1000		17,82/1000		17,76/1000		17,72/1000		17,68/1000		17,64/1000		17,64/1000	
Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	71,54	71,56		71,59		71,64		71,72		71,84		72,2		72,2	
Cakupan KB Pria	%	1,34	1,35		1,37		1,42		1,47		1,58		1,66		1,66	
Program pelayanan kontrasepsi				158.048.744		324.589.575		352.279.594		383.206.927		406.820.029		456.719.445		DP3AKB
Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	0	1		1		2		3		4		5		5	
Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri				1.135.517.702		896.353.892		972.819.860		1.058.225.668		1.123.433.233		1.261.230.437		DP3AKB
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	%	27,5	28,57		32,14		36,79		41,43		46,07		100		100	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	%	1,06	1,07		1,07		1,07		1,07		1,07		1,07		1,07	
Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) aktif	%	1	1		1		1		1		1		1		100	
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	84,00	84,00		85,00		85,00		86,00		86,00		87,00		87,00	
Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa				138.805.019		230.774.758		250.461.642		272.450.173		289.238.475		324.715.664		DP3AKB
Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	92,11	93,00		94,00		94,74		97,37		100		100		100	
Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				283.879.425		224.088.473		243.204.965		264.556.417		280.858.308		315.307.609		DP3AKB

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Persentase desa/ kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif	Aktif	BKB 563, BKR 259, BKL 304	BKB 565, BKR 264, BKL 309		BKB 565, BKR 264, BKL 309		BKB 567, BKR 264, BKL 312		BKB 567, BKR 269, BKL 316		BKB 572, BKR 274, BKL 320		BKB 576, BKR 279, BKL 324		BKB 576, BKR 279, BKL 324	
Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU				255.097.206		201.368.392		218.546.684		237.733.336		252.382.396		283.338.921		DP3AKB
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	87,55	87,55		87,55		87,57		87,59		87,61		88,00		88,00	
Rasio BKB holistik	%	5,00	5,10		5,3		10		30		80		100		100	
Urusan Perhubungan																
Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan				1.157.252.986		1.273.911.197		1.382.585.742		1.503.965.720		1.596.639.661		1.792.479.052		Dinhub
Jumlah terminal yang beroperasi	terminal	6	6		6		6		6		6		6		6	
Persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Rasio ijin trayek	Ratio	0,019	0,02		0,021		0,021		0,022		0,022		0,023		0,023	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	50	50		50		50		75		75		75		75	
Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU)	buah	334	365		410		451		496		545		600		600	
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ				273.907.211		355.695.989		386.039.627		419.930.821		445.806.839		500.488.269		Dinhub
Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	78	80		82		84		86		88		90		90	
Program peningkatan Pelayanan Angkutan				946.224.910		377.926.988		410.167.104		446.176.497		473.669.766		531.768.785		Dinhub
Persentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan laik jalan	%	85	88		90		93		97		99		99		99	
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	92	92		93		93		94		94		95		95	

[illegible]

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi						199.829.207		216.876.195		235.916.191		250.453.280		281.173.185		Dinkominfo
Prosentase SKPD yg punya Website	%	25,00	36,00		50,00		64,00		79,00		89,00		100		100	
Program Kerjasama Informasi dan media masa				321.054.112		253.433.392		275.053.234		299.200.710		317.637.372		356.597.891		Dinkominfo
Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :																
- Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	Majalah : kali / tahun	4	4		6		6		10		10		12		12	
	Dialog radio : kali / tahun	31	31		40		40		43		43		45		45	
	Siaran TV : kali / tahun	4	4		4		4		6		8		10		10	
- Media baru seperti website (media online)	setiap hari	3 kali Minggu	3 kali Minggu		setiap hari		setiap hari		setiap hari		setiap hari		setiap hari		setiap hari	
- Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	kali / tahun	1	1		2		2		3		3		3		3	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	kali / kecamatan	1 kali/ 2 Kec.	1 kali/ 2 Kec.		1 kali/ 5 Kec.		1 kali/ 8 Kec.		1 kali/ 12 Kec.		1 kali/ 15 Kec.		1 kali/ 19 Kec.		1 kali/ 19 Kec.	
- Media luar ruang seperti media bulletin, brosur, spanduk, baliho dll	kali / tahun	0	0		2		2		3		3		3		3	
Pameran / Exspo	kali / tahun	0	0		1		2		2		3		3		3	
Urusan Koperasi dan UMKM																
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif				22.530.113		317.528.610		344.616.274		374.870.828		397.970.262		446.784.190		Dinkop UKM
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	73,71	96		97		95,5		93,7		92		90,5		90,5	
Program pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi Usaha mikro kecil Menengah						124.893.255		135.547.622		147.447.620		156.533.300		175.733.240		Dinkop UKM
Jumlah Usaha mikro kecil Menengah (UMKM)	Unit	26.094	27.500		28.000		28.500		29.000		29.500		30.000		30.000	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,2	0		0		0		0		0		0		0	
Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan																
· % UKM yang mengakses permodalan	%	90	90		90		91		92		93		94		94	
· % koperasi yang mengakses permodalan	%	0	0,43		0,43		0,43		0,86		1,07		1,28		1,28	
Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				1.304.794.350		1.754.400.525		1.904.064.553		2.071.226.202		2.198.854.573		2.468.559.974		Dinkop UKM
Jumlah Koperasi	Unit	481	605		616		632		645		663		684		684	
Persentase koperasi aktif	%	88	88,2		89,2		90,2		91,2		92,2		93,22		93,22	
Persentase KSP/USP sehat	%															
Progam pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.				551.987.772		435.727.587		472.898.543		514.415.255		546.113.377		613.098.129		Dinkop UKM

[illegible]

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)																
PMA	ribu	2.500	65.180		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		71.430	
	Us \$															
PMDN	Juta Rp	2.960.092	3.937.534		389.486		389.486		389.486		389.486		389.486		5.884.964	
Jumlah perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal yang dikeluarkan BPPT	Jumlah	3605	3700		3750		3800		3850		3900		3950		3950	
Jumlah jenis perijinan dan non perijinan investasi yang dilayani BPPT	Jenis	50	50		52		52		52		52		52		52	
Persentase waktu pelayanan PTSP ditetapkan maksimal 7 hari kerja	%	90	100		100		100		100		100		100		100	
Penerapan Sistem Manajemen Mutu 9001 : 2008 dan Implementasi sistem mutu ISO 9001 : 2008	paket	1	0		1		1		1		1		1		1	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	X Rp1000	10.515.000	17.410.600		41.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Investasi Daerah						79.679.399		86.476.672		94.068.632		99.865.115		112.114.293		DPMPTSP
Peta potensi investasi kabupaten Grobogan	buah	0	1		1		1		1		1		1		1	
Urusan Pemuda dan Olahraga																
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				22.530.113		117.699.403		127.740.079		138.954.637		147.516.982		165.611.006		Dinporabud par
Jumlah kegiatan kepemudaan	buah	14	14		16		16		16		16		16		16	
Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan	%	20	20		30		30		30		30		30		30	
Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan				444.969.734		351.249.789		381.214.132		414.681.685		440.234.253		494.232.165		Dinporabud par
Jumlah organisasi pemuda	buah	22	22		25		25		25		25		25		25	
Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda						174.850.556		189.766.671		206.426.667		219.146.620		246.026.536		Dinporabud par
Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	orang	883	883		900		925		950		975		1000		1000	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program pengembangan Kebijakan Dan managemen Olah Raga						299.743.811		325.314.292		353.874.287		375.679.920		421.759.777		Dinporabud par
Jumlah organisasi olahraga	organisasi	2	2		3		3		3		3		3		3	
Program pencegahan penyalahgunaan narkoba						264.773.700		287.360.958		312.588.954		331.850.596		372.554.470		Dinporabud par
Jumlah pemuda yang memperoleh Pemahaman tentang bahaya Narkoba	orang	-	-		100		100		100		100		100		550	
Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga				985.692.450		778.084.976		844.461.684		918.598.670		975.202.459		1.094.818.087		Dinporabud par
Jumlah klub olahraga	klub	587	587		650		650		650		650		650		650	
Jumlah Cabang Olahraga Prestasi	cabang	26	26		30		30		30		30		30		30	
Prosentase Medali yang diperoleh pada even olahraga tingkat Provinsi terhadap jumlah kontingen yang diberangkatkan	%	50	50		70		70		70		70		70		70	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga				95.752.981		275.414.605		298.909.616		325.151.491		345.187.233		387.526.942		Dinporabud par

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	unit	1	1		2		2		2		2		2		2	
Jumlah gedung olahraga	unit	16	16		20		20		20		20		20		20	
Jumlah Lapangan olahraga	unit	974	974		1000		1000		1000		1000		1000		1000	
Urusan Kebudayaan																
Program pengembangan Nilai Budaya						224.807.858		243.985.719		265.405.715		281.759.940		316.319.833		Dinporabud par
Jumlah upacara adat tradisional yang dilestarikan	jenis	0	0		3		3		3		3		3		15	
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				236.566.188		286.654.998		311.108.902		338.421.776		359.275.230		403.342.933		Dinporabud par
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya				597.047.998		471.297.185		511.502.506		556.408.337		590.694.061		663.146.956		Dinporabud par

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	2	2		4		5		6		6		7		7	
Jumlah Misi Kesenian	kali	2	2		2		3		3		3		3		3	
Jumlah grup kesenian	kelompok	1.323	1323		1381		1390		1400		1420		1435		1435	
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya						236.404.946		256.572.129		279.097.111		296.294.996		332.637.718		Dinporabudpar
Jumlah event budaya di tingkat regional dan nasional yang diikuti	event	3	3		3		3		3		3		3		18	
Urusan Statistik																
Program Pengembangan Data Statistik				281.626.414		222.309.993		241.274.767		262.456.763		278.629.274		312.805.168		Bappeda
Buku "kabupaten dalam angka"	%	100	100		100		100		100		100		100			
Buku "PDRB kabupaten"	%	100	100		100		100		100		100		100			
Urusan Persandian																
Program Pengelolaan Persandian				281.626.414		222.309.993		241.274.767		262.456.763		278.629.274		312.805.168		Dinkominfo

[illegible]

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Urusan Kearsipan																
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				202.771.018		259.977.799		282.155.930		306.926.965		325.839.717		365.806.313		Dinperpusa rsipda
Persentase arsip yang terduplikasi	%	-	-		20		20		20		20		20		100	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan				253.689.074		300.171.445		325.778.407		354.379.148		376.215.890		422.361.487		Dinperpusa rsipda
Jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	10	10		10		10		10		10		10		50	
Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan						289.752.351		314.470.483		342.078.477		363.157.256		407.701.118		Dinperpusa rsipda
Persentase sarpras kearsipan yang terpelihara	%	-	0		10		10		10		10		10		50,00	
Urusan Kelautan dan Perikanan																

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program pengembangan Perikanan Tangkap				4.126.671.224		3.257.507.838		3.535.398.624		3.845.778.366		4.082.754.137		4.583.533.433		Dinakikan
Produksi perikanan Tangkap	kg	934.500	970.946		1.009.589		1.049.973		1.094.072		1.144.399		1.201.619		1.201.619	
Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	30	33		36		39		40		40		18		18	
Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	27,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
Program pengembangan Perikanan Budidaya			30,00	3.695.526.469		2.917.171.198		3.166.028.619		3.443.980.626		3.656.197.735		4.104.656.805		Dinakikan
Produksi perikanan budidaya	kg	1.890.990	1.989.321		2.094.756		2.206.825		2.325.993		2.452.760		2.587.662		2.587.662	
Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	kelompok	20	20		25		30		35		40		45		45	
Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	75,00	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		90,00	
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi perikanan				3.079.605.391		2.430.975.998		2.638.357.182		2.869.983.855		3.046.831.446		3.420.547.338		Dinakikan
Tingkat konsumsi makan ikan	kg/kap/th	14,43	15,14		15,85		16,56		17,27		17,98		18,69		15,38	
Jumlah produksi hasil olahan ikan	kg	284.375	285000		287218		290090		292990		295900		298880		298880	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah usaha pengolahan ikan	Unit	80	81		82		84		86		88		90		90	
Urusan Pariwisata																
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				214.036.075		368.784.802		400.245.018		435.383.331		462.211.528		518.905.112		Dinporabud par
Kunjungan wisata	orang	206.896	208.000		210.000		275.000		300.000		325.000		375.000		375.000	
Jumlah kajian pengembangan wisata	dokumen	0	1		2		2		3		3		3		3	
Jumlah regulasi bidang kepariwisataan (Perda dan Perbup)	Perda/Perbup	1	2		3		3		3		3		3		3	
Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,76	0,79		0,81		0,84		0,87		0,9		0,93		0,93	
Program pengembangan Destinasi Pariwisata						1.998.292.073		2.168.761.949		2.359.161.913		2.504.532.801		2.811.731.846		Dinporabud par
Jumlah destinasi wisata unggulan	unit	2	3		5		5		7		8		9		9	
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata				467.499.847		369.034.589		400.516.113		435.678.226		462.524.595		519.256.579		Dinporabud par
Jumlah restoran dan rumah makan	unit	32	32		35		37		40		45		50		50	

[illegible]

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				2.801.164.234		2.211.180.381		2.399.811.287		2.610.495.537		2.771.353.531		3.111.280.066		Dinakikan
Angka kesakitan / morbiditas ternak																
§ Sapi	ekor	1.174	1.100		1.000		950		900		850		800		800	
§ Kambing	ekor	670	650		600		575		550		500		450		450	
§ Unggas	ekor	2.860	2.500		2.300		2.100		2.000		1.900		1.800		1.800	
Angka Pengobatan ternak																
§ Vaksin AI (Ayam)	dosis	33.000	50.000		60.000		65.000		70.000		75.000		80.000		80.000	
§ Desinfektan	liter	300	200		225		250		275		300		325		325	
§ Pengobatan ternak besar (sapi)	ekor	17.500	18.500		19.500		20.500		21.500		22.500		23.500		23.500	
Program peningkatan pemasaran hasil produksi Peternakan				529.457.659		417.942.787		453.596.562		493.418.714		523.823.035		588.073.716		Dinakikan
Jumlah promosi produk peternakan	kali	21	21		22		22		22		22		22		22	
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan				3.255.601.348		2.569.903.520		2.789.136.304		3.034.000.179		3.220.954.409		3.616.027.740		Dinakikan
Capaian Inseminasi Buatan Sapi Potong	Dosis	80.996	80.500		81.000		81.500		82.000		82.500		83.000		83.000	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Capaian Kelahiran hasil IB	ekor	45.000	48.000		48.500		49.000		49.500		50.000		50.500		50.500	
Pengembangan Biogas	unit	9	0		10		10		10		12		12		12	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				3.125.537.370		2.467.233.741		2.677.707.992		2.912.789.352		3.092.274.605		3.471.564.429		Dinpertan
Cakupan bina kelompok petani	Kelompok Tani	1600	1600		1600		1600		1600		1600		1600		1600	
Jumlah kelompok tani Utama	Kelompok Tani	124	140		150		160		170		180		190		190	
Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Pertanian yang berbadan hukum	LKM	0	60		70		80		90		100		110		110	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)				3.582.513.289		2.827.960.960		3.069.208.053		3.338.659.989		3.544.387.270		3.979.131.979		Dinpertan
Produksi tanaman pangan																
- Padi	Ton	764.148	766.700		771.144		775.589		780.034		784.479		788.924		788924	
- Jagung	Ton	656.027	667.973		671.917		677.552		684.991		690.738		695.584		695584	
- Kedelai	Ton	40.723	45.420		45.902		46.080		47.304		48.040		50.660		50660	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan				50.164.423.393		39.598.745.214		42.976.826.559		46.749.848.430		49.630.560.823		55.718.107.715		Dinpertan
Jumlah promosi komoditi pertanian dan hortikultura	Kali	3	6		9		12		15		18		21		21	
Peningkatan kualitas pasca panen komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	%	5	5		6		7		10		12		15		15	
Jumlah kelompok tani yang mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Kelompok Tani	1	1		4		6		10		15		20		20	
Jumlah kemitraan yang terjalin	Kelompok tani	10	11		12		13		14		15		16		16	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				1.164.806.849		919.474.132		997.912.435		1.085.521.171		1.152.410.678		1.293.762.174		Dinpertan
Jumlah aplikasi dan adopsi teknologi baru	Unit	0	1		2		3		4		5		6		6	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan roduksi Pertanian/ Perkebunan				2.035.877.597		2.144.167.394		2.327.081.571		2.531.380.733		2.687.363.696		3.016.988.270		Dinpertan
Produksi komoditas hortikultura																
- Bawang merah	Kw	53.296	55.961		56.494		56.760		57.293		57.560		57.666		57666	
- Cabe Besar	Kw	10.672	10.939		11.099		11.206		11.259		11.419		11.526		11526	
- Cabe Rawit	Kw	27.143	27.957		28.093		28.283		28.446		29.043		29.070		29070	
- Semangka	Kw	126.066	127.820		132.369		133.958		135.029		135.705		137.469		137469	
- Jambu air	Kw	11.913	12.270		12.577		12.979		13.083		13.476		14.149		14149	
- Belimbing	Kw	6.370	6.587		6.752		6.968		7.023		7.234		7.596		7596	
- Pisang	Kw	371.097	374.942		384.316		396.614		399.787		411.780		432.369		432369	
- Melon	Kw	112.738	116.120		117.248		117.698		117.924		118.375		118.939		118939	
Urusan Kehutanan																
Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan				1.430.662.184		1.129.334.765		1.225.675.815		1.333.280.355		1.415.436.713		1.589.050.253		Dinpertan
Produktivitas Tanaman perkebunan	%	2,52	2,53		2,77		2,80		2,87		2,93		2,93		2,93	
Jumlah Produksi Tebu	Ton	118.200	121.237		124.274		127.311		130.348		133.385		136.422		136.422	
Jumlah Produksi Kelapa	Ton	23	25		27		29		31		33		35		35	
Jumlah Produksi Tembakau	Ton	2.515,50	2.578,89		2.642,28		2.705,67		2.769,06		2.769,06		2.832,45		2.832,45	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkebunan	Unit	115	118		120		125		130		135		140		140	
Jumlah Kelompok Tani Perkebunan yang Dibina	Klp	14	19		20		22		24		25		27		27	
Luas lahan kritis	Ha	161,69	161,69		150		140		130		120		100		100	
Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral																
Program pembinaan Dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan				242.198.716		-										
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	84,92	84,99		85,5		86,04		86,5		87,05		87,54		87,54	
Program pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan				33.795.170		-										
Pertambangan tanpa ijin	%	53,92	51,89		50,25		-		-		-		-		-	
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	1,21	1,26		1,32		-		-		-		-		-	
Urusan Perdagangan																

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan				275.993.886		217.863.793		236.449.271		257.207.628		273.056.689		306.549.064		Disperindag
Persentase Pasar yang diawasi	%	15,17	15,55		15,64		15,75		15,80		16,00		16,50		16,50	
Tingkat Pengaduan yang ditangani	%	75,00	78,00		80,00		85,00		87,00		90,00		95,00		95,00	
Program peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional				3.664.730.415		2.892.861.438		3.139.645.047		3.415.280.788		3.625.729.421		4.070.451.332		Disperindag
Produk yang bisa diterima pasar internasional	Produk	3	3		3		3		4		4		4		4	
Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor				112.650.566		288.753.205		313.386.102		340.898.896		361.904.990		406.295.252		Disperindag
Perkembangan nilai ekspor	Rp. (000)	142.032.319	142.387.400		142.742.480		143.456.193		144.173.475		144.894.341		145.618.813		145.618.813	
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	20,56	21		21,5		22,35		22,55		23,12		23,65		23,65	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri				17.438.217.519		13.315.883.243		14.451.831.782		15.720.587.103		16.689.285.219		18.736.346.640		Disperindag
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	12,5	15		16		20		24		28		30		30	
Program pembinaan Perdagangan Kaki Lima Dan Asongan				2.570.230.724		2.478.366.756		2.689.790.741		2.925.932.869		3.106.228.023		3.487.229.334		Disperindag
Persentase lokasi PKL yang tertata	%	10,34	11,5		12,5		25,00		30,00		45,00		50,00		50,00	
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	43,75	43,75		44		50,00		56,25		62,50		68,00		68,00	
Jumlah pasar daerah	%	16	16		16		16		16		16		16		16	
Urusan Perindustrian																
Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi				563.252.828		444.619.986		482.549.534		524.913.526		557.258.548		625.610.336		Disperindag
Cakupan pembinaan unit Usaha IKM	%	1,2	1,25		1,5		1,7		1,9		2		2,1		2,1	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program pembinaan dan pengembangan industri Kecil Dan menengah				1.135.517.702		896.353.892		972.819.860		1.058.225.668		1.123.433.233		1.261.230.437		Disperindag
Pertumbuhan Industri	%	1,27	1,28		1,29		1,3		1,32		1,33		1,35		1,35	
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,70	2,90		3,10		3,30		3,35		3,40		3,46		3,46	
Persentase industri kecil dan menengah	%	99,96	99,96		99,96		99,96		99,96		99,97		99,97		99,97	
Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,02	0,14		0,16		0,18		0,19		0,19		0,21		0,21	
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dan Kemampuan Teknologi Industri				281.626.414		322.224.597		349.712.864		380.414.859		403.855.914		453.391.760		Disperindag
Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	73,5	79,4		82,35		88,23		88,23		94,12		94,12		94,12	
Program Penataan Struktur Industri				247.831.244		395.462.001		429.197.990		466.878.143		495.647.041		556.441.732		Disperindag
Persentase sentra industri yang berkembang	%	83,58	85,04		85,77		86,86		87,59		88,69		89,42		89,42	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial				58.578.294		146.155.082		158.623.249		172.549.102		183.181.529		205.650.067		Disperindag
Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	15,09	16,02		16,33		16,45		16,56		16,59		16,75		16,75	
Urusan Transmigrasi																
Program pengembangan wilayah transmigrasi				281.626.414		222.309.993		241.274.767		262.456.763		278.629.274		312.805.168		Dinakertrans
Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	KK	14	14		20		25		25		30		30		30	
Jumlah perjanjian kerjasama (MoU) antar daerah kerjasama transmigrasi	MoU	3	3		3		4		4		5		5		5	
Program transmigrasi lokal				140.813.207		140.717.230		152.721.505		166.129.233		176.366.069		197.998.642		Dinakertrans
Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	Orang	14	14		20		25		25		30		30		30	
Keuangan																

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				7.592.648.125		5.993.477.414		6.504.767.713		7.075.834.327		7.511.845.230		8.433.227.325		BP2KAD
Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Opini	WDP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
Belanja Publik terhadap DAU	%	76,94	96,21		79,52		82,77		85,62		88,10		91,84		91,84	
Belanja Langsung terhadap total APBD	%	39,22	43,10		38,43		39,07		39,53		39,81		40,13		40,13	
Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	%	89,03	91,00		93,00		94,00		94,00		95,00		95,00		95,00	
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota				199.205.244		179.846.287		195.188.575		212.324.572		225.407.952		253.055.866		BP2KAD
Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	%	12,74	10,00		9,00		8,00		7,00		6,00		5,00		5,00	
Rasio SILPA thdp Jumlah Pendapatan	%	12,76	11,00		10,00		10,00		10,00		11,00		12,00		12,00	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan daerah				244.026.424		220.311.701		239.106.005		260.097.601		276.124.741		309.993.436		BP2KAD

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	13,52	11,33		11,91		12,87		13,91		15,02		16,20		16,20	
Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah				2.111.575.590		1.906.370.638		2.068.998.899		2.250.640.465		2.389.324.292		2.682.392.181		BP2KAD
Rasio pajak terhadap PAD	%	19,22	19,37		18,73		18,09		17,46		16,83		16,22		16,22	
Peningkatan PAD	%	15,9	12,33		11,35		24,17		24,34		24,51		24,67		24,67	
Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah				622.516.388		562.019.646		609.964.298		663.514.288		704.399.850		790.799.582		BP2KAD
Tingkat Pengelolaan asset daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Pengawasan																
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				1.579.924.183		1.247.159.061		1.353.551.442		1.472.382.440		1.563.110.228		1.754.836.992		Inspektorat
Persentase obyek pemeriksaan yang diperiksa	%	30	30		50		60		80		90		100		100	

[illegible]

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				146.445.735		115.601.196		125.462.879		136.477.517		144.887.223		162.658.687		Bappeda, BKPPD
Jumlah hasil penelitian yang menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan	dok	4														
Penataan Kelembagaan SIDA	unit	10														
Penataan Jaringan SIDA	Kecamatan	19														
Program Perencanaan Pembangunan Daerah				405.543.290		320.127.380		347.436.738		377.938.907		401.227.395		450.440.834		Bappeda
Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS, KUAP-PPASP, dan TapKin)	%	100														
Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi	%	100														

[illegible]

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kepegawaian																
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				176.861.388		239.525.279		259.958.651		282.780.943		300.205.824		337.028.238		BKPPD
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	54,00	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2.524.499.176		1.992.786.778		2.162.787.009		2.352.662.422		2.497.632.813		2.803.985.524		BKPPD
Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan formal	ASN	15	15		20		25		27		29		30		30	
Persentase pejabat yang telah mengikuti diklatpim (II, III dan IV)	%	79	80		80		80		80		80		80		80	
Persentase CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan sesuai dengan waktu yang ditentukan	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Jumlah ASN yang mengikuti diklat Teknis fungsional	ASN	188	240		310		300		300		300		300		300	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				2.580.824.459		2.037.248.777		2.211.041.963		2.405.153.775		2.553.358.668		2.866.546.558		BKPPD
Persentase PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Persentase PNS yang menerima SK pindah (mutasi) sesuai kebutuhan organisasi	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Persentase penerbitan SK pensiun tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Persentase PNS berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
Jumlah data pegawai yang di update	ASN	10577	4200		2500		2500		2500		2500		2500		2500	
Jumlah ASN yang mengikuti seleksi pimpinan tinggi	ASN	0	60		150		50		50		50		50		50	
Jumlah ASN berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya	ASN	150	150		150		150		150		200		200		200	

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Legislasi Daerah																
Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				5.644.763.824		4.455.858.342		4.835.977.759		5.260.537.954		5.584.690.810		6.269.693.490		Sek. DPRD
PERDA yang ditetapkan	Dok	10	15		15		15		15		15		15		15	
RAPERDA yang disetujui DPRD	Dok	16	75		75		75		75		75		75		75	
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Dok	45	100		100		100		100		100		100		100	
Sekretariat Daerah																
Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				309.789.056		244.540.992		265.402.243		288.702.439		306.492.202		344.085.685		
Frekuensi peningkatan kapasitas aparatur, pendampingan aparatur dan penilaian kecamatan sebagai penyelenggara paten	bulan	12	12		12		12		12		12		12		12	Sekretariat Daerah

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah perangkat kecamatan yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	orang	38	38		38		38		38		38		38		228	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah				225.301.131		177.847.994		193.019.813		209.965.410		222.903.419		250.244.134		
Prosentase MoU kerjasama Daerah antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat serta dengan pihak ketiga yang difasilitasi oleh TKSD	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat Daerah
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				230.933.660		182.294.194		197.845.309		215.214.546		228.476.005		256.500.238		
Persentase desa / kelurahan yang dilakukan pembakuan rupa bumi	%	50,00	60,00		70,00		80,00		90,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat Daerah
Persentase desa yang telah dilakukan pemeliharaan patok batas wilayahnya	%	0,00	5,00		24,00		43,00		62,00		81,00		100,00		100,00	Sekretariat Daerah

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah				2.568.432.897		2.027.467.137		2.200.425.873		2.393.605.677		2.541.098.980		2.852.783.131		
Jumlah Rapat Koordinasi bagi pejabat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan yang terselenggara selama 1 tahun	Keg	12	12		12		12		12		12		12		12	Sekretariat Daerah
Jumlah SKPD yang mengikuti rakor pejabat Pemda	PD	32	32		32		32		32		32		32		32	Sekretariat Daerah
BELANJA RUTIN PD																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				96.487.604.701		85.266.078.876		92.539.939.420		100.664.206.458		106.867.106.292		119.975.129.051		Seluruh PD
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan		12		12		12		12		12		12			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				4.183.921.535		1.982.943.671		2.152.104.209		2.341.041.757		2.485.296.086		2.790.135.608		Seluruh PD

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD	PD Pengampu Urusan
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terselenggaranya kegiatan peningkatan disiplin aparatur pada perangkat daerah	PD															
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				21.988.287.112		18.090.225.883		19.633.463.030		21.357.124.160		22.673.144.090		25.454.169.038		Seluruh PD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan pada perangkat daerah	PD															
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				53.042.691.307		43.754.520.793		47.487.122.159		51.656.111.934		54.839.146.892		61.565.564.500		Seluruh PD
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pada seluruh perangkat daerah	PD															
Jumlah				1.127.267.535.000		904.104.755.562		981.231.931.994		1.067.376.252.938		1.133.147.674.730		1.272.136.424.634		

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator *capaian* yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Dalam penyajian indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Grobogan disampaikan melalui tabel 9.1 berikut di bawah ini.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021

[illegible]

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pengampu
				Tahun* 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
20	Jumlah Rumah Sakit Tipe C yang dibangun	Unit	0	-	-	1	-	1	-	2	Kesehatan
21	Persentase puskesmas terakreditasi	%	10	43,33	76,67	100	100	100	100	100	Kesehatan
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
22	Persentase jalan - jembatan dalam kondisi baik	%	40,69	46,53	52,94	60,01	67,88	76,08	84,51	84,51	PU dan PR
23	Persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.	% penduduk	34	38	42	46	50	54	58	58	PU dan PR
24	Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	70,00	74,54	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	PU dan PR
25	Persentase cakupan pelayanan air minum	%	45,7	48	51	54	57	60	63	63	PU dan PR
26	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	82	82,5	83,1	83,7	84,1	84,5	85	85	PU dan PR
27	Persentase Kawasan memiliki RTBL	%	0	0	50,00	75,00	100,00	100	100	100	PU dan PR
28	Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan	Ha	71.948	71.948	71.948	71.948	71.948	71.948	71.948	71.948	PU dan PR
29	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	20%	PU dan PR
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
30	Persentase berkurangnya kawasan kumuh terhadap luas kawasan kumuh yang ditetapkan SK Bupati.	%	0,054	0,045	0,036	0,027	0,018	0,009	0,000	0,000	Perum dan KP
		Ha	77,32	47,32	37,32	27,32	17,32	7,32	0,00	0,00	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat										
31	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	61	67	70	75	80	83	85	85	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
32	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten	%	50	55	60	65	70	70,5	80	80	
	Sosial										
33	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	58,45	60,25	62,85	66,78	70,71	74,64	78,57	78,57	sosial
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar										
	Tenaga kerja										
34	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,22	4,13	4,07	4,04	4,01	3,98	3,95	4,13	Tenaga kerja

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pengampu
				Tahun* 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak										
35	Presentase kelembagaan PUG yang aktif	%	50	55	60	65	70	80	85	85	PP dan PA
36	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	46,7	46,73	46,73	46,76	46,79	47,82	47,85	47,85	PP dan PA
37	Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	194	101	123	145	135	125	98	98	PP dan PA
38	Persentase kecamatan layak anak	%	75	100	100	100	100	100	100	100	PP dan PA
	Pangan										
39	Skor PPH	Skor	85	85	87	87	87	90	90	90	Pangan
40	Ketersediaan cadangan pangan daerah	%	79,98	82	84	86	88	90	92	92	Pangan
	Pertanahan										
41	Persentase penyelesaian penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh Pemda	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertanahan
	Lingkungan hidup										
42	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	65,4	70	73	76	79	82	85	85	Lingkungan Hidup
43	Kasus pencemaran lingkungan	Kasus	7	6	5	4	3	2	0	0	Lingkungan Hidup
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
44	Rasio penduduk ber KTP	%	87,99	91	95	97	99	100	100	100	Kependudukan dan Capil
45	Rasio Bayi Ber akta kelahiran	%	82	82,51	85	90	100	100	100	100	Kependudukan dan Capil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
46	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDesa)	%	5,4	19,40	33,3	54,2	750	100	100	100	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
47	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	
48	Cakupan peserta KB aktif	%	74,54	74,56	75,59	75,64	76,72	76,84	77,2	77,2	
	Perhubungan										
49	Rasio ijin trayek	Ratio	0,019	0,020	0,021	0,021	0,022	0,022	0,023	0,023	Perhubungan
50	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	92	92	93	93	94	94	95	95	Perhubungan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pengampu
				Tahun* 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
	Komunikasi dan Informatika										
51	Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)	Skor	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,2	Komunikasi dan Informatika
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
52	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	73,71	96	97	95,5	93,7	92	90,5	90,5	Koperasi dan UKM
53	% UKM yang mampu mengakses permodalan	%	90	90	90	91	92	93	94	94	Koperasi dan UKM
54	Persentase koperasi aktif	%	88	88,20	89,20	90,20	91,20	92,20	93,22	93,22	Koperasi dan UKM
	Penanaman Modal										
55	Nilai investasi PMA	ribu Us \$	2.500	65.180	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	71.430	penanaman modal
56	Nilai investasi PMDN	Juta Rp	2.960.091,9	3.937.533,6	389.486	389.486	389.486	389.486	389.486	5.884.964	penanaman modal
57	Jumlah jenis perijinan dan non perijinan investasi yang dilayani BPPT	Jenis	50	50	52	52	52	52	52	52	penanaman modal
	Kepemudaan dan olah raga										
58	Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan	%	20	20	30	30	30	30	30	30	Kepemudaan dan olah raga
59	Peringkat kabupaten dalam porprov	Peringkat	4	-	-	3	-	-	-	3	Kepemudaan dan olah raga
	Statistik										
60	Persentase PD yang memiliki buku profil data statistik	%	57,89	60	70	80	90	100	100	100	Statistik
	Persandian										
61	Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	89	90	93	96	99	100	100	100	persandian;
	Kebudayaan										
62	Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan	Kali	3	3	3	3	3	3	3	18	kebudayaan
63	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	43,22	45	50	55	60	65	70	70	kebudayaan
64	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	kebudayaan
	Perpustakaan										
65	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun	Orang	20.250	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000	146.000	Perpustakaan
	Kearsipan										

[illegible]

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pengampu
				Tahun* 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
81	Prosentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	79	80	80	80	80	80	80	100	Kepegawaian
82	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	54	75	75	75	75	75	75	100	Kepegawaian
Pengawasan											
83	Tingkat maturitas SPIP	Level	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Pengawasan
84	Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4	Level 3	Pengawasan
Sekretariat Daerah											
85	LKJIP	%	CC	CC	CC	C	BB	BB	B	B	Setda
86	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat (SKM)	Skor	73,2	74	75	76	77	78	79	79	Setda

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 dan RTRW 2011-2031, serta memperhatikan RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru;
2. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta Prioritas program APBD masatransisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
3. RPJMD sebagai pedoman bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
4. RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman dalam pelaksanaan RPJMD yang bertujuan terciptanya koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dengan didukung oleh masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021;
4. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja dan penyusunan anggaran.
5. Berkenaan perubahan RPJMD, hanya dilakukan bila terjadi perubahan mendasar seperti terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD dilakukan berdasarkan kesepakatan Bupati dengan Pimpinan DPRD. RPJMD perubahan selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI

PENUTUP

Penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu bagian agenda perencanaan lima tahunan dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Bupati Grobogan Masa Jabatan Tahun 2016-2021. RPJMD Grobogan Tahun 2016-2021 dalam penyusunannya tidak terlepas dari tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, pola pengembangan tata ruang wilayah dan memperhatikan isu-isu yang berkembang baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Dalam RPJMD ini telah ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai tolok ukur kinerja kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah lima tahun yang akan datang. Dengan tersusunnya dokumen RPJMD 2016-2021 akan menjadi pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah untuk kurun waktu lima tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Grobogan. Dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang.